



UNIPMA Press
WE GOT IT

BUKU AJAR

Akuntansi Lingkungan dan Sosial

(STUDI KASUS DI BURSA EFEK INDONESIA)

Abd Rohman Taufiq., S.E., M.S.A., Ak

BUKU AJAR
AKUNTANSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL
(Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia)

ABD ROHMAN TAUFIQ
GATI SILATURAHMI



BUKU AJAR
AKUNTANSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL
(Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia)

Penulis:

Abd Rohman Taufiq

Gita Silaturahmi

Editor:

Perancang Sampul:

Penata Letak:

Cetakan Pertama, Bulan September Tahun 2022

Diterbitkan Oleh:

UNIPMA PRESS

Universitas PGRI Madiun

Jl. Setiabudi No. 85 Madiun Jawa Timur 63118 Telp.

(0351) 462986, Fax. (0351) 459400 E-Mail:

upress@unipma.ac.id

Website: www.kwu.unipma.ac.id

ISBN: 978-623-6318-81-2

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All right reserved

DAFTAR ISI

	Daftar Isi	iii
	Kata Pengantar	iv
Bab 1	Pendahuluan.....	1
Bab 2	<i>Corporate Social Responsibility</i>	4
Bab 3	Teori Kronologis dan Konsep CSR.....	25
Bab 4	Implementasi CSR Era Modern : Strategi, Indikator, Kinerja, dan Pelaporan CSR.....	38
Bab 5	Jenis Program CSR.....	42
Bab 6	Menggagas Pola Kemitraan antara Perusahaan, Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Bagi Pengembangan Dan Berkelanjutan.....	61
Bab 7	Pembangunan Berkelanjutan Dan Keberlanjutan	78
Bab 8	Kebijakan Sosial Dan Lingkungan.....	120
Bab 9	Implementasi Akuntansi Sosial Lingkungan.....	129
Bab 10	Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.....	141
Bab 11	Audit Sosial.....	160
Bab 12	Audit Lingkungan.....	178
Bab 13	Akuntansi Manajemen Lingkungan.....	191
Bab 14	Pelaporan Berkelanjutan.....	212
Bab 15	Lingkungan Hidup Dalam Kerangka CSR Dan <i>Sustainable Development</i>	231
Bab 16	Lingkungan Bisnis di Eropa Revolusi	263
Bab 17	Rekonstruksi Paradigma Akuntansi: Menuju Akuntansi Keperilakutan	279
Bab 18	Etika Bisnis: Sebuah Perspektif	299
	Daftar Pustaka	314
	Glosarium	316
	Indeks	318

Kata Pengantar

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan. Peraturan pemerintah tentang Perusahaan Terbatas (PT) wajib membuat *annual report* bertujuan untuk mengetahui kondisi suatu PT. Salah satu *annual report* yang dibahas dalam buku ini adalah perusahaan rite. Perusahaan rite merupakan perusahaan yang sering diminati oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan kecil, menengah, dan atas. Buku ini akan membahas tentang peran CSR terhadap aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan.

Perusahaan rite merupakan industri yang mencerminkan perputaran ekonomi masyarakat dalam hal minat belanja dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, industri rite harus mempunyai program CSR yang jelas dan transparan khususnya dalam hal lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Lingkungan sosial sangatlah mendukung dalam perindustrian rite, agar kedua belah pihak saling mempunyai hubungan yang harmonis terhadap kehidupan masyarakat.

Untuk itu, masyarakat dan industri rite harus mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu melestraikan lingkungan dan hubungan sosial yang harmonis. Hubungan harmonis itu mempunyai banyak arti, tetapi sebagai kelangsungan hidup industri dan menjalin hubungan baik kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah mempunyai peran dan kepentingan bersama dalam mewujudkan kepentingan bumi.

Bab 1

Pendahuluan

Tujuan Pembelajaran

1. Untuk memahami pentingnya belajar CSR
2. Untuk memahami fungsi dan kinerja CSR
3. Untuk memahami arti secara keseluruhan CSR
4. Untuk meningkatkan kinerja dan profit perusahaan

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai A business acts in socially responsible manner when its decision and actions account for and balance diverse stakeholder interests. Makna ini menekankan perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan *stakeholder* dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku secara sosial bertanggung jawab. *A business acts in a socially responsible manner when its decisions and actions account for and balance diverse stakeholder interest.*

Sedangkan komisi eropa membuat deftnisi yang lebih praktis, sebagaimana perusahaan secara sukarela memberikan kontribusi bagi terbentuknya masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggungjawab sosial akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan hidup (planet bumi) (Elkington, 1997).

Tanggungjawab sosial ini diarahkan ke dalam maupun ke luar perusahaan. Tanggungjawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas dan pertumbuhan. Pemegang saham telah menginvestasikan sumber daya yang dimiliki guna mendukung berbagai aktivitas operasional perusahaan. Karena mereka akan mengharapkan

profitabilitas yang optimal serta pertumbuhan perusahaan sehingga kesejahteraan mereka di masa depan juga akan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, perusahaan harus berjuang keras agar memperoleh laba yang optimal dalam jangka panjang senantiasa mencari peluang bagi pertumbuhan di masa depan. Di samping kepada pemegang saham, tanggung jawab sosial ke dalam ini juga diarahkan kepada karyawan, karena hanya dengan kerja keras, kontribusi, serta pengorbanan merekalah perusahaan dapat menjalankan berbagai aktivitas serta meraih kesuksesan.

Oleh karenanya perusahaan dituntut untuk memberikan kompensasi yang adil serta memberikan peluang pengembangan karier bagi karyawannya. Tentu saja hubungan antara perusahaan dengan karyawan ini harus didasarkan pada prinsip hubungan yang saling menguntungkan. Artinya perusahaan harus memberikan kompensasi yang sesuai dengan prinsip keadilan. Namun di lain pihak karyawan pun dituntut untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan perusahaan. Ke luar, tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi kepentingan generasi mendatang. Oleh karenanya perusahaan harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga mampu meraih laba yang maksimal.

Demi kelancaran aktivitas perusahaan dalam usaha mencapai tujuannya, perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja. Seiring dengan tumbuh kembang perusahaan, kebutuhan akan tenaga kerja ini akan mengalami peningkatan. Perusahaan berkewajiban untuk ikut berpartisipasi menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Lapangan kerja akan semakin banyak tersedia manakala perusahaan tumbuh dan berkembang.

Oleh karenanya perusahaan berkewajiban untuk selalu mencari peluang-peluang baru bagi pertumbuhan, tentu saja dengan tetap mempertimbangkan faktor keuntungan dan tingkat pengembalian finansial yang optimal. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, baik yang berkaitan dengan perusahaan maupun yang tidak. Perusahaan juga bertanggung jawab untuk memelihara kualitas lingkungan tempat mereka beroperasi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, baik untuk generasi saat ini maupun bagi generasi penerus.

Bab 2

Corporate Social Responsibility

Tujuan Pembelajaran

1. Untuk mengetahui principal CSR perusahaan
2. Untuk mengetahui program CSR perusahaan
3. Untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan CSR
4. Untuk memahami pedoman CSR perusahaan

2.1 *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sosial atau lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Sedangkan CSR menurut *World Business Council on Sustainable Development* adalah komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarga, komunitas lokal dan masyarakat luas. Wacana CSR yang kini menjadi isu yang sentral semakin populer dan bahkan ditempatkan pada posisi yang penting. Oleh karena itu kian banyak pula kalangan dunia usaha dan pihak terkait mulai merespon wacana ini, tidak sekedar mengikuti tren tanpa memahami esensi dan manfaat.

Program CSR merupakan investasi perusahaan demi pertumbuhan dan berkelanjutan (*sustainability*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*), melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Disisi lain, masyarakat mempertanyakan apakah perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan ekonomis

memiliki komitmen moral untuk mendistribusi membangun masyarakat lokal. Seiring dengan waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggungjawab sosial.

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk itu diperlukan tata kelola perusahaan yang GCG dengan lahan yang signifikan dalam strategi korporasi dan memperbaiki kesalahan dengan segera. Dengan pemahaman tersebut, maka pada dasarnya CSR memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial (*social security*). Selain itu melalui CSR perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang saham.

CSR harus dijalankan di atas suatu program dengan memperhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara. Semangat CSR diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Keputusan manajemen perusahaan untuk melaksanakan program CSR secara berkelanjutan, pada dasarnya merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh *stakeholder*. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan

menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

Apabila CSR benar dijalankan secara efektif maka dapat meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. modal sosial, termasuk elemen seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanismenya, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program CSR yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian realisasi program CSR merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan modal financial yang dapat dihitung dengan nilai kuantitatif, maka modal sosial tidak dapat dihitung dengan nilai secara pasti.

Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berbunyi:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam konteks pembangunan saat ini, keberhasilan sebuah perusahaan bukan lagi diukur dari keuntungan bisnis semata, melainkan juga dari sejauh mana kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Prioritas utama dalam bisnis adalah keberlanjutan usaha. Sedangkan keberlanjutan tanpa ditopang kepedulian terhadap aspek lingkungan dan sosial, berpotensi menimbulkan kendala baik berbentuk laten maupun manifest yang tentu akan menghambat pencapaian keuntungan perusahaan. Bagaimanapun sebuah bisnis tidak akan berjalan optimal jika tidak mampu menjaga cadangan sumber daya (*resource*), yang meliputi aspek sosial dalam hal ini Sumber Daya Manusia (SDM) dan aspek lingkungan atau Sumber Daya Alam (SDA).

Mengapa keberlanjutan sebuah perusahaan ditentukan oleh aspek sosial dan lingkungan, bukan semata keuntungan bisnis dikarenakan aspek sosial dan lingkungan, merupakan parameter untuk mengetahui apakah ada dampak positif atau negatif dari kehadiran perusahaan sebagai komunitas baru terhadap komunitas lokal (masyarakat setempat). Selain itu perusahaan perlu mendapatkan izin lokal (*local license*), sebagai bentuk legalitas secara *cultural* jika keberadaannya diterima masyarakat.

Deskripsi di atas menjadi pengantar mengenai perubahan paradigma tanggung jawab sosial perusahaan, yang lebih dikenal dengan istilah CSR. Dulu perusahaan memaknai CSR istilah lain *Community Development* (CD), Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan, sebagai beban atau biaya resiko, karena tidak menghasilkan keuntungan perusahaan semakin menyadari bahwa CSR bukan lagi beban, melainkan bagian dari modal sosial, dimana keberlanjutan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh *profit*, tetapi juga daya dukung *planet* dan *people*.

Parameter keberlanjutan ditentukan oleh sejauhmana perusahaan mampu mengelola hubungan dengan masyarakat dan lingkungan melalui program CSR. Perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*). Pembangunan berkelanjutan menurut *The World Commission on Environment and Development* yang lebih dikenal dengan *The Brundtland and Development* yang lebih dikenal dengan *The Brundtland Comission*, adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

The Brundtland Comission dibentuk untuk menanggapi keperhatinan yang semakin meningkat dari para pemimpin dunia, menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat. Selain itu komisi ini juga dibentuk untuk mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya karenanya, konsep *Sustainability Development* dibangun di atas tiga pilar yang berhubungan dan saling mendukung satu dengan lainnya. Ketiga pilar tersebut adalah sosial, ekonomi dan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam *The United Nation 2005 World Summit Outcome Document* (Solihin: 2009).

Pengenalan konsep *Sustainability Development* memberikan dampak kepada perkembangan definisi dan konsep CSR selanjutnya. Sebagai contoh,

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merumuskan CSR sebagai kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan, serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham.

Lembaga lain yang memberikan rumusan CSR sejalan dengan konsep *Sustainability Development* adalah *The World Business Council for Sustainability Development (WBCSD)*.

Menurut *World Bank* (Fox, Ward dan Howard 2002: 1), CSR merupakan komitmen sektor swasta untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dimulai ketika tahun 2002, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk UN Global Compact sebagai salah satu lembaga yang merangkai konsep dan kegiatan CSR. Lembaga ini merupakan representasi kerangka kerja sektor swasta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan terciptanya *Good Corporate Citizenship (GCC)*.

Tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberantas kemiskinan, menyelesaikan masalah buta huruf, memperbaiki pelayanan kesehatan, mengurangi angka kematian bayi, memberantas AIDS, menciptakan keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan dan merangsang terciptanya kemitraan dalam proses pembangunan. Terdapat beberapa definisi CSR lainnya, baik yang di kemukakan para pakar maupun lembaga internasional, di antaranya:

- a) Suatu pendekatan bisnis yang menciptakan nilai pemangku kepentingan dengan merangkum semua peluang dan mengelola resiko yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial.
- b) Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan

kualitas hidup karyawan, keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

- c) *Corporate* berusaha memenuhi kebutuhan modal, sementara di pihak lain dalam waktu bersamaan meningkatkan dampak positif pada masyarakat secara umum.
- d) Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, berikut komunitas-komunitas setempat (lokal), masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan (WBCSD, 2002).
- e) Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap social dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan (*European Commission*).
- f) Bentuk tindakan atas program yang diberikan terhadap komunitas dan nilai yang menjadi acuan dari CSR. Tindakan dalam hal ini terhadap luar *corporate* atau erat kaitannya dengan lingkungan seperti komunitas lokal dan lingkungan alam atau bagaimana *corporate* menerapkan atau memenuhi kebutuhan komunitas sekitarnya. Sedangkan nilai CSR lebih kepada nilai *corporate* yang dipakai untuk menerapkan atau mewujudkan tindakan yang sesuai dengan keadaan sosial terhadap komunitas sekitarnya.
- g) Tanggung jawab sebuah organisasi atas dampak dari keputusan dan kegiatan suatu organisasi bagi masyarakat dan lingkungannya, melalui perilaku transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan ekspektasi dari stakeholders-nya, sejalan dengan hukum yang berlaku dan norma sikap dan terintegrasi kepada keseluruhan organisasi.

- h) Komitmen dunia bisnis untuk member kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas kehidupan mereka melalui cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan (*International Finance Corporation*).

2.2 Manfaat CSR

2.2.1 Bagi Masyarakat

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat, ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyetatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi (Howard, 2002). Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini.

Persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa menetapkan bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi.

2.2.2 Bagi Perusahaan

- a) Meningkatkan Citra Perusahaan
- b) Kegiatan CSR dapat lebih mengenal perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat.

- c) Memperkuat “*brand*” Perusahaan
- d) Meningkatkan kesadaran konsumen akan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan *brand*.
- e) Mengembangkan kerja sama dengan pemangku kepentingan
- f) Melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentu tidak mampu mengerjakan sendiri dibantu dengan para pemangku kepentingan.
- g) Membedakan perusahaan dengan pesaing.
- h) CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan yang mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan komparatif.
- i) Menghasilkan Inovasi dan pembelajaran untuk Meningkatkan pengaruh perusahaan
- j) Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreativitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global.

2.3 Keuntungan CSR

2.3.1 Bagi Masyarakat

CSR akan lebih berdampak positif bagi masyarakat; ini akan sangat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyangkut pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, menciptakan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi (Howard, 2002). Indonesia, bisa dibayangkan, pelaksanaan CSR membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial.

Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi di tengah situasi hukum dan politik saat ini. Di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang dialami Indonesia, pemerintah harus

berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR. Pemerintah bisa menetapkan bidang penanganan yang menjadi fokus, dengan masukan pihak yang kompeten. Setelah itu, pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan pada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antara pelaku bisnis dan kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindari proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.

Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan multiplier effect yang diharapkan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas serta pembuatan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang.

Memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggungjawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba

jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Perusahaan yang berorientasi pada usaha memaksimalkan keuntungan ekonomis memiliki komitmen moral untuk mendistribusi keuntungan membangun masyarakat lokal, karena seiring waktu masyarakat tak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab sosial.

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik. Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik GCG agar perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan yang dapat dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Pemahaman tersebut, maka pada dasarnya CSR memiliki fungsi atau peran strategis bagi perusahaan, yaitu sebagai bagian dari manajemen risiko khususnya dalam membentuk katup pengaman sosial. Selain itu melalui CSR perusahaan juga dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan maupun pemegang sahamnya, posisi merek perusahaan, maupun bidang usaha perusahaan.

Hal ini perlu ditegaskan bahwa CSR berbeda dengan charity atau sumbangan sosial. CSR harus dijalankan di atas suatu program dengan

memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sementara sumbangan sosial lebih bersifat sesaat dan berdampak sementara. Semangat CSR diharapkan dapat mampu membantu menciptakan keseimbangan antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Pada dasarnya tanggung jawab sosial perusahaan ini diharapkan dapat kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia khususnya, dan masyarakat dunia dalam kebersamaan mengatasi masalah sosial dan lingkungan.

Keputusan manajemen perusahaan untuk melaksanakan program CSR secara berkelanjutan, pada dasarnya merupakan keputusan yang rasional. Sebab implementasi program CSR akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan seluruh *stakeholder*. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin. Kondisi ini pada gilirannya akan menjamin kelancaran seluruh proses atau aktivitas produksi perusahaan serta pemasaran hasil produksi perusahaan. Sedangkan terjaganya kelestarian lingkungan dan alam selain menjamin kelancaran proses produksi juga menjamin ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

CSR benar dijalankan secara efektif maka dapat memperkuat atau meningkatkan akumulasi modal sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal sosial, termasuk elemen kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Melalui beragam mekanisme, modal sosial dapat meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program CSR yang berkelanjutan dan menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat. Program CSR merupakan sumbangan perusahaan secara tidak langsung terhadap penguatan modal sosial secara keseluruhan. Berbeda dengan modal financial yang modal sosial tidak dapat dihitung nilainya secara pasti. Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa pengeluaran biaya untuk program-program CSR merupakan investasi perusahaan untuk memupuk modal sosial.

2.3.2 Bagi Perusahaan

a) Layak Mendapatkan Sosial *Licence To Operate*

Sehingga imbalan yang diberika kepada perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnis.

b) Mereduksi Resiko Bisnis Perusahaan

Mengelola resiko di tengah kompleks permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial, maka biaya untuk *recovery* akan jauh lebih berlipat dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program CSR. Oleh karena itu, pelaksanaan CSR sebagai langkah *preventif* untuk mencegah memburuk hubungan *stakeholders* yang perlu diperhatikan.

c) Melebarkan Akses Sumber Daya

Track records yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

d) Membentangkan Akses Menuju Market

Investasi yang ditanamkan untuk program CSR dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar.

e) Mereduksi Biaya

Penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan CSR, misal mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.

f) **Memperbaiki Hubungan dengan Stakeholder**

Implementasi CSR akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan stakeholder, dimana komunikasi ini akan semakin menambah *trust stakeholders* kepada perusahaan.

g) **Memperbaiki Hubungan dengan Regulator**

Perusahaan yang melaksanakan CSR umumnya akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

h) **Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan**

Image perusahaan yang baik di mata *stakeholders* dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut.

i) **Peluang Mendapatkan Penghargaan**

Banyaknya penghargaan atau reward yang diberikan kepada pelaku CSR sekarang, akan menambah kans bagi perusahaan untuk mendapatkan award.

2.4 Tujuan CSR

Kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan, sebagaimana dikemukakan Wibisono (2007), diantaranya:

a) **Perusahaan bagian masyarakat.**

Kegiatan sosial berfungsi sebagai upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber ekonomi oleh perusahaan yang kadang

bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.

- b) Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi dan citra perusahaan.
- c) Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik berasal akibat dari dampak operasional perusahaan dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

2.5 Implementasi CSR

Menjalankan aktivitas CSR setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta banyak hal yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan pendekatan CSR.

Implementasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan dan profit risiko, serta kondisi operasional perusahaan. Titik awal pendekatan CSR harus melibatkan pelanggan, karyawan, komunitas, dan lingkungan sekitar. CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya perusahaan. Aktivitas CSR perlu diintegrasikan dengan pengambilan keputusan inti, strategi, aktivitas, dan proses manajemen perusahaan.

Meskipun tidak terdapat standar tertentu yang dianggap baik dalam pelaksanaan aktivitas CSR, namun kerangka kerja yang luas dalam

pengimplementasian lingkungan. Kerangka kerja yang disodorkan oleh industri Kanada dapat dijadikan panduan. Kerangka kerja ini mengikuti model “*plan, do, check, dan improve*” dan bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan.

2.6 Verifikasi dan Laporan Mengenai Kemajuan

Verifikasi dan pelaporan adalah alat yang penting untuk mengukur apakah kinerja yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diharapkan sehingga memberi pihak-pihak yang berkepentingan kesempatan untuk melihat seberapa baik perusahaan memenuhi komitmennya serta pengaruh yang ditimbulkannya. Verifikasi adalah pengukuran yang dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti internal audit, kajian industri dan *stakeholder*, serta audit dari pihak ketiga. Perusahaan harus mengaitkan pendekatan terhadap verifikasi sehingga sesuai dengan budaya yang dimiliki serta tujuan, strategi, dan komitmen CSR yang telah ditetapkan.

Verifikasi melibatkan inspeksi lokasi serta kajian sistem manajemen untuk menentukan level kesesuaian terhadap kriteria-kriteria tertentu serta standar yang telah disetujui perusahaan untuk dipenuhi. Pelaporan adalah komunikasi dengan *stakeholder* mengenai manajemen dan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan. Jika dilakukan dengan baik, pelaporan harus memberikan perhatian mengenai bagaimana kecenderungan dalam masyarakat mempengaruhi perusahaan dan, giliran, bagaimana kehadiran dan operasi perusahaan mempengaruhi masyarakat. Pelaporan dapat menunjukkan motivasi dan kesediaan perusahaan untuk memposisikan dirinya dalam konteks yang lebih luas.

Bukti kemajuan CSR adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan perusahaan, karena dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak berkepentingan yang mungkin ingin membeli produk perusahaan,

menginvestasikan dananya pada perusahaan, atau memberikan dukungan bagi aktivitas perusahaan dalam komunitas. Perusahaan juga dapat memanfaatkan kemajuan CSR yang diraih guna perbaikan lebih lanjut, penilaian risiko, serta dukungan bagi arah dan peluang baru.

Verifikasi dan pelaporan juga dapat menjadi hal yang penting untuk memperoleh dan mempertahankan lisensi beroperasi bagi perusahaan, memperbaiki operasi internal serta membangun hubungan. Komunitas, pelanggan, investor, karyawan, regulator dan LSM yang ingin memperoleh informasi mengenai perusahaan kemungkinan besar akan menjadikan laporan verifikasi CSR sebagai pedoman. Aktivitas verifikasi yang tidak dilakukan dengan cara yang profesional, ketat, dan terlihat tidak kredibel akan merusak kredibilitas dan reputasi perusahaan, menutup peluang, dan mengurangi profitabilitas.

2.7 Penilai Terhadap CSR

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, peluang, dan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan aktivitas CSR. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan dan menguji informasi yang relevan mengenai produk, layanan, proses pengambilan keputusan, serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan agar dapat secara akurat menentukan posisi perusahaan saat ini berkaitan dengan aktivitas CSR. Penilaian CSR yang tepat harus memberikan pemahaman mengenai:

- a) Nilai dan etika perusahaan.
- b) Dorongan eksternal dan internal yang memotivasi perusahaan untuk menjalankan aktivitas CSR.
- c) Isu penting terkait CSR dapat memberikan dampak perusahaan.
- d) *Stakeholder-stakeholder* kunci.

- e) Struktur pengambilan keputusan yang berlaku dalam perusahaan saat ini, kekuatan dan kelemahannya dalam hal mengimplementasikan program CSR yang terintegrasi.
- f) Implikasi terhadap SDM dan anggaran yang dimiliki.
- g) Aktivitas berkaitan dengan CSR yang tengah berjalan.

Penilaian ini harus mampu mengidentifikasi risiko dan peluang utama melalui analisis kesenjangan. Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi secara relatif terhadap sasaran internal dan praktik terbaik.

Penilaian CSR bertujuan untuk melakukan aktivitas CSR secara berkesinambungan, tidak bersifat parsial. Penilaian CSR membantu perusahaan mengidentifikasi kesenjangan dan peluang, sehingga mampu memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Tahapan dari pelaksanaan penilaian CSR, sebagai berikut:

a) Membentuk tim kepemimpinan CSR

Biasanya tim kepemimpinan CSR mencakup perwakilan dari dewan direksi, manajemen puncak, pemilik, dan sukarelawan yang terkena dampak atau terlibat dengan isu seputar CSR.

b) Merumuskan definisi program CSR

Perumusan deftnisi program CSR akan menjadi landasan bagi aktivitas penilaian selanjutnya. Dapat juga diidentifikasi nilai-nilai kunci yang memotivasi perusahaan. Melibatkan orang-orang pada setiap tingkatan dalam perusahaan akan lebih menjamin tercapainya tujuan dan penerimaan dari aktivitas CSR yang dilakukan.

c) Melakukan kajian terhadap dokumen, proses, dan aktivitas perusahaan

Dokumen ini dapat mencakup misi, kebijakan, *code of conduct*, prinsip dan dokumen operasional lainnya dan juga mencakup dokumen eksternal berhubungan dengan program perusahaan. Hal ini berguna untuk menelusuri mengapa dokumen ini dibuat serta pelajaran yang bisa

diambil. Perusahaan secara khusus memiliki proses pengambilan keputusan yang spesifik serta pengambil keputusan yang berkaitan dengan aspek tertentu dari kegiatan operasionalnya. Hal ini dapat berguna dalam kaitannya dengan aktivitas CSR.

d) Mengidentifikasi dan melibatkan *stakeholder* kunci

Perusahaan mungkin saja melewatkan isu-isu penting yang sedang hangat di luar. Oleh karenanya diskusi dengan para *stakeholder* kunci, khususnya pihak eksternal, sangat penting guna memetakan kepentingan yang mereka miliki. Penting bagi perusahaan untuk memperoleh kejelasan mengenai tujuan diskusi, karena *stakeholder* dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk mengemukakan pandangan mereka mengenai perilaku perusahaan.

2.8 Program CRS Terhadap Lingkungan Hidup

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk

- a) Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- b) Menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
- c) Mentaati ketentuan tentang mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Program CSR lingkungan hidup penting untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, diantaranya:

a) Polusi Udara

Suatu perusahaan tentunya mempunyai tujuan untuk menghasilkan suatu produk yang baik dengan begitu mereka berusaha agar yang dihasilkan tidak membahayakan lingkungan, contoh pada perusahaan otomotif dan

baja yang telah mengurangi polusi udara dengan mengubah proses produksinya sehingga lebih sedikit karbondioksida yang dilepas ke udara.

b) Polusi Tanah

Tanah tercemari oleh limbah beracun yang dihasilkan dari beberapa proses produksi. Akibatnya tanah menjadi tidak subur dan akan berdampak buruk bagi pertanian. Dengan begitu perusahaan harus mempunyai strategi yang mengarah pada pencegahan terhadap polusi tanah.

c) Polusi Air

Polusi air biasanya disebabkan oleh pembuangan sampah dan limbah ke sungai, danau, maupun laut. Limbah tersebut akan menjadikan air beracun serta mematikan organisme yang ada di dalam air.

Kegiatan CSR terhadap lingkungan memberikan keuntungan bagi perusahaan, diantaranya:

- a) Mengembangkan reputasi atau citra perusahaan di mata konsumen dan investor. Perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan akan menciptakan reputasi yang baik. Konsumen akan menilai bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan merupakan perusahaan yang dapat mengelola dan memanfaatkan SDA dengan baik, sehingga akan menguntungkan konsumen dan perusahaan.
- b) Mengeliminasi konflik lingkungan dan sosial disekitar perusahaan. Kasus seputar perusahaan dengan kasus *misconduct* terhadap lingkungan sekitar area usaha bisnis yang dijalankan. Hal tersebut bisa dijadikan pelajaran berharga bagi perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dibidang SDA, sehingga memperkecil kemungkinan merusak lingkungan yang

berdampak negatif bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar daerah tersebut.

- c) Meningkatkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan tidak mungkin bergerak sendiri dalam pengimplementasi CSR, dibutuhkan bantuan dari pihak lain seperti masyarakat lokal dan pemerintah daerah.
- d) Membedakan perusahaan dengan pesaingnya: Jika perusahaan melakukan CSR terhadap lingkungan, maka perusahaan tersebut akan memiliki kemampuan dan kesempatan dalam menonjolkan keunggulan komparatif.

Bab 3

Teori Kronologis Dan Konsep CSR

Tujuan Pembelajaran

1. Untuk mengetahui pemahaman CSR dan perubahannya
2. Untuk mengetahui konsep dasar dan konsep akhir CSR
3. Untuk mengetahui proses kronologis CSR
4. Untuk memahami pedoman kronologis

3.1 Pemahaman Terminologi Berkenaan Dengan CSR

Sebelum sampai pada kajian kronologis teori dan konsep CSR, perlu kiranya ada penyamaan persepsi berkenaan dengan istilah CSR yang sering dikenal dengan istilah tanggungjawab sosial perusahaan kepada seluruh *stakeholder*. Istilah korporat diartikan sebagai tingkat manajemen puncak pada setiap organisasi laba atau nirlaba; skala kecil, menengah atau besar; skala lokal, nasional, regional atau global. Oleh karena itu apabila ada istilah tanggung jawab sosial perusahaan, dimaksudkan sebagai tanggung jawab sosial korporat di perusahaan bisnis (berorientasi pada laba). *Stakeholder* sendiri merupakan pemangku kepentingan yang meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan, pesaing, lembaga keperantaraan, fasilitator, LSM, dan pemerintah.

Pemahaman berbagai terminologi berkenaan dengan CSR, dilanjutkan dengan kajian kronologis sejak kelahiran sampai kemuktahiran dan teori dan konsep CSR dari sudut pandang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. hakikat tanggung jawab sosial korporasi dari ontologi termasuk objek yang terserap oleh pengamatan indrawi dengan manusia sebagai objek formal yang beserta kegiatan interaksinya eksis dalam ruang dan waktu. Adapun objek materinya ialah dunia kegiatan tanggung jawab sosial.

Segi epistemologi menggarap segala sesuatu berkenaan dengan kegiatan tanggung jawab sosial sebagai pengamatan empirik, dengan pola pikir yang menggunakan metode reflektif, yaitu cara deduktif dan induktif silih berganti. Dari segi aksiologi, sasarannya adalah mewujudkan apa yang didambakan oleh objek formalnya, yaitu manusia sebagai subjek dan objek dalam kegiatan tanggung jawab sosial korporat yang multidimensional, agar menikmati makna eksistensi dan esensinya dalam koeksistensi yang kondusif bagi interaksi yang saling menguntungkan menuju pencapaian keselarasan, keserasian dan keseimbangan kesejahteraan spiritual dan material.

Perbedaan perspektif di dalam memandang CSR telah mengakibatkan munculnya berbagai rumusan CSR dan berbagai elemen atau program yang terkandung dalam aktivitas CSR, sebagai berikut:

- 1) *CSR means that a corporation should be held accountable for any of its action that affect people, their communities and their environment (Lawrence & Weber, 2005)*
- 2) *The key to operationalizing the strategic role of business in contributing toward this sustainable development process, so that business is able to engage in and contribute to society as a corporate citizen (Warhurst, 2001).*
- 3) *The commitment of business to minimize its negative impacts and maximize its positive contributions to all stakeholders in connection in economic, social and environmental aspects to achieve sustainable development (Indonesia Business, 2001).*
- 4) *Business for Social Responsibility (BSR) CSR sebagai "business practices that strengthen accountability, respecting ethical values in the interest of all stakeholders".* Isu-isu CSR yang penting untuk diperhatikan oleh perusahaan menurut BSR mencakup: *business ethics, community*

investment, environment, governance and accountability, human rights, marketplace, vision, mission and values, workplace.

- 5) *The World Business Council For Sustainable Development (1999) (Business Action for Sustainable development)* adalah: “*the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as the local community and society at large.*” Adapun prioritas kegiatan CSR menurut organisasi ini mencakup: *human rights, employee rights, environmental protection, supplier relation, community involvement, stakeholders rights, CSR performance monitoring and assessment.*
- 6) *The Commission For European Communities (1993)* merumuskan CSR yang disampaikan dalam dokumen *The Green Paper* sebagai: “*essentially a concept whereby companies decide voluntarily to contribute to a better society and a cleaner environment.*” Selanjutnya organisasi ini menilai bahwa perusahaan yang bertanggungjawab secara sosial, bukanlah perusahaan yang semata-mata memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya menurut aturan hukum melainkan perusahaan yang melaksanakan kepatuhan melampaui ketentuan hukum serta melakukan investasi lebih di bidang *human capital*, lingkungan hidup dan hubungan dengan para *stakeholders*. *The green paper* selanjutnya membagi CSR yang dilakukan perusahaan ke dalam dua kategori, yaitu: (1) *internal dimension of CSR* (mencakup *human resources management*, kesehatan dan keselamatan kerja, adaptasi terhadap perubahan dan pengelolaan dampak lingkungan serta sumber daya alam). (2) *external dimension of CSR* (mencakup pemberdayaan komunitas lokal, partner usaha yang mencakup para pemasok dan konsumen, hak asasi manusia, dan permasalahan lingkungan global. Organisasi ini mengajukan pendekatan

secara holistik terhadap CSR, yang di dalamnya, mencakup: *social responsibility integrate management, social responsibility reporting and auditing, quality in work, social and ecolabel, socially responsible investment.*

- 7) *The Organization for Economic Cooperation And Development (OECD)* adalah “*business’s contribution to sustainable development and that corporate behavior must not only ensure returns to shareholders, wages to employees, and product and service to consumers, but they must respond to societal and environmental concerns and value.*” Adapun yang dimaksud dengan *sustainable development* adalah: “*development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs.*” pada tahun 2000 OECD melakukan revisi terhadap *The Guidelines for Multinational Enterprises*, yang kemudian digunakan oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD. Dalam kaitan dengan pelaksanaan aktivitas CSR, pedoman tersebut terutama bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan, terutama yang menyangkut bidang-bidang sebagai berikut: *disclosure of material information, employment and industrial relation, environmental management, bribery, competition, consumer interest, science and technology diffusion, taxation.*
- 8) *The Global Scan* mengklasifikasikan CSR yang dilakukan perusahaan ke dalam dua kategori: (1) *Operational Responsibilities*, yaitu berbagai standar yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui kegiatan perusahaan. *Operational Responsibilities* mencakup berbagai hal sebagai berikut: *protecting health and safety of workers, not engaging in bribery or corruption, not using child labour, protecting the environment, making profit and payin taxes, treating employees fairly, providing quality products at low prices, providing secure job, applying universal standards*

across the world. (2) Citizenship Responsibilities, yaitu berbagai tindakan yang tidak harus dilakukan perusahaan dalam kegiatan mereka tetapi memungkinkan perusahaan untuk melakukan diferensiasi dari pesaing. *Citizenship responsibilities* mencakup berbagai hal sebagai berikut: *responding to public concerns and viewpoints, reducing human rights abuses, increase economic stability, reducing the gap between the rich and poor, supporting charities and communities, solving social problem, supporting progressive government policies.*

3.2 Prinsip Derma dan Prinsip Perwalian sebagai Faktor Pendorong Lahirnya Konsep CSR

Konsep CSR sebagai salah satu tonggak penting dalam perjalanan manajemen korporat akan diuraikan mulai sejak lahir sampai dengan konteks kekinian. Meskipun konsep CSR seperti yang dikenal saat ini baru dikenal pada awal tahun 1970-an, namun konsep tanggungjawab sosial (*social responsibility*) sudah dikemukakan oleh Howard R. Bowen pada tahun 1953 (Caroll, 1999: 270) dalam karyanya *social responsibilities of the Businessman*. Oleh karenanya Caroll menyebut Bowen sebagai “*the father’s of corporate social responsibility*” yang merumuskan konsep tanggungjawab sosial sebagai: “*The obligation of businessmen to pursure those policies, to make those decision, or to follow those lines of action which are desirable in term of the objectives and values of our society.*”

Steiner and Steiner (1994: 105-110) memandang rumusan Bowen mengenai tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai kelanjutan dari pelaksanaan berbagai kegiatan derma (*charity*) sebagai wujud kecintaan manusia terhadap sesama manusia (*philantrophy*) yang banyak dilakukan oleh para pengusaha ternama pada akhir abad ke sembilan belas sampai periode tahun baru 1930. Sejarah mencatat nama John D. Rockefeller

yang telah mendermakan lebih dari 550 juta dollar Amerika melalui *Rockefeller foundation* (Novak, 1996: 175).

Demikian halnya nama Andrew Carnegie yang telah mendermakan lebih dari 350 juta dollar Amerika sepanjang hidupnya dalam bentuk pembangunan 2.509 perpustakaan umum serta menyumbang ratusan alat musik organ ke gereja di Amerika Serikat. Sejak kurun waktu tahun 1930 sampai periode tahun 1960 terdapat tiga tema cara pandang yang berkaitan untuk menjelaskan tanggung jawab sosial korporasi yang digunakan oleh para pemimpin bisnis, yaitu *trusteeship*, *balancing of interests and sevice* yang telah memperoleh penerimaan yang semakin besar dari para pelaku bisnis. Pertama, manajer dianggap berperan sebagai wali (*trustee*) dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan (Lawrence & Weber, 2002). Oleh sebab itu manajer harus mempertimbangkan berbagai kepentingan pihak yang terpengaruh oleh keputusan dan kebijakan perusahaan.

Stewardship principle dalam prinsip manajer perusahaan dipandang sebagai *publick trust* yang mengendalikan sumber daya sangat besar dan akan mempengaruhi berbagai pihak. Perbedaan antara *charity principle* dengan *stewaerdship principle*, dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Table 3.1

Perbedaan *Charity Principle* dengan *Stewardship Principle*

Jenis	<i>Charity Principle</i>	<i>Stewardship Principle</i>
<i>Definition</i>	<i>Business should give voluntary aid to society's need person or group</i>	<i>Business acting as a public trustee, should consider the interest of all who are affected by business decision and policies</i>
<i>Type of activity</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Corporate philanthropy</i> b) <i>Voluntary actions to promote the social good</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Acknowledging business and society interdependence</i> b) <i>Balancing the interest and needs of many diverse group in society</i>
<i>Example</i>	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Corporate philanthropic foundations</i> b) <i>Private initiatives to solve social problem</i> c) <i>Social partnerships with need groupss</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a) <i>Enlightened self interest</i> b) <i>Meeting legal requirement</i> c) <i>Stakeholder approach to corporate strategic planning</i>

Sumber: James E. Post, Anne T. Lawrence dan James Weber. 2002.

Berdasarkan *stewardship principle*: **Pertama**, perusahaan diharapkan untuk melakukan berbagai aktivitas yang tidak hanya baik untuk perusahaan tetapi juga baik untuk lingkungan sekitarnya. Sebagai pihak yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola berbagai sumber daya, perusahaan diharapkan dapat menghasilkan produk yang berguna bagi para konsumen serta bisa memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. **Kedua**, para manajer memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai konsituen utama perusahaan. Mereka juga bertindak sebagai koordinator yang melakukan rekonsiliasi atas beragam tuntutan yang

diajukan berbagai kelompok terhadap perusahaan. Kaitan ini manajer setidaknya memiliki dua jenis tanggung jawab sosial, yakni *operational responsibilities* dan *citizenship responsibilities*. *Operational responsibilities* dapat dipandang sebagai berbagai standar yang harus dicapai oleh perusahaan dalam pelaksanaan usahanya secara normal.

Hal tersebut mencakup perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja, perlakuan terhadap karyawan secara adil, dan sebagainya. Sedangkan *citizenship responsibilities* mencakup berbagai tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat seperti memelihara lingkungan hidup, menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau, membayar pajak, dan masih ada yang lain. *Ketiga*, manajer memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Dalam hal ini terdapat suatu keyakinan bahwa manajer berkewajiban untuk melaksanakan serangkaian program sosial dalam rangka memberikan manfaat bagi masyarakat.

3.3 Pengaruh Konsep Stakeholder Management terhadap Perkembangan Konsep CSR

Perkembangan konsep CSR berjalan seiring dengan perkembangan konsep *stakeholder*. Konsep *stakeholder* sendiri tidak lepas dari perkembangan adopsi pendekatan sistem teori manajemen. Konsep lingkungan organisasi perusahaan yang berkembang sejalan dengan berkembangnya pendekatan sistem manajemen yang mengubah cara pandang manajer dan ahli teori manajemen terhadap organisasi secara efektif. Melalui pengakuan terhadap berbagai elemen di lingkungan luar perusahaan yang akan berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian tujuan, para peneliti di *Stanford Research Institute* (SRI) memperkenalkan konsep *stakeholder* pada tahun 1963 (Freeman dan Reid, 1983: 89) yang semula

merujuk kepada “*those group without whose support the organization would cease to exist.*”

Freeman (1984), mendefinisikan *stakeholder* sebagai “setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan.” Pada awalnya yang dimaksud dengan *stakeholder* mencakup para pemegang saham (*stockholders*), para karyawan (*employees*), para pelanggan (*customers*), para pemasok (*suppliers*), para pemberi pinjaman (*lenders*) dan masyarakat luas (*society*).

Berdasarkan kaitannya dengan perusahaan, Jones (1995) selanjutnya mengklasifikasikan *stakeholders* ke dalam dua kategori, yaitu: *inside stakeholders* dan *outside stakeholders*.

- a) Para pemangku kepentingan di dalam perusahaan (*inside stakeholders*), terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Yang termasuk ke dalam kategor *iside stakeholders* adalah pemegang saham (*stockholders*), para manajer (*manage*) dan karyawan (*employees*).
- b) Para pemangku kepentingan di luar perusahaan (*outsde stakeholders*), terdiri dari orang-orang maupun pihak-pihak (*constituencies*) yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan dan bukan pula karyawan perusahaan tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh kpeutusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu kelompok pemangku kepentingan ini dapat memengaruhi perusahaan. Kategori *outside stakeholders* adalah pelanggan (*customers*), pemasok (*suppliers*), pemerintah (*government*), masyarakat lokal (*local communities*) dan masyarakat umum (*general public*).

Sudut pandang yang berbeda, **Post** et., al., (2002) membagi para pemangku kepentingan ke dalam dua kategori, yakni: *primary stakeholder*

dan *secondary stakeholders*. Pemangku kepentingan utama (*primary stakeholders*) adalah berbagai pihak yang berinteraksi langsung dalam aktivitas bisnis serta mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melaksanakan tujuan utama yakni:

- a) Para pemegang saham (*stockholders*).
- b) Para karyawan (*employees*).
- c) Para pemasok (*suppliers*).
- d) Para kreditur (*creditors*).
- e) Para pelanggan (*customers*).
- f) Para pedagang besar dan eceran (*wholesaler and retailers*).

Sedangkan yang dimaksud dengan para pemangku kepentingan sekunder (*secondary stakeholders*) adalah orang-orang atau kelompok di dalam masyarakat yang dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai aktivitas atau keputusan utama perusahaan (*Post et., al., 2002*), yaitu:

- a) Masyarakat secara umum
- b) Komunitas kecil
- c) Pemerintah pusat dan Daerah
- d) Para pemerintah asing
- e) Kelompok aktivis sosial
- f) Media.
- g) Berbagai kelompok pendukung bisnis (*business support group*).

Pengakuan terhadap adanya berbagai *stakeholders* di luar *shareholders* yang dapat memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan perusahaan telah mengubah dimensi tanggung jawab sosial perusahaan dari tanggung jawab ekonomi semata-mata dalam bentuk maksimasi laba untuk kemakmuran para pemegang saham menjadi tanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* yang

lebih luas. Perkembangan tanggung jawab sosial korporat dalam sebuah kontinum yang menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada berbagai konstituen (Robbins dan Coulter, 2002).

Tanggungjawab sosial korporat lebih tertuju kepada *shareholder* dan manajer. Tahap ini pemimpin perusahaan akan mengedepankan kepentingan para pemegang saham, yakni melalui berbagai upaya untuk menggunakan sumber daya perusahaan dan melakukan maksimasi laba. Tahap ini perusahaan memerhatikan berbagai peraturan yang berlaku namun pemimpin perusahaan memiliki pandangan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat secara luas. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Milton Friedman mengenai konsep perusahaan.

Menurut Milton Friedman (Baron, 2002), tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan, yakni maksimasi laba, sementara pada saat yang sama mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian tujuan utama dari suatu perusahaan korporasi adalah maksimasi laba sebagai wujud dari nilai pemegang saham. Bahkan Friedman memandang para manajer yang memiliki pendapat bahwa pemimpin perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat secara luas, merupakan para manajer yang bertindak tidak sejalan dengan keinginan pemegang saham.

Manajer perusahaan harus menjaga hubungan baik dengan penyedia SDM yang menyediakan sumber daya tenaga kerja, perbankan yang menyediakna sumber daya keuangan, pemasok yang menyediakan bahan baku. Manajer juga harus mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Perusahaan juga harus menghindari berbagai praktik yang dapat merugikan konsumen.

Demikian pula hubungan baik dengan *supplier* dilakukan perusahaan untuk memperoleh syarat perdagangan yang menguntungkan sehingga manajer perusahaan dapat menekan harga bahan baku yang akan memberikan kontribusi bagi terciptanya HPP yang rendah. Perusahaan menggunakan retorika CSR sebagai salah satu strategi perusahaan untuk melakukan maksimasi laba. Adapun bila manajer mengembangkan konsep CSR di luar tujuan, maka konsep CSR tersebut hanya bisa ditafsirkan sebagai dua opsi: **Pertama**, manajer memasuki ranah politik dengan melakukan berbagai aktivitas *philanthropic* yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah telah memperoleh pajak dari masyarakat.

Kedua, manajer bertindak sebagai *principal* dan bukan sebagai agen, dimana tindakan manajer untuk melakukan program CSR tersebut “dibiayai” oleh pemegang saham yang harus menanggung biaya CSR. Tindakan perusahaan ini berpotensi mengakibatkan *competitive disadvantage*, sehingga bisa menjadi target akuisisi perusahaan yang lebih unggul. Tahap kedua, perusahaan mulai mengembangkan tanggung jawab sosialnya kepada para karyawan. Tahap ini manajer perusahaan tidak hanya memperhatikan laba, tetapi mereka mulai memberikan perhatian yang besar kepada SDM.

Ketiga, perusahaan mengembangkan tanggung jawab sosialnya kepada para konstituen dalam suatu lingkungan yang spesifik di mana konstituen tersebut biasanya merupakan komunitas lokal (*local communities*) yang terkena dampak secara langsung oleh operasional perusahaan di daerah tempat mereka bermukim. **Keempat**, perusahaan tidak hanya mengembangkan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat lokal melainkan mencakup pula masyarakat dalam arti luas (*boarder society*). Para manajer memandang bisnis mereka sebagai bagian dari entitas publik dan

mereka merasa bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kebijakan kepada publik.

Bab 4

Implementasi CSR Era Modern: Strategi, Indikator Kinerja, dan Pelaporan CSR

Tujuan Pembelajaran

1. Untuk mengimplementasikan CSR moder
2. Untuk mengetahui strategi CSR secara keseluruhan
3. Untuk mengetahui indicator CSR
4. Untuk memahami kinerja dan pelaporan CSR

4.1 Strategi dalam Implementasi CSR

Setelah memahami CSR secara utuh, baru tahap pelaksanaan CSR bisa dimulai. Dewasa ini banyak terjadi perubahan-perubahan drastis dalam Implementasi CSR. Dibutuhkan upaya dan strategi ekstra agar Implementasi CSR sanggup bahkan berjalan sesuai dengan ide dan konsep dasarnya. Strategi ekstra tersebut sebaiknya meliputi empat agenda utama, yakni: pedoman (*guidelines*) dan tata etika (*codes of conduct*), sistem dan kebijakan manajemen korporat, strategi kepemimpinan korporat dalam CSR, terakhir komitmen dan kemitraan di antara stakeholders.

4.2 Indikator Kinerja Kunci dalam Pelaksanaan CSR

Indikator yang paling efektif harus bersifat kualitatif dan mempunyai 8 (delapan) indikator dalam pengukuran, diantaranya:

1. Leadership (Kepemimpinan)

- a) Program CSR dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan dukungan dari *top management* perusahaan.
- b) Terdapat kesadaran filantropik dari pimpinan yang menjadi dasar pelaksanaan program.

2. Proprsri Bantuan

CSR dirancang bukan semata mata pada kisaran anggaran saja, melainkan juga pada tingkatan serapan maksimal, artinya apabila areanya luas, maka anggarannya juga harus besar. Jadi tidak dapat dijadikan tolak ukur, apabila anggaran besar pasti menghasilkan program yang bagus.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

- a) Terdapat laporan tahunan (*annual report*)
- b) Mempunyai mekanisme audit sosial dan finansial audit sosial terikat pengujian program CSR yang ditujukan secara benar sesuai kebutuhan masyarakat dan perusahaan secara benar dengan melakukan *interview* dengan para penerima.

4. Cakupan Wilayah (*Convarage Area*)

Terdapat identifikasi penerima manfaat secara tertib dan rasional berdasarkan skala prioritas yang telah ditentukan.

5. Perencanaan dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

- a) Perencanaan perlu ada jaminan untuk melibatkan *multistakholder* pada setiap seiklus pelaksanaan proyek.
- b) Terdapat kesadaran untuk memperhatikan aspek lokalitas pada saat perencanaan dan kontribusi, pemahaman, dan penerimaan terhadap budaya lokal yang ada.
- c) Terdapat *blue-print policy* dasar pelaksanaan program.

6. Pelibatan Stakholder (*Stakholders Enggagement*)

- a) Terdapat mekanisme koordinasi reguler dengan *stakholder*, utamanya masyarakat.
- b) Terdapat mekanisme yang menjamin partisipasi masyarakat untuk dapat terlibat dalam siklus proyek.

7. Keberlanjutan (*Sustainability*)

- a) Terjadi alih peran dari korporat ke masyarakat
- b) Tumbuhnya rasa memiliki program dan hasil program pada diri masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam menjaga dan memelihara dengan baik.
- c) Adanya pilihan partner program yang bisa tetap dijalankan sampai sesuai dengan partner tersebut.

8. Hasil Nyata (*Outcome*)

- a) Terdapat dokumentasi hasil yang menunjukkan berkurangnya angka kesakitan dan kematian (bidang kesehatan), atau berkurangnya angka buta huruf dan meningkatkan kemampuan SDM (bidang pendidikan) sesuai bidang CSR yang dipilih oleh perusahaan.
- b) Terjadinya perubahan pola pikir masyarakat.
- c) Memberikan dampak ekonomi masyarakat
- d) Terjadi penguatan komunitas (*community empowerment*).

4.3 Pelaporan CSR

Impelementasi CSR membutuhkan pelaporan yang berguna dalam menginformasikan serta mengomunikasikan plus bentuk pertanggung jawaban kepada Stakholder. Untuk isi pelaporan CSR begitu strategis dalam menginisiasi opini stakholder agar meningkatkan reputasi perusahaan secara nyata. Alur pelaporan CSR berawal dari suatu perusahaan sadar akan dampak dari operasional yang mereka lakukan kemudian berinisiatif meakukan sesuatu, dalam hal ini berupa perencanaan program CSR plus budget yang berguna mengoptimalkan nilai ebih serta meminimalisir dampak buruk, yang seterusnya hsil inisiatif plus aktifitas tersebut harus dibuat suatu laporan yang akan disampaikan keada pemangku kepentingan.

Media menyampaikan laporan tersebut bisa berupa pemberitahuan di portal perusahaan, bisa disatukan dengan laporan kinerja tahunan perusahaan, bisa juga disampaikan di forum seperti seminar, diskusi dan konferensi. Dengan kata lain pelaporan pelaporan CSR berperan besar bagi perusahaan untuk mempublikasikan praktek CSR mereka kepada stakeholder secara taksis, komprehensif, dan berkelanjutan.

Penggalangan informasi menyangkut aktivitas CSR suatu perusahaan membutuhkan usaha yang sangat ekstra dan kecermatan dalam penyusunannya. Hal yang sangat membuat CSR reporting wajib terlihat komprehensif serta fokus, maka dari itu banyak hasil publikasi dari CSR *reporting* dimuat dalam puluhan lembar halaman bahkan ada yang sama seratusan halaman lebih, dan pelaporan tersebut sangat detail oleh reputasi perusahaan yang mempublikasikan CSR reporting.

Bab 5

Jenis Program CSR

Tujuan Pembelajaran

1. Untuk mengetahui jenis program CSR
2. Untuk mengetahui analisis program CSR
3. Untuk mengetahui pelaporan analisis program CSR
4. Untuk memahami kebijakan analisis program CSR

5.1 Promosi Kegiatan Sosial

Aktivitas CSR perusahaan menyediakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial. Komunikasi persuasif bertujuan menciptakan kesadaran dan perhatian terhadap suatu masalah sosial. Tujuan komunikasi persuasif yang ingin dicapai perusahaan melalui pelaksanaan, dan menciptakan kesadaran dan perhatian masyarakat dengan menyajikan angka statistik. Melaksanakan kesadaran masyarakat terhadap peningkatan peredaran uang palsu dengan dikenal kampanye Dilihat, Diraba, Diterawang (D3). Berikut penjelasan 3D dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
Pengertian kampanye 3D Bank Indonesia

Aktivitas	Arti Aktivitas
Dilihat	Lihat uang yang dimiliki, warna pudar, kusam, pucat, luntur, patah-patah, atau masalah lainnya. Pastikan uang yang anda periksa tadi memiliki warna, corak dan gambar yang baik serta memiliki tanda uang asli seperti tanda air yang menggambarkan pahlawan nasional, bahan kertas serta benang tali pengaman yang berada di dalam uang. Uang

	pecahan memiliki tanda keaslian, seperti corak gambar dengan warna yang mencolok dan sulit ditiru penjahat.
Diraba	Usap uang apakah terasa kasar atau lembut. Uang yang asli agak kaku dan bahannya tebal. Gambar uang sengaja dicetak agak menonjol dan terasa jika diusap.
Diterawang	Langkah yang terakhir adalah menerawang ke sumber cahaya kuat seperti matahari dan lampu. Lihatlah bagian tali pengaman dan tanda mata air apakah dalam kondisi baik atau tidak

Sumber: Bank Indonesia.com

Penjelasan diatas menggambarkan salah satu contoh CSR atas kepedulian sosial dalam bentuk uang. Di samping itu, ada aktivitas yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- 1) Kegiatan promosi untuk menggugah kesadaran masyarakat mengenai suatu masalah sosial tertentu juga dilakukan oleh Glaxo, Smith and Klein yang memproduksi obat turun panas.
- 2) membujuk orang untuk memperoleh informasi lebih banyak mengenai isu sosial dengan mengunjungi website tertentu.
- 3) Membujuk orang untuk menyumbangkan waktunya, untuk membantu mereka yang membutuhkan.
- 4) Membujuk orang menyumbangkan uang untuk kemanfaatan masyarakat melalui pelaksanaan program sosial perusahaan. SCTV membentuk Pundi Amal SCTV untuk membantu masyarakat miskin melalui pelaksanaan program beasiswa pengobatan gratis. Harian Republika membentuk dompet dhuafa untuk menyantuni masyarakat kurang mampu melalui program beasiswa, pemberian modal dan pelatihan usaha.

- 5) Membujuk orang untuk menyumbangkan sesuatu yang mereka miliki selain uang misal, toko buku gramedia menyediakan kotak untuk menampung sumbangan buku bekas guna disumbangkan yang membutuhkan buku tersebut.

Berbagai benefit yang dapat diperoleh perusahaan dengan melaksanakan kegiatan *cause promotions*, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan *cause promotions* perusahaan akan memperkuat *positioning merk* perusahaan. Pelaksanaan *cause promotions* yang dilakukan oleh Anlene dengan menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya *osteoporosis* dan menghubungkan pencegahan *osteoporosis*. Hal tersebut telah menguatkan posisi merk Anlene sebagai susu mencegah *osteoporosis*.
- 2) Pelaksanaan *cause promotions* dapat turut menciptakan jalan ekspresi loyalitas konsumen terhadap permasalahan, sehingga meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan.
- 3) Memberikan peluang kepada karyawan perusahaan untuk terlibat dalam suatu kegiatan sosial yang menjadi kepedulian.
- 4) *Cause promotions* dapat menciptakan kerjasama antara perusahaan dengan pihak lain, sehingga memperbesar dampak pelaksanaan promosi.
- 5) Aktivitas *cause promotions* dapat meningkatkan citra perusahaan (*corporate image*) yang baik agar dapat memberikan pengaruh positif, misal meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja finansial perusahaan.

5.2 Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial

Aktivitas CSR ini, perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk. Kegiatan ini anya didasarkan

kepada penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu serta untuk aktivitas derma tertentu. Beberapa aktivitas *cause related marketing* oleh perusahaan sebagai berikut:

- 1) Menyumbangkan sejumlah uang untuk setiap produk terjual. Sebagai contoh es krim Viennetta dari Wall program "Berbagi 1000 Kebaikan" dengan cara menyumbangkan 1000 untuk setiap penjualan es krim Viennetta. Dana untuk setiap produk dari Wall's telah meluncurkan dengan cara menyumbangkan dana yang terkumpul sebesar Rp. 1.15 milyar dan digunakan untuk membantu korban gempa di Sumatera.
- 2) Menyumbangkan sejumlah uang tertentu untuk setiap aplikasi atau rekening yang dibuka.
- 3) Menyumbangkan persentase tertentu dari setiap produk yang terjual atau transaksi untuk kegiatan amal. Sebagai contoh, Aqua membuat program "1 untuk 10" di mana untuk setiap liter air mineral Aqua dalam kemasan tertentu yang terjual, maka perusahaan akan menyediakan sepuluh liter air bersih bagi warga masyarakat di Nusa Tenggara.
- 4) Menyumbangkan persentase tertentu dari laba bersih perusahaan untuk kegiatan sosial atau untuk tujuan amal. Perusahaan BUMN menyisihkan laba tertentu yang digunakan untuk kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Kampanye *cause related marketing* mendukung berbagai jenis kegiatan sosial, namun terdapat beberapa masalah sosial yang sangat menonjol sehingga mendorong banyak perusahaan untuk berpartisipasi dalam bidang ini. Untuk konteks Indonesia, pelaksanaan *cause related marketing* terutama ditujukan untuk kegiatan beasiswa, penyediaan air bersih, pemberian layanan kesehatan, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

Perusahaan yang melaksanakan aktivitas *cause related marketing* akan dapat memperoleh *benefit* (Kotler & lee, 2005, sebagai berikut:

- 1) Perusahaan dapat menarik pelanggan baru melalui pelaksanaan *cause related marketing*. Sebagai contoh, Citibank bekerjasama dengan American Lung Association, berhasil mengumpulkan dana lebih dari 1 juta dollar Amerika untuk membantu para penderita kanker paru-paru. Dana ini berasal dari sumbangan para pemegang kartu kredit citibank di mana untuk setiap pembukaan kartu kredit, para pemegang tu kredit menyumbang 30 dollar Amerika yang akan disumbangkan ke American Lung Association. Kegiatan ini menimbulkan perasaan bermakna bagi para pelanggan kartu kredit Citibank sehingga terjadi peningkatan pembukaan kartu kredit baru.
- 2) Aktivitas *cause-related marketing* dapat menjangkau relung pasar (*market niche*). Saat ini semakin banyak perusahaan yang menyadari bahwa aktivitas *cause related marketing* merupakan suatu cara yang efektif untuk menjangkau konsumen dari segmen dengan karakteristik demografi, geografi atau pasar sasaran tertentu (Kotler dan Lee, 2005).
- 3) Aktivitas *cause related marketing* dapat meningkatkan penjualan produk perusahaan.
- 4) Aktivitas *cause related marketing* dapat membangun identitas merk yang positif di mata pelanggan. Identitas merk yang positif dapat terjadi akibat merk perusahaan disandingkan dengan program CSR yang disponsori oleh merk perusahaan.

5.3 Pemasaran Kemasyarakatan Korporasi

Aktivitas CSR perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian

lingkungan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampanye *Corporate Societal Marketing* (CSM) terfokus mendorong perubahan perilaku, sebagai berikut:

1) Isu Kesehatan

Kampanye CSM yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat yang memiliki dampak bagi kesehatan, seperti menghindari perilaku yang menimbulkan risiko tinggi untuk terjangkit HIV/AIDS, serangan jantung, kecanduan rokok, alkohol, dan narkotika.

2) Isu Perlindungan Terhadap Kerugian

Isu tersebut mencakup keselamatan lalu lintas, pencegahan dari kejahatan, pencegahan dari pembajakan.

3) Isu Lingkungan

Kampanye CSM bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar meninggalkan berbagai perusak lingkungan, seperti mencemari air, mencemari pemborosan energi, dan melakukan perdagangan yang dilindungi.

4) Isu Keterlibatan Masyarakat

Kampanye CSM bertujuan mengubah perilaku orang agar mereka lebih terlibat dalam bo sosial masyarakat, seperti: mendorong orang untuk melakukan donor darah, melakukan pencegahan kejahatan secara kolektif, dan tur memelihara kelestarian lingkungan.

Benefit yang dapat diperoleh perusahaan melalui pelaksanaan CSM, antara lain:

1. Menunjang Positioning Merk Perusahaan

Sebagai contoh perusahaan penghasil makanan Subway di Amerika Serikat memperoleh benefit yang besar bagi *positioning brand* pada saat perusahaan ini bermitra dengan program *North Carolina's Heart Disease*

and Stroke Prevention Task Force dan North Carolina Cardiovascular Health. Melalui edukasi mengenai makanan berkadar lemak rendah yang disiarkan melalui iklan di radio dan televisi yang mencapai sekitar dua juta pendengar di North Carolina, Subway berhasil meningkatkan positioning merk makanan berkadar lemak rendah yang mereka produksi sehingga menjadi pilihan utama masyarakat North Carolina.

2. Menciptakan Preferensi Merk.

Melalui penciptaan preferensi merk, maka merk produk perusahaan memiliki kemungkinan untuk lebih dipilih oleh konsumen pada saat mereka melakukan pembelian produk, dibandingkan dengan merk produk pesaing. Sebagai contoh, program corporate societal marketing yang dilakukan oleh Pampers melalui program "*Back to sleep*". Program ini bertujuan mengedukasi masyarakat Amerika untuk menidurkan bayi dengan posisi terlentang, hal ini dilakukan karena ditengarai *Sudden Infant Death Syndrome* (SIDS) yang mengakibatkan kematian bayi secara mendadak. Program ini telah berhasil mengangkat popularitas pampres sehingga produk ini menjadi pilihan utama para orang tua di Amerika.

3. Mendorong Peningkatan Penjualan

Terutama bila konsumen mengkaitkan produk perusahaan dengan bahan perilaku yang diinginkan, contoh, kampanye yang lakukan Aqua dalam bentuk kampanye terapi air melalui perilaku mengkonsumsi air dalam jumlah 5 (lima) liter per hari, telah berhasil meningkatkan jumlah penjualan Aqua.

4. Menarik Mitra yang Andal serta Memiliki kepedulian Besar untuk Merubah Perilaku Masyarakat

Hal ini disebabkan karena pelaksanaan corporate societal marketing biasanya memperoleh tanggapan yang positif dari kalangan pemerintah,

organisasi nirlaba, yayasan serta berbagai kelompok kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap perubahan perilaku masyarakat. Sebagai contoh, program "5 A Day" yang diluncurkan oleh National Cancer Institute bekerjasama dengan perusahaan Dole Company Food yang bertujuan untuk mendorong anak serta keluarga mengkonsumsi lima sampai sembilan buah dan sayuran setiap hari. Program ini telah memperoleh sambutan serta kerjasama yang sangat baik dari para distributor, toko eceran, penghasil sayuran dan buah serta organisasi perdagangan.

5. Memberikan Dampak Nyata terhadap Perubahan Sosial Sebagai contoh program "*Don't Mess with Texas*" yang diluncurkan oleh Texas Department of Transportation. Program ini bertujuan untuk membujuk para penduduk Texas agar tidak membuang sampah di jalan dan menyediakan tempat sampah di kendaraan. Program ini berhasil mengurangi sampah yang dilemparkan ke jalan raya Texas sampai 50 persen dan mengurangi jumlah puntung rokok yang mengotori jalanan Texas sampai 70 persen.

5.4 Kegiatan Filantropi Perusahaan

Aktivitas CSR ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu. Sumbangan tersebut biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, bingkisan intuan atau pelayan secara cuma-cuma. Kegiatan filantropi biasanya berkaitan dengan berbagai kegiatan sosial yang menjadi prioritas perusahaan. Berbagai program corporate philanthropy yang dilaksanakan perusahaan anntara lain :

1. *Program corporate philanthropy* dalam bentuk sumbangan uang tunai. Misalnya kegiatan pemberian uang tunai kepada anak-anak panti asuhan pada Bulan Ramadhan yang dilakukan oleh CDC Telkom.
2. *Program corporate philanthropy* dalam bentuk bantuan hibah. Sebagai contoh, sejak tahun 2003 sampai tahun 2006, PT Telkom telah menyalurkan bantuan hibah kepada 2.731 penerima bantuan yang secara garis besar dapat dikelompokkan dalam bantuan bencana alam, bantuan sarana umum, bantuan pendidikan dan pelatihan, bantuan sarana ibadah serta bantuan kesehatan masyarakat.
3. *Program corporate philanthropy* dalam bentuk penyediaan beasiswa. Sebagai contoh, penyediaan beasiswa yang dilakukan oleh PT HM Sampoerna melalui Sampoerna Foundation untuk membiayai beasiswa program S2 maupun S3
4. *Program corporate philanthropy dalam bentuk pemberian produk.* Sebagai contoh, PT Telkom Divre III melaksanakan kegiatan *corporate philanthropy* dalam bentuk pemberian paket sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2007.
5. *Program corporate philanthropy dalam bentuk pemberian layanan cuma-cuma.*
6. *Program corporate philanthropy dalam bentuk penyediaan keahlian teknis oleh karyawan perusahaan secara cuma-cuma.* Sebagai contoh, pelayanan perbaikan kendaraan yang mudik Lebaran yang dilakukan oleh PT Astra.
7. *Program corporate philanthropy dengan mengizinkan penggunaan fasilitas dan saluran distribusi yang dimiliki perusahaan untuk digunakan bagi kegiatan sosial.*
8. *Program corporate philanthropy yang dilakukan perusahaan dengan cara menawarkan penggunaan peralatan yang dimiliki oleh perusahaan.*

Beberapa benefit yang dapat diperoleh perusahaan dari pelaksanaan *program corporate philanthropy*, antara lain :

1. Meningkatkan reputasi perusahaan

Program *corporate philanthropy* oleh PT Telkom sebagai salah satu bentuk pelaksanaan CSR PT.Telkom. Program ini telah meningkatkan reputasi perusahaan sehingga pada tahun 2007. PT Telkom menerima penghargaan sebagai *The Most Coverage and Target in Corporate Social Responsibility* dari Departemen Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan masyarakat Telekomunikasi Indonesia dan majalah seluler.

2. Memperkuat Bisnis Perusahaan di Masa Depan

Melalui penciptaan citra yang baik di mata publik, perolehan pemasok memiliki produk berkualitas tinggi serta memperoleh citra yang baik dari para pembuat peraturan yang akan berpengaruh terhadap operasional perusahaan di masa mendatang. Sebagai contoh, berbagai bentuk kegiatan filantropi yang dilakukan oleh *the new york times* terutama dengan memberikan bantuan dalam bidang jurnalisme dan pendidikan bagi para jurnalis, telah menempatkan *the new york times* pada urutan pertama dalam daftar majalah fortune, sebagai "*america's most admired companies*".

3. Memberi Dampak Bagi Dalam Masalah Sosial Lokal

Lifebouy ikut mengatasi masalah sosial di beberapa pedesaan Indonesia yang tidak memiliki sanitasi lingkungan yang baik dengan membangun WC umum di berbagai pedesaan di Indonesia lengkap dengan sarana air bersihnya.

5.5 Pekerjaan Sosial Kemasyarakatan Secara Sukarela

Aktivitas CSR ini, perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedagang eceran, atau para pemegang *franchise* agar

menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi masyarakat lokal. Bentuk dukungan yang diberikan perusahaan kepada para karyawan untuk melaksanakan program *community volunteering*, antara lain:

1. Etika perusahaan melalui komunikasi korporat yang akan mendorong karyawan untuk menjadi sukarelawan bagi komunitas. Komunikasi ini dapat pula dijadikan sarana agar karyawan mengetahui sumber daya perusahaan yang dapat digunakan untuk peluang sukarela.
2. Menyarankan kegiatan sosial atau aktivitas amal tertentu yang bisa oleh para karyawan. Perusahaan akan sediakan informasi yang rinci mengenai bagaimana keterlibatan karyawan dalam aktivitas tersebut dalam bentuk kegiatan sosial atau amal.
3. Mengorganisir tim sukarelawan untuk suatu kegiatan sosial.
4. Membantu para karyawan menemukan kegiatan sosial yang akan dilaksanakan melalui survey ke wilayah yang diperkirakan membutuhkan bantuan sukarelawan, mencari informasi melalui website atau dalam beberapa kasus dengan menggunakan software khusus yang akan melacak aktivitas sosial yang cocok dengan minat karyawan yang akan menjadi tenaga sukarelawan.
5. Menyediakan waktu cuti dengan tanggungan perusahaan bagi karyawan yang bersedia menjadi tenaga relawan, di mana waktu cuti ini bervariasi dari hanya beberapa hari kerja sampai menggunakan waktu cuti satu tahun untuk melaksanakan kegiatan sukarela di Negara berkembang atas nama perusahaan.
6. Memberikan penghargaan dalam bentuk uang untuk jumlah jam yang digunakan karyawan tersebut sebagai sukarelawan.
7. Memberikan penghormatan kepada para karyawan yang terlibat dalam kegiatan sukarela, seperti memberitakan karyawan yang bersangkutan

dalam majalah internal perusahaan, memberikan penghargaan seperti penyematan pin pada karyawan yang menjadi sukarelawan untuk memberikan presentasi pada pertemuan tingkat departemen maupun rapat umum tahunan.

Beberapa benefit yang dapat diperoleh perusahaan melalui kegiatan *community volunteering*, antara lain:

1) Membangun Hubungan Tulus Perusahaan dengan Komunitas

Hubungan yang tulus ini dapat terbina karena komunitas merasakan langsung komitmen perusahaan melalui pelibatan karyawan dalam mengatasi masalah sosial suatu komunitas.

2) Kegiatan Community Volunteering dapat Memberikan Kontribusi terhadap Pencapaian

Bertujuan untuk pelaksanaan program *community volunteering* dari perusahaan *Hewlett Packard* yang bernama "*e-community*" di daerah pedesaan India yang sangat miskin serta memiliki keterbatasan pasokan listrik, telah menimbulkan ide bagi pembuatan printer dengan menggunakan tenaga matahari (*solar-powered printer*) dan kamera digital dengan tenaga matahari (*solar-powered digital camera*). Kedua penemuan ini telah menciptakan bisnis baru di India yang menambah lini bisnis perusahaan.

3) Meningkatkan Kepuasan dan Motivasi Karyawan

Hal ini terjadi karena karyawan bekerja di perusahaan yang memiliki reputasi baik di mata publik, sehingga mereka merasa puas bekerja di perusahaan dan kepuasan tersebut dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi.

5.6 Praktika Bisnis yang Memiliki Tanggungjawab Sosial

Aktivitas CSR ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum serta melaksanakan investasi yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan komunitas dan memelihara lingkungan hidup. Komunitas dalam hal ini mencakup karyawan perusahaan, pemasok, distributor, organisasi nirlaba yang menjadi mitra perusahaan serta masyarakat secara umum. Sedangkan yang dimaksud kesejahteraan mencakup di dalam aspek kesehatan, keselamatan, kebutuhan psikologis dan emosional.

Beberapa aktivitas yang termasuk ke dalam socially responsible business practice, mencakup:

- 1) Membuat fasilitas yang memenuhi bahkan melebihi tingkat keamanan lingkungan dan keselamatan yang ditetapkan
- 2) Mengembangkan perbaikan proses produksi barang dan jasa, seperti berbagai kegiatan untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahaya, mengurangi penggunaan bahan kimia dalam proses peningkatan pertumbuhan tanaman pangan.
- 3) Menghentikan penawaran produk yang ditenggarai membahayakan kesehatan manusia meskipun produk itu legal.
- 4) Memilih pemasok berdasarkan kriteria kesediaan mereka menerapkan dan memelihara aktivitas sustainable development.
- 5) *Memilih perusahaan manufaktur* dan bahan kemasan yang paling ingin dengan berbagai kriteria seperti: perusahaan tersebut i tujuan mengurangi penggunaan sumber daya secara sia-sia, meggunakan sumber daya yang bisa di daur ulang serta mengurangi terjadinya pembuangan racun ke lingkungan.
- 6) Melakukan pelaporan secara terbuka mengenai material produk yang digunakan berikut asal-usulnya, potensi bahaya yang ditimbulkan dari

penggunaan produk serta berbagai informasi lain yang berguna bagi konsumen.

- 7) Mengembangkan berbagai program untuk menunjang terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Program benefit yang dapat diperoleh perusahaan melalui *Socially Responsible Business Practice (SRBP)*, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan SRBP dapat menghemat uang perusahaan, memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran energi di antara para karyawan perusahaan.
- 2) Meningkatkan kesan baik komunitas terhadap perusahaan. Sebagai contoh, aktivitas yang dilaksanakan oleh Coca Cola untuk mencegah penularan HIV/AIDS di wilayah Afrika. Program pemberian kondom gratis, memberikan penjelasan mengenai penyakit AIDS beserta cara penularan HIV/AIDS, melakukan pemeriksaan darah secara gratis untuk mengetahui secara dini apakah darah pasien tercemar virus HIV atau tidak dan berbagai bentuk program lainnya, telah mengangkat popularitas Coca Cola.
- 3) Bagi perusahaan yang berhasil menjalankan kegiatan SRBP, maka keberhasilan tersebut akan menciptakan preferensi konsumen terhadap merk produk perusahaan.
- 4) Pelaksanaan SRBP, misalnya dalam bentuk penyediaan sarana untuk kepentingan umum seperti sarana MCK (seperti yang dilakukan oleh Lifebouy), pembangkit listrik mikr (seperti yang dilakukan oleh Indonesia Power), penyediaan sarana bersih (seperti yang dilakukan oleh Aqua Danone), dapat memberikan nilai positif dari pemerintah selaku pembuat peraturan sehingga memberikan situasi yang menguntungkan bagi perusahaan.

5.7 Social Business Enterprise (SBE) Merupakan Wujud Konkret dari Skema Besar Konsep CSR

Social Business Enterprise (SBE) pertama kali digagas oleh Muhammad Yunus dengan mempertemukan kepentingan bisnis untuk mencapai tujuan sosial. Esensi dari konsep ini adalah mengoptimalkan keuntungan sosial dari suatu bisnis yang akan sangat berguna untuk kebaikan manusia tanpa harus terpaksa mendapatkan keuntungan pribadi semata. Konsep ini tidak lain merupakan bagian dari skema besar CSR yang dirancang dan diimplementasikan selama ini sangat diapresiasi di seluruh dunia. Berikut ini konsep dari *Asian Development Institute* (ADBI), mengenai konsep dan proyek SBE pertama. Berikut penjelasan SBES dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2

Social Business Enterprise

Terminologi	<i>"Social benefit maximizing kind businesses which are created to do good to people, not paying any attention to making personal gain."</i>
Straegi Profit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>To be designed and operated to pass aon ll the benefits to the consumers</i> ▪ <i>To be operated without incurring losses</i> ▪ <i>To be operated competing with Profit Maximizing Enterprises (PMEs)</i>
Kebijakan Menyangkut Dividen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>to generate enough surplus to pay back the invested capital to the investors as earlyas possible to generate surplus for- Expansion, Improvement of quality,</i> ▪ <i>Increasing efficiency through introducing new technology, Innovative marketing to reach the deeper layers of low-income people and disadvantaged communities</i>

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Undertake research and experimentation to improve and diversify products and services ▪ Investors capital out of the profit will be paid back within a time period agreed upon by the investors ▪ After the capital amount is paid back, SBEs may even give a nominal annual fixed dividend (not above 5%) ▪ Bottom line for an SBE will always be to deliver benefits to people, rather than to earn money for the investors
Transfer Kepemilikan saham/modal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ if an investor wants to withdraw his investment from an SBE at any point time, he may do so, provided he sells his shares to the existing shareholders, or to a new shareholder who accepts the philosophy, practice and conventions of a SB
Projek Pertama: Grameen Danone Foods Limited (GD)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A no loss Company ▪ A no loss Company ▪ Established in collaboration between Groupe Danone and four Grameen ▪ Companies called <ul style="list-style-type: none"> a) Grameen Business Promotion Services b) Grameen Welfare c) Grameen Energy and d) Grameen Telecom ▪ Ownership 50:50 by Groupe Danone and four above Grameen Companies. ▪ Authorized Capital is USD 3.67 million and the paid up Capital is USD 1.103 million. ▪ The Company is registered under Companies Act of Bangladesh.
Misi, Objektif dan Fitur Projek Grameen	<p>Mission:</p> <p>Reduce poverty by a unique proximity business model that brings daily healthy nutrition to the D & E class.</p> <p>Objectives:</p>

<p><i>Danone Foods Limited (GD)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>To bring daily health nutrition to low ncome D & E class) and nutritionally deprived population of Bangladesh</i> ▪ <i>To alleviate poverty through the implementation of a unique proximity based business model</i> ▪ <i>To contribute in creating independent business and job opportunities in the farming processing, sales and distribution sectors.</i> ▪ <i>To provide easily affordable dairy product especially developed to fulfill the nutritional needs of children</i> ▪ <i>To protect the environment relying on solar & biogas energy and develop innovative, environment friendly packaging solutions for its products.</i> <p><i>Other Unique Features:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Investors will not take profit from the business.</i> ▪ <i>They will help using the Profit for expansion and development of the business.</i> <p>Investors will provide arrange technical and expert support for the benefit of the Company</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>They will arrange support of professionals to facilitate development of business.</i> ▪ <i>The investors will keep continued support for sustainable and smooth growth of the Company</i>
---	--

Sumber: Yunus, 2008

Tabel 5.2 diatas menjelaskan tentang BSE yang sangat objek dalam tatanan perusahaan, selain BSE ada juga konsep BSE dan implementasi dalam *proiek grameen danone foods limited* sebagai konsep yang efektif. Berikut konsep BSE dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawa ini.

Tabel 5.3**Konsep Social Business Enterprise**

<i>Lokasi Proyek</i>	<i>At Bogra, a northern district of Bangladesh, 220 km from Dhaka.</i>
<i>Waktu Peresmian dan Peluncuran Proyek</i>	<i>The plant inaugurated on 7th November 07 by Football icon Zinedine Zidane</i>
<i>Ukuran Gedung Pabrik untuk Tempat Produksi</i>	<i>Very small only 800 sq m Factory Building</i>
<i>Produk yang akan diproduksi</i>	<i>Yogurt from fresh milk that includes cornstarch, date molasses, sugar and micro nutrients (vitamin, iron, protein, iodine, zinc, calcium, etc.) A single 80-gram cup provides 30% of a child's daily requirements of vitamin, iron, zinc and iodine</i>
<i>Kapasitas Produksi</i>	<i>3,000 kgs yogurt/day and maximum 10.000 kgs/day</i>
<i>Merek Produk</i>	<i>"SHOKTI DOI"- means 'Energy Yogurt'</i>
<i>Biaya Proyek</i>	<i>USD 1.00 million approximately</i>
<i>Penjualan Produk</i>	<i>Grameen Ladies (Village Ladies) & tiny shops in rural areas are engaged in product selling process.</i>
<i>Biaya Produksi/Unit</i>	<i>7 Cents / 80 gms Cup</i>
<i>Pemasok untuk bahan baku susu</i>	<i>The company is actively considering developing about 500 mini Baku Susu dairy farms with 3-5 cows each Such farms will be supported with micro credit by Grameen Companies and The Grameen Bank</i>
<i>Produksi</i>	<i>Producton and Marketng are underway on trial basis</i>
<i>Rencana Jangka Pendek</i>	<i>Two more plants to be established by 2008</i>

Sumber: Asian Development Bank Institute (ADBI) - 2007

Filosofi SBE itu suatu Intisari tentang filosofi SBE itu sendiri, yakni keuntungan bisnis sosial ada di dalam bisnis'. Sedangkan prinsip utama ialah 'sebaik mungkin beroperasi tanpa menanggung rugi seraya melayani orang khususnya mereka yang di antara kita paling kurang beruntung'. Berinvestasi di bisnis sosial amat jauh berbeda dengan kegiatan fillantropi. **Pertama**, usaha yang diciptakan orang mandiri. Tidak perlu suntikan dana setiap tahun

Bisnis sosial bisa bergerak sendiri, menghidupi sendiri, dan berkembang sendiri. Begitu berdiri, bisnis ini terus tumbuh sendiri. **Kedua**, investor dalam bisnis Sosial mendapat lagi uang mereka. Mereka dapat menginvestasikan lagi uang itu dalam bisnis sosial serupa atau bisnis sosial lain.

Bab 6

Menggagas Pola Kemitraan Antara Perusahaan, Pemerintah Dan Perguruan Tinggi Bagi Pengembangan Dan Berkelanjutan

Tujuan Pembelajaran

1. Untuk mengetahui pemodalan untuk aktivitas CSR
2. Untuk mengetahui laporan pemodalan aktivitas CSR
3. Untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan CSR
4. Untuk memahami pedoman CSR perusahaan

6.1 Pemodalan dan Elaborasi Menggagas Pola Kemitraan antara Perusahaan, Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Bagi Pengembangan dan Bekerlanjutan Bisnis

Pemodelan tersebut yakni munculnya visualisasi konsep pemangku kepentingan kunci (*key stakeholder*), antara lain diperkenalkan oleh Fottler (1989). *Key Stakeholder* adalah elaborasi tahap awal dari permodelan tersebut, yakni menunjukkan stakeholder yang memiliki kekuatan (*power*) dalam bentuk potensi ancaman dan potensi kerjasama bagi perusahaan/organisasi. *Key Stakeholder* sangat bersifat kontekstual, sehingga stakeholder kunci bagi suatu perusahaan/organisasi bisa jadi bukan merupakan stakeholder kunci bagi perusahaan/organisasi lainnya.

Konteks pola kemitraan antara Perusahaan, Pemerintah, dan Lembaga Pendidikan, *Key Stakeholder* dirumuskan secara arbitrer dan mengacu kepada *stakeholder* yang dianggap paling penting secara kontekstual bagi kemitraan perusahaan, **Pertama**: lingkaran besar bagian atas yang dibatasi garis pemisah adalah kondisi sebelum terjalin kemitraan. Perusahaan, Pemerintah dan Lembaga pendidikan mengimplementasikan instrumennya, baik tata etik maupun panduan dan strategi CSR tidak

terorganisasi. **Kedua:** lingkungan besar bagian bawah adalah kondisi sesudah dilakukan kemitraan. Perusahaan, Pemerintah, dan lembaga pendidikan dapat mengimplementasikan instrumennya secara terorganisasi, baik tata etika maupun panduan dan strategi CSR. Visi dan misi mereka diintegrasikan ke dalam nilai inti dan strategi bersama. Kinerja ketiga badan taskforce (Badan Perencana CSR, Badan Pelaksana CSR, dan Badan Pengendali CSR) ini ditunjukkan dalam lingkaran kecil yang overlap sebagai dampak sinergitas dari kemitraan ini. Rincian dan unsur apa saja yang tergabung ke dalam tiga badan independen yang bersifat *Taskforce* tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Badan Perencana CSR

Badan Perencana CSR merupakan badan yang merumuskan tujuan dan program CSR. Perumusan tujuan dan program CSR melibatkan berbagai kelompok stakeholder, yang terdiri dari unsur-unsur:

a) Perusahaan

Pola kerjasama ini, perusahaan diwakili oleh Chief Executive Officer (CEO) yang merupakan pimpinan tertinggi perusahaan pada tingkat korporasi.

b) Pemerintah

Stakeholder yang mewakili pemerintah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)

c) Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan dalam pola kerjasama diwakili oleh perguruan tinggi yakni: rektorat dan fakultas.

d) Masyarakat

Keterwakilan masyarakat melalui tokoh masyarakat di dalam badan perencanaan CSR sangat diperlukan, karena program CSR yang

direncanakan dan diimplementasiakan ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Badan Pelaksana CSR

Badan Pelaksana CSR adalah badan terdepan yang berperan guna merealisasikan program-program CSR yang telah disepakati Badan Perencana dan itu terdiri dari:

a) Perusahaan

Swasta maupun BUMN atau BUMD yang diwakili oleh Tim Community Development, Tim PKBL atau Tim Khusus CSR.

b) Pemerintah

Diwakili oleh BAPPEDA dan Dinas terkait

c) Lembaga Pendidikan

Diwakili Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, yang khusus lagi diwakili oleh Lembaga Penelitian dan Pengkajian, Lembaga Partisipasi Pembangunan atau Lembaga untuk Kontribusi Masyarakat.

d) Kelompok Masyarakat

Gabungan antara LSM dan Organisasi Massa kredibel dan representatif di bidang.

3. Badan Pengendali CSR

Pelaksanaan CSR melibatkan dana jumlah yang besar, hubungan yang rumit antarmanusia dengan manusia yang termanifestasi ke dalam dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan serta keefektifan program, maka pelaksanaan CSR melalui program kemitraan antara Perusahaan, Pemerintah dan Lembaga Pendidikan membutuhkan Badan Pengendali

CSR. Dan Badan CSR tersebut wajib merangkum unsur-unsur di bawah berikut:

a) Perusahaan

Diwakili oleh Tim Khusus Monitoring dan Evaluation (MonEv).

b) Unsur Pemerintah

Diwakili oleh Tim Khusus dari Bawasda, BPK, dan BPKP.

c) Unsur Lemabaga Pendidikan yang diwakili oleh Perguruan Tinggi
Lebih khususnya oleh tim Khusus Monitoring dan Evaluation (MonEv).

d) Unsur Masyarakat

Direpresentasikan oleh Tim Khusus Pengawas, Pengamat, Peninjau dari gabungan LSM dan ORMAS yang berintegritas.

e) Kantor Akuntan Publik (KAP)

Lembaga Konsultan Independen

Dengan memahami elaborasi utama dari permodelan tersebut, juga bisa dipahami elaborasi yang lebih tajam dari permodelan tersebut yang berupa strategi “Tanggung Jawab dan Reward Melalui Pola Kemitraan.”

Berikut ini adalah elaborasinya:

a) Bagi Perusahaan

Kegiatan CSR, perusahaan di Indonesia dapat dikategorikan kepada dua kelompok. Pertama, kelompok yang melaksanakan kegiatan CSR secara sukarela, karena undang-undang tidak mewajibkannya. Kedua, kelompok perusahaan yang melaksanakan CSR karena undang-undang mewajibkannya. Kedua kelompok perusahaan dengan pendekatan dasar hukum yang berbeda ini memiliki harapan yang sama, yakni pelaksanaan CSR dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan, baik secara finansial maupun non finansial dalam jangka panjang.

Reward yang diperoleh perusahaan sebagai dampak dari pola kemitraan CSR, antara lain: program lebih tepat sasaran dan lebih terorganisasi di dalam pelaksanaannya. Merk produk perusahaan akan semakin diapresiasi oleh para pelanggan terutama dalam pembentukan loyalitas terhadap merk tersebut. Pada gilirannya perusahaan mendapatkan reputasi yang diharapkan.

Secara strategik perusahaan dapat mempertahankan, bahkan bisa meningkatkan pangsa pikiran, pangsa pasar, dan pangsa hati melebihi dari yang ditargetkan. Perusahaan akan diuntungkan juga dalam hal mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas. LSM dan lembaga-lembaga riset serta pemerintah akan memberikan penghargaan atas prestasi perusahaan di bidang aktivitas CSR. Reputasi dan kinerja keuangan dari perusahaan yang bagus akan memudahkan menarik calon-calon investor baru. Investasikan di program CSR dengan membidik segmen yang belum digarap akan menjadi suatu terobosan dalam pengembangan bisnis keberlanjutan.

b) Bagi Pemerintah

Pelaksanaan tanggung jawab social oleh pemerintah memiliki landasan konstitusional, yang mengacu pada preambule dan pasal UUD 1945. Kepedulian Pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum telah dilaksanakan seperti program Jaringan Pengaman Sosial (JPS), pemberian bantuan raskin, askeskin, subsidi bahan bakar bantuan penanggulangan korban bencana alam serta berbagai aktivitas lainnya.

Pemerintah melaksanakan JPS, yaitu memberikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang tidak mampu sehubungan dengan pemerintah menaikkan BBM dalam upaya menghindari defisit APBN yang semakin besar. Sayangnya program

BLT ini efektif dilaksanakan dalam keadaan darurat yang bersifat jangka pendek, dan tidak untuk jangka panjang. Apabila dilaksanakan untuk permanen kurang bersifat mendidik.

Selain program social yang dilaksanakan oleh berbagai departemen teknis, Pemerintah juga mewajibkan BUMN menyisihkan laba yang mereka peroleh untuk digunakan dalam kegiatan Program Kegiatan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan tujuan memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan multiplier effect dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh UMKM. Di samping itu UU Perseroan Terbatas 74, baru mewajibkan pelaksanaan CSR untuk perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam saja. Di satu sisi pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan public untuk masalah sosial-ekonomi. Di sisi lain Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk mengatasinya. Penanggulangan berbagai masalah ekonomi oleh pemerintah yang melibatkan perusahaan dan lembaga pendidikan masih bersifat sporadic dan tidak memiliki pola yang baku.

Melalui kemitraan yang dibakukan Badan taskforce menjadi mediator bagi pemerintah dengan pihak lain. Badan tersebut mengintegresakan semua kegiatan seperti: negosiasi dan membuat komitmen untuk kerjasama internasional, menyiapkan kerangka kerja legal atau regulasi yang mengatur dan mengendalikan semua sektor berkenaan dengan kebijakan CSR dalam lingkungan kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional. Pola ini akan menjadi suatu jalan keluar sebagai reward yang meringankan beban program pemerintah dalam mengatasi persoalan pengangguran dari calon sarjana dan kemiskinan masyarakat lainnya. Dengan cara ini, Pemerintah dapat menghambat mobilitas tenaga kerja Indonesia secara illegal dan tidak mempunyai

keahlian khusus terutama masyarakat miskin untuk mencari kerja ke luar negeri yang sering dilecehkan.

c) Bagi Lembaga Pendidikan

Perguruan tinggi dapat mewakili lembaga pendidikan formal dan informal untuk menjalin kemitraan dengan Pemerintah dan perusahaan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan penelitian, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi siap saja yang dianggap sebagai pemangku kepentingan kunci bagi perusahaan, pemerintah, dan perguruan tinggi. Penelitian tersebut juga akan mampu mengungkap berbagai masalah social yang dianggap penting dan diharapkan oleh pemangku kepentingan kunci. Ketiga unsur ini harus membentuk kolaborasi yang terbuka dan saling memberikan nilai tambah, sehingga di tataran teknis akan menghasilkan kreasi CSR yang komprehensif dan berfungsi di semua kalangan.

Perguruan tinggi yang mewakili lembaga pendidikan akan mampu mengoptimalkan perannya sebagai bagian dari solusi terhadap kemiskinan dan pengangguran. Misalnya memberikan peluang studi bagi calon-calon mahasiswa yang potensial tetapi kurang mampu. Reward yang diperoleh perguruan tinggi antara lain akan meningkatkan citra dan reputasi positif dari para pemangku kepentingan. Perguruan tinggi lebih mudah memanfaatkan peluang untuk menarik dan hibah atau pinjaman lunak dari lembaga-lembaga luar negeri yang bertujuan untuk penguatan SDM dan infrastruktur kampus.

Perguruan tinggi tidak hanya sebagai menara gading saja, tetapi akan dilirik oleh perusahaan sebagai tempat strategis dalam pelaksanaan riset dan pengembangan. Konsekuensi yang diharapkan, dukungan dana dapat bergulir secara produktif sesuai dengan peringkat

kepentingannya. Badan taskforce mengkoordinasi dan memainkan peranan stratejik untuk kepentingan perusahaan dan lembaga pendidikan, juga tidak terkecuali untuk kepentingan pemerintah sesuai dengan jenjang pemerintahan. Melalui pemanfaatan badan tersebut perusahaan, lembaga pendidikan, dan pemerintah dapat berkompetisi di level local, nasional, regional, bahkan global.

6.2 Contoh Pola Kemitraan antara Perusahaan, Pemerintah, dan Lembaga Pendidikan bagi Pengembangan dan Berkelanjutan Bisnis

Sebelum kita mengambil contoh berharga dari *Microsoft* menyangkut gagasan pola kemitraan antara perusahaan, pemerintah, dan pendidikan, ada baiknya kita mulai dengan pertanyaan krusial, yakni inisiatif dari pihak mana yang muncul terlebih dahulu untuk memulai kemitraan besar ini supaya seiring seirama bisa bekerja sama.

- d) Inisiatif pertama: gagasan bisa dimulai dari perusahaan yang menawarkan kemitraan kepada pemerintah dan lembaga pendidikan.
- e) Inisiatif kedua: gagasan dimulai dari lembaga pendidikan tinggi yang diwakili oleh perguruan tinggi untuk menawarkan kemitraan kepada perusahaan dan pemerintah.
- f) Inisiatif ketiga: lembaga pendidikan bahkan pemerintah mengajak perusahaan yang sudah berhasil melakukan CSR, untuk bermitra sesuai dengan pola yang digagas dalam Bab7 ini.

Setelah kita paham ternyata ada tiga inisiatif yang bisa saling memicu satu sama lain dan *Microsoft* telah mengambil perannya dalam bentuk inisiatif pertama yang bias ditiru oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Berdasarkan *Citizenship Report* tahun 2006, *Microsoft* memiliki tiga bentuk *Global Citizenship Initiative*, yaitu:

1. Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Penggunaan Internet

Program citizenship yang termasuk ke dalam kategori ini terutama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan internet, berikut berbagai bentuk edukasi yang dilakukan oleh Microsoft untuk meningkatkan perlindungan terhadap PC yang dimiliki oleh suatu komunitas pada saat mereka melakukan komunikasi secara online melalui internet.

Untuk melaksanakan edukasi tersebut, Microsoft bekerjasama dengan pemerintah terutama lembaga-lembaga yang membuat undang-undang mengenai teknologi informasi, kalangan perguruan tinggi yang akan mengembangkan kurikulum bermuatan lokal sesuai dengan kebutuhan komunitas suatu Negara dan organisasi nirlaba yang akan menjadi mitra Microsoft dalam menjalankan berbagai program corporate citizenship dalam kategori ini. Sebagai contoh Microsoft bekerjasama dengan kepolisian Kanada dan organisasi nirlaba di Kanada meluncurkan program *Child Exploitation Tracking System (CETS)*, sebuah software yang inovatif serta dapat membantu melindungi anak-anak dan mengurangi eksploitasi anak secara online.

2. Memajukan Knowledge Economy

Menyadari bahwa pengetahuan (*knowledge*) merupakan “mata uang” yang sangat berharga saat ini dan teknologi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mentransfer, berbagi dan menerapkan pengetahuan tersebut, maka Microsoft bekerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi dan NGO di seluruh dunia membenahi menyediakan akses teknologi dan melatih kemampuan orang dari berbagai penjuru dunia agar dapat meningkatkan kapasitas pelayanan yang mereka miliki saat ini melalui penggunaan teknologi komputer.

Salah satu program yang diluncurkan oleh Microsoft untuk meningkatkan akses komunitas terhadap teknologi informasi dan mengembangkan kemampuan komunitas dalam aplikasi teknologi informasi adalah melalui program Microsoft Unlimited Potential (UP) dan Partner in Learning. Saat ini Microsoft sudah bekerjasama dengan 100 pemerintahan di dunia berikut kalangan perguruan tinggi dan NGO untuk menjalankan program tersebut. Melalui program UP, Microsoft telah melatih lebih dari 20 juta orang didunia. Sedangkan program partner in Learning telah melatih 24 juta guru dan mahasiswa di seluruh dunia untuk mengajar keterampilan teknologi informasi kepada lebih dari 134 juta penduduk di dunia.

3. Melaksanakan Praktik Bisnis yang Bertanggung Jawab (*Responsible Business Practice*)

Microsoft melaksanakan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, baik dalam bentuk kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku di masing Negara di mana Microsoft beroperasi, membantu industry local mencapai standar industry Microsoft, menghasilkan produk yang ramah lingkungan, dan memastikan bahwa produk perusahaan dapat dioperasikan dengan baik untuk produk perusahaan lain termasuk pesaing.

Salah satu program yang diluncurkan oleh Microsoft dalam kategori praktik bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business practice*) adalah pemberian insentif kepada para innovator di seluruh dunia untuk mengembangkan software yang akan digunakan oleh Microsoft dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*).

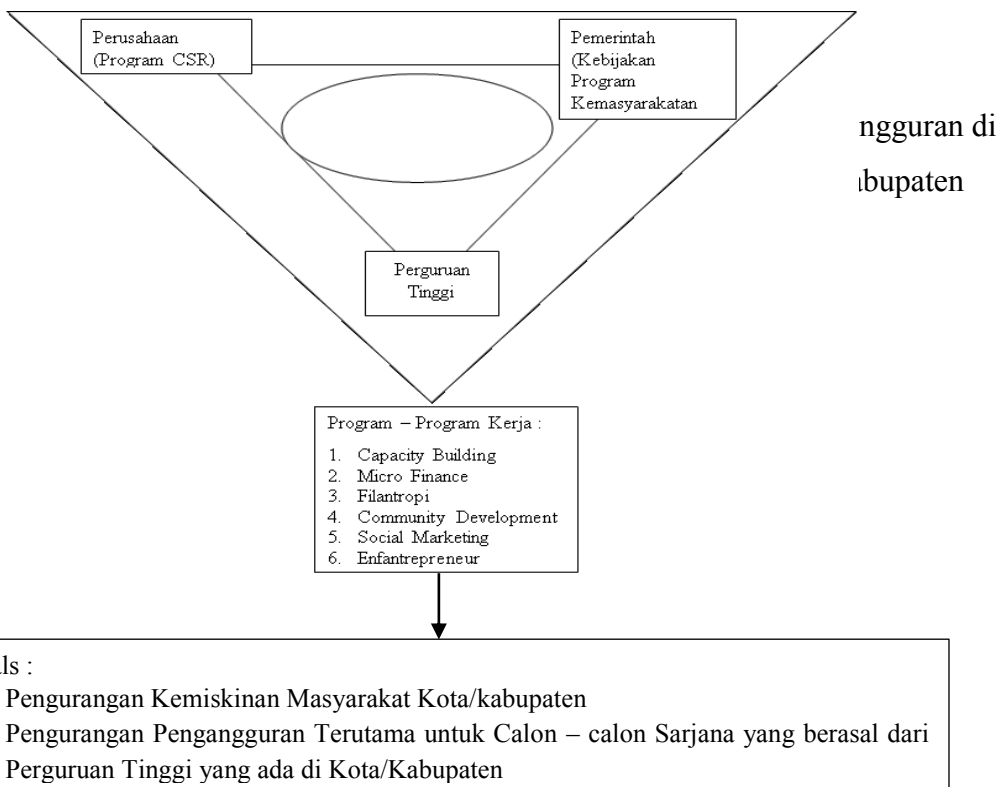
Sistem insentif ini telah memberikan kontribusi yang dramatic dalam pertumbuhan teknologi informasi dalam kurun waktu dua puluh

tahun terakhir, di mana yang didalamnya melibatkan lebih dari 11 juta tenaga berketerampilan tinggi di seluruh dunia, menibgkatkan kompensasi yang diterima oleh para ahli teknologi informasi serta menambah kemakmuran penduduk dunia sebesar kurang lebih \$ 1,7 trilyun per tahun.

6.3 Manggagas Program CSR Melalui Pola Kemitraan antara Perusahaan, Pemerintah, dan Lembaga Pendidikan untuk Masyarakat Kota/Kabupaten

Gambar 7.2

Skema Program CSR Melalui Pola Kmeitraan antara Perusahaan, Pemerintah, dan Lembaga Pendidikan bagi Pengurangan Kemiskinan dan



Skema di atas terlibat dalam pola mempunyai kompetensi yang bisa saling berkolaborasi. Perusahaan sebagai entitas bisnis ada suatu infrastruktur bisnis dan keuntungan bisnis di sana dalam artian infrastruktur dan keuntungan itu bisa ditransfer untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk program CSR yang tepat sasaran. Kemudian ada pemerintahan yang berperan untuk penyediaan kebijakan yang win solution bagi pola kemitraan ini. Selanjutnya pemerintah juga mempunyai program kemasyarakatan yang bisa disinergikan dengan program CSR perusahaan. Selain itu pemerintah memegang kunci dalam mengatur APBD yang sangat berguna untuk pelaksanaan program kerja.

Terakhir adalah Lembaga Pendidikan yang diwakili oleh perguruan tinggi yang jelas mempunyai sumber daya yang sangat luar biasa seperti ide inovatif, perangkat pengetahuan, dan metode penelitian yang bisa dikontribusikan untuk kepentingan masyarakat. Bila pola kemitraan ini jalan secara terpadu, terintegrasi dan bermuatan demi kepentingan masyarakat, efeknya bisa sangat luar biasa untuk pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran terutama untuk calon sarjana yang berasal dari perguruan tinggi yang ada di kota/kabupaten. Program CSR untuk Pengurangan Kemiskinan Masyarakat Kota/Kabupaten kemiskinan menurut rumusan BPS sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kemiskinan yang menjadi perhatian dalam program CSR ini adalah kemiskinan yang dialami oleh keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Untuk mengatasi kemiskinan, maka dapat dikembangkan program CSR kombinasi antara program micro finance, program capacity building, program filantropi stratejik dan community development dalam bentuk Program Daerah Binaan. Program ini tentu saja melibatkan semua pihak yang terlibat di pola kemitraan dengan tingkat partisipasi yang telah diatur dan

disesuaikan dengan program yang rinci. Penentuan Daerah Binaan didasarkan pada hasil keputusan Badan Perencana CSR. Bila Daerah Binaan sudah ditentukan, kepada Daerah Binaan tersebut diberikan paket program CSR yang meliputi : program micro financing perorangan, program micro financing kelompok, program pelathan pengusaha mandiri, program pemberian beasiswa dan program penguatan infrastrustur bisnis komunitas. Deskripsi dari program adalah sebagai berikut :

1. Program Micro Financing Perorangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang memiliki keahlian berusaha tetapi memiliki keterbatasan modal. Dengan cara memberikan bantuan dan akses modal dari suatu bank yang telah berkomitmen di pola kemitraan tanpa agunan tetapi dibebani bunga setelah masa grace period berakhir. Sebagai contoh apabila pinjaman modal berjangka waktu 3 tahun maka selama 1 tahun akan mendapatkan insentif bebas bunga dan 2 tahun berikutnya tetap dikenakan bunga yang tentu tarifnya lebih rendah dari tarif bunga yang berlaku. Selain memberikan bantuan dan akses modal, juga diberikan pelatihan singkat manajemen taktis operasional yang relevan dengan kebutuhan usaha masing – masing agar pinjaman dana lebih efektif bagi usaha berkesinambungan.

2. Program Micro Financing Kelompok

Program ini bertujuan meningkatkan pendapatan pengusaha di sektor riil dan jasa secara kelompok dalam bisnis yang homogen dengan cara memberikan bantuan dan akses modal yang berasal dari bank sebagai unsur yang terlibat didalam pola kemitraan kepada kelompok usaha dalam satu komunitas. Pengembalian pinjaman modalnya dilakukan secara tanggung renteng oleh kelompok usaha tersebut, sehingga dana pinjaman tersebut benar digunakan untuk usaha produktif.

3. Program Pelatihan Pengusaha Mandiri

Program ini bertujuan melatih masyarakat menjadi calon pengusaha dimana usaha yang akan mereka jalankan memiliki keterkaitan dengan bisnis perusahaan sponsor CSR. Misalnya, melalui dana PKBL, Telkom sudah melaksanakan pelatihan kepada masyarakat di daerah binaan untuk menjalankan usaha warung internet yang akan menggunakan provider internet dari PT Telkom. Kemitraan ini pada umumnya telah memberikan keuntungan, baik finansial maupun non finansial bagi kedua belah pihak.

4. Program Pemberian Beasiswa

Program ini bertujuan memberikan beasiswa kepada anak yang mempunyai potensi, tetapi tidak mampu melanjutkan yang akan memperbesar akses penerima beasiswa untuk bekerja di sektor formal. Beasiswa yang diberikan tidak sebatas beasiswa untuk pendidikan dasar dan menengah, melainkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

5. Program Penguatan Infrastruktur Bisnis Komunitas

Program ini bertujuan untuk membantu peningkatan sarana dan prasarana bisnis di suatu daerah binaan. Maksudnya adalah melalui skema yang telah ditelaah, maka suatu komunitas mendapat dana hibah berupa alat produksi seperti mesin baru, penambahan fasilitas tempat produksi yang lainnya. Sebagai ilustrasi, di daerah binaan tersebut komunitasnya mempunyai bisnis sablonan dan dikelola dengan manajemen yang cukup baik tetapi tidak kuat menambah volume produksi oleh karena kapasitas mesin produksi yang terbatas dan sudah tua, maka diperlukan mesin baru yang berasal dari program ini.

6. Program Filantropi Strategik

Selain program di atas dapat juga dijalankan suatu mekanisme program CSR secara spontanitas tetapi strategik. Dengan melibatkan lembaga

filantropi setempat baik itu dari rumah zakat, Badan Amal Agama lainnya maupun Badan Filantropi yang didirikan oleh tokoh masyarakat lokal. Contohnya lembaga filantropi ini bisa mengambil SD inpres binaan di daerahnya sendiri. Programnya adalah perbaikan gedung sekolah yang sudah rusak dan kesejahteraan guru. Mekanisme perbaikan gedung – gedung sekolah yang rusak ini bisa melalui dana CSR perusahaan yang berbentuk hibah seterusnya dieksekusi oleh lembaga filantropi ini. Dengan demikian membantu para siswa mendapatkan sarana yang baik untuk proses belajar mengajar.

6.4 Pengurangan Pengangguran Terutama Calon Sarjana berasal dari Perguruan Tinggi di Kota/Kabupaten

Untuk calon sarjana ini diperlukan program kombinasi antara program yang berbentuk capacity building, micro finance, filantropi, dan infantpreneur. Berikut ini program yang diharapkan strategis serta jitu untuk direalisasikan:

1. Program CSR Infantpreneur

Menyampaikan lapangan kerja sebagai dampak krisis ekonomi telah meningkatkan jumlah pengangguran, termasuk pengangguran yang berasal dari lulusan baru perguruan tinggi (fresh graduate) baik dari jenjang D3 maupun S1. Sebagai strategi untuk mengurangi pengangguran dari kalangan mahasiswa D3 dan S1, perusahaan, pemerintah dan perguruan tinggi dapat bekerjasama menerapkan program csr infantpreneur.

Program CSR Infantpreneur diawali dari pengajuan rencana bisnis (business plan) yang dibuat oleh mahasiswa secara individu maupun kelompok. Dari hasil seleksi rencana bisnis, selanjutnya ditentukan rencana bisnis yang paling layak didanai pelaksanaannya oleh perusahaan

(dalam hal ini PT Telkom dan Bank Jabar melalui penyaluran dana PKBL) atau Pemerintah Kota/Kabupaten. Keberhasilan mahasiswa untuk menjalankan rencana usaha menjadi suatu usaha yang riil, akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi mahasiswa tersebut dan juga anggota masyarakat lainnya.

2. Program CSR untuk Anak Muda Berbakat dan Berpotensi Tinggi

Sekali lagi dunia kerja untuk saat ini tidak cukup untuk menampung jumlah calon – calon tenaga kerja dan kalangan sarjana. Yang harus dilakukan adalah menciptakan program yang menghidupkan jiwa-jiwa kreatif pada diri anak muda, serta memicu potensi mereka guna menumbuhkan semangat berusaha yang mengarah kepada produktivitas yang menghasilkan. Selanjutnya mampu memberikan efek multiplier bagi perekonomian masyarakat kota/kabupaten. Ada tiga potensi besar yang bisa digarap oleh program CSR ini, yakni industri kreatif, dan information Communication and Technology (ICT) serta industri kuliner.

Pemuda yang bisa digarap melalui program CSR ini adalah mereka yang berasal dari semua perguruan tinggi yang ada di kota/kabupaten. Dengan melakukan identifikasi ke kampus-kampus, mereka diajak untuk bergabung dalam suatu komunitas bisnis di mana di dalam komunitas tersebut terdapat anak muda yang mempunyai keahlian yang berbeda sesuai dengan bidangnya.

Selanjutnya komunitas bisnis ini akan dibentuk untuk memasuki di antara ketiga industri yang ditawarkan. Kemudian mereka akan difasilitasi oleh perusahaan, pemerintah dan perguruan tinggi dalam hal dana, strategi, infrastruktur serta kebijakan yang mendukung agar mereka bisa jalan serta menghasilkan secara bisnis dan mampu membuka lapangan kerja kelak ketika mereka sudah mandiri.

3. Program Perekrutan Tenaga Kerja Satu Atap

Program ini juga telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota/Kabupaten, atau oleh perusahaan itu sendiri atau oleh perguruan tinggi. Tetapi efeknya belum optimal. Dalam artian apabila dibentuk suatu konsep yang melibatkan pola kemitraan antara perusahaan, pemerintah dan perguruan tinggi maka ketiga unsur tersebut akan saling bahu-membahu dan terletak di dalam satu atap guna menarik calon-calon tenaga kerja dari calon sarjana yang berkualitas.

Program ini kombinasi pelatihan magang bursa kerja rutin, dan perekrutan melalui informasi yang mudah diakses sangat bermanfaat sekali bagi calon – calon sarjana yang ingin bekerja. Selama ini ketiga unsur tersebut bekerja secara terpisah atau bekerjasama hanya dalam jangka waktu pendek. Dengan pola kemitraan ini perusahaan, pemerintah dan perguruan tinggi akan saling sinerjik, optimal serta berjangka waktu panjang dalam mebgurangi tingkat pengangguran yang berasal dari calon sarjana.

Bab 7

Pembangunan Bekelanjutan Dan Keberlanjutan

Tujuan Pembelajaran

1. Untuk mengetahui berkelanjutan program CSR
2. Untuk mengetahui keberlanjutan CSR
3. Untuk mengetahui proses pembuatan kebijakan berkelanjutan
4. Untuk memahami pedoman keberlanjutan

7.1 Pendahuluan

Diskusi tentang pentingnya perusahaan mempunyai tanggungjawab sosial telah terjadi pada tahun 1930-an di Amerika Serikat saat itulah istilah CSR lahir. Namun perwakilan kebangkitan CSR modern selalu merujuk pada Brown (1953) yang menulis buku tentang “*Social Responsibility og the Business Man*” seperti yang dikemukakan oleh Caroll (1999). Dewasa ini pemikiran tentang CSR telah berkembang dari filantropi ke investasi sosial, bahkan telah bergerak pada upaya mewujudkan pasar inklusi yang merupakan strategi bisnis bagi kaum miskin.

Di Indonesia sendiri praktek CSR sebenarnya telah dimulai pada awal 1990-an melalui program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), dan semakin banyak dibicarakan oleh kalangan korporasi sejak diterbitkannya UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan yang bergerak di bidang dan atau berkiatan dengan pengelolaan sumberdaya alam. Seiring dengan itu, CSR semakin ramai diperbincangkan baik oleh kalangan korporasi, birokrasi dan kelompok masyarakat. Tetapi, hingga kini, pemahaman dan praktik CSR masih belum ada kesamaan.

Meskipun demikian, satu hal yang patut disyukuri adalah kesadaran tentang pentingnya CSR terus berkembang, utamanya sejak Indonesia turut meratifikasi ISO 26000 tentang Panduan Tanggungjawab Sosial (*Guidance for social Responsibility*), yang secara resmi baru diliri pada tanggal 1 November 2010. Sejalan dengan itu, diskusi dan tulisan tentang CSR semakin banyak dijumpai. Bahkwan, sejak Kementerian sosial memprakarsai terbentuknya Forum CSR Kesejahteraan Sosial pada tahun 2012, hingga kini semakin banyak dibentuk Forum serupa di beberapa provinsi dan Kabupaten maupun kota.

7.2 Pembangunan Berkelanjutan

Seperti yang dituangkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsep pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan itu, pertama kali dipublikasikan oleh *the World Conservation Strategy* (WCS) pada tahun 1980 di Gland, Swiss dan menjadi pusat pemikiran untuk pembangunan dan lingkungan pada WCS tersebut, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai:

“maintenance of essential ecological processes and life support systems, the preservation of genetic diversity, and the sustainable utilization of species and ecosystems”.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini kemudian dipopulerkan melalui laporan komisi Bruntland (1987) dari *World Commission on Environment and Development* (WCED) yang berjudul *“Our Common*

Future” (Hari Depan Kita Bersama). Laporan ini mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai: Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam konsep tersebut terkandung dua generasi penting, **Pertama**, gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. **Kedua**, gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.

Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Seiring dengan itu, banyak laporan PBB yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. Sedangkan elkington mengemas CSR ke dalam *profit, planet, and people* (3P). perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam proses pembangunan berkelanjutan terdapat proses perubahan yang terencana yang di dalamnya terdapat eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, perubahan kelembagaan yang kesemuanya ini dalam keadaan yang selaras, serta meningkatkan potensi

masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu lingkungan, tetapi lebih luas dari itu yang mencakup tiga lingkup kebijakan yaitu ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan yang selanjutnya disebut dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Dokumen PBB, terutama dokumen yang menyatakan bahwa ketiga pilar tersebut saling terkait dan pilat pendorong bagi pembangunan berkelanjutan (Summit, 2005). Idealnya, ketiga hal tersebut dalam perjalanan Bersama-sama dan menjadi fokus pendorong dalam pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dalam bunga rampai pembangunan Kota Indonesia Abad 21 pada era sebelum pembangunan berkelanjutan digaungkan pertumbuhan ekonomi yang merupakan satu-satunya tujuan dilaksanakan suatu pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek lain (Sarosa, 2005). Selanjutnya pada era pembangunan berkelanjutan saat ini, ada tiga tahapan yang dilakui oleh setiap Negara. Pada setiap tahap mempunyai tujuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi namun dengan dasar pertimbangan aspek-aspek yang semakin komprehensif dalam setiap tahapan. Tahap pertama dasar pertimbangan hanya pada keseimbangan ekologi. Tahap kedua dasar pertimbangan harus telah memasukkan pula aspek keadilan sosial. Tahap ketiga, semestinya dasar pertimbangan dalam pembangunan mencakup pula aspek aspirasi politis dan sosial budaya dari masyarakat setempat. Tabel 7.1 dibawah ini merupakan tahapan evolusi konsep pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut:

Tabel 7.1

Tahapan Dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan

<i>Pre Sustainable Development</i>	<i>Sustainable Development</i>		
	<i>Phase 1</i>	<i>Phase 2</i>	<i>Phase 3</i>
<i>Economic Development (Growth) As the main objective of development</i>	<i>Economic development and ecological Sustainability need to be reached and balanced-out in development</i>	<i>Economic development, and ecological sustainability Social justice need to be reached and balanced-out in development</i>	<i>Economic development and ecological sustainability Social justice and political participation and cultural vibrance need to be reached and balanced-out in development</i>

Sumber: Sarossa, 2005

Hakikat pembangunan berkelanjutan adalah seperangkat usaha yang terencana dan terarah untuk menghasilkan suatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan hdiup manusia. Sedangkan ciri pembangunan berkelanjutan sebagai berikut:

- 1) Menjamin pemerataan dan keadilan, yaitu generasi mendatang memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam sehingga berkelanjutan.
- 2) Menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati, spesies, habitat, dan ekosistem agar terciptanya keseimbangan lingkungan.
- 3) Menggunakan pendekatan integrative sehingga terjadi keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan untuk masa kini dan mendatang.

- 4) Menggunakan pandangan jangka Panjang untuk merencanakan rancangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang mendukung pembangunan.
- 5) Memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang dan mengaitkan bahwa pembangunan ekonomi harus seimbang dengan konservasi lingkungan.

7.2.1 Pentingnya Paradigma Baru Pembangunan

Kebutuhan untuk paradigma baru pembangunan secara luas diakui oleh pertengahan 1980 yang menyatakan bahwa selama dua dasawarsa terakhir telah terjadi kegagalan pembangunan, utamanya dalam ketidakmampuan untuk menghentikan lingkaran kemiskinan, kombinasi utang yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi tingkat penderitaan manusia.

Dewasa ini, dasar filosofis gerakan tersebut dapat ditelusuri dengan gerakan lingkungan dan sosial di seluruh dunia yang dimulai pada pertengahan dan akhir 1960-an, sebagian besar masih aktif. Setidaknya ada Sembilan dari gerakan ini yang usaha dan energinya terpisah, berkumpul di akhir 1980-an pada konferensi PBB di bulan Juni 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan, diantaranya:

- a) Gerakan ekologi dan lingkungan dari Eropa dan Amerika Utara.
- b) Gerakan anti perang dan anti nuklir Eropa dan Amerika Utama.
- c) Gerakan Order Dunia.
- d) Gerakan model dinamika dunia
- e) Gerkan hijau di Eropa
- f) Gerakan ekonomi alternative
- g) Gerakan perempuan di Amerika Utara, dan Eropa
- h) Gerakan masyarakat adat di Amerika Latin, Asia, dan Pasifik.
- i) Gerkan hak asasi manusia di seluruh dunia.

7.2.2 Deminsi Pembangunan Berkelanjutan

Merskipun definisi komisi Brundland tentang pembangunan berkelanjutan cukup sederhana dan jelas tentang konsep itu sendiri agar komplek (Brow, 1991), President Institusi Pembangunan Penelitian di Boston University, misalnya membedakan adanya empat dimensi pembangunan berkelanjutan, diantaranya:

- 1) Berkelanjutan ekologi menyiratkan bahwa SDA tidak terbarukan dan tidak habis untuk perbaikan jangka pendek.
- 2) Keberlanjutan ekonomi menyiratkan bahwa perbaikan tidak tergantung pada sumberdaya yang tidak dapat dipelihara.
- 3) Keberlanjutan politik mensyaratkan perubahan yang konsisten tentang distribusi kekuasaan dalam masyarakat yang sedang berlangsung atau berkembang.
- 4) Keberlanjutan kultural harus didukung oleh perubahan yang konsisten dengan nilai-nilai, harapan, dan norma dalam masyarakat.

Gerakan pendorong pembangunan berkelanjutan merupakan gerakan yang bertujuan untuk memberikan motivasi untuk kalangan generasi penerus. Tabel 7.2 dibawah ini merupakan penjelasan masing-masing gerakan pendorong pembangunan, sebagai berikut:

Tabel 7.2.

Gerakan Pendorong Pembangunan Berkelanjutan

Gerakan	Tujuan Utama
Gerakan ekologi dan lingkungan	a) Meminta perhatian atas serangan besar-besaran yang terjadi terhadap lingkungan. b) Memperingatkan dampak pertumbuhan penduduk yang tidak dikendalikan. c) Memperingatkan efek pada manusia dan alam dari penggunaan pestisida dan herbisida yang tidak

	<p>dikendalikan.</p> <p>d)Membawa keseimbangan yang lebih besar dalam kebijakan ekonomi dan lingkungan.</p>
Gerakan anti perang dan anti nuklir	Diprakarsai di AS sebagai protes terhadap perang di Vietnam, pergerakan cepat menyebar pada konsekuensi menstabilkan kekuasaan dan sumber daya ketidakseimbangan antara negara kaya dan miskin.
Gerakan Order Dunia	Gerakan dipelopori oleh sejumlah relative kecil dari “Visioner” hukum internasional dan gerakan parlemen ini berusaha untuk mengembangkan strategi layak untuk meningkatkan kualitas tatanan dunia pada akhir abad.
Gerakan model dinamika dunia	Banyak kritik gerakan ini adalah diarahkan pada ketidakseimbangan politik dan ekonomi yang ada antara negara kaya dan miskin dengan kesenjangan sosial yang dihasilkan dan pertumbuhan tak terkendalik yang menimbulkan konsekuensi serius bagi dunia.
Gerakan hijau	Gerakan ini berusaha untuk mempromosikan kedua perdamaian dan kebijakan lingkungan yang sehat, biasanya dalam dunia yang bebas nuklir. Penekanan ditempatkan pada kebutuhan paradigma pembangunan baru yang lebih mencerminkan.
Gerakan ekonomi alternatif	Gerakan ini bertujuan untuk memberikan alternatif praktis untuk berlaku sistem ekonomi dan kebijakan yang mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek dengan biaya jangka Panjang terhadap lingkungan dan manusia. Prioritas ditugaskan untuk redistribusi bagian yang lebih adil di dunia. Sumber daya untuk negara miskin di komisi Brandt.
Gerakan	Terdiri dari gerakan di seluruh dunia yang berusaha untuk

perempuan	memperoleh bagi perempuan hak-hak dasar yang sama sosial, politik, ekonomi dan hukum seperti yang tersedia untuk laki-laki. Gerakan di selatan juga cenderung untuk merangkul isu lingkungan yang relevan dengan perempuan dan keprihatinan mereka.
Gerakan masyarakat adat	<ul style="list-style-type: none"> a) Mempertahakna atau mendapatkan kembali tanah dan sumberdaya yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat adat. b) Memperoleh peningkatan pengakuan dan perlindungan hukum. c) Meningkatkan sensitivitas yang lebih luas untuk bumi yang berpusat nilai, kepercayaan dan praktik yang berada di pusat kosmologi dan agama.
Gerakan hak asasi manusia	Gerakan ini cukup luas dan bekerja menuju sepenuhnya kemungkinan pelaksanaan dan perlindungan hak sipil dan kebebasan politik diartikulasikan di PBB deklarasi Universal HAM dan perjanjian internasional lainnya diundangkan.

Sumber: Brown, 1991

Pendekatan yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan menurut Brown (1999), harus mengoptimalkan penggunaan sumberdaya yang tersedia di tingkat local, mengurangi ketergantungan sumberdaya yang harus didatangkan dari luar, tidak mencari perbaikan yang terus menerus diinfuskan atau sumberdaya yang diperlakukan, dan melestarikan sumberdaya yang dibutuhkan untuk perbaikan dalam jangka Panjang. Selanjutnya pembangunan berkelanjutan harus memperhitungkan kebijakan dari lokalitas di mana upaya tersebut dimulai dari:

- 1) Kesatuan umat manusia dan kesatuan kehidupan di bumi dengan pengakuan khusus bahwa masa depan manusia dan planet ini terkait satu sama lain.
- 2) Minimalisasi kekerasan terutama penghapusan terorisme negara dan pengurangan kekerasan yang terkait dengan perjuangan berbagai kelompok untuk mengatasi kelangkaan sumber daya, ruang, pengaruh, atau prestise yang lebih kompleks dan sistem planet.
- 3) Pemeliharaan kualitas lingkungan termasuk pembentukan langit-langit dunia pada factor penting seperti peningkatan populasi penggunaan sumber daya dan pembuangan limbah.
- 4) Kepuasan standar kesejahteraan dunia minimum dengan perhatian khusus diberikan kepada penghapusan penderitaan masa melalui kepuasan minimal, kebutuhan sosial, dan material dasar orang di mana-mana.
- 5) Keunggulan martabat manusia dengan penekanan khusus pada pembentukan pribadi dan kebebasan kolektif, hak-hak pribadi, hati Nurani dan kelompok hak asasi, rekayasa budaya.
- 6) Retensi keragaman dan pluralism khususnya untuk memperkuat generasi yang ada dan untuk mempromosikan toleransi yang lebih besar dan moderasi dalam pandangan politik dan sosial.
- 7) Kebutuhan partisipasi sekolah terutama untuk menghindari penindasan yang berhubungan dengan pengecualian orang-orang dari tindakan dan proses yang berdampak langsung terhadap kuantitas dan kualitas hidup mereka.

7.2.3 Jenjang Praktik Pembangunan Berkelanjutan

Berikut ini adalah jenjang praktik pembangunan berkelanjutan yang sering dilaksanakan oleh perusahaan, dapat dilihat pada tabel 7.3 dibawah ini.

Tabel 7.3

Jenjang Praktik Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Sosial Berkelanjutan	Dampak dan proses terkait dengan jenjang praktik pembangunan sosial berkelanjutan.
Pemberdayaan Individu dan Kelompok	Proses penyadaran individu belajar memahami dan bertindak berdasarkan kontradiksi dalam struktur sosial, politik dan ekonomi intrinsic untuk semua masyarakat.
Resolusi Konflik	Upaya resolusi konflik diarahkan untuk mengurangi keluhan antara orang-orang atau kelompok, dan hubungan kekuasaan asimetris antara anggota kelompok yang lebih kuat dan kurang kuat.
Pembangunan Masyarakat	Melalui peningkatan partisipasi dan animasi sosial dari rakyat sebagai proses penyadaran masyarakat tentang potensi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang merespon lebih merata kepada kebutuhan sosial dan material dari populasi.
Pembangunan Kelembagaan	Proses memanusiakan Lembaga sosial yang ada dan pemasaran Lembaga baru yang merespon secara lebih efektif kebutuhan sosial baru muncul
Pembangunan Bangsa	Proses bekerja menuju integrasi insitusi sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara pada semua tangga organisasi politik.
Pembangunan Regional	Proses bekerja menuju integrasi ekonomi sosial, Lembaga suatu daerah, budaya di semua tingkat organisasi politik.
Pembangunan Dunia	Proses bekerja menuju pembentukan sistem baru sosial internasional, hubungan politik, ekonomi, dan ekologi

	dipandu oleh upaya untuk perdamaian dunia, peningkatan keadaan sosial, kepuasan universal untuk kebutuhan dasar manusia, dan untuk perlindungan planet rapuh ekosistem.
--	---

Sumber : Brown, 1999.

7.2.4 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip yang dikemukakan berikut ini, mengikuti prasyarat strategi yang efektif bagi pembangunan berkelanjutan dunia. Prinsip ini mencerminkan nilai yang berorientasi dan tujuan dari gerakan pembangunan berkelanjutan serta visinya. Prinsip tersebut juga menyarankan sifat tindakan local, nasional, dan internasional yang komprehensif diperlukan untuk membalikkan kerusakan sosial yang terjadi di banyak daerah pendekatan dunia, yaitu:

- 1) Upaya menuju pembentukan strategi pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia harus maju dengan pengakuan bahwa masalah yang paling mendasar yang dihadapi umat manusia pada dasarnya mencakup politik, sosial, dan moral di alam. Lebih khusus perumus strategi pengembangan dunia selanjutnya disebut *World Development Strategy* (WDS) dukung “Planet” yang dihadapi umat manusia, menhadapi masalah pasokan sumberdaya yang langka. Sebaliknya, bukti yang ada di dalam, sudah memiliki bahan dan teknologi sumberdaya yang dibutuhkan untuk membersihkan diri dari kemiskinan, kelaparan dan lain dalam bentuk “pembangunan yang salah” yang menelan terlalu banyak energi dari masyarakat dunia.
- 2) WDS harus menetapkan prioritas tertinggi untuk:
 - a) Kesatuan kemanusiaan dan kehidupan di bumi.
 - b) Meminimalkan kekerasan.

- c) Pemeliharaan kualitas lingkungan
 - d) Kepuasan standar kesejahteraan dunia minimum
 - e) Keutamaan martabat manusia
 - f) Retensi keragaman dan pluralism
 - g) Partisipasi universal
- 3) WDS harus mempromosikan tiga tujuan, yaitu:
 - 4) Sebuah penyempitan kesenjangan yang masih melebar dalam penguasaan antara negara terkaya dan termiskin di dunia harus menjadi tujuan jangka pendek WDS yang signifikan (Estes, 1988). Dalam mengejar tujuan ini, WDS harus mengartikulasikan tujuan yang bersifat komprehensif dan luas yang harus dapat dicapai dalam interval waktu yang wajar.
 - 5) Agar efektif WDS harus menyerukan perubahan yang signifikan dari sikap lokalistik dan cara berpikir ke arah pendekatan yang menempatkan peningkatan penekanan pada regionalism dan internasionalisme.
 - 6) WDS harus mendorong orang di mana untuk menerima tanggungjawab Bersama guna meningkatkan kesejahteraan orang lain dan dari planet serta ekosistem yang rapuh. Bencana lingkungan dan politik terkini di Somalia, Sudan, Bosnia Herzegovina, Filipinan, Kuwait, Irak, Kamboja, Rusia dan tempat lain yang membuat semua sistem sosial dan lingkungan kontemporer terlalu jelas sifatnya yang saling tergantung dan rapuh.

Pada wala abad baru negara relative kaya di dunia tidak mampu untuk mengabaikan kebutuhan mendesak dan menarik bagi sebagian besar manusia yang tinggal di negara berkembang. Untuk mencoba melakukannya, kita tidak hanya akan bangkrut secara moral tetapi akan mengancam keberlanjutan dari gaya hidup dan pola konsumsi negara-

negara yang sudah maju secara ekonomi yang sangat bergantung pada sumberdaya yang hanya dapat diperoleh dari negara-negara miskin.

- 7) WDS yang efektif akan memerlukan pelaksanaan reformasi lebih ceapt dan lebih lengkap, meliputi: sosial, politik, ekonomi dan ekologi yang diuraikan dalam “Agenda 21 dan Visioner” dari model pembangunan sosial dunia lainnya. Untuk itu, WDS minimal harus menekankan pada:
 - a) Kerjasama global bukan kompetisi
 - b) Brbagi pengakuan secara global daripada menyia-nyiakan
 - c) Subsidi internasional yang lebih mudah dan berkelanjutan yang lebih baik dan program bantuan pembangunan internasional untuk negara-negara miskin di dunia
 - d) Pendekatan regional untuk pembanguna sosial ekonomi yang melestarikan sumberdaya alam di planet yang terus berkurang dan melindungi ekosistem yang rapuh
- 8) Agar efektif, WDS harus menghormati kedaulatan nasional. Oleh karena itu, strategi yang ditetapkan harus:
 - a) Menekankan orang yang bekerja untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk satu sama lain dalam konteks sejarah, tradesi, dan tujuan nasional mereka sendiri
 - b) Negara haru memutuskan sendiri apa kebutuhan meraka dan bagaimana kepuasa terbaik harus dikejar untuk memenuhi terbaik harus dikejar kebutuhan tersebut.
 - c) Mendiefinisikan kembali peran masyarakat internasional vis-à-vis upaya negara berkembang dan wilayah dunia bahwa mitra pembangunan bukan pembuat keputusan yang bekerja berlandaskan pada apa yang dianggap miskin, kurang berkembang
- 9) Sistem lembaga internasional pemerintah dan kuasi-pemerintah yang ada dan organisasi perlu diperkuat sebagai bagian dari WDS yang

komprehensif. Namun, dasar hukum dari Lembaga-lembaga internasional, serta berbagai fungsi, peran dan tanggungjawab yang ditugaskan kepada mereka perlu dirombak secara signifikan dalam rangka untuk lebih mencerminkan realitas sosial, politik, ekonomi dan lingkungan yang ada pada awal abad baru

10) Lembaga internasional dan regional baru perlu dibuat sebagai bagian dari mesin WDS. Dalam dekade ini, misalnya, institusi global yang lebih efektif diperlukan untuk:

- a) Mempromosikan perdamaian dan kerjasama global
- b) Mempercepat kerjasama internasional bagi upaya pengendalian senjata permanen
- c) Mempromosikan, memantau dan mengendalikan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai
- d) Mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia internasional yang menjamin warga individu terhadap pemerintah yang menindas
- e) Mengelola ekonomi global terutama dalam kaitannya terhadap aliran pembangunan dan sumberdaya lainnya, antara negara kaya dan miskin di dunia
- f) Meningkatkan akses pada bagian dari semua bangsa dengan sumberdaya berlimpah berlimpah yang ada di bumi dan lautan
- g) Mengelola masalah yang terkait dengan pelestarian dan konservasi lingkungan fisik di dunia terutama elemen-elemen yang penting untuk kelangsungan hidup manusia dan kontinuitas di planet.

11) Seperti direkomendasikan oleh program pembangunan PBB dan badan internasional lain, Dewan Keamanan Pembangunan yang semakin diperkuat, atau badan dunia lainnya. Fungsi Dewan Keamanan Pembangunan harus mencakup:

- a) Perencanaan pembangunan untuk semua bangsa, bukan hanya orang-orang dari selatan.
- b) Pembentukan kerangka kebijakan global di semua bidang ekonomi dan sosial, termasuk untuk keamanan pangan, keamanan ekologi, pengembangan bantuan kemanusiaan, utang, stabilisasi harga komoditas, transfer teknologi, kontrol obat, isu-isu perempuan, isu-isu anak dan pembangunan manusia.
- c) Penyusunan anggaran pembangunan global yang berkaitan dengan aliran dari semua sumberdaya pembangunan.
- d) Menyediakan koordinasi kebijakan untuk kelancaran fungsi pembangunan internasional dan lembaga keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan keamanan pembangunan harus berupaya untuk mendorong partisipasi Bersama dan kerjasama di antara semua negara di dunia dalam kemitraan yang fokus pada peningkatan kecukupan penyediaan sosial, dan angka kemandirian dalam negara dan wilayah di dunia untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah. Selanjutnya mendorong swadaya dan saling membantu sebagai strategi utama untuk mempromosikan kerjasama intra dan inter-regional di antara negara berkembang, serta memajukan kreatifitas dan solusi fleksibel untuk urusan pembangunan sosial, sub-nasional, nasional, regional dan global.

- 12) WDS harus berisi berbagai mekanisme pendanaan yang fleksibel untuk memastikan implementasi yang penuh. Idealnya, dana untuk mendukung strategi akan dihasilkan dari sumber yang menanggung langsung tujuan yang lebih besar pada WDS, dan tujuan ini meliputi:
- a) Tabungan yang disadari oleh masing-masing negara sebagai akibat dari pengeluaran militer yang berkurang dan perlucutan senjata, yaitu perdamaian (UNDP, 1992).

- b) Pengadaan pajak global di berbagai kegiatan yang mengancam rapuhnya ekosistem bumi.

Menindak lanjuti publikasi *our common future* yang banyak upaya telah dilakukan untuk mengembangkan pedoman dan prinsip pembangunan berkelanjutan (Mitchell *et al*, 2003). Beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan pilihan dari Deklarasi Rio tahun 1992 yang di tuangkan oleh Mitchell sebagai Unced *The Rio Declaration on Environment and Development*:

- Prinsip 1 Manusia menjadi pusat perhatian dalam pembangunan berkelanjutan karena mereka hidup secara sehat dan produktif selaras dengan alam.
- Prinsip 2 Negara mempunyai hubungan dengan *the charter of the united nations* dan prinsip hukum internasional, hak penguasa untuk mengeksploitasi sumberdaya mereka yang sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan.
- Prinsip 3 Hak untuk melakukan pembangunan harus diisi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan yang sama dari generasi sekarang dan generasi akan datang.
- Prinsip 4 Dalam rangka pencapaian pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan seharusnya menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sebagai sebagian terpisah dari proses tersebut.
- Prinsip 5 Semua negara dan masyarakat harus bekerjasama memerangi kemiskinan yang merupakan hambatan mencapai pembangunan berkelanjutan.
- Prinsip 6 Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, neraga harus menurunkan atau mengurai pola konsumen dan produksi, serta

mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai.

- Prinsip 7 Negara harus memperkuat kapasitas yang dimiliki untuk pembangunan berlanjutan melalui peningkatan pemahaman secara keilmuan dengan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan meningkatkan pembangunan, adaptasi, ahli teknologi termasuk teknologi baru.
- Prinsip 8 Penanganan terbaik isu-isu lingkungan adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat yang tanggap terhadap lingkungan dari berbagai tingkatan. Di tingkat nasional, masing-masing individu harus mempunyai akses terhadap informasi tentang lingkungan, termasuk informasi tentang material dan kegiatan berbahaya dalam lingkungan masyarakat, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk tanggap dan partisipasi melalui pembuatan informasi yang dapat diketahui secara luas.
- Prinsip 9 Dalam rangka mempertahankan lingkungan, pendekatan pencegahan harus diterapkan secara menyeluruh oleh negara sesuai dengan kemampuan. Apabila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan penundaan pengukuran biaya untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan.
- Prinsip 10 Penilaian dampak lingkungan sebagai instrument nasional harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan yang mungkin mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan yang memerlukan keputusan di tingkat nasional.
- Prinsip 11 Wanita mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan

pembangunan lingkungan. Partisipasi penuh mereka perlu untuk mencapai pembangunan berlanjut.

Prinsip 12 Penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan karena pemahaman dan pengetahuan tradisional.

Prinsip 13 Negara harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya dan keinginan mereka serta menguatkan partisipasi mereka secara efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi etika lingkungan, pembangunan berkelanjutan lebih mengikuti pandangan ekosentrisme dan bukan pandangan *anthroposentrisme*. Menguraikan prinsip-prinsip etika lingkungan hidup yang jika dikaji lebih jauh juga memegang peranan penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan (Keraf, 2002). Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan hidup, sebagai berikut:

- a) Sikap hormat terhadap alam (*respect for nature*).
- b) Prinsip tanggungjawab (*moral responsibility form nature*).
- c) Solidaritas kosmis (*cosmic solidarity*).
- d) Prinsip kasih penulis dan kepedulian terhadap alam (*caring for nature*).
- e) Prinsip no harm.
- f) Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam
- g) Prinsip keadilan
- h) Prinsip demokrasi
- i) Prinsip integritas modal

7.2.5 Kendala Pembangunan Berkelanjutan

Pencapaian agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) masih terkendala. Hingga kini, peta jalan sebagai

strategi proyeksi hingga 2030 belum juga disusun. Akibatnya, kendala mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan angka dalam dukungan pemberdayaan terutama pada lingkungan. Irinonisnya realisasi pembangunan berkelanjutan tersebut justru semakin sulit untuk diwujudkan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Jalal Ramlan (Kompas.com) dalam pembukaan *Indonesia Social Investment Forum* (ISIP) yang mengatakan ketika *World Commission on Environment and Development* (WCED) merumuskan pembangunan berkelanjutan pada 1987, masalah dunia tidaklah serumit sekarang.

Saat ini belum ada yang namanya virus Ebola, perubahan iklim, atau cuaca ekstrim seperti saat ini. Kondisi ini terjadi akibat selalu menunda mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep pembangunan yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa depan. Selain semakin rumitnya tantangan, ego sektoral pun kerap menyulitkan realisasi pembangunan berkelanjutan. Tiga sektor untuk investasi sosial ini semua pihak baik pemerintah, perusahaan maupun masyarakat bisa bermitra untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Tumpang tindihnya program yang kerap berujung pada gagalnya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan itu bisa diminimalkan. Adapun kendala pembangunan berkelanjutan yang lain, diantaranya:

a) Pembangunan berkelanjutan dibatasi oleh yang dapat diakses

Kendala yang membatasi pembangunan masyarakat. Beberapa dapat dinegosiasikan untuk beberapa derajat, paling tidak dapat diubah. Pembangunan masyarakat, apa pun bentuknya, akan dibatasi ruang aksesibilitas yang tersisa. Namun, dalam ruang aksesibilitas ini, masih ada spectrum yang luas dari pilihan dan kemungkinan. Hal ini membuat

pilihan, dan memperkenalkan pilihan subyektif dan keputusan etis tidak dapat dihindari.

b) Keberlanjutan adalah sebuah konsep dinamis.

Masyarakat dan perubahan lingkungan mereka, teknologi dan perubahan budaya, nilai-nilai dan aspirasi perubahan, dan masyarakat yang berkelanjutan, harus memungkinkan dan mempertahankan perubahan tersebut, yaitu, harus membiarkan terus menerus, layak dan kuat, bagi pembangunan yang kita maksud dengan pembangunan berkelanjutan. Hasil adaptasi seperti hasil seleksi dari berbagai kemungkinan tidak dapat diramalkan. Meskipun faktor-faktor yang menghambat proses pembangunan dan proses mengemudi itu diketahui, jalan pembangunan berkelanjutan masih tidak bisa ditebak, debatable dari proses evolusi. Bentuk masyarakat harus mampu memungkinkan perubahan terus menerus agar berkelanjutan; itu tidak dapat direncanakan atau diperkirakan.

c) Kendala fisik dan hukum alam: Tidak semuanya mungkin

Hukum alam dan aturan logika dapat rusak. Ini berarti pembatasan yang tidak dapat dielakkan. Contoh pembatasan tersebut adalah kebutuhan gizi minimum untuk pertumbuhan tanaman, atau efisiensi energi.

1) Lingkungan fisik

Masyarakat manusia, berkembang di dalam, tergantung pada, dan merupakan bagian dari lingkungan global. Perkembangannya dibatasi oleh kondisi lingkungan global. Perkembangannya dibatasi oleh kondisi lingkungan global: ruang yang tersedia, kapasitas penyerapan limbah tanah, sungai, lautan, atmosfer, ketersediaan sumberdaya terbarukan dan tidak terbarukan, kesuburan tanah dan iklim. Beberapa keterbatasan negara (misalnya, jumlah sumberdaya), yang lain adalah keterbatasan tingkat (misalnya, tingkat maksimum penyerapan

limbah). Jalur pembangunan yang berkelanjutan harus mematuhi kendala.

2) Aliran energi surya, saham sumberdaya material

Hanya ada satu pasokan energi permanen di bumi, yaitu energi surya. Semua fosil yang tersedia saat ini dan jumlah sumberdaya nuklir untuk beberapa bulan insolation global, jika semua energi matahari mencapai bumi selama berbulan-bulan bisa ditangkap. Dalam pembangunan berkelanjutan, keterbatasan energi adalah energi matahari yang dapat ditangkap dan digunakan oleh tanaman dan teknologi. Semua sumber daya materi terbatas pada pasokan global saat ini. Mereka telah melekat di bumi ini selama sekitar empat miliar tahun. Daur ulang adalah, juga merupakan persyaratan penting dari keberlanjutan.

Daya dukung: Organisme dan ekosistem, termasuk manusia, memerlukan energi surya, baik secara langsung (tanaman), atau tidak langsung sebagai makanan dalam biomassa tanaman atau hewan. Tingkat konsumsi bergantung pada organisme dan gaya hidupnya. Dalam jangka panjang, hal ini dibatasi oleh produktivitas fotosintesis suatu daerah, yaitu, jumlah biomassa tanaman yang dapat diproduksi di sana per tahun, yang ditentukan oleh sumber daya (hara, air, cahaya) yang 'minimum' (Hukum Liebig, factor pembatas).

d) Kendala dari sifat manusia dan tujuan manusia: tidak semuanya diinginkan.

1) Aktor manusia

Manusia sadar diri, antisipatif, imajinatif, ini berarti bahwa mereka tidak dibatasi untuk bertindak sempit dengan cara didenda menurut aturan tetap perilaku. Mereka bisa menciptakan solusi-solusi baru, atau mereka mungkin bahkan tidak melihat yang jelas. Masyarakat yang lebih inovatif, memiliki populasi terdidik dan terlatih baik, dan

menyediakan lingkungan yang beragam dan terbuka-budaya, memiliki ruang akses yang lebih besar daripada yang lain.

2) Organisasi manusia, budaya, teknologi

Untuk masyarakat tertentu, dan dunia secara keseluruhan, ada organisasi manusia, budaya dan politik systems, tersedia dan kemungkinan teknologi dan sistem, dengan mereka implikasi untuk perilaku dan penerimaan berubah, selanjutnya akan mebatasi ruang aksesibilitas.

3) Peran etika dan nilai-nilai

Tidak semua yang tetap dapat diakses, akan ditolerir oleh standar etika, atau nilai-nilai perilaku atau budaya lain dan norma-norma masyarakat tertentu.

e) Kendala waktu: dinamika dan evolusi menentukan kecepatan dan arah

1) Peran waktu

Semua proses yang dinamis membutuhkan waktu. Sebagai contoh, struktur bangunan, atau memperkenalkan teknologi baru, atau membersihkan air di bagian tanah, atau memulihkan kesuburan tanah, atau menghentikan pertumbuhan penduduk, semua butuh waktu, pembatasan pada apa yang dapat dilakukan.

2) Peran evolusi

Pembanguna berkelanjutan menyiratkan konstanta evolusi, mengorganisir diri dan perubahan adaptif. Untuk ini seluas mungkin spectrum respon adaptif terhadap tantangan baru harus tersedia untuk potensi adopsi. Tapi ini berate bahwa keragaman proses dan fungsi merupakan salah satu prasyarat penting bagi keberlanjutan.

7.2.6 Kriteria dan Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Sekitar tahun 1982, UNEP menyelenggarakan sidang istimewa memperingati 10 tahun gerakan lingkungan dunia (1972-1982) di Nairobi,

Kenya, sebagai reaksi ketidakpuasan atas penanganan lingkungan selama ini. Dalam sidang istimewa tersebut disepakati pembentukan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development* - WCED). PBB memilih PM Norwegia Nyonya Harlem Brundtland dan mantan Menlu Sudan Mansyur Khaled, masing-masing menjadi Ketua dan Wakil Ketua WCED. Menurut Brundtland Report dari PBB (1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan ini kemudian dipopulerkan melalui laporan WCED berjudul “*Our Common Future*” (Hari Depan Kita Bersama) yang diterbitkan pada 1987. Laporan ini mendefinisikan Pembangunan Berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan penting.

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (Tiga Pilar Pembangunan berkelanjutan). Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil *World Summit 2005* menyebut ketiga pilar tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Idealnya, ketiga hal tersebut dapat berjalan bersama-sama dan menjadi focus pendorong dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam buku “Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia

dalam Abad 21” (Buku 1) Sarosa menyampaikan bahwa pada era sebelum pembangunan berkelanjutan digaungkan, pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya tujuan bagi dilaksanakannya suatu pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek lainnya.

Selanjutnya pada era pembangunan berkelanjutan saat ini ada 3 tahapan yang dilalui oleh setiap Negara. Pada setiap tahap, tujuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi namun dengan dasar pertimbangan aspek-aspek yang semakin komprehensif dalam tiap tahapannya. Tahap pertama dasar pertimbangannya hanya pada keseimbangan ekologi. Tahap kedua dasar pertimbangannya harus telah memasukkan pula aspek keadilan sosial. Tahap ketiga, semestinya dasar pertimbangan dalam pembangunan mencakup pula aspek aspirasi politis dan sosial budaya dari masyarakat setempat.

Berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, maka indikator pembangunan berkelanjutan tidak akan terlepas dari aspek-aspek tersebut diatas, yaitu aspek ekonomi, ekologi/lingkungan, sosial, politik, dan budaya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Djajadiningrat (2005) dalam buku *Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban bagi Anak Cucu*, Seputar Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat, menyatakan bahwa dalam pembangunan yang berkelanjutan terdapat aspek keberlanjutan yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a) Keberlanjutan Ekologis
- b) Keberlanjutan di Bidang Ekonomi
- c) Keberlanjutan Sosial dan Budaya
- d) Keberlanjutan Politik
- e) Keberlanjutan Pertahanan Keamanan

Prof. Otto Soemarwoto dalam Sutisna (2006), mengajukan enam tolok ukur pembangunan berkelanjutan secara sederhana yang dapat digunakan

baik untuk pemerintah pusat maupun di daerah untuk menilai keberhasilan seorang Kepala Pemerintahan dalam pelaksanaan proses pembangunan berkelanjutan. Keenam tolok ukur itu meliputi:

1) Tolok ukur pro lingkungan hidup (*pro-environment*)

Salah satunya adalah indeks kesesuaian, seperti misalnya nisbah luas hutan terhadap luas wilayah (semakin berkurang atau tidak), nisbah debit air sungai dalam musim hujan terhadap musim kemarau, kualitas udara, dan sebagainya. Berbagai bentuk pencemaran lingkungan dapat menjadi indikator yang mengukur keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan. Terkait dengan tolok ukur pro lingkungan ini, Syahputra (2007) mengajukan beberapa hal yang dapat menjadi rambu-rambu dalam pengelolaan lingkungan yang dapat dijadikan indikator, yaitu:

- a) Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan lokasi secara benar menurut kaidah ekologi.
- b) Pemanfaatan sumberdaya terbarukan (*renewable resources*) tidak boleh melebihi potensi lestarynya serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya tidak terbarukan.
- c) Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran.
- d) Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (*carrying capacity*).

2) Tolok ukur pro rakyat miskin (*pro-poor*)

Pro rakyat miskin dalam hal ini memberikan perhatian pada rakyat miskin yang memerlukan perhatian khusus karena tak terurus pendidikannya, berpenghasilan rendah, tingkat kesehatannya juga rendah serta tidak memiliki modal usaha sehingga daya saingnya juga rendah. Pro rakyat miskin dapat diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI)

dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* (HPI) dikembangkan oleh PBB. Kedua indikator ini harus dilakukan bersamaan sehingga dapat dijadikan tolok ukur pembangunan yang menentukan. Nilai HDI dan HPI yang meningkat akan dapat menunjukkan pembangunan yang pro rakyat miskin.

3) Tolok ukur pro kesetaraan jender/pro-perempuan (*pro-women*)

Tolok ukur ini dimaksudkan untuk lebih banyak membukakesempatan pada kaum perempuan untuk terlibat dalam arus utama pembangunan. Kesetaraan jender ini dapat diukur dengan menggunakan *Gender-related.Developmenta.Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measure*(GEM) untuk suatu daerah. Jika nilai GDI mendekati HDI, artinya di daerah tersebut hanya sedikit terjadi disparitas jender dan kaum perempuan telah semakin terlibat dalam proses pembangunan.

4) Tolok ukur pro pada kesempatan hidup atau kesempatan kerja (*pro-livelihood opportunities*)

Tolok ukur ini dapat diukur dengan menggunakan berbagai indikator seperti misalnya indikator demografi (angkatan kerja, jumlah penduduk yang bekerja, dan sebagainya), index gini, pendapatan perkapita, dan lain-lain. Indikator Kesejahteraan Masyarakat juga dapat menjadi salah satu hal dalam melihat dan menilai tolok ukur ini

5) Tolok ukur pro dengan bentuk negara kesatuan RI

6) Tolok ukur ini merupakan suatu keharusan, karena pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah untuk bangsa Indonesia yang berada dalam kesatuan NKRI.

7) Tolok ukur anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Dapat dilihat dari berbagai kasus yang dapat diselesaikan serta berbagai hal lain yang terkait dengan gerakan anti KKN yang digaungkan di daerah bersangkutan. Buah pemikiran pakar lingkungan ini sejalan

dengan buah pemikiran beberapa konseptor pembangunan berkelanjutan yang dirangkum oleh Gondokusumo (2005), dimana disebutkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk tercapainya proses pembangunan berkelanjutan (Tabel 1). Syarat-syarat tersebut secara umum terbagi dalam 3 indikator utama, yaitu:

- a) Pro Ekonomi Kesejahteraan, maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk kesejahteraan semua anggota masyarakat, dapat dicapai melalui teknologi inovatif yang berdampak minimum terhadap lingkungan.
- b) Pro Lingkungan Berkelanjutan, maksudnya etika lingkungan non antroposentris yang menjadi pedoman hidup masyarakat, sehingga mereka selalu mengupayakan kelestarian dan keseimbangan lingkungan, konservasi sumberdaya alam vital, dan mengutamakan peningkatan kualitas hidup non material.
- c) Pro Keadilan Sosial, maksudnya adalah keadilan dan kesetaraan akses terhadap sumberdaya alam dan pelayanan publik, menghargai diversitas budaya dan

Untuk suatu proses pembangunan berkelanjutan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut (Budimanta, 2005):

- 1) Cara berpikir yang integratif. Dalam konteks ini, pembangunan haruslah melihat keterkaitan fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial dan manusia di dalam merencanakan, mengorganisasikan maupun melaksanakan pembangunan tersebut.
- 2) Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Hingga saat ini yang banyak mendominasi pemikiran para pembuat keputusan dalam pembangunan adalah kerangka pikir jangka pendek, yang ingin cepat mendapatkan hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi ini sering kali membuat keputusan yang tidak

memperhitungkan akibat dan implikasi pada jangka panjang, seperti misalnya potensi kerusakan hutan yang telah mencapai 3,5 juta Ha/tahun, banjir yang semakin sering melanda dan dampaknya yang semakin luas, krisis energi (karena saat ini kita telah menjadi *nett* importir minyak tanpa pernah melakukan langkah diversifikasi yang maksimal ketika masih dalam kondisi surplus energi), transportasi yang tidak berkembang, kemiskinan yang sulit untuk diturunkan.

- 3) Mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa sumberdaya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang. Yang tak kalah pentingnya adalah juga pengakuan dan perawatan keanekaragaman budaya yang akan mendorong perlakuan yang merata terhadap berbagai tradisi masyarakat sehingga dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.
- 4) Distribusi keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya sumber daya lahan dan faktor produksi yang lain, lebih meratanya akses peran dan kesempatan kepada setiap warga masyarakat, serta lebih adilnya distribusi kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.

Terkait dengan kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan tersebut, *International Institute for Sustainable Development* (IISD) telah menyampaikan laporannya tentang beberapa ukuran berkelanjutan untuk wilayah kota kecil, kota provinsi, negara, dan global (Bossel, 1999). Di samping itu, ukuran pembangunan berkelanjutan juga dapat diukur berdasarkan kriteria, meliputi: individu, sistem sosial, administrasi sistem pemerintahan, sistem infrastruktur, sistem ekonomi, sistem sumber daya dan sistem lingkungan global. Adapun indikator yang digunakan meliputi: eksistensi, efektivitas, kebebasan bertindak, keamanan, kesesuaian, dan co-

eksistensi. Dipihak lain, Komisi Nasional Mekanisme Pembangunan Bersih (KNMKB) pada tanggal 4 Juli 2013 meliris kriteria dan indicator pembangunan berkelanjutan sebagai yang dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu: keberlanjutan lingkungan, ekonomi, sosial, dan teknologi.

Mengenai dampak lokal dari uslan proyek MPB, sehingga batas wilayah evaluasi adalah lokal. Lebih spesifik lagi, lingkup evaluasi untuk kategori kriteria berkelanjutan lingkungan adalah wilayah yang mengalami dampak ekologis langsung akibat uslan proyek. Sementara lingkup evaluasi untuk kategoero kriteria berkelanjutan ekonomi dan sosial adalah batas administrasi kabupaten. Bila dampak ekonomi dan sosial dirasakan lintas kabupaten yang terkena dampak. Berbeda dengan ketika kriteria lainnya, batas evaluasi dari berkelanjutan teknologi adalah di tingkat nasional.

a) Keberlanjutan Lingkungan

- 1) Kriteria keberlanjutan lingkungan dengan menerapkan konservasi atau diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam.
 - a) Terjaganya keberlanjutan fungsi ekologis
 - b) Tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan yang berlaku baik nasional maupun lokal yang tidak menimbulkan pencemaran udara, air, dan tanah.
 - c) Terjaga keanekaragaman hayati berupa genetik, spesies, dan ekosistem dan tidak terjadi pencemaran genetika.
 - d) Patuh terhadap peraturan tata guna lahan atau tata ruang.
- 2) Kriteria keselamatan dan kesehatan masyarakat lokas.
 - a) Tidak menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan.
 - b) Patuh terhadap peraturan kesehatan kerja

- c) Prosedur yang terdokumentasi yang menjelaskan usaha yang memadai untuk mencegah kecelakaan dan mengatasi bila terjadi kecelakaan.
- b) Keberlanjutan Ekonomi
 - 1) Tidak menurunkan pendapatan masyarakat lokal.
 - 2) Adanya kesempatan dari pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah PHK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3) Adanya upaya untuk mengatasi kemungkinan dampak penurunan pendapatan bagi sekelompok masyarakat.
 - 4) Tidak menurunkan kualitas pelayanan umum untuk masyarakat lokal.
- c) Keberlanjutan Sosial
 - 1) Partisipasi Masyarakat
 - a) Adanya proses konsultasi ke masyarakat local
 - b) Adanya tanggapan dan tindak lanjut terhadap komentar, keluhan masyarakat local.
 - 2) Proyek tidak merusak integritas sosial masyarakat indikator tidak menyebabkan konflik di tengah masyarakat lokal.
- d) Keberlanjutan Teknologi
 - 1) Tidak menimbulkan ketergantungan pada pihak asing dalam hal pengetahuan dan pengoperasian alat.
 - 2) Tidak menggunakan teknologi yang masih bersifat percobaan dan teknologi using.
 - 3) Menguayakan peningkatan kemampuan dan pemanfaatan teknologi lokal lainnya.

Terkait dengan indikator pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka Panjang (Dajadiningrat, 2005). Lebih lanjut secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pencapaian keberlanjutan dalam hal (1) ekologis, (2) ekonomi, (3) sosial budaya, (4) politik, (5)

keberlanjutan pertahanan dan keamanan. Keberlanjutan ekologis merupakan prasyarat pembangunan demi keberlanjutan kehidupan karena akan menjamin keberlanjutan eksistensi bumi. Sehubungan dengan kearifan budaya, masing-masing suku di Indonesia memiliki konsep yang secara tradisional dapat menjamin keberlangsungan ekologis, misalnya sistem subak di Bali atau pemakaman bagi suku Dayak di pedalaman Kalimantan dan beberapa suku lain yang memiliki filosofi harmonisasi dengan alam.

Keberlanjutan ekonomi yang terdiri atas keberlanjutan ekonomi makro dan keberlanjutan ekonomi sektoral yang merupakan salah satu aspek keberlanjutan ekonomi dalam perspektif pembangunan. Dalam keberlanjutan ekonomi makro ada tiga elemen yang berkesinambungan dan peningkatan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal ini akan dapat tercapai melalui kebijaksanaan ekonomi makro yang tepat guna dalam proses structural yang menyertakan disiplin fiscal dan moneter.

Sementara itu keberlanjutan ekonomi sektoral yang merupakan keberlanjutan ekonomi makro akan diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan sektoral yang spesifik. Kegiatan ekonomi sektoral ini dalam bentuknya yang spesifik akan mendasarkan pada perhatian terhadap sumber daya alam yang berniali ekonomis sebagai kapital. Selain itu koreksi terhadap harga barang dan jasa, dan pemanfaatan sumber daya lingkungan yang merupakan biosfer keseluruhan sumber daya. Dalam hal ini keberlanjutan sosial dan budaya, secara menyeluruh keberlanjutan sosial dinyatakan dalam keadilan sosial. Hal-hal yang merupakan perhatian utama adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahankan keanekaragaman budaya dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

Bidang keberlanjutan politik terdapat pokok pikiran seperti perhatian terhadap HAM, kebebasan individu, hak-hak sosial, politik dan ekonomi, demokratisasi serta kepastian ekologis. Sedangkan keberlanjutan di bidang pertahanan dan keamanan adalah keberlanjutan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan. Persoalan berikutnya adalah harmonisasi antar struktur dalam menghadapi atau melaksanakan idealisasi pembangunan yang berkelanjutan. Apabila selama ini terjadi ketimbangan, maka yang terjadi adalah disharmonisasi yang berdampak pada hal yang lebih luas yaitu menyangkut nasionalisme, rasa kebanggaan dan “Pudarnya Negara Bangsa” Secara ideal keberlanjutan pembangunan membutuhkan pendekatan pencapaian terhadap keberlanjutan atau kesinambungan berbagai aspek kehidupan yang mencakup: keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan.

e) Keberlanjutan Ekologis

Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis harus diupayakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memelihara integritas tatanan lingkungan agas sistem penunjang kehidupan di bumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan tanah, air, udara dan seluruh kehidupan berlanjutan.
- 2) Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan lingkungan, yaitu: daya dukung, daya asimilatif dan

keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya terpulihkan. Ketiga untuk melaksanakan kegiatan yang tidak mengalir, menggunakan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan. Sedangkan sumber yang tidak terpulihkan mempunyai jumlah absolut dan berkurang bila dimanfaatkan.

Konsep sustainable tidak boleh diterapkan. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks sumberdaya yang tidak dapat dipulihkan berarti: pemanfaatan secara efisien diupayakan agar dapat dikembangkan substitusi dengan sumberdaya terpulihkan; membatasi dampak lingkungan pemanfaatannya sekecil mungkin, karena sumberdaya ini tidak menciut akan tetapi bervariasi sesuai dengan kualitasnya.

f) Keberlanjutan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, keberlanjutan ekonomi makro merupakan landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak dasar. Kebijakan ekonomi makro diarahkan pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukannya kesempatan yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat miskin.

Pemenuhan hak dasar, kebijakan ekonomi makro perlu mempertimbangkan empat tujuan yang saling berkaitan, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro, yaitu efisiensi ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal tersebut diatas dapat dicapai melalui kebijakan makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi sektor public, mobilisasi tabungan domestic, pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar

yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan sumberdaya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset.

g) Keberlanjutan Sosial Budaya

Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh manusia. Keberlanjutan sosial dan budaya yang mempunyai empat sasaran, yaitu:

- 1) Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga.
- 2) Memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan memerangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Halangan terhadap keberlanjutan sosial harus dihilangkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkannya untuk mendapat akses Pendidikan yang merata, pemerataan pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita.
- 3) Mempertahankan keanekaragaman budaya dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan pembangunan ekonomi.
- 4) Mendorong partisipasi lokal dalam pengambilan keputusan.

Beberapa pesyarikat dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial, yaitu: prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk manfaat Bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya meningkatkan status wanita, akses Pendidikan dan

kesehatan, memajukan ekonomi harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras dengan distribusi aset. Produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antara regional dan desa, kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan alokasi sumberdaya.

h) Keberlanjutan Politik

Keberlanjutan politik diarahkan pada respek pada kaum right, kebebasan individu dan sosial untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial dan politik, demokrasi yang dilaksanakan perlu diperhatikan proses demoktasi yang transparan dan bertanggungjawaban, kepastian kesediaan pangan, air, dan pemukiman.

i) Keberlanjutan Pertahanan Keamanan

Keberlanjutan keamanan seperti menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman dan gangguan baik dari dalam dan luar yang langsung dan tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan negara dan bangsa perlu diperhatikan (Jaya, 2004).

7.3 Ekonomi Hijau

Seiring dengan disepakatinya pembangunan berkelanjutan sejak Oktober 2008 UNEP telah mengembangkan ekonomi hijau yang dilatarbelakangi oleh:

1) Multi kritis yang menyangkut:

- a) Finansial berupa pengangguran sebanyak 18 s/d 51 juta dibandingkan 2007 dan jumlah penduduk yang sangat miskin naik di atas 100 juta di seluruh dunia.
- b) Kenaikan biaya harga bahan bakar di negara berkembang yang naik sebanyak US\$ 400 Milyar dibanding tahun 2007

- c) Kenaikan biaya harga pangan di negara berkembang yang naik sebanyak US\$ 400 324 Milyar/tahun dibanding tahun 2007.
 - d) Kerusakan ekosistem keragaman hayati sekitar EU 50 Milyar/tahun.
 - e) Perubahan iklim dan emisi gas per tahun sebanyak 5 kali lipat melampaui ambang batas.
- 2) Prediksi kenaikan beragam kebutuhan pada tahun 2004 meliputi:
- a) Permintaan energi pada tingkat global yang naik 45%.
 - b) Kenaikan harga minyak yang mencapai US\$ 180/barel
 - c) Emisi gas yang naik sebanyak 45%.
 - d) Suhu global yang rata-rata naik sebesar 6⁰ C di abad yang akan datang.
 - e) Krisis finansial sebanyak 5 s/d 10% GDP global atau sebanding dengan 3% hilangnya GDP saat ini.
 - f) Kelaparan yang mengancam negara miskin yang menghabiskan sekitar 10% GDP.

Penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi hijau adalah sebuah sistem kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa yang dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dalam jangka Panjang, sementara tidak menekankan generasi mendatang dengan resiko lingkungan atau kelangkaan ekologi yang signifikan (UNEP, 2008). Melihatnya sebagai sebuah pandangan alternative bagi pertumbuhan dan perkembangan, salah satu yang dapat menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang konsisten dengan pembangunan keberlanjutan (Bapna dan Talberth, 2011).

Sebuah ekonomi hijau mempromosikan *triple bottom line*: mempertahankan dan memajukan ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan sosial. Model pertumbuhan ekonomi yang berlaku difokuskan pada

peningkatan PDB diatas semua tujuan yang lainnya. Walaupun sistem ini telah meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan bagi ratusan juga, ia datang dengan biaya sosial, lingkungan dan ekonomi yang signifikan dan berpotensi ireversibel. Ekonomi hijau mencoba untuk memperbaiki masalah ini melalui berbagai reformasi kelembagaan dan peraturan, pajak, dan kebijakan dan alat ekonomi berbasis pengeluaran.

7.3.1 Kebaruan Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau hanya mendukung mereka yang sudah diartikulasikan untuk tujuan yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan (Bapna dan Talberth, 2011). Tapi ekonomi hijau membawa kebaruan dalam merespon perkembangan terakhir. Pertama, ada apresiasi yang lebih mendalam oleh banyak pemerintah, korporasi, masyarakat sipil, dan masyarakat bahwa kita mencapai batas planet, bukan hanyadalam emisi gas rumah kaca, tetapi juga dalam penggunaan air, tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya. Biaya lingkungan dan sosial model ekonomi kita saat ini menjadi lebih berat dan lebih jelas.

Upaya keberlanjutan masa lalu belum memfokuskan cukup pada memperbaiki kegalan kebijakan ekonomi. Tapi kita serang memiliki kesempatan untuk mengatasi masalah yang menantang yang diberikan bukan kebijakan yang hanya dibuat oleh respon terhadap krisis keuangan. Kedua, dan mungkin bahkan lebih penting, resesi global telah mendorong peninjauan kembali atas prinsip kunci dari model ekonomi saat ini seperti keutamaan pertumbuhan dan keyakinan dalam regulasi.

Dewasa ini banyak yang mempertanyakan kekuatan status quo, dan banyak pemimpin publik maupun sektor swasta yang sedang mencari:

- 1) Kebijakan dan peraturan yang dapat mengidentifikasi dan mengelola resiko keuangan dan lebih efektif lainnya.

- 2) Pasar baru dan industry yang dapat lebih baik, menciptakan pekerjaan jangka Panjang.
- 3) Dukungan publik untuk inovasi guna memperbaiki posisi sebuah negara untuk bersaing di pasar besok yang lain baik.

Perkembangan ini menunjukkan perlunya sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan yang ramah lingkungan, misalnya pekerjaan di sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi seperti energi bersih. Di samping itu, upaya keberlanjutan masa lalu belum cukup memfokuskan pada memperbaiki kegagalann kebijakan ekonomi seperti polusi harga. Tapi kita sekarang memiliki kesempatan untuk mengatasi masalah yang menantang yang diberikan, bukan kebijakan yang dibuat oleh respon terhadap krisis keuangan. Sebuah contoh yang baik adalah adopsi korea dari strategi pertumbuhan hijau nasional. Selain itu ekonomi hijau mempunyai tujuan yang mendukung keberlanjutan, diantaranya:

- 1) Berkontribusi menghidupan kembali ekonomi dunia, tabungan & menciptakan lapangan kerja dan melindungi kelompok rentan.
- 2) Mengurangi ketergantungan karbon dan degradasi ekosistem, menempatkan ekonomi di jalan untuk pembangunan bersih dan stabil - 1% dari PDB pada sektor hijau lebih dari dua tahun.
- 3) Pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, pencapaian MDGs dan kemiskinan yang ekstrim akhir tahun 2005.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ekonomi hijau memiliki tga elemen utama, yaitu:

- 1) Stimulasi fiscal sektor ditargetkan, meliputi:
 - a) Energi bangunan efisien
 - b) Transportasi yang efisien dan kurang polusi modal transportasi dan infrastruktur, angkutan umum, kendaraan ramah lingkungan
 - c) Energi bersih “Pintar” dan energi terbarukan

- d) Pertanian dan air tawar untuk mempertahankan kemampuan pertanian, mengurangi kehilangan air
- 2) Reformasi kebijakan domestic, meliputi:
 - a) Reformasi kebijakan GGND domestic
 - b) Reformasi subsidi jahat
 - c) Gunakan insentif dan pajak untuk mendorong perilaku perkotaan
 - d) Resionalisasi penggunaan lahan dan kebijakan perkotaan
 - e) Mengadopsi pengelolaan sumber daya air terpadu
 - f) Kepastian undang-undang lingkungan
 - g) Memastikan monitoring dan akuntabilitas terkait dengan implementasi dari paket subsidi
- 3) Arsitektur kebijakan internasional dan koordinasi, dalam hal:
 - a) Perdagangan internasional multilateral dan bilateral terhadap aliran barang dan jasa lingkungan
 - b) Bantuan internasional untuk mendukung pergeseran nasional menuju ekonomi hijau
 - c) Pasar karbon global
 - d) Pasar global untuk jasa ekosistem
 - e) Pengembangan dan transfer teknologi ramah lingkungan
 - f) Koordinasi internasional dalam melaksanakan paket stimulus hijau
 - g) Gunakan insentif dan pajak untuk mendorong perilaku bertanggungjawab terhadap lingkungan

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa pesan kunci dari gerakan ekonomi hijau, yaitu:

- a) Investasi hijau anggaran pemerintah dan strategi pertumbuhan.
- b) Buat mekanisme pendanaan investasi hijau public swasta.
- c) Menyediakan kondisi yang memungkinkan negara.
- d) Menyediakan kondisi global yang memungkinkan.

7.3.2 Prinsip Ekonomi Hijau

Dalam mengimplementasikan ekonomi hijau, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan (Faizal, 2012), yaitu:

a) Pemerataan Distribusi Kesejahteraan

Mengupayakan distribusi kesejahteraan yang adil di dalam suatu negara dan antar negara, untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin, dan mencapai keadilan sosial dan ekonomi, dalam bagian yang berkelanjutan dan sumber daya adil di dunia dan meninggalkan ruang yang cukup untuk satwa liar dan hutan belantara.

b) Ekuitas dan Keadilan Ekonomi

Dipandu oleh prinsip persamaan tetapi tanggungjawab berbeda, menciptakan kemitraan ekonomi yang akan menstransfer bantuan keuangan dan teknologi yang cukup besar ke negara kurang berkembang, untuk membantu meminimalkan kesenjangan antara dunia maju dan berkembang dan mendukung kelestarian lingkungan kedua negara tersebut.

c) Ekuitas Antargenerasi

d) Pendekatan Pencegahan

e) Hak untuk Berkembang

f) Internalisasi Eksternalitas

g) Kerjasama Internasional

h) Kewajiban Internasional

i) Informasi, Partisipasi dan Akuntabilitas

j) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

k) Strategi, Terkoordinasi dan Terintegrasi untuk Memberikan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan, ekonomi Hijau dan Pengentasan Kemiskinan

- l) Biaya Transisi
- m) Mendefinisikan Kembali Kesejahteraan
- n) Kesetaraan Gender
- o) Menjaga Keanekaragaman Hayati dan Mencegah Polusi dari Setiap Bagian dari Lingkungan

Bab 8

Kebijakan Sosial Dan Lingkungan

Tujuan Pembelajaran

1. Untuk mengetahui kebijakan sosial dan lingkungan
2. Untuk menganalisis kebijakan sosial dan lingkungan
3. Untuk mengetahui kemajuan kebijakan sosial dan lingkungan
4. Untuk mengetahui pedoman kebijakan sosial dan lingkungan

8.1 Strategi Pengelolaan Lingkungan

Menurut Sulistyowati, 2009 pada awalnya strategi pengelolaan lingkungan didasarkan pada pendekatan “*carrying capacity approach*”, akibat terbatasnya dukungan lingkungan alamiah untuk menetralsisir pencemaran yang terus meningkat, makanya upaya untuk mengendalikan pencemaran berubah dari “*endofpipe treatment*” menjadi “*pollution prevention*” dimana pelaku industry dituntut untuk melakukan peran aktif dalam pengelolaan lingkungan, bahkan dengan meningkatnya kesadaran industry akan pentingnya pengelolaan lingkungan, mereka bertindak proaktif didalam mengupayakan pengendalian pencemaran untuk menghasilkan suatu produk yang aman dan ramah lingkungan dimana salah satu pendekatan tersebut adalah konsep “*greening business*”.

Greening Business Management adalah strategi pengelolaan lingkungan yang terpadu yang meliputi pengembangan struktur organisasi, sistem, dan budaya dalam suatu kompetensi hijau dengan cara menerapkan dan menaati seluruh peraturan tentang pengelolaan Lingkungan termasuk pengelolaan bahan baku, pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam yang efektif, penggunaan teknologi produksi yang menghasilkan limbah minimal serta menerapkan komitmen kesadaran lingkungan bagi

seluruh karyawan dalam organisasinya. Berdasarkan pengalaman dari beberapa industri maka ada 4 alasan yang menjadi penyebab industry harus meletakkan masalah lingkungan sebagai aspek yang penting dalam usahanya, yaitu:

a) Lingkungan dan efisiensi

Dengan adanya kesadaran bahwa sumber daya alam sangat terbatas, maka apapun juga harus dilakukan untuk mengurangi penggunaannya. Industri harus mengupayakan daur ulang dan melakukan efisiensi dalam penggunaan setiap material dan energi dalam proses produksinya, yang mana hal tersebut mempunyai implikasi pada pengurangan biaya produksi.

b) Image lingkungan

Mempunyai sifat positif terhadap lingkungan merupakan suatu hal yang baik untuk dapat menumbuhkan image yang selanjutnya untuk memperbesar market share. Memperluas pasar dengan *greening image* akan tercapai apabila konsumen telah bernuansa hijau pula.

c) Lingkungan dan peluang pasar

Dengan adanya tuntutan pasar terhadap pelaku bisnis dan dunia usaha dalam hal Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang selanjutnya dikembangkan menjadi pemberian sertifikat ISO14001, maka hal ini memberikan dampak positif bagi dunia usaha.

d) Ketaatan terhadap peraturan lingkungan

Meskipun *low enforcement* pemerintah masih lemah, namun demikian apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan ataupun adanya pengaduan masyarakat akibat dampak dari suatu aktivitas industri, maka akan berdampak negatif terhadap reputasi industri tersebut. Selain itu organisasi lingkungan lokal dan internasional akan bereaksi keras apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan

lingkungan. Oleh karena itu, ketaatan terhadap setiap peraturan lingkungan secara proaktif sangat dianjurkan agar peluang untuk memperluas pasar dan sasaran dari bidang usaha tidak terganggu. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa bisnis hijau adalah trend saat ini, yang mana untuk mencapai hal tersebut harus ada interaksi antar ekonomi dan ekologi, hal ini disebabkan karena adanya dampak sumber daya alam dan sumber daya manusia dari setiap aspek dari suatu aktivitas perusahaan industri. Untuk mencapai tujuannya, maka suatu perusahaan harus menciptakan sistem input, proses, dan output yang terintegrasi sehingga memungkinkan tercapainya suatu perusahaan hijau secara komprehensif.

Adapun keuntungan dari bisnis hijau adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurangi biaya operasi eksploitasi SDA.
- 2) Menciptakan keunggulan dan mempertahankan pelanggan.
- 3) Menciptakan strategi lingkungan yang unik
- 4) Membantu perusahaan melakukan ekspansi ke pasar global.
- 5) Meningkatkan image perusahaan dan hubungan masyarakat.
- 6) Memperkecil resiko lingkungan jangka panjang berkaitan dengan kerusakan SDA, konservasi energi, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan limbah.
- 7) Memberikan keuntungan bagi ekosistem dan komunitas.
- 8) Etika merupakan suatu yang sangat diinginkan.
- 9) Menjadikan perusahaan selangkah lebih maju dalam mentaati peraturan lingkungan.

8.2 Kelembagaan Lingkungan Hidup

Kelembagaan dapat dilihat dari instansi pemerintah dan LSM, perangkat hukum, dan peraturan perundang-undangan, serta program-program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

8.2.1 Perangkat Hukum

Perangkat hukum yang berhubungan dengan lingkungan hidup mengacu pada UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keppres No.2/2002 tentang pengalihan tugas, fungsi dan kewenangan Bapedalke Menteri Negara dan Lingkungan Hidup, serta Keppres No.4/2002 tentang unit organisasi dan tugas eselon I Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugasnya Menteri Negara Lingkungan Hidup dibantu oleh:

- a) Sekretariat Menteri Negara
- b) Deputi Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup
- c) Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Kewilayahan
- d) Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat
- e) Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Instansi
- f) Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Non Instansi
- g) Deputi Bidang Kelestarian Lingkungan
- h) Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup
- i) Staf Ahli Bidang Lingkungan Global
- j) Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan
- k) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Lingkungan
- l) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya

Wewenang Pemerintah dalam mengatur kebijakan untuk melestarikan fungsi Lingkungan hidup, UU No.23/1997 juga berisi persyaratan penataan, penyelesaian sengketa, penyidikan, dan ketentuan pidana. Persyaratan penataan Lingkungan hidup dibagi menjadi 4 bagianya itu:

a) Perijinan

Setiap kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan untuk memperoleh ijin melakukan kegiatan tersebut. Ijin diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b) Pengawasan

Menteri mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan lingkungan hidup. Untuk melakukan pengawasan tersebut Menteri dapat menetapkan pejabat yang berwenang.

c) Sanksi Administrasi

Gubernur. Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggungjawab kegiatan yang melanggar perundang-undangan lingkungan hidup. Wewenang ini dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota Madya/Kepala Daerah tingkat I dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

d) Audit lingkungan

Pemerintah mendorong penanggungjawab kegiatan/usaha untuk melakukan audit lingkungan hidup.

UU Lingkungan Hidup yang penting lainnya adalah:

a) Bila terjadi sengketa lingkungan hidup, maka dapat ditempuh melalui

pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang bersengketa.

- b) Untuk lebih meningkatkan penegakan hukum, selain penyidik Pejabat Polisi, Pejabat Pegawai Sipil tertentu dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan UU Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- c) Bila terjadi tindak pidana yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup maka diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

8.3 Kasus Lingkungan

Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. GC

September 2008 kejahatan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. GC yang merupakan sebuah perusahaan tambang patungan antara PT ANTAM 20% dan Perusahaan asing BDIMining Corp. 80% sudah Nampak jelas. Dalam beberapa tahun belakangan ini pencemaran maupun dampak pertambangan PT. GC telah merusak dan mengganggu aktivitas pertanian masyarakat di Desa Palam, Guntung Manggis dan Cempaka. Material pasir pun sebagai sisa dari aktivitas pertambangan intan dijual dengan ketidakjelasan hasilnya.

Terkait dengan PT. GC yang ada di Kalsel, menurut organisasi non pemerintah yang focus pada persoalan lingkungan ini, perusahaan tersebut telah melakukan kejahatan lingkungan, yaitu sengaja Melakukan pembuangan limbah atau zat kealiran sungai yang dapat membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan orang banyak. “Perbaikan system pengolahan air limbah (Sispal) yang dilakukan oleh PT. GC adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, dan itu memang sudah termasuk dalam dokumen AMDAL yang telah mereka buat sendiri, dan itu menghilangkan kasus kejahatan lingkungan yang telah dilakukan PT. GC.

Menurut WALHIKalsel, salah satu alat bukti terjadinya kejahatan lingkungannya adalah hasil penelitian tim gabungan Pemerintah Kota Banjar baru dan Pemerintah Provinsi Kalsel, melalui Bappedalda, yang mengakibatkan tingkat keasaman air sungai (ph) mencapai 2,97, sedangkan Peraturan Gubernur (Pargub) Kalsel mencatumkan ph normal senilai 6 hingga 9. Selain itu, PT. GC juga membuang limbah timbal mencaoi 0,84, padahal sesuai Pergub Kalsel hanya dibolehkan 0,1. “Ini tentu saja bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997 Bab VI tentang Persyaratan Penataan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat 1 “Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup”, ujar Hegar menjelaskan. Juga dengan KUHP pasal 202 ayat (1) Barang siapa memasukkan barang sesuatu ke dalam sumur, pompa, sumber atau dalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal diketahuinya bahwa karena perbuatan itu air lalu berbahaya bagi nyawa atau Kesehatan orang diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kasus Pencemaran Lingkungan oleh PT. AI

Pada bulan Oktober 2009 Pencemaran sungai Belangan terjadi sustru tidak lama setelah Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) RI memberikan penghargaan peringkat HIJAU kepada PT. AI dalam Program Penelitian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengolahan Lingkungan Hidup (PROPPER) Tahun 2009. Sungai Balangan, merupakan sungai besar yang membelah kabupaten Balangan dimana bagian hilirnya sampai wilayah Amuntai (Hulu Sungai Utara), Negara (Hulu Sungai Selatan), Mergasari (Tapin) hingga ke Muara Sungai Baritoo & ndash : Banjarmasin. Sungai yang menjadi urat nadi masyarakat, khususnya kabupaten Balangan dan Amuntai secara fisik telah berubah warna menjadi coklat kehitaman. Ini

membuktikan bahwa batu bara PT. AI. Hal ini juga tercemar sebagai dampak dari aktivitas pertambangan batubara PT. AI. Hal ini juga secara langsung diakui oleh pihak perusahaan melalui Manager External Relationnya Yunizar Andriansyah. Berdasarkan informasi dan pantauan WALHIKalsel dilapangan, beberapa dampak langsung yang telah dirasakan masyarakat antara lain:

- a) Ribuan warga di 4 Kecamatan Kabupaten Balangan yakni Kecamatan Paringin, JUai, Paringin Utara dan Kecamatan Lampihong saat ini tidak bisa mengakses langsung air sungai Balangan untuk keperluan setiap hari. Demikian juga yang dialami masyarakat di Kecamatan Amuntai Tengah, Babirik, Sei Pan dan dan Banjarang.
- b) Terancamnya sumber ekonomi para petambak ikan disepanjang sungai Balangan yang sebagian besar menggunakan jalan apung. Bahkan menurut laporan ikan-ikan yang mereka budidayakan sudah ada yang mulai mati.
- c) Terganggunya operasional PDAM di Balangan dan Amuntai hingga terhentinya layanan distribusi air bersih kewarga selama 3 hari. Keruhnya sungai Balangan ini juga menyebabkan biaya tinggi bagi PDAM dalam memproduksi air bersihnya.
- d) Warga yang terpaksa memanfaatkan sungai Balangan untuk keperluan sehari-hari sudah ada yang mengalami gatal-gatal. Belum ada laporan dari warga yang menderita penyakit seperti diare, namun apa bila ini terus berlangsung tentunya sangat berbahaya buat masyarakat khususnya pada balita yang rentan akan penyakit.

Tercemarnya sungai Balangan ini juga telah menuai protes dari sejumlah masyarakat. Kabupaten Balangan melakukan aksi di depan DPRD Balangan. Kemudian selanjutnya giliran masyarakat Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara berbondong-bondong mendatangi kantor PT. AI di

Dahai : Paringin. WAKHİKalsel juga mendapatkan info bahwa gabungan masyarakat Amuntai dan Balangan akan melakukan aksi besar-besaran apa bila pemerintah dan instansi terkait lamban menangani kasus ini.

WALHİKalsel sangat prihatin dan menyayangkan pencemaran sungai Balangan ini justru terjadi tidak lama setelah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI memberikan penghargaan kepada PT. ADARO Indonesia dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPPER) tahun 2009 dengan peringkat HIJAU. Artinya PT. AI dalam hal ini telah 2 kali mendapat predikat terbaik dalam pengolahan lingkungan hidup seluruh perusahaan di Indonesia dari KLH setelah tahun 2008 yang lalu memperoleh penghargaan yang sama. Sebagai bentuk tanggungjawab atas terjadinya pencemaran di Sungai Balangan ini, makan dengan ini WALHİKalsel meminta KLH untuk :

- a) Mencabut predikat HIJAU yang selama ini diberikan kepada PT. AI dan selanjutnya KLH harus meninjau kembali proyek PROPPER yang selama ini hanya lebih banyak digunakan sebagai preenwash perusahaan dan cenderung abai terhadap ancama penderita rakyat. PROPPER juga sarat dengan kepentingan dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang (korupsi) oleh pejabat KLH.
- b) Mendesak KAPOLDA Kalselagar segera melakukan penyelidikan atas kejahatan lingkungan yang telah dilakukan PT. AI. Meninjau ulang AMDAL PT. AI, karena WALHİKalsel menganggao AMDAL tersebut telah gagal dalam menjawab problem pengelolaan lingkungan hidup perusahaan. Selanjutnya memberi sanksi kepada pembuat AMDAL beserta Komisi AMDALnya.
- c) Menuntut PT. AI secepatnya merehabilitasi sungai Balangan yang telah tercemar dan harus bertanggung jawab kepada masyarakat sertapihak-pihak selama ini telah dirugikan.

Bab 9

Implementasi Akuntansi Sosial Lingkungan

Tujuan Pembelajaran

- 1) Untuk mengetahui
- 2) Untuk menganalisis kebijakan sosial dan lingkungan
- 3) Untuk mengetahui kemajuan kebijakan sosial dan lingkungan
- 4) Untuk mengetahui pedoman kebijakan sosial dan lingkungan

9.1 Akuntansi Sosial Lingkungan

Menurut Djogo (2006), akuntansi lingkungan (*Environmental Accounting*) atau EA adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*Environmental Cost*) kedalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan. Biaya lingkungan adalah dampak (*impact*) baik moniter maupun non moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Menurut Mattew dan Parerra (1996), akuntansi lingkungan sebagai informasi sosial digunakan untuk memberikan gambaran bentuk komprehensif akuntansi yang memasukkan *ektrenalities* kedalam rekening perusahaan seperti informasi tenaga kerja, produk, dan pencemaran lingkungan. Dalam hal ini, pencemaran dan limbah produksi meruapakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan sebab pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengidentifikasian, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan laporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan.

Akuntansi (*Accounting*) dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang menyediakan informasi yang biasanya bersifat kuantitatif dan disajikan

dalam suatu keuangan, untuk mengambil keputusan, perencanaan, pengendalian sumberdaya, operasi, menilai prestasi lembaga atau perusahaan dan pelaporan keuangan pada investor, kreditor dan instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan keuangan dan memberikan laporan kepada masyarakat. Akuntansi merupakan kegiatan yang profesional, karena itu para profesional akuntan biasanya dibayar untuk melakukan *auditing* (pemeriksaan oleh akuntan). Akuntansi lingkungan hidup adalah metodologi untuk menilai biaya dan manfaat dari sebuah kegiatan lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan. Hasil dari akuntansi ini digunakan oleh para pemimpin perusahaan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan perbaikan lingkungan.

Pertengahan tahun 1990 ketika istilah *Environmental Accounting* belum banyak dikenal hanya beberapa perusahaan saja yang menerapkannya, mula-mula dengan mengungkapkan masalah lingkungan. Hal ini berkaitan dengan keterbukaan perusahaan untuk mengungkapkan informasi lingkungan sebagai dampak dari aktivitas industri atau bisnis mereka. Namun kemudian jumlah perusahaan yang menerapkan *environmental accounting* meningkat. Hal ini berkaitan dengan di keluarkannya *the environmental accounting guideline* yang di terbitkan oleh *the Environmental Agency* yang berubah menjadi *Ministry of Environmental* (MOE) pada Mei 2000. Kemudian draft ini diperbaiki lagi pada Maret 2002 sebagai petunjuk pelaksanaan akuntansi perlindungan lingkungan (*Environmentel Protection*).

Banyak perusahaan industri dan jasa di dunia yang menerapkan akuntansi lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental cost*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*). Akuntansi lingkungan diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk

menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya dan efek perlindungan lingkungan (*environmental protection*).

Ada beberapa tujuan dikembangkannya akuntansi lingkungan : (1) akuntansi lingkungan merupakan sebuah alat manajemen lingkungan, (2) akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi masyarakat. Sebagai alat manajemen lingkungan, akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi lingkungan. Data akuntansi Lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya konservasi lingkungan keseluruhan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Selain itu, akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menilai tingkat keluaran dan capaian tiap tahun untuk menjamin perbaikan kinerja lingkungan yang harus berlangsung terus menerus.

Sebagai alat komunikasi dengan dengan publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan dan pandangan terhadap akuntansi lingkungan dari para pihak, pelanggan, dan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk merubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan. Bannet dan James (1998) memberikan beberapa cakupan area dalam memahami akuntansi lingkungan, yaitu :

- 1) Mengintegrasikan lingkungan ke dalam kepentingan pengeluaran modal
- 2) Memahami dan mengelola biaya lingkungan
- 3) Membuat skema minimasi limbah
- 4) Memahami dan mengelola *life cycle costs*
- 5) Mengukur performa lingkungan
- 6) Malibatkan akuntan manajemen dalam formulasi strategi lingkungan berkaitan dengan akuntansi manajemen dan evaluasi kinerja.

9.2 Akuntansi Lingkungan di Indonesia

Tidak banyak informasi atau diskusi yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan sebagai salah satu istilah atau sistem penilaian lingkungan khusus. Suatu langkah yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan Bank Indonesia yang tercantum dalam nota kesepahaman (MoU) antara KLH dan BI yang ditandatangani pada tahun 2005. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang penetapan peringkat kualitas aktiva bagi bank umum. Peraturan tersebut mengatur tentang aktiva produktif untuk kredit termasuk dalam kualitas kredit. Aspek lingkungan hidup menjadi salah satu faktor di dalam penilaian kredit itu. BI sepakat menggunakan proper (perangkat penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) KLH dalam menilai kelayakan kredit (Tempo Interaktif, 8 April 2005).

Penilaian tingkat kinerja perusahaan (Proper) terkait dengan lingkungan hidup yang menjadi program tahunan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk penilaian tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, dampak lingkungan, yang dapat berpengaruh pada penentuan kuatlas kredit perusahaan, kelayakan perusahaan dan sebagainya. Hasil penelitian ini disampaikan ke Bank atau kreditor lainnya. Proper di ataur dalam Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No. 27/MenLH/2002. Misalnya Bank sebagai debitur dapat menurunkan kredit bagi perusahaan berperingkat buruk. Jika tidak layak dari sudut lingkungan hidup k karena kinerja buruk maka perusahaan bisa saja tidak diijinkan untuk mendapatkan kredit. Ada juga dengan pemberian sistem ISO. Dengan sistem Iso perusahaan yang punya komitmen untuk kemudian memperbaiki kinerja terhadap lingkungan yang baik dapat diberikan sertifikat ISO sedangkan perusahaan yang buruk tidak akan akan mendapatkan ISO tersebut. Perusahaan masih terus bisa melakukan operasi bisnisnya namun dengan

proper perusahaan bisa tidak tidak bisa diberi ijin operasi atau tidak mendapatkan kredit dari bank.

9.3 Keterbatasan Akuntan dalam Penerapan Akuntansi Sosial dan Lingkungan

Gray dan Walters (1993) mengemukakan ada dua alasan yang mendorong akuntan terlibat pada masalah sosial dan lingkungan yaitu:

1. Masalah sosial dan lingkungan pada dasarnya merupakan masalah bisnis. Hal ini dapat berakibat pada perusahaan pasar dan akan membawa dampak pada dunia bisnis dan akuntan dituntut untuk memberikan perhatian dan berperan serta mulai dari penentuan biaya, penetapan nilai aset sampai dengan penghitungan tingkat resiko yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan bisnis.
2. Masalah lingkungan membutuhkan kegiatan audit (dalam bahasa teknis akuntansi, audit antara lain di artikan sebagai prosedur pemeriksaan laporan keuangan, mulai dari pengkajian dokumen sampai dengan pemberian rekomendasi). Selanjutnya Gray dan Walters (1993) memaparkan bahwa Akuntansi lingkungan mencakup tujuh hal berikut ini :
 - a) Akuntansi untuk resiko.
 - b) Akuntansi untuk penilaian aset dan proyeksi modal.
 - c) Analisis biaya terutama untuk area kunci seperti energi, limbah, dan perlindungan lingkungan.
 - d) Investasi menyangkut faktor lingkungan.
 - e) Pengembangan system informasi akuntansi (SIA) baru.
 - f) Mengukur *costs and benefits* terhadap program pengembangan lingkungan.

g) Pengembangan teknik akuntansi yang mengekspresikan harta, utang dan biaya yang bernuansa ekologi.

Memperhatikan lingkup pekerjaan akuntan tersebut membawa konsekuensi perubahan bagi tugas akuntan yaitu:

1. Akuntan Keuangan

Keterlibatan akuntansi keuangan meliputi:

- a) Menyusun neraca yang didalamnya mencakup akun-akun berikut :
Penetapan nilai asset; Hutang; Biaya tak terduga.
- b) Menyusun laporan keuangan yang didalamnya mencakup biaya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah / sampah dan kebersihan lingkungan.
- c) Menyusun laporan tahunan yang mencakup gambaran kinerja perusahaan untuk lingkungan.
- d) Menyusun laporan kerjasama dengan bank, manajer lembaga keuangan, dan lembaga asuransi.

2. Akuntan manajemen

Hal ini akuntan bertugas:

- a) Menyusun rencana bisnis termasuk munculnya biaya-biaya baru yang menyangkut masalah lingkungan;
- b) Membuat *costs and benefits analysis* dengan adanya pengembangan lingkungan;
- c) Menyusun analisis biaya dan efisiensi dengan adanya program pengembangan lingkungan.

3. Akuntan sistem

Sedangkan akuntan sistem berperan untuk:

- a) Merencanakan berbagai perubahan pada System Informasi Manajemen (SIM).
- b) Merencanakan berbagai perubahan pada sistem pelaporan keuangan.

9.4 Tujuan Akuntansi Sosial dan Lingkungan

Akuntansi sosial dan lingkungan menurut Hendriksen (1994) adalah untuk memberikan informasi yang memungkinkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap masyarakat dapat di evaluasi. Ramanathan (1976) dan Suadi (1988) juga menguraikan tiga tujuan dari akuntansi sosial yaitu:

1. Mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial neto periodik suatu perusahaan, yang meliputi bukan hanya manfaat dan biaya sosial yang di internalisasikan keperusahaan, namun juga timbul dari eksternalitas yang mempengaruhi segmen-segmen sosial yang berbeda.
2. Membantu menentukan apakah strategi dan praktik perusahaan yang secara langsung mempengaruhi relatifitas sumberdaya dan status individu, masyarakat dan segmen-segmen sosial adalah konsisten dengan prioritas sosial yang diberikan secara luas pada satu pihak dan aspirasi individu pada pihak lain,
3. Memberikan dengan cara yang optimal, kepada semua kelompok sosial, informasi yang relevan tentang tujuan, kebijakan, program, strategi dan kontribusi suatu perusahaan terhadap tujuan sosial perusahaan. Berdasarkan tujuan akuntansi sosial yang diuraikan diatas dapat dipahami bahwa akuntansi sosial berperan dan menjalankan fungsinya sebagai bahasa bisnis yang mengakomodasi masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga pos-pos biaya sosial yang dikeluarkan kepada masyarakat dapat menunjang operasional dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan.

9.5 Pengukuran Akuntansi Sosial dan Lingkungan

Pertukaran yang terjadi antara perusahaan dan lingkungan sosialnya terdapat dua dampak yang timbul yaitu dampak positif atau yang disebut juga dengan manfaat sosial (*social benefit*) dan dampak negatif yang disebut

dengan pengorbanan sosial (*Social Cost*). Masalah yang timbul adalah bagaimana mengukur kedua dampak tersebut. Menurut Harahap (1993) , masalah pengukuran akuntansi sosial memang rumit, karena jika dibandingkan dengan transaksi biaya langsung dapat dicatat dan mempengaruhi posisi keuangan, maka dalam akuntansi sosial terlebih dahulu harus diukur dampak positif dan dampak negative yang ditimbulkan oleh perusahaan. Lebih jauh Harahap (1993) menguraikan beberapa metode yang biasa dipakai dalam pengukuran akuntansi sosial yaitu:

- 1) Menggunakan penilaian dengan menghitung *opportunity cost approach*.
- 2) Menggunakan daftar kuesioner.
- 3) Menggunakan hubungan antara kerugian massal dengan permintaan untuk barang perorangan dalam menghitung kerugian masyarakat.
- 4) Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga.

Zulfikar (1987) dalam Sonhadji (1989) memberikan beberapa teknik pengukuran yang dapat dipakai, antara lain ;

- 1) Penilaian Pengganti

Nilai dari sesuatu tidak dapat langsung ditentukan, maka dapat menyetemikannya dengan nilai pengganti

- 2) Teknik Survey

Mencakup cara untuk mendapatkan informasi dari kelompok masyarakat tentang pengukuran aktifitas sosial perusahaan

- 3) Biaya Perbaikan dan Pencegahan.

Biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh perusahaan sehubungan dengan lingkungan sosialnya

- 4) Penilaian dari Penilai Independen.

Memberikan suatu wewenang kepada pihak luar untuk mengukur aktifitas sosial perusahaan

- 5) Putusan Pengadilan.

Suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum

Secara empiris beberapa perusahaan di Amerika seperti IBM, Chase Manhattan corporation, Bank of Minneapolis telah memaparkan informasi social secara kuantitatif dalam laporan keuangannya, yang menunjukkan pengukuran atas praktik pengukuran dampak social perusahaan mereka (Sonhadji, 1989).

9.6 Pelaporan, Pengungkapan (*Disclosure*) Akuntansi Sosial dan Lingkungan

Menurut Belkoui (1985) dikutip oleh Harahap (1993), pelaporan dalam akuntansi sosial, berarti memuat informasi yang menyangkut dampak positif atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan. Pelaporan ini menurut Belkoui (1980) dalam Sawardjono (1991) didasari relevan atau tidaknya informasi tersebut, dan relevansi ini tergantung pada para pemakai informasi. Menurut Sawardjono (1991), peningkatan kebutuhan informasi ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan yang telah melaporkan tanggungjawab sosialnya. Di negara-negara maju seperti Amerika, Kanada, Inggris, Australia dan Jepang, pelaporan ini sudah merupakan hal yang lazim. Estes (1976) dalam Sondhaji (1989) menggambarkan Praktik pelaporan akuntansi sosial yang terdiri dari :

1) Praktik Sederhana,

Laporan terdiri dari uraian akuntansi sosial yang tidak disertai dengan data kuantitatif, baik satuan uang maupun satuan yang lainnya

2) Praktik yang lebih maju

Laporan terdiri dari uraian akuntansi sosial dan disertai dengan data kuantitatif

3) Praktik yang paling maju

Laporan dalam bentuk kualitatif, perusahaan juga menyusun laporannya dalam bentuk neraca.

Selanjutnya dengan semakin berkembangnya pasar modal, perusahaan-perusahaan melaporkan dan mengungkapkan aktifitas sosial untuk memberikan informasi kepada pemilik modal, calon investor dan pihak-pihak luar (*stakeholders*) lainnya yang juga berkepentingan. Praktik pengungkapan sosial (*social disclosure*) dalam laporan tahunan perusahaan telah dilakukan dinegara negara Eropa barat, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Singapura dan Malaysia. Keadaan ini turut mendorong perusahaan untuk mengungkapkan secara sukarela untuk setiap periode mengenai lingkungan sosialnya, sehingga dapat menunjukkan kepada kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tahunan perusahaan yang dapat menjelaskan kepedulian dan kepekaan sosial suatu entitas bisnis.

Di negara Amerika Serikat praktik pengungkapan sosial ini sudah dimulai sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini FASB telah banyak merekomendasikan secara lebih spesifik tentang standar pelaporan *externalities*. Davidson (1993) memberikan contoh FAS No. 5 yang mengatur tentang penyajian dampak sosial khususnya mengenai dampak lingkungan. Davidson (1993) seorang direktur yang menangani urusan lingkungan di *Ernst dan Young consulting* Washington, mengatakan bahwa saat ini SEC (*stock exchange commission*) telah menerapkan review bagi perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan dampak lingkungan dalam laporan tahunan mereka.

Namun demikian, pengungkapan informasi sosial di Amerika Serikat sampai saat ini masih bersifat kerelaan (*Voluntary disclosure*) dan bukan merupakan suatu kewajiban (*Mandatory disclosure*), tetapi kecenderungan yang terjadi adalah perusahaan mengungkapkan aktifitas sosial tersebut

untuk mendeskripsikan lebih jauh tentang kiprah suatu perusahaan dalam menjalankan fungsi – fungsi sosialnya.

Di samping itu penelitian–penelitian yang dilakukan diluar negeri menunjukkan bahwa di Inggris Ince dan Davut (1997), Tsang dan Eric WK (1998) di Singapura, Hackson dan Milne (1996) di Selandia Baru, Adam et.al (1997) di enam negara Eropa (Prancis, Jerman, Swiss, Inggris, dan Belanda) dan penelitian Andrew et.al (1989) di Malaysia dan Singapura membuktikan pengungkapan sosial perusahaan sudah menjadi hal yang lazim dilaksanakan dengan penekanan bahwa perusahaan besar lebih banyak mengungkap informasi sosialnya dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Deegan dan Gordon (1991) dalam Heny dan Murtanto (2001) mengemukakan bahwa sebagian besar pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan masih bersifat kualitatif, dan kecenderungan perusahaan mengeungkapkan informasi positif daripada informasi negatif.

9.7 Penyusutan Standar Akuntansi Lingkungan

Upaya untuk memiliki pedoman SR, IAI diharapkan menyusun pedoman SR. Adanya standar yang baku dan bersifat mandatori mengatur SR akan meningkatkan pelaporan SR untuk perusahaan yang aktivitasnya mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Aras dan Crowther (2008) menyatakan bahwa kebutuhan standar dalam menganalisis dan mengukur sustainability dan memberikan petunjuk model yang lengkap mengenai impikasi distribusi dn dikembangkan menjadi model yang dapat dioprasionalkan. Kebutuhan stadar pelaporan juga terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25, Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40, Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur upaya dalam kewajiban perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Usaha ini mungkin akan

menemukan kendala terkait dengan pengukuran dan hambatan dalam proses penyusunannya karena standar akuntansi sosial dan lingkungan berkaitan dengan konsekuensi ekonomi perusahaan. Masalah pengukuran dapat diatasi dengan pelaporan nonkeuangan.

Bab 10

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Tujuan Pembelajaran

- 1) Untuk mengetahui cara membuat laporan pertanggungjawaban
- 2) Untuk menganalisis laporan pertanggungjawaban
- 3) Untuk mengetahui akuntansi pertanggungjawaban
- 4) Untuk mengetahui kinerja akuntansi pertanggungjawaban

10.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Menurut ISO 26000 dalam Cheng dan Christiawan (2011), *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah perilaku transparan dan etis yang mendukung kesejahteraan semua *stakeholder*, termasuk masyarakat dan lingkungan, yang terintegrasi dalam keseluruhan praktik operasional organisasi. CSR merupakan kepedulian perusahaan yang di dasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Lines*, yaitu: *Profit* (keuntungan), *People* (Masyarakat), dan *Planet* (Lingkungan).

Akuntansi pertanggungjawaban social (*Social Responsibility Accounting*) didefinisikan sebagai proses seleksi variable-variabel kinerja

social tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja social perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban social dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negative terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya.

10.2 Tujuan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Tujuan akuntansi pertanggungjawaban social menurut Belkaoui (1992:434), “...is to measure and disclosure the costs and benefits to society created by the production-related activities of bussines enterprises”. Sedangkan menurut Ramanathan yang dikutip oleh Usmansyah (1988: 21–22) menyatakan ada tiga tujuan akuntansi pertanggungjawaban social yaitu:

- 1) Untuk mengidentifikasikan dan mengukur sumbangan social netto periodik dari suatu perusahaan, yang meliputi bukan hanya biaya dan manfaat yang diinternalisasikan kedalam perusahaan, namun juga yang timbul dari eksternalitas yang mempengaruhi bagian-bagian sosial yang berbeda.
- 2) Untuk membantu menentukan apakah praktek dan strategi perusahaan yang secara langsung mempengaruhi sumber daya relative dan keadaan sosial adalah konsisten dengan priorotas-prioritas sosial pada satu sisi dan aspirasi-aspirasi individu pada sisi lainnya.
- 3) Untuk menyediakan dengan cara yang optimal bagi semua kelompok sosial, informasi yang relevan mengenai kebijakan, program, kinerja dan sumbangan sosial.

Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi pertanggungjawaban sosial tidak hanya bermanfaat bagi anggota masyarakat dalam menilai kinerja sosial perusahaan, tetapi juga akan membantu manajemen mencapai tujuan, yaitu dengan meyakini adanya suatu perkembangan yang lebih menyeluruh yang telah diberikan kepada kebutuhan bisnis secara total dan penghargaan publik. Laporan sosial ini juga akan membantu manajemen berpikir mengenai akibat-akibat dari tindakan mereka sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih baik.

10.3 Manfaat Pelaksanaan CSR

Bertambahnya kesadaran perusahaan-perusahaan terhadap pelaksanaan CSR tentunya tidak lepas dari manfaat yang mereka dapatkan dari pelaksanaan CSR tersebut. Menurut Business Sosial Responsibility (BSR), manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR):

1) Mengurangi biaya operasional (*Reduced Operating Cost*).

Tanggung jawab sosial perusahaan mampu mengurangi biaya operasional perusahaan, misalnya jadwal kerja yang fleksibel dan program keselamatan kerja berdampak pada menurunnya absensi pekerja dan menambah simpanan uang perusahaan dari pekerja melalui peningkatan produktivitas kerja.

2) Meningkatkan kinerja keuangan (*Improved Financial Performance*).

Hubungan antara tanggung jawab sosial dengan kinerja keuangan yang positif dapat dilihat dari kriteria melalui *total return, sales growth and profit growth selama lebih dari satu periode sebaik net profit margin dan return on equity*.

3) Meningkatkan citra produk dan reputasi (*Enhanced Brand Image and Reputation*).

Perusahaan menyadari adanya tanggung jawab sosial bermanfaat bagi meningkatnya reputasi, baik perusahaan di mata publik sebagaimana sebaik reputasi di dalam komunitas bisnisnya sehingga dapat menarik rekan bisnis baru dan mendapat keuntungan.

- 4) Meningkatkan penjualan dan kesetiaan konsumen (*Increased Sales and Customer Loyalty*).

Memproduksi barang yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan ditunjang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut, dan diharapkan masyarakat setia menggunakan hasil produksi perusahaan.

- 5) Meningkatkan produktivitas dan kualitas (*Increased Productivity and Quality*).

Usaha perusahaan dalam menciptakan kondisi kerja yang produktif, mengurangi dampak buruk bagi lingkungan atau melibatkan pekerja dalam peningkatan produktivitas dan mengurangi angka kesalahan yang terjadi.

- 6) Meningkatkan kemampuan untuk mempekerjakan dan mengupah pekerja (*Increased Ability to Attract and Retain Employees*).

Perusahaan menyadari dengan komitmen tinggi atas tanggung jawab sosial perusahaan akan lebih mudah dalam merekrut dan mengupah pekerja, berdampak pada penurunan perputaran biaya perekrutan dan pelatihan. Orang akan memilih bekerja pada lingkungan kerja dimana tidak ada konflik sosial yang tercipta terutama masalah ketenagakerjaan.

- 7) Mengurangi penyimpangan tindakan dari undang-undang (*Reduced Regulatory Oversight*).

Pemerintah memiliki peranan dalam pembuatan kebijakan perundangan yang dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam kegiatan

operasionalnya. Pemerintah memberikan penghargaan bagi perusahaan yang bertindak proaktif terhadap lingkungan, misalnya keberhasilan dalam pengolahan limbah pabrik serta menjaga kelestarian lingkungan.

8) Cara mendapatkan modal (*Acces to Capital*).

Pertumbuhan investasi terhadap tanggung jawab sosial yang tinggi telah memberi jalan bagi masuknya tambahan modal yang mungkin telah tersedia.

Pernyataan diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat atau lingkungan sekitar tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba.

10.4 Pelaksanaan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Perubahan sikap perusahaan maupun pemerintah terhadap pelaksanaan CSR disebabkan kesadaran mereka akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ada enam kecenderungan utama, yang semakin menegaskan arti penting CSR. Yaitu: meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin, posisi negara yang semakin berjarak pada rakyatnya, makin mengemukakan arti kesinambungan; makin gencarnya sorotan kritis dan resistensi dari publik, bahkan yang bersifat anti-perusahaan; tren ke arah transparansi, dan harapan-harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi pada era milenium baru. Diharapkan perusahaan-perusahaan saat ini lebih sadar akan tanggung jawabnya selain kepada pemegang saham, juga pada masyarakat, lingkungan dan alam disekitar tempat usahanya.

10.5 Ruang Lingkup Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Brumment dalam Glautier dan Underdown (1986) membagi bidang yang menjadi tujuan sosial perusahaan menjadi lima yaitu:

1) Sumbangan Terhadap Laba Bersih (*Net Profit Contribution*).

Peningkatnya perhatian terhadap tujuan sosial perusahaan, seharusnya tidak mengurangi tujuan perolehan laba. Sebab perusahaan tidak dapat melangsungkan usahanya tanpa perolehan laba yang layak. Sebaliknya, harusnya hal tersebut menambah arti pentingnya perolehan laba perusahaan. Artinya, ada korelasi yang jelas antara tujuan sosial dan tujuan memperoleh laba. Kegagalan mengakui adanya masalah sosial mungkin dapat mempengaruhi kinerja laba perusahaan, baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka waktu yang panjang.

2) Sumbangan Terhadap Sumber Daya Manusia (*Human Resources Contribution*).

Meperlihatkan tentang hubungan perusahaan dengan para pegawainya, yaitu semua yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Meliputi: pengangkatan pegawai, program pelatihan, pemberian upah dan gaji secara layak, kebijakan promosi jabatan dan rotasi tugas, keamanan kerja, pelayanan kesehatan yang memadai, lingkungan kerja yang nyaman, dan lain-lain.

3) Sumbangan Terhadap Publik (*Public Contribution*).

Bidang yang menampakkan kegiatan perusahaan terhadap kelompok atau individu di luar perusahaan, yang antara lain meliputi: kegiatan kemanusiaan umum, praktek peluang kesempatan kerja yang adil, pembayaran pajak kepada pemerintah dan sebagainya.

4) Sumbangan Terhadap Lingkungan (*Environmental Contribution*).

Pemberian perhatian terhadap aspek lingkungan produksi yang meliputi pemakaian sumber daya, proses produksi, dan produksi yang mencakup

kegiatan daur ulang, penanggulangan pencemaran dan pemeliharaan lingkungan tempat perusahaan berdiri dan beroperasi.

- 5) Sumbangan Terhadap Barang Atau Jasa (*Product Or Service Contribution*).
- 6) Aspek kualitatif produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Misalnya mengenai kegunaannya, daya tahannya, pengamanan dan pelayanannya yang diupayakan sebaik mungkin sesuai peran yang diemban, serta mencakup pula kepuasan pelanggan. Kejujuran perusahaan dalam periklanan, kelengkapan dan kejelasan dalam pemberian segel dan pembungkusan.

The Committee on Accounting for Corporate Social Performance dari *National Association of Accountants* yang dikutip oleh Edward dan Black (1976) mengidentifikasikan ruang lingkup dari pengaruh sosial perusahaan, yang keberadaannya dapat disesuaikan dengan jenis perusahaan, yaitu:

- a. *Community Involvement*
 - a) *General Philanthropy*
 - b) *Public and Private Transportation*
 - c) *Health Service*
 - d) *Housing*
 - e) *Aid in Personal and Bussiness Problem*
 - f) *Community Planing and Improvement*
 - g) *Volunter Activities*
 - h) *Specialized Fofod Program*
 - i) *Education*
- b. *Human Resources*
 - a) *Employment Practices*
 - b) *Training Programs*
 - c) *Promotion Policies*

- d) *Employment Continuity*
 - e) *Remuneration*
 - f) *Working Conditions*
 - g) *Drugs and Alcohol*
 - h) *Job Enrichments*
 - i) *Communications*
- c. *Physical Resources and Enviroment Contribution*
- a) Air
 - b) Water
 - c) Sound
 - d) Solid Waste
 - e) Use of Scare Resources
 - f) Aesthetics
- d. *Product or Service Contribution*
- a) *Completeness and Clarity of Labeling, Packing, and Market Representation*
 - b) *Warranty Provisions*
 - c) *Responsiveness to Customer Complains*
 - d) *Consumer Education*
 - e) *Product Quality*
 - f) *Product Safety*
 - g) *Content and Frequency of Advertising*
 - h) *Constructive Research*

Sedangkan menurut Harahap (2002: 198 – 200), keterlibatan sosial perusahaan yang disesuaikan dengan keadaan di Negara Indonesia yaitu:

1) Lingkungan Hidup.

Pengawasan terhadap efek polusi, perbaikan pengrusakan alam, konservasi alam, keindahan lingkungan, pengurangan suara bising,

penggunaan tanah, pengelolaan sampah dan air limbah, riset dan pengembangan lingkungan, kerja sama dengan energi, antara lain: konservasi energi yang dilakukan perusahaan, penghematan energi dalam proses produksi dan lain-lain.

2) Sumber Daya Manusia Dan Pendidikan.

Keamanan dan kesehatan karyawan, pendidikan karyawan, kebutuhan keluarga dan rekreasi karyawan, menambah dan memperluas hak-hak karyawan, usaha untuk mendorong partisipasi, perbaikan pensiun, beasiswa, bantuan pada sekolah, pendirian sekolah, membantu pendidikan tinggi, riset dan pengembangan, pengangkatan pegawai dari kelompok miskin, peningkatan karir karyawan dan lain-lain.

3) Praktek Bisnis yang Jujur.

Memperhatikan hak-hak karyawan wanita, jujur dalam iklan, kredit, servis, produk, jaminan, selalu mengontrol kualitas produk, dan lain-lain, pemerintah dan universitas, pembangunan lokasi rekreasi dan lain-lain.

4) Membantu Masyarakat Lingkungan.

Memanfaatkan tenaga ahli perusahaan dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya, tidak campur tangan dalam struktur masyarakat, membangun klinik kesehatan, sekolah, rumah ibadah, perbaikan desa/kota, sumbangan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, perbaikan perumahan desa, bantuan dana, perbaikan sarana pengangkutan, pasar dan lain-lain.

5) Kegiatan Seni dan Kebudayaan.

Membantu lembaga seni dan budaya, sponsor kegiatan seni dan budaya, penggunaan seni dan budaya dalam iklan, merekrut tenaga yang berbakat seni dan olahraga, dan lain-lain.

6) Hubungan dengan Pemegang Saham.

Sifat keterbukaan direksi pada semua persero, peningkatan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, pengungkapan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial, dan lain.

7) Hubungan dengan Pemerintah

Mentaati peraturan pemerintah, membatasi kegiatan lobbying, mengontrol kegiatan politik perusahaan, membantu lembaga pemerintah sesuai dengan kemampuan perusahaan, membantus ecara umum usaha peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, membantu proyek dan kebijakan pemerintah, meningkatkan produktivitas sektor informal, pengembangan dan inovasi manajemen.

10.6 Pengukuran dan Pelaporan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Menurut Glautier dan Underdown (1986: 484-485) ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk pedoman pengukuran dalam pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial, yaitu:

a) Pendekatan deskriptif dipandang sebagai pendekatan yang umum digunakan.

Laporan social deskriptif, informasi mengenai semua aktivitas sosial perusahaan dilaporkan dalam bentuk uraian (deskriptif). Aktivitas social perusahaan dalam pelaporannya tidak dikuantifikasikan dalam satuan uang.

b) Pendekatan biaya yang yang dikeluarkan (*the cost of outlay approach*).

Pendekatan biaya yang dikeluarkan menggambarkan semua aktivitas social perusahaan dikuantifikasikan dalam satuan uang dan menjadi hal yang sebaliknya dari pendekatan deskriptif. Sehingga laporan yang dihasilkan oleh pendekatan biaya yang dikeluarkan mempunyai

kemampuan untuk diperbandingkan antara laporan suatu tahun tertentu, dengan laporan tahun yang lain. Sedangkan kelemahannya adalah tidak disajikannya manfaat yang diperoleh sehubungan dengan telah dikeluarkannya biaya untuk suatu kegiatan. Pendekatan biaya manfaat (*the cost benefit approach*).

- c) Pendekatan biaya manfaat mengungkapkan baik biaya maupun manfaat dari aktivitas sosial perusahaan.

Pendekatan biaya manfaat mungkin merupakan pendekatan yang paling ideal. Namun, dalam kenyataannya sulit untuk menerapkannya, anatara lain karena tidak adanya alat ukur manfaat dari yang dihasilkan atas biaya yang telah dikeluarkan untuk aktivitas sosial perusahaan.

Menurut Zulfikar seperti yang dikutip oleh Sonhaji (1989:9) memberikan beberapa teknik pengukuran yang dapat dipakai antara lain:

Nilai dari sesuatu tidak dapat langsung ditentukan, maka kita dapat mengestimasi dengan nilai suatu pengganti, yaitu sesuatu yang kira-kira mempunyai kegunaan yang sama dengan yang diukur.

- a) Teknik *Survey*

Teknik ini mencakup cara-cara untuk mendapatkan informasi dari mereka yang dipengaruhi, yaitu kelompok masyarakat yang dirugikan atau yang menerima manfaat. Pengumpulan informasi yang paling mudah adalah dengan bertanya langsung kepada anggota kelompok masyarakat yang ada.

- b) Biaya perbaikan dan pencegahan

Untuk biaya sosial tertentu dapat dinilai dengan mengestimasi pengeluaran yang dilakukan untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan.

- c) Penilaian dari penilai independen.

Penilai yang independen dapat berguna untuk menilai barang tertentu. Hal ini analog dengan penilaian pengganti yang dilakukan oleh ahli dari luar perusahaan.

d) Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan, misalnya denda akibat dari suatu kegiatan yang sering menunjukkan nilai sosial.

10.7 Faktor Munculnya Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII yang ditandai dengan penemuan mesin-mesin industry membawa dampak perubahan terhadap perkembangan akuntansi. Pertama, adanya perubahan cara produksi dari industri rumah tangga menuju ke sistem pabrik, sedangkan yang kedua adalah bertambah panjangnya periode produksi. Sistem pabrik menuntut modal yang besar, sedangkan pada tahap ini badan usaha persekutuan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan modal. Lalu terbentuklah badan usaha yang lain yaitu perseroan terbatas. Bentuk ini dianggap paling memuaskan karena dana tidak memiliki batas waktu atau jatuh tempo dan relatif lebih mudah untuk ditambah, disamping memiliki tanggung jawab yang terbatas.

Perkembangnya badan usaha berbentuk perusahaan, maka semakin banyaklah masyarakat dan institusi yang menjadi pemodal fungsi pendanaan lalu terpisah dari fungsi manajemen. Inilah yang kemudian dikenal orang sebagai revolusi manajemen. Dalam situasi ini, para pemegang saham tidak lagi mampu mencukupi sendiri informasi yang mereka butuhkan dan mereka tidak lagi terlibat dalam kegiatan manajemen. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk membuat laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban dari manajer kepada para pemegang saham.

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya secara langsung atau tidak langsung berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dikatakan oleh Usmansyah (1989: 6) bahwa sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan semuanya berasal dari masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu perusahaan harus memberikan pertanggungjawaban atas semua sumber daya yang telah digunakan serta hasil-hasil yang telah dicapainya.

Abad XX yang ditandai dengan teknologi yang *massive* sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perluasan usaha untuk meningkatkan produktivitas. Di bawah sistem kapitalis, perusahaan-perusahaan besar mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk menghasilkan keluaran maksimum dengan satu tujuan yaitu maksimalisasi laba atau maksimalisasi kesejahteraan para pemegang saham. Masyarakat melihat perusahaan yang berlaba besar berperan aktif dalam proses perusakan lingkungan dan kemerosotan nilai kemanusiaan. Krisis lingkungan hidup yang dikeluhkan oleh masyarakat dewasa ini pada hakekatnya adalah pengejawantahan krisis wawasan manusia. Masyarakat yang semakin kritis menuntut agar perusahaan mempertanggungjawabkan semua yang telah mereka terima dari lingkungan sosialnya dalam suatu laporan pertanggungjawaban sosial, lebih dari sekedar suatu kewajiban moral yang selama ini berlaku di masyarakat.

10.8 Permasalahan Sosial dalam Dunia Bisnis di Indonesia

berikut ini adalah contoh permasalahan sosial pada dunia bisnis dapat dilihat pada tabel 10.1 dibawah ini:

Tabel 10.1

Contoh Perusahaan Sosial Pada Dunia Bisnis

No	Contoh Kasus	Lokasi	Permasalahan Sosial
01.	PT. Inti Indo Rayon Utama	Porsea Propinsi, Sumatera Utara	Dihentikan operasional karena adanya masalah lingkungan dan masalah dengan masyarakat sekitar industri.
02.	PT. Exxon mobil	Lhokseumawe Aceh Utara, Prop. DI Aceh	Menghentikan kegiatan produksi karena faktor stabilitas keamanan.
03.	PT. Ajinomoto Indonesia	Jakarta	Penarikan distribusi, pemasaran, dan aktifitas produksi karena masalah sertifikasi halal oleh MUI.
04.	Beberapa Perusahaan kertas di Riau	Provinsi Riau	Mendapatkan protes dari masyarakat setempat sehubungan permasalahan limbah industri dan lingkungan.
05.	PT. Maspion Indonesia	Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur	Permasalahan demo buruh dan isu kesejahteraan karyawan
06.	PT. Telkom Indonesia	Divre IV Jateng dan DIY	Serikat Karyawan (Sekar) PT. Telkom menolak penjualan Divre IV kepada PT. Indosat
07.	PT. BCA	Jakarta	Serikat Pekerja menolak Divestasi

			saham Bca
08.	PT Kereta Api Indonesia	Jakarta	Serikat Pekerja menolak kembalinya Dewan Direksi lama, karena dianggap bertanggung jawab atas beberapa kasus kecelakaan kereta api yang terjadi di Indonesia.
09.	Bank Internasional Indonesia (BII)	Jakarta	Tuntutan Karyawan atas gaji, upah dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
10.	PT. Gudang Garam	Kediri Jawa Timur	Mogok Kerja Massal karyawan menuntut perbaikan gaji dan kesejahteraan pekerja.

Sumber: Review berbagai sumber

Sederetan data lain sebenarnya masih banyak lagi mengenai permasalahan sosial yang dihadapi oleh perusahaan PMA maupun PMDN di Indonesia. Tentunya gambaran ini semakin menunjukkan betapa dunia usaha sangat rentan dengan berbagai masalah sosial. Beberapa kasus maraknya aksi demo buruh, penjarahan gudang, perusakan gedung kantor dan pabrik, dan penggarapan lahan perusahaan karena masyarakat meyakini dan hak rakyat yang dirampas oleh penguasa, semakin menguatkan fakta tentang stabilitas sosial yang tidak kondusif.

10.9 Dampak CSR

Perkembangannya tidak semua perusahaan menerima konsep pelaksanaan tanggung jawab sosial ini, Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya yang berjudul Teori Akuntansi mengemukakan argumen menerima

mengenai perusahaan agar memiliki sikap dan tanggung jawab sosial antara lain:

- 1) Keterlibatan sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat, hal ini menguntungkan perusahaan.
- 2) Meningkatkan nama baik perusahaan akan menimbulkan simpati langganan, simpati karyawan, investor dan lain.
- 3) Keterlibatan sosial akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat, yang mungkin akan menurunkan produksi.
- 4) Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat.
- 5) Menunjukkan respon positif terhadap norma dan nilai masyarakat, sehingga mendapat simpati masyarakat.
- 6) Sesuai keinginan para pemenang saham dalam hal publik.
- 7) Mengurangi tensi kebencian masyarakat kepada perusahaan yang melakukan kegiatan yang dihindari.
- 8) Membantu kepentingan nasional, seperti konservasi alam, pemeliharaan barang seni budaya, peningkatan pendidikan rakyat, lapangan kerja, dan lain.

Adapun argument yang menolak keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial antara lain :

- 1) Mengalihkan perhatian perusahaan dari tujuan utamanya dalam mencari laba, ini akan menimbulkan pemborosan.
- 2) Memungkinkan keterlibatan perusahaan terhadap permainan kekuasaan atau politik secara berlebihan yang sebenarnya bukan lapangannya.
- 3) Dapat menimbulkan lingkungan bisnis yang memolitik bukan yang bersifat pluralistic.
- 4) Keterlibatan sosial memerlukan dana dan tenaga yang cukup besar yang tidak dapat dipenuhi oleh dana perusahaan yang terbatas, yang dapat

menimbulkan kebangkrutan atau menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

- 5) Keterlibatan dalam kegiatan sosial yang demikian kompleks membutuhkan tenaga dan para ahli belum tentu dimiliki oleh perusahaan.

Argument di atas dapat dilihat bahwa perusahaan yang menjalankan konsep pelaksanaan tanggung jawab sosial selain mereka merasa peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, tetapi perusahaan juga mengharapkan timbal balik yang positif dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tersebut. Juga terdapat argument yang menolak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut tidak lain dikarenakan ketakutan mereka dalam tujuan utama perusahaan yaitu mendapatkan laba yang maksimal akan berkurang.

10.10 Metode Pengukuran CSR

Akuntansi konvensional bahwa setiap transaksi baru dapat dicatat jika sudah mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Dalam *Socio Economic Accounting* (SEA) kita harus mengukur dampak positif (*Social Cost*) dan dampak negatif (*Social Negatif*) yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan, di sinilah rumitnya menghitung dampak ekonomis pelaksanaan tanggung jawab sosial sebagai informasi yang akan dilaporkan dalam *Social Economic Reporting* misalnya :

- 1) Menggunakan penelitian dengan menghitung *Opportunity Cost Approach*. Misalnya dalam menghitung social cost dari pembuangan, maka dihitung beberapa kerugian manusia dalam hidupnya: beberapa berkurang kekayaannya, beberapa kerusakan wilayah rekreasi, dan lain sebagainya akibat pembuangan limbah. Total kerugian itulah yang menjadi *Social cost* perusahaan.

- 2) Menggunakan daftar kuesioner, survey, di mana mereka yang merasa dirugikan ditanyai berapa besar jumlah kerugian yang ditimbulkan atau berapa biaya yang harus dibayar kepada mereka sebagai kompensasi kerugian yang dideritanya.
- 3) Menggunakan hubungan antara kerugian massal dengan permintaan untuk barang pengurangan dalam menghitung jumlah kerugian masyarakat.
- 4) Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga. Misalnya vonis hakim akibat pengaduan masyarakat akan kerusakan lingkungan dapat juga dianggap sebagai dasar perhitungan.

10.11 Teknik Pelaporan Tanggungjawab Sosial

Walaupun teknik pelaporan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) belum mempunyai pedoman yang resmi, ada beberapa teknik pelaporan yang menurut para ahli bisa digunakan perusahaan seperti yang diungkapkan oleh Diller yang diterjemahkan oleh Sofyan Syafri Harahap dalam buku Teori Akuntansi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan lainnya.
- 2) Pengungkapan dalam catatan atau laporan keuangan.
- 3) Dibuat dalam perkiraan tambahan, misalnya emlalui adanya perkiraan (akun) penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan dan sebagainya.

Meskipun teknik pelaporan setiap perusahaan berbeda, tetapi pelaporan ini sangat berguna bagi perusahaan terutama untuk menambah kepercayaan para pemegang saham, selain bagi perusahaan pelaporan ini juga bermanfaat bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan berbagai kebijakan.

10.12 Pengaruh Penerapan Akuntansi Tanggungjawab Sosial

Pengaruh penerapan Akuntansi CSR telah banyak diteliti oleh para ahli maupun akademis, baik terhadap kinerja perusahaan, nilai perusahaan, maupun respon investor. Pengaruh Akuntansi CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan misalnya diungkapkan oleh Kurnianto (2011), bahwa pengungkapan aktivitas CSR (*CSR disclosure*) tidak terbukti berpengaruh positif terhadap Return on Equity (ROE) perusahaan satu tahun ke depan (ROE_{t+1}) perusahaan.

Sementara hasil penelitian Flammer (2013) menemukan bahwa adopsi dan penerapan CSR berhubungan dengan peningkatan produktivitas karyawan dan pertumbuhan penjualan. Penelitian Rosiana, Juliarsa, dan Sari (2013) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan profitabilitas mampu memperkuat pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. Temuan senada diungkapkan Elliott *et.al.* (2012) yaitu bahwa kinerja CSR yang lebih baik meningkatkan estimasi investor atas nilai dasar perusahaan.

Beberapa hasil penelitian terkait dampak penerapan Akuntansi CSR di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar menyatakan bahwa penerapan Akuntansi CSR tidak berdampak baik positif maupun negatif terhadap variabel-variabel kinerja keuangan perusahaan. Namun penerapan CSR dan akuntansinya terbukti berdampak terhadap peningkatan produktivitas karyawan dan pertumbuhan penjualan. Selain itu, pengungkapan CSR juga terbukti dapat meningkatkan nilai perusahaan dan mempengaruhi reaksi investor.

Bab 11

Audit Sosial

Tujuan Pembelajaran

- 1) Untuk mengetahui cara mengaudit sosial
- 2) Untuk menganalisis laporan audit sosial
- 3) Untuk mengetahui laporan audit sosial
- 4) Untuk mengetahui kinerja audit sosial

11.1 Mekanisme Pengawasan Tingkah Laku

Mekanisme dalam pengawasan terhadap para karyawan sebagai anggota komunitas perusahaan dapat dilakukan berkenaan dengan kesesuaian atau tidaknya tingkah laku anggota tersebut dengan budaya yang dijadikan pedoman korporasi yang bersangkutan. Apakah aturan-aturan, nilai, norma dan pengetahuan yang menjadi kebudayaan perusahaan hanya sebagai wacana saja ataukah sudah menjadi bagian dalam usaha untuk mewujudkan tindakannya, atau sudah dimanifestasikan kedalam tindakannya ataukah belum. Pengawasan ini juga dilakukan terhadap masyarakat yang telah dikenai program pemberdayaan masyarakat, ini untuk melihat apakah perubahan atau program yang diterapkan oleh korporat sudah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat atau belum.

Sehingga audit sosial ini menjadi rentetan penilaian setelah dilakukan evaluasi terhadap program yang diterapkan. Apakah pendampingan yang selama ini dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sudah menunjukkan keberhasilannya atau belum. Keberhasilan suatu penerapan program adalah bahwa program tersebut sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat sebagai sasaran program. Mekanisme pengawasan tersebut berbentuk audit sosial sebagai kesimpulan dari

monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebelumnya. Monitoring dan evaluasi terhadap tingkah laku anggota suatu perusahaan atau organisasi pada dasarnya harus dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan secara berkesinambungan. Monitoring yang dilakukan sifatnya berjangka pendek sedangkan evaluasi terhadap tingkah laku anggota perusahaan berkaitan dengan kebudayaan perusahaan yang berlaku dilakukan dalam jangka panjang.

Hasil dari evaluasi tersebut menjadi bahan bagi audit sosial. Pengawasan terhadap tingkah laku dan peran karyawan pada dasarnya untuk menciptakan kinerja karyawan itu sendiri yang mendukung sasaran dan tujuan dari proses berjalannya perusahaan. Kinerja yang baik adalah ketika tindakan yang diwujudkan sebagai peran yang sesuai dengan status dalam pranata yang ada dan sesuai dengan budaya perusahaan yang bersangkutan. Apabila kenyataan yang dihadapi oleh karyawan suatu korporasi ternyata tidak dapat dipahami dengan menggunakan pengetahuan budaya yang dipunyai dan apabila dipahami akan memunculkan fungsi yang lain maka dapat memunculkan masalah. Hal ini berkaitan dengan kenyataan yang tampak dikorporasi dipahami dengan menggunakan kebudayaan atau pengetahuan budaya karyawan yang bersangkutan yang secara nyata berasal dari latar belakang suku bangsa dan kebudayaan yang berbeda-beda, dan tidak adanya budaya perusahaan yang dapat dijadikan pedoman dalam memahami lingkungannya yang dalam hal ini lingkungan perusahaan.

Untuk mendeteksi apakah budaya perusahaan telah menjadi bagian dalam pengetahuan budaya para karyawan dilakukan audit sosial dan sekaligus merencanakan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menguatkan nilai yang ada agar para karyawan sebagai anggota perusahaan tidak memunculkan pengetahuan budaya yang dimilikinya diluar lingkungan perusahaan. Pengetahuan tentang pedoman yang diterapkan oleh

perusahaan menjadi penting ketika pedoman tersebut dipakai sebagai acuan dalam bertindak oleh para anggotanya yang pada dasarnya sudah mempunyai kebudayaan dari kelompok sosial.

Kehidupan komunitas atau masyarakat secara umum, mekanisme pengawasan terhadap tindakan anggota masyarakat biasanya berupa larangan dan sanksi sosial yang terimplementasi dalam aturan adat. Sehingga tampak bahwa kebudayaan menjadi sebuah pedoman bagi berjalannya sebuah proses kehidupan masyarakat dan komunitas. Gambaran ini pun tampak pada sebuah perusahaan, karena perusahaan adalah juga sebagai bentuk komunitas yang dipedomani oleh budaya yang spesifik. Karyawan dalam suatu perusahaan adalah sebagai stakeholder yang berada di dalam perusahaan, dan sebagai stakeholder, keberadaan karyawan menjadi penting demi keberlangsungan aktivitas dari korporasi. Tindakan karyawan berkenaan dengan perannya dalam pranata sosial perusahaan dapat menentukan keberlangsungan aktivitas yang ada.

Di samping karyawan sebagai stakeholder, terdapat juga para bekas karyawan, para direksi, pemilik modal yang juga menentukan berjalannya aktivitas pranata sosial perusahaan. Kesemua *stakeholder* tersebut menduduki status dan peran tertentu dalam korporasi dan mempunyai hubungan fungsional satu dengan lainnya. Selain itu terdapat juga stakeholder luar yang juga menentukan berjalannya aktivitas perusahaan, seperti para pemasok bahan mentah, atau para agen distributor dan sebagainya. Ke semua *Stakeholder* luar ini juga dapat dikatakan sebagai aliansi sosial dari perusahaan yang bersangkutan sehingga mempunyai pengetahuan kebudayaan yang sama antara satu dengan lainnya. Keseluruhan sistem dari berjalannya aktivitas sebuah korporasi sebagai suatu bentuk kebudayaan perusahaan dengan aliansi sosialnya yang dalam hal ini para *stakeholder* luar yang menunjang perusahaan perlu dilakukan suatu

pengawasan yang berupa audit sosial. Kegunaan pengawasan sosial ini adalah dapat memantau fungsi yang telah berjalan dan juga meramalkan kegiatan-kegiatan apa selanjutnya berkenaan dengan aktivitas perusahaan.

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang dalam kenyataannya menempati suatu wilayah sosial tertentu. Dan sebagai suatu bentuk organisasi, korporasi tentunya mempunyai tujuan yang dapat dipahami secara bersama oleh para anggotanya dalam lingkup organisasi yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian sebuah perusahaan mempunyai ciri sendiri yang membedakannya dengan perusahaan lainnya, maka perusahaan tersebut mempunyai suatu bentuk kebudayaan tersendiri yang dapat mengatur kehidupan anggota-anggotanya dalam organisasi yang bersangkutan sebagai bentuk kebudayaan perusahaan (*corporate culture*).

Perusahaan sebagai bagian dari suatu komunitas dan mempunyai suatu kebudayaan tersendiri akan mempunyai sifat yang adaptif terhadap lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial dan budaya yang ada disekitarnya. Anggota dari perusahaan tersebut yang berupa individu yang menduduki status dan peran tertentu tentunya mempunyai pola aturan dan tindakan yang mengacu dan bersumber pada budaya korporasi yang dianutnya. Pola aturan yang dipakai untuk acuan dalam melaksanakan kegiatannya merupakan aturan dalam pranata sosial yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.

Pranata sosial yang ada dan berlaku dalam kehidupan perusahaan akan bersumber aturannya serta pengetahuan, nilai dan normanya pada kebudayaan perusahaan yang bersangkutan. Dalam konteks ini, kebudayaan yang dianut dalam korporasi termasuk juga didalamnya etika bisnis korporasi akan terwujud dalam aturan yang ada dipranata sosial yang berlaku dalam perusahaan. Dalam pranata sosial tersebut diatur segala status dan peran yang harus dijalankan oleh individu sebagai anggota korporasi.

Struktur sosial dalam masing-masing pranata sosial korporasi tersebutlah pada dasarnya yang memberikan gambaran berjalan baik atau tidak baiknya sebuah korporasi dalam aktivitasnya.

Suatu perusahaan tidak akan lepas dari segala perhitungan dan perencanaan yang mengatur pola aturan yang ada, seperti halnya pada komunitas lainnya seperti masyarakat suku bangsa. Pemantauan sosial pada masyarakat-masyarakat suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing biasanya berupa pantangandan larangan serta keyakinan yang didasari pada mitologi dari komunitas setempat. Dan dengan alay pemantau seperti larangan dan pantangan yang berlaku dikomunitas yang bersangkutan, maka kehidupan sosial masyarakat suku bangsa tersebut dalam lingkup kecil dapat dipantau dan dimonitoroleh adat istiadatnya sesuai dengan pranata sosial yang berlaku (kekerabatan, ekonomi, teknologi, mata pencaharian dsb). Sedangkan alat dalam memantau pola sosial anggota dari suatu organisasi sosial termasuk korporasi dan dalam kedudukannya dikomunitas, khusus perusahaan disebut sebagai audit sosial.

Perusahaan, apa yang dikatakan sebagai proses audit sosial adalah mirip atau sama dengan cara-cara yang dipakai untuk memeriksa keuangan di perusahaan yang bersangkutan. Akan tetapi pada dasarnya, untuk memperjels apa yang harus dilakukannya dan apa aktivitasnya, pemeriksaan sosial tersebut dilakukan secara terpisah antara pemeriksaan secara finansial serta pemeriksaan sosial secara jelas. Sehingga masing-masing sasaran dari pemeriksaan tersebut akan mempunyai kespesifikan tersendiri yang akhir bermuara pada satu hasil sebagai sasaran kesejahteraan anggota korporasi yang bersangkutan yang sudah tentu mengakomondasikan kepentingan dari seluruh anggota korporasi.

Sebagai sebuah organisasi, perusahaan akan mempunyai beberapa tenaga ahli dalam menyiapkan anggaran-anggaran yang akan dikeluarkan, da begitu juga dengan pemeriksaan terhadap anggaran yang telah dikeluarkan berkaitan dengan berjalannya organisasi yang bersangkutan seperti ahli akuntansi dan pemegang buku. Tetapi ada juga yang ahli dalam menganalisis mengapa pemeriksaan sosial adalah sesuatu yang penting juga dalam perjalanan organisasi yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa para ahli finansial dan pemegang buku perencanaan adalah juga pegawai yang cara bertindak dan berfikirnya dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada.

Tenaga-tenaga ahli tersebut merupakan individu-individu yang menduduki status tertentu, status dalam hal ini adalah kumpulan hak dan kewajiban yang ada pada diri seseorang dalam satu lingkup kebudayaan. Sehingga individu tersebut harus berperan sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh kebudayaan yang mengatur status yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam suatu perusahaan, status dan peran seorang ahli anggaran dan pemeriksaan sosial berada dalam pranata sosial tertentu yang disepakati bersama antar antar anggota shareholder sebagai kesepakatan dalam kebudayaan perusahaan yang bersangkutan.

Sehingga pengukuran finansial sebuah organisasi akan juga dipengaruhi oleh pegawai (tenaga) dari pengukur tersebut, dan ini sangat terkait dengan sistem sosial dari pegawai yang bersangkutan. Dan pernyataan ukuran dari keluasan yang dilakukan secara efektif apa yang diharapkan dilakukan dalam perencanaan akan terkait dengan sistem sosial yang berlaku yang didasari pada kebudayaan yang dianut oleh tenaga yang bersangkutan. Oleh karena itu pentingnya pengetahuan, nilai, aturan dan norma yang dibangun yang dipakai dalam pranata sosial pemeriksaan yang berlaku di perusahaan yang bersangkutan, pengetahuan budaya perusahaan menjadi

penting bagi anggota-anggota perusahaan agar si individu sebagai pemeriksa tidak mengacu dan menggunakan pengetahuan budaya yang dipunyainya sendiri berkaitan dengan individu tersebut berasal dari lingkungan sosial budaya yang berbeda dengan perusahaan. Sehingga dengan demikian kebudayaan korporasi yang bersangkutan menjadi suatu hal yang penting untuk dibangun agar dalam bertindak dan bertingkah laku yang diwujudkan oleh anggota perusahaan tersebut dapat mengacu pada satu pedoman yang disetujui bersama.

Memang pada dasarnya anggota perusahaan berasal dari anggota komunitas yang berbeda-beda kebudayaannya dan suku bangsa, dan dengan bersam-sama dengan orang lain yang berbeda kebudayaan dan suku bangsa bergabung sebagai satu komunitas perusahaan. Sebagai satu komunitas perusahaan, individu-individu tersebut akan menempati status dan peran yang telah disepakat dalam kebudayaan suku bangsa yang dipunyai oleh anggota-anggota perusahaan.

Dalam kehidupan komunitas, sistem sosial akan teruss berjalan untuk mengatur segala tinggah laku individu-individunya. Sistem sosial ini terus berkembang dan selalu berubah mengikuti perkembangan dari kehidupan masyarakatnya dan ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial lainnya. Perubahan-perubahan dalam kondisi lingkungan sosial ini berdampak pada berjalannya organisasi baik secara internal maupun eksternal, artinya bahwa pola aturan yang ada dalam organisasi akan terpengaruh oleh sistem sosial yang ada dimasyarakat. Organisasi yang efektif dan efisien mempunyai visi yang jelas bertolak dari dimana mereka melakukan sebuah aktifitas dan juga berkenaan dengan bagaimana aktifitas organisasi tersebut berjalan dan apa yang menjadi sasaran bagi organisasi yang bersangkutan. Proses audit sosial pada dasarnya akan dapat membantu organisasi yang bersangkutan dalam

mencapai tujuan yang jelas dan sekaligus melaksanakan prosedur yang lebih efisien.

Berkaitan dengan pelaksanaan audit sosial, maka sebuah perusahaan atau organisasi harus jelas terlebih dahulu tentang beberapa aktivitas yang harus dijalankan seperti:

- 1) Aktivitas apa saja yang harus dilakukan sebagai sebuah organisasi dalam hal ini sasaran apa yang menjadi pokok dari perusahaan yang harus dituju – internal maupun eksternal (sasaran)
- 2) Bagaimana cara melakukan pencapaian dari sasaran yang dituju tersebut sebagai rangkaian suatu tindakan (rencana tindakan) yang mengacu pada suatu pola dan rencana yang sudah disusun sebelumnya.
- 3) Bagaimana mengukur dan merekam pokok-pokok yang harus dilakukan berkaitan dengan sasaran yang dituju, dalam hal ini keluasaan dari kegiatan yang dilakukan tersebut (indikator).

Ketiga bentuk aktivitas tersebut terangkai dalam satu arena sehingga dengan demikian mejadu sangat sederhana untuk merancang prosedur bagi pemantau aktivitas yang bersangkutan, apa yang terjadi dari hari ke hari dengan memonitor kegiatan dari hari kehari oleh pemegang buku catatan sosial. Dan dalam pencatatan tersebut sekaligus juga mencatat indikator-indikator yang berkembang setiap saat dan kembali lagi mengukur gejala sosial untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan telah ada sasaran yang sebenarnya yang ingin dituju, pemegang buku juga mencatat sesuatu hal yang organisasi atau perusahaan tidak melakukannya dan ini biasanya terjadi dalam poses beraktivitas yang dilakukan oleh individu sebagai anggota dalam organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Segala ide dalam proses aktivitas berjalannya organisasi atau perusahaan yang dipunyai oleh individu sebagai anggota organisasi, dan ide tersebut dapat dipakai sebagai bagian dari ide organisasi karena

dilakukan setiap hari dan pada setiap kesempatan, dalam hal ini biasanya efisiensi kegiatan dalam menuju sasaran yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan.

Sehingga dengan demikian seorang pemeriksa sosial adalah ‘teman yang mengkritik’ (idealnya orang luar) yang secara periodik memeriksa ‘buku’ dan menanyakan pertanyaan lebih mendalam untuk membantu kelenturan organisasi secara sistematis pada tingkat yang efektif dalam operasi internalnya sebaik pada dampak eksternalnya dalam kaitannya dengan kondisi sosial budaya baik secara internal maupun eksternal korporasi. Disini yang dimaksudkan adalah segala ide-ide dan strategi dalam pelaksanaan aktivitas yang berjalan dalam organisasi atau perusahaan dapat dicatat walaupun pada dasarnya ide-ide tersebut bukan berasal dari visi dan misi dari organisasi atau perusahaan. Akan tetapi, penting bagi pemeriksa sosial untuk mencatat ide-ide ini sebagai bagian dari perwujudan anggota organisasi dalam berekspresi menghadapi lingkungannya.

Pelaksanaan auditor sosial yang berpengalaman biasanya akan bekerja mengukur dan megarahkan berjalannya sebuah organisasi berdasarkan pada visi dan misi yang ada, pada awalnya dia membantu dalam memberikan segala keterangan tentang berjalannya sebuah organisasi berkaitan dengan indikator yang harus diperhatikan, sasaran yang ingin dicapai dan kemudian juga merekam kenyataan sosial yang sedang berjalan dan bagaimana prosedur penilaiannya.

Audit sosial ini merupakan sistem yang ada dalam kebudayaan perusahaan yang oleh anggota-anggotanya dipakai untuk merencanakan kegiatan organisasi yang bersangkutan dan tentunya didasari pada kebudayaan yang berlaku diorganisasi yang bersangkutan. Audit sosial akhirnya merupakan suatu cara berjalannya sebuah organisasi sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya berdasarkan pada rancangan dan rencana yang

telah ada sebelumnya, dan juga sebagai strategi dalam beradaptasi terhadap lingkungan sosial dari suatu komunitas diluar perusahaan atau organisasi. Ini semua memerlukan suatu pengaturan yang baik dalam kaitannya dengan hubungan antar-*stakeholder*.

11.2 Sosial Enterprise Partnership (SEP)

“Audit Sosial adalah sebuah metode yang dilakukan berkenaan dengan sebuah organisasi (perusahaan, lembaga dan sebagainya), dalam merencanakan, mengatur dan mengukur aktivitas nonfinansial serta untuk memantau (memonitor) konsekuensi secara eksternal dan internal sekaligus dari sebuah organisasi atau perusahaan yang bersifat komersial”.

Konsep ini tampak bahwa audit sosial merupakan suatu cara untuk mengetahui keadaan sosial suatu organisasi dan sekaligus juga meramalkan kedepan berjalannya organisasi tersebut secara sosial kaitannya dengan keadaan dalam organisasi serta hubungannya dengan pihak luar. Artinya bahwa organisasi yang bersangkutan dapat memverifikasi aturan-aturan yang ada yang didalamnya terhadap kenyataan yang dihadapinya.

11.3 The New Economics Foundation (NEF)

“Audit sosial adalah suatu proses dimana sebuah organisasi dapat menghitung untuk keadaan sosial, laporan pada dan meningkatkan keadaan sosial tersebut. Audit sosial bertujuan menilai dampak sosial yang ditimbulkan oleh organisasi dan tingkah laku anggota-anggota yang beretika dari sebuah organisasi dalam hubungannya dengan keseluruhan *stakeholder* yang terkait dengannya”. Konsep ini menggambarkan bahwa audit sosial lebih merupakan suatu penilaian dampak sosial dari adanya program atau social impact assessment.

11.4 *The Northern Ireland Co-operative Development Agency*

“Audit sosial adalah suatu proses dimana sebuah organisasi dapat menghitung untuk keadaan sosial, laporan pada dan meningkatkan keadaan sosial tersebut. Audit sosial bertujuan menilai dampak sosial yang ditimbulkan oleh organisasi dan tingkah laku anggota-anggota yang beretika dari sebuah organisasi dalam hubungannya dengan keseluruhan *stakeholder* yang terkait dengannya”. Konsep ini menggambarkan bahwa audit sosial lebih merupakan suatu penilaian dampak sosial dari adanya program atau social impact assessment.

11.5 Model dan Keuntungan Audit Sosial

Sebagai penilaian perwujudan perusahaan dalam aktivitasnya di masyarakat dan ini digambarkan oleh sejauh obyek-obyek sosial yang diminati termasuk didalamnya informasi dan opini, yang menyatakan keadaan perusahaan secara keseluruhan dan bagaimana bentuk dari perusahaan itu sendiri. Jadi, disinikita dapat melihat perkembangan dari proses adaptasi budaya dari korporasi yang bersangkutan dan kita dapat mendalami obyek-obyek sosial yang menjadi minat dari perusahaan yang bersangkutan.

Ini dapat juga disebut sebagai pemegang buku sosial yang di dalam buku sosial terdapat perhitungan sosial. Perhitungan sosial yang dimaksud adalah kita meramalkan informasi kualitatif dan kuantitatif yang telah kita kumpulkan dan hitung untuk perwujudan sosial yang kita harapkan muncul. Audit sosial dilakukan ketika akhir tahun dan ini ketika beberapa individu datang untuk memverifikasi perhitungan sosial dan membantu untuk menuliskan laporan audit sosial (biasanya individu ini berasal dari organisasi bebas).

11.6 Prinsip Kunci

Secara umum prinsip kunci dari penilaian sosial dan audit sosial adalah untuk mencapai keberlanjutan dalam rangka meningkatkan hubungan antar kenyataan sosial dan untuk menyatakan suatu penilaian. Enam prinsip kunci dalam audit sosial dapat diidentifikasi sebagai enam proses kegiatan, yaitu :

1) Ini harus merefleksikan pendapat variasi masyarakat yang berkaitan dengan usaha.

Mengompilasikan pendapat masyarakat berarti juga mengidentifikasi pranata sosial yang berkaitan dengan usaha yang ada di kehidupan masyarakat.

2) Seluruh aktivitas dari usaha masyarakat (comprehensive).

Aktivitas dari usaha yang ada di masyarakat akan selalu berkaitan satu dengan lainnya sehingga apabila tidak terjadi keterkaitan usaha dikawatirkan akan menciptakan suatu persaingan yang tidak sehat antar-usaha. Mencapai laporan pada seluruh aspek dari kerja organisasi dan bentuk organisasi. Menggunakan pendekatan yang holistik yang melihat pada seluruh aspek baik dalam organisasi yang bersangkutan secara intern, maupun dengan luar organisasi secara eksteren. Keterkaitan dilihat baik secara diakronis atau kesejahteraan maupun secara sinkronis atau fungsional antar unsur yang terkait, sehingga tergambar secara deskriptif terintegrasi.

3) Usaha masyarakat harus dapat dibandingkan setiap waktu dengan organisasi sejenis.

Hal ini penting dilakukan agar supaya terdapat pemantauan yang lebih cermat, karena perubahan atau pergeseran kepentingan akan dapat terjadi setiap saat. Memberikan keleluasaan bagi organisasi untuk membandingkan keberadaannya dari tahun ke tahun dan berlawanan dengan norma eksternal atau *benchmark* dan memberikan keleluasaan

untuk membandingkan organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.

- 4) Ini harus terjadi setiap tahun dan tidak hanya latihan.

Audit sosial merupakan suatu kegiatan yang penting dan tampak seperti kegiatan biasa, sehingga kadang tampak sebagai sesuatu yang kurang penting padahal kegiatan tersebut sangat penting. Untuk menciptakan perhitungan sosial pada dasar regular seperti konsep dan praktik menjadi terikat dalam kebudayaan dari organisasi. Tentunya tidak melibatkan kebudayaan dari pengaudit sosial yang bersangkutan harus dapat menempatkan dirinya sebagai seorang yang terlepas dari kebudayaan sendiri. Sebuah fenomena tingkah laku dan kebudayaan secara obyektif, tidak mempunyai kepentingan pribadi atau kelompok lain.

- 5) Penilaian sosial harus dicek oleh individu yang *independent*.

Konteks ini penilaian oleh orang luar akan membawa efek kemandirian dan bebas dari kepentingan keberpihakan. Menjamin bahwa perhitungan sosial diaudit oleh orang yang mempunyai pengalaman dengan kepentingan pada organisasi. Orang yang mempunyai keahlian di bidang sosial baik secara kuantitatif dan diutamakan yang dapat menilai secara kualitatif, dan obyektif menilai tingkah laku anggota suatu organisasi.

- 6) Penemuan dari audit sosial harus dapat disirkulasikan.

Hal ini menjadi penting karena data dari audit sosial adalah merupakan sebuah saran yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Menjamin bahwa perhitungan audit diungkapkan pada *stakeholder* dan masyarakat dalam transparansi dan perhitungan.

Sepuluh langkah untuk mengkaitkan audit sosial dengan perusahaan, sebagai berikut.

Langkah 1:

Mengumpulkan informasi tentang pemeriksaan sosial mencari kesempatan mengapa kita harus melakukan salah satu cara yang dapat dilakukan. Juga

menganalisis dan memeriksa apa yang telah dilakukan dan informasi apa yang telah dikumpulkan bahwa hal-hal tersebut akan dapat dipakai dalam melakukan proses audit sosial.

Langkah 2:

Jelaskan sasaran sosial dari korporasi, tuliskan dan rangkaikan seluruh hal yang sudah dilakukan untuk mencapai sasaran, contoh: mencoba mengurangi angka pengangguran dalam satu wilayah sosial dengan mempekerjakan para pengangguran tersebut dalam waktu yang lama pada sebuah pelatihan kerja terlebih dahulu.

Langkah 3:

Daftarkan *stakeholder* yang ada dan terkait dengan perusahaan. *Stakeholder* adalah individu atau kelompok yang mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, seperti staff, direktur, komunitas lokal, organisasi lain, *founding*. Kumpulkan segala cara yang ada dalam pola pikir para stakeholder tersebut dan dikonsultasikan secara baik melalui interview dan kuesioner.

Langkah 4:

Untuk setiap sasaran dalam korporasi yang telah didaftar pada tahap kedua, akan *di-ranking* secara angka. Menggunakan beberapa indikator yang telah disetujui secara bersama dalam sebuah panel yang digunakan untuk mengecek wujud dari aktivitas yang dilakukan. Seperti sebuah tawaran kerja yang disediakan perusahaan kepada para pengangguran guna memperkecil angka pengangguran di masyarakat tetapi harus melalui atau mengikuti program pelatihan kerja yang mungkin mendapatkan gaji tidak seperti karyawan atau anggota penuh. Yakinkan indikator tersebut sangat praktis dan informasi dapat dikumpulkan.

Langkah 5:

Buat sistem pemegang buku sosial. Ini mungkin sesuatu untuk meyakinkan

bahwa informasi dasar reguler mengacu kembali pada sasaran yang dikumpulkan dan direkam. Pencatat sosial mungkin harus membuat sistem pengumpulan rekaman yang baru atau mungkin salah satunya sudah dipunyai.

Langkah 6:

Akhir tahun dilakukan pengumpulan informasi secara kualitatif dan kuantitatif; data-data tersebut kemudian diinterpretasikan dalam sebuah rekaman buku pegangan sosial dan kemudian mempersiapkan pemeriksaan sosial.

Langkah 7:

Perusahaan sudah harus merancang untuk auditor sosial untuk memverifikasi seluruh informasi dalam pemeriksaan sosial dan melakukan beberapa *interview* dengan *stakeholder* lainnya. Ini diperlukan untuk membuktikan kembali apakah informasi yang telah dikumpulkan tersebut benar adanya dan juga diharapkan diperolehnya informasi tambahan sebagai pengisi informasi yang belum teridentifikasi sebelumnya.

Langkah 8:

Menuliskan laporan audit sosial dan kemudian melakukan suatu tindakan sebagai respon berkaitan dengan penemuan yang didapat dari laporan tersebut. Ini berarti harus mengatur suatu strategi baru untuk mencapai target baru atau memodifikasi apa yang dilakukan sebelumnya. Hal ini merupakan ide baik untuk menyirkulasikan laporan audit sosial.

Langkah 9:

Melakukan kegiatan pemantauan terhadap strategi yang diterapkan dan hendaknya strategi yang dilaksanakan merupakan, beberapa langkah aktivitas. Sehingga dengan demikian rancangan, kedepan terhadap aktivitas dapat dipantau dengan baik.

Langkah 10:

Menuliskan segala apa yang dipantau tersebut dalam sebuah buku catatan sosial dan hendaknya si pencatat merupakan orang yang sama sehingga dapat diketahui budaya dan pengetahuan dari pencatat ini dan ini memudahkan untuk melakukan evaluasi nantinya dalam proses audit sosial.

Penghitungan sosial akan memberikan suatu pengertian yang jelas dari apa yang perusahaan lakukan sebagai sebuah perusahaan masyarakat, perusahaan lakukan dan yang sudah dicapai, berapa banyak biaya yang perusahaan keluarkan dan bagaimana bentuk serta pola perbedaan kelompok yang ada dalam perusahaan khususnya kelompok sosial diantara para pegawai perusahaan.

Review sasaran yang menjadi tujuan perusahaan dan apa yang dilihat oleh perusahaan jika sasaran tersebut masih sesuai.

- 1) Menganggap yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan
- 2) Target baru untuk tahun depan dan lebih baik lagi jika menggunakan alternatif jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Periksa pengumpulan informasi yang diperoleh dan lihat jika tersebut masih relevan dan berguna bagi keberlanjutan proses yang sedang berlangsung.
- 4) *Stakeholder* mendapatkan keuntungan dari perusahaan dalam kaitannya hubungan antar-stakeholder secara organisasi
- 5) Perusahaan berdiri secara hukum

Sebagian besar seorang pekerja atau pemilik suatu perusahaan merasa pekerjaan audit sosial memakan waktu dan tenaga yang mungkin dirasa sia-sia saja, karena tidak menghasilkan keuntungan finansial secara cepat. Tetapi pada dasarnya pekerjaan audit sosial merupakan pekerjaan yang sangat baik dan 'mulia', hal ini terkait dengan usaha dari audit sosial adalah semata-mata demi keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan sosial.

Audit sosial merupakan suatu pekerjaan yang diwajibkan bagi perusahaan pada masa sekarang ini terkait dengan *corporate social responsibility*. Artinya bahwa audit sosial adalah sesuatu yang sama nilainya dengan melakukan perancangan secara finansial. Karena perusahaan secara tidak langsung telah berusaha dan menggali segala milik yang semula dipunyai oleh masyarakat bukan dalam artian finansial dan kebendaan. Inti dari bisnis masyarakat dan perusahaan dan organisasi kemasyarakatan adalah untuk mencapai beberapa bentuk dari keuntungan sosial, masyarakat atau lingkungan. Keberlanjutan finansial atau keuntungan adalah sangat esensi atau merupakan tujuan yang memang harus dicapai dan untuk mencapai keuntungan tersebut, kecuali bila organisasi atau perusahaan tersebut disubsidi oleh pemerintah atau lembaga donor.

Organisasi dan asosiasi masyarakat yang terpengaruh oleh usaha untuk mencapai keuntungan sosial berarti membutuhkan pengetahuan tertentu dan hal tersebut dipakai untuk mencapai sesuatu yang obyektif. Artinya dengan melakukan audit sosial berarti keuntungan materil tergantikan dengan keuntungan sosial atau dalam arti menguangkan keadaan sosial sehingga perolehan secara sosial dapat berdampak ada tujuannya pada keuntungan finansial pada tujuannya.

Pelaporan sosial dan audit sosial adalah sebuah kerangka yang dilakukan dengan bantuan pengaudit sosial dari luar anggota sebuah organisasi untuk membangun dokumentasi dan pelaporan, dan membangun proses di mana organisasi tersebut dapat menghitung dan mengidentifikasi perwujudan sosial yang ada. Pelaporan sosial dan audit sosial ini menggambarkan sebuah rencana tindakan untuk meningkatkan perwujudan tersebut sesuai dengan visi dari perusahaan, dan perencanaan yang akan dilakukan. Semua ini dapat dilakukan melalui dampak yang terjadi pada

masyarakat dan dengan memperhitungkan masing- masing kepentingan *stakeholder*.

Perangkat laporan sosial yang dibuat mencakup :

- 1) Sebuah laporan pada hakikatnya terwujud dalam pernyataan yang saling berlawanan dengan sasaran yang tetap (bagaimana kondisi yang telah dijalankan dan dinyatakan akan dilakukan).
- 2) Penilaian dari dampak pada masyarakat (dapat ini diukur ? Apa yang masyarakat pikirkan dan ini hendaknya berisi tentang data deskripsi tentang masyarakat secara keseluruhan berkenaan dengan dampak yang terjadi. Ini menjadi pening karena masyarakat adalah sebuah *stakeholder* yang perlu mendapat pertimbangan bagi sebuah perusahaan.
- 3) Gambaran beberapa *stakeholder* pada sasaran kita dan nilai- nilai *stakeholder* (apakah sudah melakukan sesuatu yang benar).
- 4) Laporan pada bentuk perwujudan lingkungan tertentu dalam hal ini lingkungan alam dan sosial perusahaan berada ditempat yang kritis dan dengan sumber daya yang sangat minim dan bagaimana kondisi komunitas sebagai lingkungan sosial.
- 5) Laporan kebutuhan perusahaan menerapkan kesempatan adil.
- 6) Laporan pada kebutuhan perusahaan dengan kualitas dan prosedural yang standar.

Bab 12

Audit Lingkungan

Tujuan Pembelajaran

- 1) Untuk mengetahui cara mengaudit lingkungan
- 2) Untuk menganalisis laporan audit lingkungan
- 3) Untuk mengetahui laporan audit lingkungan
- 4) Untuk mengetahui kinerja audit lingkungan

12.1 Audit Lingkungan di Indonesia

Sebuah laporan pada hakikatnya terwujud dalam pernyataan yang saling berlawanan dengan sasaran yang tetap bagaimana kondisi yang telah dijalankan dan apa yang dinyatakan akan dilakukan. Penilaian dari dampak pada masyarakat. Hendaknya berisi tentang data deskripsi tentang masyarakat secara keseluruhan berkenaan dengan dampak yang terjadi. Ini menjadi pening karena masyarakat adalah sebuah *stakeholder* yang perlu mendapat pertimbangan bagi berjalannya sebuah organisasi atau perusahaan.

Gambaran beberapa *stakeholder* pada sasaran kita dan nilai- nilai *stakeholder* (apakah sudah melakukan sesuatu yang benar ? Apakah sudah berjalan pada jalan yang sesuai dengan yang dinyatakan. Laporan pada bentuk perwujudan lingkungan tertentu dalam hal ini lingkungan hidup alam dan sosial (apakah perusahaan berada ditempat yang kritis dan dengan sumber daya yang sangat minim dan bagaimana kondisi komunitas senagai lingkungan sosialnya, apakah mendukung program atau malah berlawanan.

Laporan pada kebutuhan perusahaan menerapkan kesempatan yang adil (apakah perusahaan melakukan tantangan inklusi sosial. Laporan pada kebutuhan perusahaan dengan kualitas dan prosedural yang standar (apakah

melakukan apa yang diharapkan. Fungsi audit lingkungan adalah (BAPEDAL, 1995), antara lain:

- 1) Upaya peningkatan penataan suatu usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, misalnya standar emisi udara, limbah cair, dan standar operasi lainnya.
- 2) Dokumen suatu usaha/kegiatan tentang pelaksanaan Standar Operasi Prosedur (SOP) pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk rencana tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan serta rencana perubahan pada proses dan peraturan.
- 3) Jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan kerusakan lingkungan.
- 4) Bukti keabsahan prakiraan dampak dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL, yang berguna dalam penyempurnaan proses AMDAL.
- 5) Upaya perbaikan penggunaan sumber daya melalui penghematan penggunaan bahan, minimisasi limbah dan indentifikasi kemungkinan proses daur ulang.
- 6) Upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha/kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan, misalnya pembangunan yang berkelanjutan, proses daur ulang dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Berikut ini meruapakan beberapa manfaat perusahaan/organisasi dalam menajalankan audit lingkungan (BAPEDAL, 1995; Hadiwiardjo, 1997)

- 1) Mengidentifikasi risiko lingkungan
- 2) Pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan.

- 3) Menghindari kerugian finansial seperti pembergentian suatu usaha atau kegiatan oleh pemerintah, atau publikasi yang merugikan akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- 4) Mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan atau terhadap pimpinan bersarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Membuktyikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila dibutuhkan dalam proses peradilan.
- 6) Meningkatkan keperdulian penanggung jawab dan staf suatu badan usaha/kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan terhadap kebijaksanaan dan tanggung jawab lingkungan.
- 7) Mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi, daan pengurangan pemakaian ulang dan daur ulang limbah.
- 8) Menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan, atau bagi keperluan kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah dan media masa.
- 9) Menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha/kegiatan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham.

Keberhasilan pelaksanaan audit lingkungan sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan pemilik atau pimpinan perusahaan dengan memberikan kebebasan bagi pelaksanaan audit untuk mengkaji hal yang dianggap berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan (BAPEDAL, 1995). Sama halnya dengan audit keuangan yang diperlukan untuk mengidentifikasi ada tidaknya kebocoran dalam pengelolaan keuangan suatu usaha, audit lingkungan diperlukan untuk memberikan data bagi pihak eksekutif dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengelolaan lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah

terjadinya pencemaran lingkungan dan memastikan agar kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku.

Ruang lingkup audit lingkungan menjelaskan tentang tujuan dan batas audit dalam faktor-faktor seperti lokasi fisik dan kegiatan organisasi sesuai dengan laporan. Ruang lingkup audit ditentukan oleh klien dan pimpinan auditor. Pihak yang diaudit harus juga ikut berkonsultasi dalam menentukan ruang lingkup audit. Beberapa perubahan yang memungkinkan dalam cakupan audit memerlukan persetujuan klien dan pimpinan auditor. Sumber yang berkenaan dengan audit harus sesuai dengan cakupan yang diinginkan (Anon, 1996). Aspek yang dikaji dalam audit lingkungan adalah :

1) Aspek Teknologi

Sebagai upaya untuk mengidentifikasi resiko dan meminimalisasi dampak kegiatan terhadap lingkungan, pengembangan pendekatan preventif dan penyelesaian masalah pada sumber dampak.

2) Aspek Manajemen Dan Organisasi

Pelaksanaan kegiatan sebagai upaya peningkatan efektivitas dan kinerja manajemen dalam mengatasi masalah lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

3) Aspek Administrasi

Upaya untuk peningkatan dan pemanfaatan informasi yang dipercaya serta penyempurnaan pengawasan internal terhadap informasi berkaitan dengan aspek lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.

Beberapa peranan audit lingkungan dalam pembangunan, sebagai berikut :

- 1) Audit lingkungan merupakan perangkat manajemen dalam pengelolaan lingkungan.
- 2) Audit lingkungan merupakan upaya peningkatan ketaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan.

- 3) Audit lingkungan dapat dijadikan bukti keabsahan rekomendasi AMDAL dan alat penyempurnaan dokumen AMDAL.
- 4) Audit lingkungan merupakan upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilakukan atau yang perlu dilaksanakan oleh usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan.

12.2 Auditing Sebagai Komponen Manajemen Lingkungan

Suatu manajemen lingkungan merupakan metode untuk menuntun suatu organisasi untuk mencapai dan mempertahankan kinerja sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan dan sebagai tanggapan terhadap peraturan yang secara konstan berubah, sosial, keuangan, ekonomi dan tekanan kompetitif, dan resiko lingkungan. Apabila beroperasi secara efektif, suatu sistem manajemen lingkungan korporat memberikan manajemen dan dewan direksi pengetahuan, yaitu :

- 1) Perusahaan menaati hukum dan peraturan lingkungan
- 2) Kebijakan dan prosedur secara jelas didefinisikan dan diumumkan ke bseluruh organisasi.
- 3) Resiko korporat yang bersal dari resiko lingkungan dinyatakan dan berada dibawah pengendalian.
- 4) Perusahaan mempunyai sumberdaya dan staff yang tepat untuk pekerjaan lingkungan, menggunakan sumber daya tersebut, dan dapat menengendalikan masa depan sumber daya tersebut.

Sistem manajemen lingkungan terdiri dari beberapa fungsi, yaitu :

1) Perencanaan

Menetapkan tujuan, menentukan kebijakan, mendefinisikan prosedur, dan menentukan anggaran program.

2) Mengorganisasi

Menetapkan struktur organisasi, melukiskan peranan dan tanggung jawab, menciptakan deskripsi posisi, menetapkan kualifikasi posisi dan melatih staff.

3) Menuntun dan Mengarahkan

Mengkoordinasi, memotivasi, menetapkan prioritas, mengembangkan standar kinerja, mendelegasi dan mengelola.

4) Mengkomunikasikan

Menembangkan dan mengimplementasikan saluran komunikasi yang efektif dalam korporat, dalam devinisi, dan dengan kelompok eksternal, termasuk pengatur apabila sesuai.

5) Mengendalikan dan Menelaah

Mengukur hasil, menyatakan kinerja, mendiagnosis masalah, mengambil tindakan korektif dan secara sengaja mencari cara-cara untuk belajar dari kesalahan masa lalu serta dengan demikian menciptakan perbaikan dalam sistem.

12.3 Jenis Audit Lingkungan

Audit lingkungan hidup ini ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sukarela. Audit wajib dilakukan kepada :

- 1) Usaha dan atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan seperti petrokimia, kilang migas, dan PLTN, audit ini harus dilakukan secara berkala.
- 2) Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan audit lingkungan yang bersifat sukarela dapat dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha sebagai alat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang bersifat internal yang didasarkan pada dokumen lingkungan hidup atau system manajemen lingkungan yang dimiliki. Apabila

penanggung jawab usaha ingin mempublikasikan laporan hasil audit lingkungan, maka audit lingkungan tersebut harus dilakukan oleh auditor lingkungan hidup eksternal.

12.3.1 Auditor Lingkungan Hidup

Auditor lingkungan hidup terdiri atas :

- a). Auditor lingkungan hidup perorangan
- b). Auditor lingkungan hidup yang bergabung dalam lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup.

12.3.2 Kompetensi

Auditor lingkungan hidup yang dapat melaksanakan audit lingkungan hidup adalah auditor yang mempunyai sertifikat auditor lingkungan hidup. Pasal 51 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup yang berlaku mulai tanggal 3 oktober 2010. Kriteria untuk memperoleh sertifikat auditor lingkungan hidup meliputi kemampuan :

1. Memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup
2. Melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan, kesimpulan dan pelaporan.
3. Merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.

Permen 17 tahun 2010 tentang Audit Lingkungan Hidup membedakan kualifikasi auditor menjadi dua yaitu auditor utama dan auditor dengan syarat kompetensi, sebagai berikut :

Auditor Utama	Auditor
Memahami prinsip, metodologi, dan	Memahami prinsip, metodologi,

tata laksana audit lingkungan hidup	dan tata laksana audit lingkungan hidup
Melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan.	Melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan
Merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan.	Merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup
Menunjuk dan mengoordinasikan kegiatan auditor di bawah tanggungjawabnya sebagai auditor utama.	
Merumuskan kesimpulan audit lingkungan hidup	
Mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan hasil audit lingkungan hidup ;dan	
Memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh LSK auditor ;ingkungan hidup.	Memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh LSK auditor lingkungan hidup.

Sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi auditor lingkungan hidup yang ditunjuk oleh Menteri LH. Sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup meliputi kegiatan :

- a. Penilaian kompetensi;
- b. Penerbitan sertifikat kompetensi

12.3.3 Penilaian Kompetensi

Penilaian kompetensi dilakukan dengan menggunakan data/informasi yang meliputi:

- a. Latar belakang pendidikan
- b. Pelatihan di bidang audit lingkungan hidup.
- c. Pengalaman kerja di bidang lingkungan hidup.
- d. Pengalaman melakukan audit lingkungan hidup.

Penilaian kompetensi dan persyaratan sertifikat kompetensi ditetapkan oleh lembaga sertifikasi auditor lingkungan hidup dengan persetujuan menteri.

12.3.4 Penerbitan Sertifikat Kompetensi

Penerbitan sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup dilakukan setelah lulus penilaian kompetensi. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh LSK lingkungan hidup yang ditunjuk Menteri LH.

Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup meliputi kemampuan untuk :

- a. Memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup.
- b. Melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan
- c. Merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.

Sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup.

12.4 Tata Cara Audit Lingkungan

Peraturan Menteri LH Nomor 17 Tahun 2010 menyatakan bahwa tata cara audit lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri. Namun sampai

dengan pertengahan Tahun 2011, Permen ini belum diterbitkan. Walaupun demikian, pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan telah diatur dalam keputusan Menteri LH sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1994. Kepmen ini mengamanatkan agar audit lingkungan dapat memberikan informasi mengenai :

- a) Sejarah atau rangkaian suatu usaha atau kegiatan, rona dan kerusakan lingkungan di tempat usaha atau kegiatan tersebut, pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan, serta isu lingkungan yang terkait.
- b) Perubahan rona lingkungan sejak usaha atau kegiatan tersebut didirikan sampai waktu terakhir pelaksanaan audit.
- c) Penggunaan input dan sumber daya alam, proses bahan bakar, bahan jadi, dan limbah termasuk limbah B3.
- d) Identifikasi penanganan dan penyimpanan bahan kimia, B3 serta potensi kerusakan yang akan timbul.
- e) Kajian risiko lingkungan
- f) System control manajemen, rute pengangkutan bahan dan pembuangan limbah, termasuk fasibilitas untuk meminimumkan dampak buangan dan kecelakaan.
- g) Efektivitas alat pengendalian pencemaran seperti ditunjukkan dalam laporan inspeksi, perawatan, uji emisi, uji rutin, dll.
- h) Catatan tentang lisensi pembuangan limbah dan penataan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk standard baku mutu lingkungan.
- i) Penataan terhadap hasil dan rekomendasi AMDAL (RKL-RPL)
- j) Perencanaan dan prosedur standar operasi keadaan darurat
- k) Rencana minimalisasi limbah dan pengendalian pencemaran lingkungan
- l) Penggunaan energy, air, dan sumber daya alam lainnya
- m) Program daur ulang, konsiderasi product life cycle

n) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan kepedulian lingkungan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1994 menyatakan bahwa audit lingkungan mempunyai karakteristik dasar sebagai berikut :

a. Metodologi

- a) Komprehensif untuk menjamin pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan serta dokumentasi dan pengujian informasi tersebut.
- b) Fleksibel agar auditor dapat menerapkan teknik-teknik yang tepat
- c) Berpodoman kepada rencana yang sistematis

b. Konsep pembuktian dan pengujian

Tim audit harus melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung untuk membuktikan semua data informasi yang diperoleh.

c. Pengukuran dan standard yang sesuai

Audit lingkungan harus membandingkan kinerja usaha atau kegiatan dengan standar yang sesuai dengan usaha atau kegiatan dan proses produksi yang diaudit.

d. Laporan tertulis

Laporan audit harus berupa laporan tertulis yang menyajikan hasil temuan yang akurat dengan dilandasi oleh bukti yang kompeten dan terdokumentasi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1994 juga mengatur pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan antara lain meliputi :

a) Tata Laksana

Tata laksana audit merupakan suatu rencana yang harus diikuti oleh auditor untuk mencapai tujuan audit yang diharapkan. Tata laksana audit ini diperlukan agar pelaksanaan dan pelaporan audit dapat

dilaksanakan secara konsisten. Tata laksana audit yang umum di gunakan antara lain daftar isian, checklist, daftar pertanyaan, dan pedoman.

b) Pelaksanaan Audit, meliputi tahapan-tahapan :

1) Pendahuluan

2) Pra-audit

Tahap ini menentukan keberhasilan pelaksanaan audit. Pada tahap pra-audit ini dilakukan pemilihan tata laksana audit, penentuan tim auditor, pendanaan pelaksanaan kegiatan audit, penetapan tujuan dan lingkup audit. Untuk dapat melaksanakan aktivitas dalam tahap ini diperlukan informasi antara lain informasi rinci mengenai aktivitas di lapangan, status hukum, struktur organisasi dan lingkup usaha yang akan diaudit.

Adapun pedoman pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan diatur oleh Kepmen LH Nomor 30 Tahun 2001. Kepmen ini mengatur bahwa tata laksana audit lingkungan hidup yang diwajibkan dilaksanakan sesuai dengan Standard Nasional Indonesia Nomor 19-14010-1997 tentang Pedoman Audit Lingkungan Prinsip Umum dan SNI 19-14012-1997 tentang pedoman Audit Lingkungan Kriteria kualifikasi auditor lingkungan dan bebas dari pertantangan kepentingan. Namun, SNI 19-14010-1997 dan SNI 14012-1997 telah digantikan dan SNI 19-19011-2005 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan atau lingkungan. SNI 19-19011-2005 mengadopsi secara keseluruhan (adopsi identik) ISO 19011:2001, Guidelines for Quality and or Environmental Management System. SNI 19-19011-2005 ini telah mengatur secara detail panduan tentang prinsip audit, pengelolaan program audit, pelaksanaan audit system manajemen mutu dan atau audit system manajemen lingkungan, serta panduan tentang kompetensi auditor system manajemen mutu dan atau system manajemen lingkungan.

12.5 Kegunaan Audit Lingkungan

Pada awalnya audit lingkungan digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang perilaku korporasi terhadap status lingkungan, dampak dan upaya pengendaliannya. Selanjutnya jika korporasi mulai dituntut untuk mengendalikan dampak lingkungan, audit lingkungan menjadi alat untuk pentaatan (compliance) terhadap regulasi internal maupun eksternal. Belakangan ini, pihak ketika seperti asuransi, bank, merger partners di dunia internasional mulai memperhatikan audit lingkungan karena ancaman penutupan, klaim kerusakan, gangguan liabilities, nama buruk pasar, dan tanggung jawab pada pemegang saham dan consumer. Perkembangan kebijakan perdagangan internasional juga akan menuntut audit lingkungan untuk membangun citra korporasi hijau (green corporation).

Bab 13

Akuntansi Manajemen Lingkungan

Tujuan Pembelajaran

- 1) Untuk pemahaman akuntansi manajemen lingkungan
- 2) Untuk mengetahui konsep akuntansi manajemen lingkungan
- 3) Untuk mengetahui proses akuntansi manajemen lingkungan
- 4) Untuk memahami pedoman akuntansi manajemen lingkungan

13.1 Definisi Akuntansi Manajemen Lingkungan

Menurut *International Federation of Accountants* (IFAC) akuntansi manajemen lingkungan atau *Environmental Management Accounting* (EMA) adalah IFAC (2005) :

”the management of environmental and economic performance through the development and implementation of appropriate environment-related accounting systems and practices. While this may include reporting and auditing in some companies, environmental management accounting typically involves life-cycle costing, full-cost accounting, benefits assessment, and strategic planning for environmental management.”

Akuntansi manajemen lingkungan adalah manajemen lingkungan dan kinerja ekonomi yang melalui perkembangan dan implementasi sistem dan praktek akuntansi yang berhubungan dengan lingkungan. Hal ini dapat berupa laporan dan audit pada beberapa perusahaan, tetapi ada yang lain seperti akuntansi manajemen lingkungan yang terdiri dari *life-cycle costing*, *full-cost accounting*, penilaian manfaat, dan perencanaan strategis untuk manajemen lingkungan.

Akuntansi manajemen lingkungan dapat pula didefinisikan sebagai “generasi analisis dan penggunaan informasi keuangan dan non-keuangan

untuk mengoptimalkan kinerja lingkungan dan ekonomi perusahaan untuk mencapai bisnis yang berkelanjutan” (Benneth et al. 2002). Akuntansi manajemen lingkungan memiliki bentuk informasi termasuk akuntansi moneter dan fisik yang bersifat internal organisasi dan juga berkaitan dengan integrasi masalah ekologis dan moneter (Burritt et al.2002), dan karena itu merupakan kegiatan manajemen yang relevan untuk organisasi sektor swasta dan sektor publik. Karena semua organisasi menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya dan kapasitas, semua kegiatan yang mereka lakukan harus memiliki nilai tambah dengan jelas.

Konsep akuntansi manajemen lingkungan digunakan untuk melakukan pemantauan dan pengevaluasian informasi yang terukur dari keuangan maupun manajemen serta arus data tentang bahan dan energi guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan-bahan maupun energi, mengurangi dampak lingkungan dari operasi perusahaan, mengurangi resiko-resiko lingkungan dan memperbaiki hasil dari manajemen perusahaan (Ikhsan, 2009). Bentuk informasi dari akuntansi manajemen lingkungan adalah :

1) Informasi fisik atau *Physical Environmental Management Accounting* (PEMA). PEMA merupakan pendekatan yang berfokus pada dampak perusahaan pada lingkungan (Schaltegger & Burritt, 2000). Akuntansi manajemen lingkungan menempatkan suatu penekanan tertentu terhadap materi penentu biaya karena : penggunaan energi, air dan materi seperti hasil dari limbah atau emisi, yang terkait secara langsung terhadap dampak organisasi yang mereka jalnkan. Biaya pembelian material merupakan pemicu biaya utama dalam organisasi, dimana banyak organisasi membeli energi, air dan bahna lainnya. Mendukung aktivitas yang mereka lakukan. Dalam suatu aturan pabrikasi, beberapa dari

pembelian bahan dikonversi ke dalam satu produk akhir yang disampaikan ke pelanggan. Operasi non pabrikasi yaitu agrikultur dan ternak, sektor ekstraksi sumber daya, sektor jasa, transport, sektor publik, juga dapat menggunakan satu pengaruh nyata dari sejumlah energi, air dan bahan-bahan untuk membantu menjalankan operasi mereka bergantung kepada bagaimana bahan itu di atur, dapat memimpin ke arah satu hasil yang signifikan dari limbah dan emisi. Contoh yang paling nyata dari bahan terkait dampak lingkungan adalah hasil dari limbah dan emisi, yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem alam, meliputi tanaman dan binatang. Lingkup luas kedua dari bahan terkait dampak lingkungan adalah dampak potensial dari produk fisik termasuk dengan produk dan kemasan yang dihasilkan oleh satu pabrik. Menjejak dan mengurangi jumlah energi, air dan bahan yang digunakan oleh pabrikasi, jasa dan perusahaan lain juga dapat memiliki manfaat upstreams tidak langsung bagi lingkungan, karena ekstraksi dari hampir semua bahan baku memiliki dampak lingkungan.

- 2) Informasi moneter atau *Monetary Environmental Management Accounting* (MEMA). MEMA merupakan aspek dalam akuntansi manajemen lingkungan yang diwujudkan dalam unit moneter (Schaltegger & Burritt, 2000). Kebanyakan dari skema dikembangkan secara internasional meliputi jenis biaya dengan jelas dipandu oleh upaya untuk mengendalikan atau mencegah limbah dan emisi yang dapat merusak lingkungan atau kesehatan manusia. Jenis dari biaya ini sering dikenal sebagai perlindungan pembelanjaan lingkungan. Perkembangan terbaru lainnya dalam area Akuntansi Manajemen Lingkungan adalah sebuah dorongan untuk melihat biaya pembelian dari seluruh sumber daya alam yaitu energi, air, bahan-bahan, saat lingkungan saling berhubungan. Dalam aturan perusahaan manufaktur, di mana kebanyakan dari

pembelian bahan-bahan dikonversi ke dalam produk fisik, hal ini akan mengijikan biaya lebih efektifitas manajemen dari bahan-bahan terkait dampak lingkungan dari seluruh produk. Biaya ini bagaimanapun dipandang sebagai suatu hal yang terkait dengan lingkungan, karena satu organisasi harus memiliki informasi untuk memenuhi aspek penilaian keuangan dari manajemen lingkungan terkait limbah fisik dan produk fisik. Sebagian besar informasi akuntansi secara fisik sayangnya tidak mudah tersedia untuk pegawai akuntansi, sebagaimana tidak secara sistematis dicatat atau tidak yang mencerminkan arus dunia nyata dari bahan-bahan. Akuntansi untuk seluruh energi, air, bahan-bahan dan barang sisa ke dalam dan keluar organisasi tersebut kesembangan bahan-bahan, kadang-kadang juga disebut dengan *input-output balance*, suatu *mass balance*, atau *eco-balance*.

Tabel 13.1

Kombinasi Akuntansi Manajemen Lingkungan

Akuntansi Manajemen Lingkungan			
Akuntansi dalam unit moneter		Akuntansi dalam unit fisik	
Akuntansi	MAML	PAML	Alat
Konvensional	Moneter AML	Pisik AML	Penilaian lainnya

Sumber : NCSR, 2008

13.2 Peranan Akuntansi Manajemen Lingkungan Terhadap Pengambilan Keputusan Internal

Pengambilan keputusan internal perusahaan yang mempertimbangkan kegiatan lingkungan dibahas di bawah ini:

- 1) Pengambilan Keputusan terkait Proses

Penetapan biaya produk yang benar adalah prasyarat untuk membuat keputusan bisnis yang sehat. Penentuan harga produk yang akurat diperlukan untuk keputusan strategis terkait volume dan pilihan produk yang akan diproduksi. Akuntansi Manajemen Lingkungan mengubah banyak biaya overhead lingkungan menjadi biaya langsung dan mengalokasikannya ke produk yang bertanggung jawab atas timbulnya mereka. Hasil peningkatan biaya akuntansi manajemen lingkungan meliputi:

- a) Harga produk yang berbeda sebagai hasil dari perhitungan ulang biaya;
- b) Evaluasi ulang margin keuntungan produk;
- c) Penghapusan produk tertentu ketika perubahannya dramatis;
- d) Mendesain ulang proses atau produk untuk mengurangi biaya lingkungan;
- e) Meningkatkan pemeliharaan dan pemantauan kinerja lingkungan.

2) Proyek Investasi dan Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan proyek investasi memerlukan perhitungan indikator profitabilitas yang berbeda seperti *Net Present Value* (NPV), *Payback Periods* (PBP) dan *Internal Rate of Return* (IRR) atau Rasio Biaya Manfaat. Mengenali dan menghitung biaya dan manfaat lingkungan sangat berharga dan diperlukan untuk menghitung profitabilitas proyek yang berkaitan dengan lingkungan. Tanpa perhitungan ini,, manajemen mungkin membuat kesalahan dalam pengambilan kesimpulan masalah lingkungan.

13.3 Teknik Akuntansi Manajemen lingkungan dalam Pengambilan Keputusan Internal

Bagian ini menjelaskan berbagai alat yang tersedia untuk pengambilan keputusan internal dengan mempertimbangkan kegiatan lingkungan dalam

bisnis. Teknik pengambilan keputusan dikategorikan dalam tiga kelompok utama, yaitu Analisis Biaya, Penilaian Investasi, dan Manajemen Kinerja (Wahyuni, 2009).

1) Alat akuntansi manajemen lingkungan untuk analisis biaya

analisis biaya mencakup *Life Cycle Assessment (LCA)*, *Activity Based Costing (ABC)* dan aliran biaya akuntansi bahan.

a) Penilaian Siklus Hidup

Para profesional lingkungan telah mengakui bahwa kegiatan produksi dapat memengaruhi pasokan sumber daya alam dan kualitas lingkungan; dampak lingkungan yang merugikan dapat terjadi pada setiap tahap dalam siklus hidup produk (Newell et al, 1994). Sarana untuk menguji dampak lingkungan dari suatu produk atau kegiatan di seluruh siklus hidupnya mulai dari bahan mentah hingga pembuangan disebut *Life Cycle Analysis (LCA)*. LCA adalah proses sistematis untuk mengevaluasi biaya siklus hidup suatu produk atau layanan dengan mengidentifikasi konsekuensi lingkungan dan menetapkan ukuran nilai moneter terhadap konsekuensi tersebut. LCA termasuk mengidentifikasi dan mengukur energi dan bahan yang digunakan serta limbah yang dilepaskan ke lingkungan, menilai dampak lingkungannya, dan mengevaluasi peluang untuk perbaikan. LCA akan menghasilkan data tentang pelepasan lingkungan dan dampaknya yang pada gilirannya memungkinkan entitas untuk mengidentifikasi peluang pencegahan polusi.

b) *Activity Based Costing (ABC)*

Penetapan biaya berbasis aktivitas memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan semua biaya, termasuk biaya lingkungan, dan biaya berdasarkan aktivitas (Newell et al, 1994). Lima alokasi utama dipertimbangkan dalam ABC dan meliputi volum emisii atau limbah,

Toksisitas emisi dan limbah yang diolah, dampak lingkungan ditambahkan (volume x input per unit volume), volume emisi yang diolah dan biaya relatif untuk perawatan berbagai jenis emisi ABC akan membuat informasi biaya yang lebih akurat tidak hanya untuk penetapan harga produk yang lebih baik.

c) Aliran Biaya Akuntansi (*Flow Cost Accounting*)

Analisis aliran material pada dasarnya dimaksudkan untuk mendefinisikan aliran material dan energi yang bergerak melalui sistem penciptaan nilai (seperti bisnis) selama periode tertentu. Menggabungkan perspektif Akuntansi Manajemen Lingkungan, perhitungan biaya aliran meliputi evaluasi potensi produksi yang lebih bersih di tingkat pabrik, perkiraan awal biaya penghasil limbah dan analisis mendalam tentang penilaian kuantifikasi volume dan komposisi berbagai aliran limbah dan energi serta emisi yang dikeluarkan juga sebagai pemahaman terperinci tentang penyebab limbah dan aliran energi serta emisi ini.

d) Alat Akuntansi Manajemen Lingkungan untuk Penilaian Investasi

Alat EMA untuk penilaian investasi adalah Total Cost Assessment (TCA) yang pada dasarnya merupakan analisis berdasarkan penganggaran modal.

e) *Total Cost Assessment* (TCA)

Penilaian biaya total mencakup biaya lingkungan ke dalam analisis penganggaran modal. Ini mengidentifikasi biaya ekonomi dan area penghematan biaya dari pencegahan polusi dalam analisis penetapan biaya tradisional. Badan Perlindungan Lingkungan AS mendefinisikan TCA sebagai analisis keuangan komprehensif jangka panjang dari berbagai biaya dan penghematan investasi yang dialami oleh organisasi

yang melakukan investasi. TCA bermanfaat dalam menilai proyek investasi dan melakukan analisis anggaran.

- f) Alat Akuntansi Manajemen Lingkungan untuk Manajemen Kinerja *Balance Scorecard* membantu entitas untuk mengukur secara komprehensif, termasuk masalah lingkungan, dalam hal manajemen kinerja atau evaluasi.
- g) *Environmental Balanced Scorecard* (EBS)

EBS dapat bertindak sebagai alat manajemen kinerja yang komprehensif dalam suatu organisasi. EBS adalah seperangkat pengukuran yang memberikan pandangan cepat dan komprehensif kepada manajer puncak tentang bisnis, termasuk efek dari Langkah operasional dan lingkungan berbagai perspektif perusahaan seperti kepuasan pelanggan, peningkatan internal, penelitian dan pelatihan, dan perspektif keuangan dan lainnya yang terkait dengan strategi bisnis.

13.4 Tujuan Akuntansi Manajemen Lingkungan

Lingkungan organisasi merupakan variabel yang sangat penting dalam menentukan strategi bisnis suatu perusahaan. Perubahan lingkungan yang terjadi mengakibatkan individu, organisasi, dihadapkan pada perusahaan yang dinamis untuk tetapi bertahan dan memiliki inovasi dalam persaingan bisnis (Ellitan, 2008). Dalam hal itu secara umum teknik akuntansi manajemen biasanya tidak memperdulikan buruknya perilaku perusahaan terhadap lingkungan.

Perusahaan yang terintegrasi, multinasional, dan besar cenderung akan menerapkan Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML) dalam proses akuntansi mereka melalui sejumlah pengidentifikasian terhadap biaya-biaya, proses bisnis maupun proses produksi, produk-produk, dan jasa. Meskipun sistem akuntansi konvensional yang ada tidak cukup mampu untuk

disesuaikan pada biaya-biaya lingkungan dan sebagai hasilnya hanya mampu menunjukkan akun untuk biaya umum tak langsung (Rustika, 2011).

Akuntansi manajemen lingkungan (AML) dikembangkan untuk berbagai keterbatasan dalam akuntansi manajemen konvensional. Beberapa poin berikut ini dapat menjadi alasan mengapa dan apa yang dapat diberikan oleh AML dibandingkan dengan akuntansi manajemen konvensional (Ikhsan, 2009):

- 1) Meningkatnya tingkat kepentingan 'biaya terkait lingkungan'. Seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, peraturan terkait lingkungan menjadi semakin ketat sehingga bisnis harus mengeluarkan investasi yang semakin besar untuk mengakomodasi kepentingan tersebut. Jika dulu biaya pengelolaan lingkungan relatif kecil, kini jumlahnya menjadi cukup signifikan bagi perusahaan. Banyak perusahaan yang kemudian menyadari potensi untuk meningkatkan efisiensi muncul dan besarnya biaya lingkungan yang harus ditanggung.
- 2) Lemahnya komunikasi bagian akuntansi dengan bagian lain dalam perusahaan. Walaupun keseluruhan perusahaan mempunyai visi yang sama tentang 'biaya', namun tiap-tiap departemen tidak selalu mampu mengkomunikasikannya dalam bahasa yang mudah diterima oleh semua pihak. Jika di satu sisi bagian keuangan menginginkan efisiensi dan tambahan biaya untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Walaupun ecoefficiency bisa menjadi jembatan antar kepentingan ini, namun kedua bagian tersebut berbicara dari sudut pandang yang bersebrangan.
- 3) Menyembunyikan biaya akuntansi dalam pos biaya umum (overhead). Ketidakmampuan akuntansi tradisional menelusuri dan menyeimbangkan akuntansi lingkungan dengan akuntansi keuangan menyebabkan semua biaya dari pengolahan limbah, perizinan dan lain-lain digabungkan dalam

biaya overhead; sebagai konsekuensinya biaya overhead menjadi 'membengkak'.

- 4) Ketidakpastian alokasi biaya lingkungan sebagai biaya tetap. Karena secara tradisional biaya lingkungan tersembunyi dalam biaya umum, pada saat diperlukan, akan menjadi sulit untuk menelusuri biaya sebenarnya dari proses, produk atau lini produksi tertentu. Jika biaya umum dianggap tetap, biaya limbah sesungguhnya merupakan biaya variabel yang mengikuti volume limbah yang dihasilkan berbanding lurus dengan tingkat produksi.
- 5) Ketidaktepatan perhitungan atas volume (dan biaya) atas bahan baku yang terbuang. Berapa sebenarnya biaya limbah? Akuntansi tradisional akan menghitungnya sebagai biaya pengelolaannya, yaitu biaya pembuangan atau pengolahan. AML akan menghitung biaya limbah sebagai pengolahan ditambah biaya pembelian bahan baku. Sehingga biaya limbah yang dikeluarkan lebih besar (sebenarnya) daripada biaya yang selama ini diperhitungkan.
- 6) Tidak dihitungnya keseluruhan biaya lingkungan yang relevan dan signifikan dalam catatan akuntansi. Banyak sekali biaya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan yang seharusnya diperhitungkan dengan benar agar tidak terjadi kesalahan pengambilan keputusan. Biaya tersebut umumnya meliputi biaya pengelolaan limbah, biaya material dan energi, biaya pembelian material dan energi dan biaya proses.

13.5 Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan

Terdapat beberapa manfaat potensial yang terhubung dalam penerapan akuntansi manajemen lingkungan. Hal ini termasuk pengurangan biaya (*cost reduction*), peningkatan harga produk (*improved product pricing*), daya tarik sumber daya manusia (*attraction of human resources*) dan peningkatan

reputasi (Bennet et al, 2003; Burrit et al, 2002; de Beer et al, 2006; Gibson dan Martin, 2004; Hansen dan Mowen, 2005:778). Penerapan akuntansi manajemen lingkungan umumnya akan bermanfaat bagi organisasi dengan menyediakan informasi berbeda untuk pengambilan keputusan (Adams dan Zuthsi, 2004; Benneth et al, 2003; Burritt et al, 2002). Informasi yang mungkin akan mengungkapkan peluang seperti proses pengelolaan limbah yang lebih baik, mengurangi penggunaan energi dan konsumsi bahan baku atau peluang untuk daur ulang material. Lingkungan informasi seperti ini juga digunakan dalam pengembangan proses yang lebih efisien dan dengan demikian mengarah kepada inovasi (Ferreira et al, 2009:923).

Pengguna akuntansi manajemen lingkungan sangat penting bagi industri. Menurut Ikhsan (2009:69) manfaat potensial penerapan akuntansi manajemen lingkungan diantaranya:

1. Kemampuan secara akurat meneliti dan mengatur penggunaan dan arus tenaga dan bahan-bahan, termasuk polusi/sisa volume, jenis-jenis lain lainnya.
2. Kemampuan secara akurat mengidentifikasi, mengestimasi, mengalokasikan, mengatur atau mengurangi, biaya-biaya, khususnya jenis lingkungan dari biaya-biaya.
3. Informasi yang lebih akurat dan lebih menyeluruh dalam mendukung, penetapan dari dan keikutsertaan di dalam program-program sukarela, penghematan biaya untuk memperbaiki kinerja lingkungan.
4. Informasi yang lebih akurat dan menyeluruh untuk mengukur dan melaporkan kinerja lingkungan, seperti meningkatkan citra perusahaan pada stakeholder, pelanggan, masyarakat lokal, karyawan, pemerintah, dan penyedia keuangan.

Menurut Guide to Corporate Environmental Cost Management (2003), manfaat dan keuntungan akuntansi manajemen lingkungan terdiri atas:

1. Kepatuhan (*Compliance*)

Akuntansi manajemen lingkungan mendukung lingkungan lewat kepatuhan efisiensi biaya dengan regulasi lingkungan dan kebijakan yang dikenakan sendiri.

2. *Eco-Effeciancy*

Akuntansi manajemen lingkungan mendukung pengurangan simultan dari biaya-biaya dan dampak lingkungan lewat penggunaan energi yang lebih efisien, air dan material dalam operasi internal dan produk akhir.

3. Posisi Strategic (*Strategic Position*)

Akuntansi manajemen lingkungan mendukung evaluasi dan implementasi dari program biaya efektif dan lingkungan sensitif untuk menjamin strategi jangka panjang.

a. Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan Bagi Pemerintah

Penerapan akuntansi manajemen lingkungan oleh industri juga dapat bermanfaat bagi pemerintah, antara lain :

- 1) Semakin banyak industri yang mampu membenarkan program lingkungan yang berdasarkan pada kepentingan keuangan perusahaan sendiri, penurunan keuangan, politik dan beban perlindungan lingkungan lainnya bagi pemerintah.
- 2) Penerapan akuntansi lingkungan oleh industri dapat memperkuat efektifitas keberadaan kebijakan pemerintah/regulasi dengan pernyataan kepada biaya-biaya perusahaan dan kebenaran manfaat lingkungan sebagai hasil dari kebijakan/aturan-aturan.
- 3) Pemerintah dapat menggunakan data akuntansi manajemen lingkungan industri untuk menaksir dan melaporkan ilmu tentang ukuran kinerja lingkungan dan keuangan untuk pemerintah.
- 4) Data akuntansi manajemen lingkungan industri digunakan untuk menginformasikan program kebijakan pemerintah.

- 5) Pemerintah dapat menggunakan data akuntansi manajemen lingkungan industri untuk mengembangkan ilmu tentang pengukuran dan pelaporan manfaat lingkungan serta pengungkapan keuangan suka rela dari industri, pendekatan inovatif dalam perlindungan lingkungan dan program lain serta kebijakan-kebijakan pemerintah.
 - 6) Data akuntansi manajemen lingkungan industri dapat digunakan untuk akuntansi tingkat nasional atau regional.
 - 7) Data akuntansi manajemen lingkungan pemerintah dapat digunakan untuk lingkungan dan keputusan-keputusan lainnya pada operasional pemerintah, termasuk didalamnya pembelian, penganggaran dan sistem manajemen lingkungan pemerintah daerah.
 - 8) Data akuntansi manajemen lingkungan dapat digunakan untuk menaksir dan melaporkan keuangan dan matriks kinerja lingkungan bagi operasional pemerintah.
- b. Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat
- Penerapan akuntansi lingkungan oleh industri juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, antara lain:
- 1) Mampu untuk lebih efisien dan efektif menggunakan sumber daya alam, termasuk energi dan air.
 - 2) Mampu untuk mengurangi efektifitas biaya dari emisi.
 - 3) Mengurangi biaya-biaya masyarakat luar yang berhubungan dengan polusi seperti biaya terhadap monitoring lingkungan, pengendalian dan perbaikan sebagaimana biaya kesehatan publik yang baik.
 - 4) Menyediakan peningkatan informasi untuk meningkatkan kebijakan pengambilan keputusan publik.

- 5) Menyediakan informasi kinerja lingkungan industri yang dapat digunakan dalam luasnya konteks dari evaluasi kinerja lingkungan dan kondisi-kondisi ekonomi serta area geografik.

13.6 Biaya Lingkungan

13.6.1 Definisi Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen (2009) adalah "Biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Maka, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan".

Biaya lingkungan merupakan segala pengorbanan baik finansial ataupun nonfinansial yang dikeluarkan oleh perusahaan guna menjaga kestabilan lingkungan. Biaya lingkungan adalah dampak, baik moneter atau non-moneter yang terjadi oleh hasil aktivitas perusahaan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan. Menurut Ikhsan (2009), biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Tujuan perolehan biaya adalah bagaimana cara mengurangi biaya-biaya lingkungan, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kinerja lingkungan dengan memberi perhatian pada situasi sekarang, masa yang akan datang dan biaya-biaya manajemen yang potensial. Biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal serta berhubungan dengan semua biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan. Definisi-definisi tambahan antara lain meliputi:

- 1) Biaya lingkungan meliputi biaya-biaya dari langkah yang diambil, atau yang harus diambil untuk mengatur dampak-dampak lingkungan terhadap aktivitas perusahaan dalam cara pertanggungjawaban lingkungan, seperti

halnya biaya lain yang dikemudikan dengan tujuan-tujuan lingkungan dan keinginan perusahaan.

- 2) Biaya-biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal dan berhubungan terhadap seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan.
- 3) Biaya lingkungan adalah pemakaian sumber daya disebabkan atau dipandu dengan usaha untuk 1) mencegah atau mengurangi bahan sisa dan polusi, 2) mematuhi regulasi lingkungan dan kebijakan perusahaan, 3) kegagalan memenuhi regulasi dan kebijakan lingkungan. Hansen Mowen (2006), biaya lingkungan dapat disebut biaya kualitas lingkungan (*environmental quality costs*). Sama halnya dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Maka, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan.

Biaya lingkungan dapat disebut biaya kualitas lingkungan (*environmental quality costs*). Sama halnya dengan biaya kualitas. Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Dengan demikian, biaya lingkungan berhubungan dengan ciptaan, deteksi, perbaikan, dan pencegahan terjadinya penurunan lingkungan (Hansen & Mowen, 2007).

13.6.2 Klasifikasi Biaya Lingkungan

Kualitas biaya lingkungan merupakan suatu teknik standar industri untuk mengevaluasi kecenderungan dalam biaya penuh dalam menjamin masing-masing akhir produk dan menyesuaikan jasa lebih dari yang dikehendaki pelanggan (Ikhsan, 2009). Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori (Hansen & Mowen, 2009):

- 1) Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh-contoh aktivitas pencegahan adalah evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi atau menghilangkan limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, memeriksa risiko lingkungan, pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan lingkungan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk, dan pemerolehan sertifikat ISO 14001.
- 2) Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection costs*) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan dapat meliputi : (1) peraturan pemerintah, (2) *voluntary standard* (ISO 14001) yang dikembangkan oleh International Standards Organization, dan (3) kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen. Contoh-contoh aktivitas deteksi adalah pemeriksaan aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses (agar ramah lingkungan), mengembangkan pengukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, pembuktian kinerja lingkungan dari pemasok, dan pengukuran tingkat pencemaran.
- 3) Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Jadi biaya kegagalan internal terjadi untuk menghilangkan dan mengolah limbah dan sampah ketika diproduksi. Aktivitas kegagalan internal memiliki salah satu dari dua tujuan :

- a) Memastikan bahwa limbah dan sampah yang diproduksi tidak dibuang ke lingkungan luar.
 - b) Mengurangi tingkat limbah yang dibuang sehingga jumlahnya tidak melewati standar lingkungan. Contoh-contoh aktivitas kegagalan internal adalah pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pengolahan dan pembuangan limbah-limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisesi fasilitas untuk memproduksi limbah dan daur ulang sisa bahan.
- 4) Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure costs*) adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal dapat dibagi lagi menjadi kategori yang direalisasi dan yang tidak direalisasi. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi (*realized external failure cost*) adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. Biaya kegagalan yang tidak dapat direalisasikan (*unrealized external failure cost*) atau biaya sosial (*societal cost*), disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan.

Selain itu, biaya kualitas lingkungan juga dapat diklasifikasikan menjadi biaya pengamatan (*monitoring costs*), biaya pengurangan (*abatement costs*), biaya pemulihan (*remediation costs*) yang meliputi biaya pemulihan di dalam lokasi (*onsite remediation*), dan biaya pemulihan di luar lokasi (*off-site remediation*) (Hilton, 2011).

1) Biaya Pengamatan (*Monitoring Costs*).

Biaya pengamatan merupakan biaya mengamati proses-proses produksi jika dihasilkan polusi. Contoh biaya untuk menguji limbah yang mencemari.

2) Biaya Pengurangan (*Abatement Costs*).

Biaya pengurangan adalah biaya yang terjadi untuk mengurangi polusi. Contoh mengubah desain produk untuk menggunakan bahan yang lebih mahal, tetapi tidak menyebabkan lingkungan menjadi tercemar.

3) Biaya Pemulihan (*Remediation Costs*)

a) Biaya Pemulihan di dalam Lokasi (*On-site Remediation*).

Biaya pemulihan di dalam lokasi adalah biaya untuk mengurangi atau mencegah pencemaran polutan ke lingkungan yang dihasilkan sebagai akibat proses produksi. Contoh biaya untuk memasang *scrubber* di cerobong untuk menghilangkan polusi udara.

b) Biaya Pemulihan di luar Lokasi (*Off-site Remediation*).

Biaya pemulihan di luar lokasi adalah biaya untuk mengurangi atau menghilangkan polutan dari lingkungan. Contoh : biaya membersihkan sungai yang tercemar akibat operasional perusahaan.

c) *International Federation of Accountants* (IFAC)

Model biaya lingkungan menurut *International Federation of Accountants* (IFAC), biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi enam kategori (2005) dapat dilihat pada tabel 13.2 dibawah ini.

Tabel 13.2
Klasifikasi Biaya Lingkungan IFAC

<p>1. Biaya Material dari Output Produk (<i>Materials Costs of Product Outputs</i>)</p> <p>Termasuk biaya penyediaan sumber daya seperti air dan biaya pembelian bahan lainnya yang akan diproduksi menjadi suatu output produk.</p>
<p>2. Biaya Material dari Output Non-Produk (<i>Materials Costs of Non-Product Outputs</i>)</p> <p>Biaya pembelian dan pengolahan sumber daya dan bahan lainnya yang menjadi output non-produk (limbah dan emisi).</p>
<p>3. Biaya Kontrol Limbah dan Emisi (<i>Waste and Emission Control Costs</i>)</p> <p>Biaya untuk penanganan, pengolahan dan pembuangan limbah dan emisi, biaya perbaikan dan kompensasi yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan, dan setiap biaya yang timbul karena kepatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku.</p>
<p>2. Biaya Pencegahan dan Pengelolaan Lingkungan (<i>Prevention and other Environmental Management Costs</i>)</p> <p>Biaya yang timbul karena adanya kegiatan pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif. Termasuk juga biaya pengelolaan lingkungan lainnya seperti perencanaan perbaikan lingkungan, pengukuran kualitas lingkungan, komunikasi dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan.</p>
<p>5. Biaya Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and Development Costs</i>)</p> <p>Biaya yang timbul karena adanya proyek-proyek penelitian dan pengembangan yang berhubungan dengan isu-isu lingkungan.</p>
<p>6. Biaya Tak Berwujud (<i>Less Tangible Costs</i>)</p> <p>Biaya internal dan eksternal yang tak berwujud. Contohnya adalah biaya</p>

yang timbul karena adanya kewajiban untuk mematuhi peraturan pemerintah agar di masa depan tidak muncul masalah lingkungan, biaya yang timbul untuk menjaga citra perusahaan, biaya yang timbul karena menjaga hubungan dengan stakeholder dan eksternalitas.

Sumber: *International Federation of Accountants (IFAC)*

United States Environmental Protection Agency (EPA) mengklasifikasikan biaya lingkungan dalam biaya konvensional, biaya tersembunyi, biaya kontingen, biaya image dan biaya sosial:

1) Biaya Konvensional

Biaya penggunaan material, utilitas, barang modal, dan bahan pembantu yang dimasukkan sebagai harga barang jadi tetapi seringkali tidak dimasukkan sebagai biaya lingkungan. Akan tetapi, penggunaan yang berkurang dari bahan-bahan di atas dan limbah yang berkurang lebih menguntungkan secara lingkungan.

2) Biaya Tersembunyi

Biaya tersembunyi adalah biaya tidak langsung yang berkaitan dengan desain produk dan proses yang ramah lingkungan, dan lain-lain.

3) Biaya Kontingen

Biaya kontingen adalah biaya yang termasuk atau tidak termasuk waktu yang akan datang, misal biaya kompensasi karena 'kecelakaan' lingkungan, denda dan lain-lain.

4) Biaya Image

Biaya image adalah biaya lingkungan yang bersifat *intangible* karena dinilai sangat subyektif.

5) Biaya Sosial

Biaya sosial merupakan biaya dari pengaruh bisnis pada lingkungan dan masyarakat disekitarnya, biaya ini juga disebut biaya eksternal atau *externalities*.

13.6.3 Pengukuran Biaya Lingkungan

IFAC (2005) menyatakan bahwa agar dapat mengelola dan mengurangi dampak lingkungan dari produk dan proses produksi, perusahaan harus memiliki data yang akurat mengenai jumlah dan tujuan dari semua energi, air dan bahan yang digunakan. Harus diketahui berapa yang digunakan, berapa yang menjadi produk akhir dan berapa yang menjadi limbah. Dengan diketahui data-data tersebut maka perusahaan diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan, pengendalian dan evaluasi terkait dengan pengelolaan lingkungan.

13.6.4 Strategi Biaya Lingkungan

Strategi yang bisa digunakan untuk mengatur biaya lingkungan (Hilton, 2011:561):

1) *End-of-pipe strategy*.

Menurut pendekatan ini perusahaan yang menghasilkan limbah atau polutan, kemudian akan membersihkannya sebelum tersebar ke lingkungan. Contoh strategi ini adalah scrubber pada cerobong asap, pengelolaan limbah, dan penyaringan udara.

2) *Process improvement strategy*.

Menurut pendekatan ini, perusahaan memodifikasi produk dan proses produksi agar menghasilkan sedikit atau tidak menghasilkan polutan, selain itu juga menemukan cara untuk melakukan daur ulang limbah sendiri.

3) *Prevention strategy*.

Strategi ini perusahaan menghindari semua masalah dengan peraturan yang ada pada banyak kasus dapat menghasilkan.

Bab 14

Pelaporan Berkelanjutan

Tujuan Pembelajaran

- 1) Untuk mengetahui pelaporan berkelanjutan
- 2) Untuk mengetahui konsep pelaporan berkelanjutan
- 3) Untuk mengetahui proses pelaporan berkelanjutan
- 4) Untuk memahami pedoman akuntansi manajemen lin

14.1 Pemahaman *Sustainability Report*

Laporan berkelanjutan (*sustainability report*) adalah laporan yang memberikan informasi tentang dampak sosial ekonomi dan kinerja organisasi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. (Pedoman GRI 2006) Pelaporan berkelanjutan tidak hanya mencakup pembuatan laporan, tetapi merupakan suatu metode untuk menginternalisasi dan meningkatkan komitmen organisasi untuk pembangunan berkelanjutan dengan cara yang nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.

Szekely (2005) menyatakan bahwa *sustainability* adalah bagaimana membangun masyarakat dimana ekonomi, social dan tujuan ekologi harus seimbang. Salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengukur *corporate sustainability* adalah pendekatan *triple bottom line*. Pendekatan tersebut melibatkan tiga dimensi yakni:

- 1) Environmental (lingkungan); mengukur dampak pada sumber daya seperti udara, air, emisi limbah.
- 2) Social (sosial); berhubungan dengan *corporate governance*, motivasi, insentif, keamanan dan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, hak asasi manusia dan perilaku etis.

3) Economic (ekonomi); mengacu pada pengukuran pemeliharaan atau peningkatan keberhasilan perusahaan sebagai contoh, teknologi dan inovasi, kolaborasi, manajemen pengetahuan, pembelian, proses dan pelaporan *sustainability*.

Konsep *sustainability* ini yang paling terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada dengan efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu kita juga harus menghindari hal atau pengeluaran, resiko yang tidak perlu serta menghindari limbah sehingga tidak menghabiskan cadangan sumber daya lingkungan, meningkatkan material dan efisiensi energi untuk generasi masa depan. Organisasi perlu menjalankan pelaporan keberlanjutan untuk benchmark dan mengevaluasi kinerja keberlanjutan.

Untuk menjadi alat perbandingan mengenai tata kelola perusahaan dan membuka jalan untuk berdialog dengan pembuat laporan mengenai berbagai hal yang terkait dengan keberlanjutan. Setelah keputusan pelaporan keberlanjutan diambil, tim dibentuk untuk melaksanakan proses. Langkah pertama dalam proses implementasi adalah membangun kapasitas tim dan menciptakan kesadaran di seluruh organisasi. Sebuah penilaian materialitas kemudian dilakukan yang merupakan proses identifikasi dan evaluasi risiko usaha yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan yang berbeda dalam lingkup ekonomi, lingkungan dan sosial dan peran mereka bagi organisasi. Hal ini melibatkan identifikasi masalah dan pemangku kepentingan dan penetapan prioritas menggunakan protokol Global Reporting Initiative (GRI).

Pelaporan kemudian dikembangkan dengan menggunakan GRI Framework. Isi laporan terdiri dari ruang lingkup, batasan-batasan dan kelengkapan. Kualitas laporan tergantung pada keseimbangan, komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan dan keandalan.

14.2 Tujuan *Sustainability Report*

Laporan keberlanjutan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Sebuah laporan keberlanjutan harus menyediakan gambaran yang berimbang dan masuk akal dari kinerja keberlanjutan sebuah organisasi baik kontribusi yang positif maupun negatif. Laporan Keberlanjutan yang disusun berdasarkan Kerangka Pelaporan GRI mengungkapkan keluaran dan hasil yang terjadi dalam suatu periode laporan tertentu dalam konteks komitmen organisasi, strategi, dan pendekatan manajemennya. Laporan dapat digunakan untuk tujuan berikut, diantaranya:

- 1) Patok banding dan pengukuran kinerja keberlanjutan yang menghormati hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela;
- 2) Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh harapannya mengenai pembangunan berkelanjutan; dan
- 3) Membandingkan kinerja dalam sebuah organisasi dan di antara berbagai organisasi dalam waktu tertentu.

Selain itu organisasi menerbitkan tujuan dari laporan keberlanjutan adalah untuk:

- 1) Menunjukkan komitmen terhadap lingkungan atau isu-isu sosial, kepada karyawan dan masyarakat yang mereka layani
- 2) Mempromosikan transparansi dan meminta umpan balik atas kinerja dalam menanggapi tuntutan informasi dari pihak investor, pelanggan, regulator, dan organisasi non pemerintah.
- 3) Menunjukkan upaya untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pihak eksternal seperti masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- 4) Mengelola dan mengkomunikasikan risiko secara lebih baik.

- 5) Meningkatkan atau melindungi reputasi.
- 6) Menumbuhkan nilai pemegang saham dan nilai merek.

14.3 Prinsip *Sustainability Report*

1) Menurut Cahyandito (2011), laporan pertanggungjawaban sosial digunakan untuk menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial suatu perusahaan. Terdapat Prinsip dalam penyusunan *sustainability reporting*, sehingga membuat informasi yang tertuang di dalam *sustainability reporting* menjadi informasi yang berkualitas dan memadai. Prinsip ini sangat fundamental bagi terwujudnya transparansi yang efektif. Kualitas informasi akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk membuat penilaian yang masuk akal serta kinerja organisasi.

2) Keseimbangan

Laporan harus menggambarkan aspek positif dan negatif dari kinerja perusahaan untuk dapat memungkinkan penilaian yang masuk akal terhadap keseluruhan kinerja. Keseluruhan penyajian isi laporan harus menyajikan gambaran yang tidak bias terhadap kinerja organisasi. Laporan harus menghindari pemilihan, penghilangan, atau penyajian format yang memungkinkan kesalahan penilaian oleh pembaca laporan.

3) Dapat diperbandingkan

Isu dan informasi harus dipilih, dikumpulkan, dan dilaporkan secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dalam sebuah cara yang memungkinkan pemangku kepentingan dapat menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi lainnya. Perbandingan sangat dibutuhkan dalam mengevaluasi kinerja. Pemangku kepentingan yang menggunakan laporan harus dapat membandingkan informasi kinerja

ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dilaporkan dengan kinerja organisasi sebelumnya, sasarannya, dan apabila memungkinkan dengan kinerja organisasi lainnya. Konsistensi dalam melaporkan memungkinkan pihak internal dan eksternal untuk melakukan perbandingan.

- 4) Kecermatan informasi yang dilaporkan harus cukup cermat dan detail bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja organisasi.
- 5) Ketepatan waktu laporan dilakukan berdasarkan jadwal reguler serta informasi kepada pemangku kepentingan tersedia tepat waktu ketika dibutuhkan dalam mengambil kebijakan. Kegunaan informasi akan sangat terkait dengan apakah waktu pengungkapannya kepada pemangku kepentingan dapat memungkinkan mereka untuk mengintegrasikannya secara efektif dalam pembuatan kebijakan yang mereka lakukan.
- 6) Kejelasan informasi harus disediakan dalam cara yang dapat dimengerti dan diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan. Laporan harus 20 menyajikan informasi dalam cara yang dapat dimengerti, dapat diakses, dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan organisasi (baik dalam bentuk cetak maupun saluran lainnya). Pemangku kepentingan harus dapat menemukan informasi yang dibutuhkannya tanpa harus bekerja keras. Informasi harus disajikan dalam cara yang komprehensif kepada pemangku kepentingan yang telah memiliki pemahaman akan organisasi dan aktivitasnya.
- 7) keterandalan informasi dan proses yang digunakan dalam penyiapan laporan harus dikumpulkan, direkam, dikompilasi, dianalisis, dan diungkapkan dalam sebuah cara yang dapat diuji dan dapat membentuk kualitas dan materialitas dari laporan. Pemangku kepentingan harus yakin bahwa sebuah laporan dapat dicek ketepatan dan ketelitian isinya serta tingkatan Prinsip Pelaporan yang digunakan. Informasi dan data yang

termasuk dalam laporan harus didukung oleh pengendalian internal atau dokumentasi.

14.4 Upaya Penerapan *Sustainability Reporting* di Indonesia

Sustainability Reporting di Indonesia baru masuk pada tahap pengenalan. Beberapa perusahaan di Indonesia memang mulai tertarik untuk mengembangkan *sustainable reporting*. Ketertarikan itu terutama terjadi pada perusahaan yang mempunyai kehadiran secara global atau merupakan langkah pelaporan dalam kaitan dengan pelaporan di tingkat kantor pusat dari suatu perusahaan multinasional.

Sebagai langkah awal, Kantor Kementerian Lingkungan Hidup sudah berupaya mengenalkan hal ini bersama-sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui induk kelembagaan internasionalnya yaitu ACCA (*Association of Chartered Certified Accountants*) pada tahun 2004. Dari kerjasama yang dihasilkan suatu panduan yang diberi judul “*An Introduction to Sustainability Reporting for Organisations in Indonesia*”. Sebagai suatu upaya pengendalian, publikasi ini mencakup penjelasan mendasar mengenai meningkatkan kebutuhan untuk melaporkan lingkungan dan aspek *sustainability* dari suatu bisnis yang akan membantu perusahaan dalam mencapai keberlanjutan usahanya. Sebagai acuan dari pelaporan, digunakan GRI *Guidelines* tahun 2002 yang disajikan secara ringkas.

Untuk mendukung proses pengenalan tersebut diadakan *Sustainability Reporting Award* pada tahun 2005 lalu. *Indonesian Sustainability Reporting Award 2005* diselenggarakan oleh IAI, KLH, BEJ, *National Committee on Governance* (NCG), *Indonesian Netherlands Association* (INA) dan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). Ada tiga kategori award yang diberikan yaitu *Environmental Reporting Award*, *Social Reporting Award* dan *Social and Environmental Reporting Award*. Kriteria penilaian

yang digunakan mengacu pada kriteria internasional yang diterapkan ACCA (*The Association of Chartered Certified Accountants*) di berbagai negara dengan melakukan modifikasi sesuai kondisi Indonesia. Untuk *Indonesian Sustainability Award 2005* tersebut, kriteria-kriteria yang dipakai ialah sebagai berikut:

- 1) Kelengkapan (*Completeness*), meliputi: profil perusahaan, dampak penting, kebijakan sosial/lingkungan, komitmen manajemen, target dan tujuan kebijakan sosial/lingkungan, layanan produk dan jasa, kebijakan pengadaan bahan baku dan isu-isu yang terkait dengannya, kebijakan pelaporan dan pembukuan, serta hubungan antara pelaporan sosial/lingkungan dengan masalah pembangunan yang berkelanjutan.
- 2) Kepercayaan (*Credibility*), meliputi: pencapaian utama saat ini, penyebutan anggota tim yang bertanggung jawab untuk isu sosial/ekonomi, sistem manajemen dan integrasinya ke kegiatan usaha, perencanaan ketidakpastian dan manajemen risiko proses audit internal, ketaatan atau ketidaktaatan terhadap peraturan, data-data mengenai dampak sosial/ekonomi, data-data keuangan konvensional yang berhubungan, laporan keuangan sosial/lingkungan dan full cost accounting, akreditasi atau sertifikasi ISO, penjabaran mengenai interaksi dengan pihak terkait atau proses dialog, pemanfaatan masukan dari pihak-pihak yang terkait, serta pernyataan dari pihak ketiga.
- 3) Komunikasi, meliputi: tata letak dan penampilan, kemudahan dan dipahami, dibaca dan proporsional uraian tiap bagian, mekanisme komunikasi dan umpan balik, ringkasan pelaporan atau *executive summary*, tersedia petunjuk kemudahan untuk membaca laporan, pemanfaatan sarana internet, acuan bagi website dan pelaporan lain, dan hubungan antar pelaporan, kesesuaian grafik, gambar dan foto dengan narasi, dan integrasi dengan laporan keuangan.

14.5 *Green Economy*

Mengenal ekonomi hijau sebenarnya tidak sulit, apa yang disebut dengan ekonomi hijau adalah perekonomian yang tidak merugikan lingkungan hidup. Program lingkungan PBB (UNEP; *United Nations Environment Programme*) dalam laporannya berjudul *Towards Green Economy* menyebutkan, ekonomi hijau adalah ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam.

Ekonomi hijau dalam kalimat sederhana dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon (tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan), hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Kemudian apa bedanya ekonomi hijau (*green economy*) dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)?. Konsep ekonomi hijau melengkapi konsep pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan adalah “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi hijau merupakan motor utama pembangunan berkelanjutan.

UNEP menetapkan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2012 adalah “*Green Economy: Does it include you?*”. Dalam konteks Indonesia, tema tersebut diadaptasi sebagai Tema Hari Lingkungan Hidup Indonesia 2012 menjadi “Ekonomi Hijau: Ubah perilaku, tingkatkan kualitas lingkungan”. Dari sini terlihat pentingnya perubahan paradigma dan perilaku untuk selalu mengambil setiap kesempatan dalam mencari informasi, belajar dan melakukan tindakan demi melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Dengan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pola hidup masyarakat modern telah membuat pembangunan sangat eksploitatif terhadap sumber daya alam dan mengancam kehidupan. Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan produksi terbukti membuahkan perbaikan ekonomi, tetapi gagal di bidang sosial dan lingkungan. Sebut saja, meningkatnya emisi gas rumah kaca, berkurangnya areal hutan serta musnahnya berbagai spesies dan keanekaragaman hayati. Ketimpangan rata-rata pendapatan penduduk negara kaya dengan negara miskin.

Konsep ekonomi hijau diharapkan menjadi jalan keluar. Menjadi jembatan antara pertumbuhan pembangunan, keadilan sosial serta ramah lingkungan dan hemat sumber daya alam. Tentunya konsep ekonomi hijau baru akan membuahkan hasil jika kita mau mengubah perilaku. Di Indonesia Negara yang sedang berkembang ini, tentu banyak perusahaan industry. Kenapa banyak industri di Indonesia tentu saja karena masih banyak SDA yang belum bisa di olah. Umumnya yang mengolah SDA tersebut yaitu mayoritas dari perusahaan luar, seperti perusahaan mesin, teknologi, pakaian, dan makanan. Hal tersebut terjadi karena Indonesia belum bisa mengolah SDA karena keterbatasan teknologi. Namun dampak positif nya seperti pendapatan Negara bertambah, tetapi memiliki dampak yang negative pula bahkan terhadap lingkungan. Seperti limbah dari perusahaan industry tersebut yang dibuang sembarang atau limbah polusi yang besar. Jika telah merusak lingkungan tentu akan mengganggu ekosistem, bahkan manusia.

Salah satu solusinya yaitu dengan kebijakan *Green Economy*. *United Nations Environment Programme* (UNEP) memberikan pengertian ekonomi hijau sebagai kegiatan perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di satu sisi, tetapi disisi lain mampu menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Lalu menurut Sudariyono, yaitu Deputi

Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas, menyebutkan ekonomi hijau mampu mengubah praktek ekonomi yang mementingkan keuntungan, menjadi perekonomian yang lebih ramah lingkungan.

Ekonomi hijau yaitu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam kegiatan perekonomian. Jangan karena mementingkan keuntungan jangka pendek malah merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan sangat berakibat fatal bagi manusia, karena kegiatan perekonomian juga tergantung pada lingkungan. Kebijakan *green economics* sangat perlu agar tidak terjadinya perusakan lingkungan. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian tanpa merusak lingkungan. *Green economy* atau disebut juga ekonomi hijau menurut UNEP (Badan PBB untuk program lingkungan Hidup) adalah suatu model pembangunan suatu model pembangunan untuk mencegah meningkatnya emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Model ini punya peran untuk menggantikan model hitam yang boros konsumsi bahan bakar fosil, batu bara, dan gas alam. *Green Economy* dipakai atas dasar pentingnya ekosistem buol aktivitas manusia sebagai pelaku ekonomi dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Selain itu, *green economy* juga jadi jalan keluar agar lingkungan yang ada tercipta bersih dan bebas polusi.

14.6 Prinsip untuk Ekonomi Hijau

1) Pemerataan Distribusi Kesejahteraan

Mengupayakan distribusi kesejahteraan yang adil di dalam suatu negara dan antar bangsa, untuk mengurangi perbedaan antara si kaya dan si miskin, dan mencapai keadilan sosial dan ekonomi, dalam bagian yang berkelanjutan dan sumber daya yang adil di dunia dan meninggalkan ruang yang cukup untuk satwa liar dan hutan belantara.

2) Ekuitas dan Keadilan Ekonomi

Dipandu oleh prinsip persamaan tetapi tanggung jawab berbeda, menciptakan kemitraan ekonomi yang akan mentransfer bantuan keuangan dan teknologi yang cukup besar ke negara-negara kurang berkembang, untuk membantu meminimalkan kesenjangan antara dunia maju dan berkembang dan mendukung kelestarian lingkungan kedua Negara tersebut.

3) Ekuitas Antargenerasi

Sumber daya lingkungan dan ekosistem harus hati-hati dikelola dan dijaga sehingga dapat meningkatkan nilai aset lingkungan untuk generasi mendatang, sehingga secara adil memenuhi kebutuhan mereka mendatang memungkinkan mereka untuk berkembang.

4) Pendekatan Pencegahan

Ilmu harus digunakan untuk meningkatkan hasil-hasil sosial dan lingkungan, melalui identifikasi risiko terhadap lingkungan. Ketidakpastian ilmiah dampak lingkungan tidak akan menghindari langkah-langkah untuk mencegah degradasi lingkungan. Sebuah ‘beban pembuktian’ harus berbohong dengan mereka yang mengklaim bahwa tidak akan ada dampak lingkungan yang signifikan.

5) Hak untuk Berkembang

Perkembangan manusia yang selaras dengan lingkungan merupakan dasar untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan, sehingga individu dan masyarakat diberdayakan untuk mencapai hasil-hasil sosial dan lingkungan yang positif.

6) Internalisasi Eksternalitas

Membangun nilai sosial dan lingkungan yang sebenarnya harus menjadi tujuan utama kebijakan. Untuk tujuan ini, harga pasar harus

mencerminkan biaya sosial dan lingkungan secara nyata, sehingga si pembuat polusi yang menanggung biaya polusi.

7) Kerjasama Internasional

Penerapan standar lingkungan dalam Negara bangsa harus dilakukan dengan cara kerjasama dengan masyarakat internasional, berdasarkan persamaan pemahaman tentang kemungkinan dampak yang bisa terjadi pada pengembangan Negara lain. Langkah-langkah lingkungan yang terkait dengan perdagangan harus menghindari perlindungan lingkungan yang tidak adil, tapi secara keseluruhan harus memastikan perdagangan yang mendukung penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan standar perburuhan yang progresif, mempromosikan ‘perlombaan menuju puncak’ daripada ke bawah.

8) Kewajiban Internasional

Mengakui bahwa tindakan dalam batas-batas nasional dapat menyebabkan dampak lingkungan di luar yurisdiksi nasional, membutuhkan kerja sama dalam pengembangan hukum internasional yang memungkinkan sebagai ‘obat’ peradilan yang independen dalam kasus tersebut.

9) Informasi, Partisipasi dan Akuntabilitas

Semua warga negara harus memiliki akses ke informasi mengenai lingkungan, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memastikan bahwa masalah lingkungan ditangani dengan partisipasi dari semua warga yang peduli, lembaga di semua tingkat (nasional dan internasional) harus demokratis dan diperhitungkan, serta menggunakan alat-alat yang memungkinkan masyarakat sipil untuk dapat mempertahankan mereka untuk tetap diperhitungkan. Dalam hal ini, akses terhadap keadilan oleh warga

negara untuk memperbaiki dalam hal lingkungan adalah landasan meningkatkan akuntabilitas.

10) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Memperkenalkan produksi yang konsumsi berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan adil. Mengurangi dan menghilangkan pola-pola yang tidak berkelanjutan baik dari produksi maupun konsumsi, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang bahan yang digunakan (3R: Reduce, Reuce, Recycle), mengakui kelangkaan sumber daya Bumi dan melaksanakan kegiatan yang sesuai.

11) Hanya Transisi

Dalam mengejar pembangunan berkelanjutan ekonomi hijau, akan ada biaya dalam membuat transisi ke karbon rendah. Beberapa negara dan pelaku ekonomi akan lebih mampu menanggung biaya tersebut dari yang lain dan lebih tahan terhadap transisi perubahan transisi. Dalam proses perubahan, yang paling rentan harus didukung dan dilindungi - negara berkembang harus memiliki akses untuk bantuan keuangan dan teknis yang tepat, warga negara dan masyarakat juga harus memiliki akses untuk keahlian dan pekerjaan baru.

12) Mendefinisikan Kembali Kesejahteraan

GDP (*Gross Domestic Product*) adalah alat yang memadai untuk mengukur kesejahteraan sosial dan integritas lingkungan. Banyak kegiatan sosial dan kerusakan lingkungan meningkatkan GDP - seperti eksploitasi bahan bakar fosil dan spekulasi keuangan. Kesejahteraan manusia dan kualitas hidup, dan kesehatan lingkungan harus menjadi tujuan untuk membimbing pembangunan ekonomi.

13) Kesetaraan *Gender*

Kesetaraan dan kesamaan *gender* merupakan prasyarat untuk transisi ke ekonomi hijau dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Perempuan memiliki peran penting sebagai agen perubahan untuk pengelolaan lingkungan dan pengembangan - tindakan mereka harus dihargai dengan seharusnya dan keterampilan mereka harus ditingkatkan.

14) Menjaga Keanekaragaman Hayati dan Mencegah Polusi dari Setiap Bagian dari Lingkungan

Melindungi dan mengembangkan keanekaragaman hayati dan habitat alami sebagai bagian integral pembangunan dan kesejahteraan manusia, dan mengembangkan sistem pemerintahan yang melindungi ketahanan ekosistem untuk mencegah kerusakan permanen.

14.7 Tantangan dan Peluang *Green Economy*

Umumnya kita melihat krisis finansial dipisahkan dari upaya perbaikan kualitas lingkungan, bahkan seringkali upaya perbaikan lingkungan dikorbankan hanya untuk perbaikan ekonomi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kejadian bencana di Indonesia dalam periode 2003-2005 saat terjadi 1429 kejadian bencana. Sekitar 53,3% adalah bencana yang terkait dengan hidro-meteorologi. Banjir adalah bencana yang paling sering terjadi (34%) diikuti oleh longsor (16%). Menurut UN *Officer for the Coordination of Humanitarian Affairs* mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang rentan terhadap bencana yang terkait dengan iklim. Adapun kerugian ekonomi dari data World Bank (2006) menyebutkan bahwa kerugian global akibat perubahan iklim mencapai US\$ 4,3 triliun. Kerugian ini akan menjadi beban tanggungan Negara-negara berkembang dan miskin yang relatif memiliki keterbatasan kemampuan adaptasi akibat keterbatasan modal dan teknologi.

Memperlihatkan Negara-negara seperti Korea Selatan, Bangladesh, Srilanka, Cina, USA, Jerman, Inggris, yang sudah melaksanakan *green economy* dengan membuat kebijakan fiskal dan alokasi dana yang lebih besar untuk program-program adaptasi dan mitigasi. Pada saat ini Indonesia memberikan dana stimulant yang terbesar pada kegiatan infrastruktur, padahal Amerika dan Negara-negara tersebut diatas mengalokasikan dana stimulant untuk pembangunan ekonomi rendah karbon antara lain untuk energi efisiensi, membangun energi terbarukan, mengembangkan otomotif industri rendah karbon dimana dengan cara ini juga membuat lapangan kerja baru.

Indonesia juga dengan mendorong pelaksanaan program CDM, dan dengan adanya UU Persampahan dimana pembuangan sampah yang “open dumping” harus merubah menjadi *landfill* dan upaya pembakaran gas metan bahkan ada yang dijadikan listrik. Selain itu, industri kelapa sawit menggunakan limbah cangkangnya menjadi bahan bakar bahkan bisa juga diproduksi listrik. Dan juga di gedung-gedung dilakukan energi efisiensi dapat menghemat biaya listrik sampai 20%, bahkan bisa lebih besar bila adanya penggantian bahan perusak ozon pada chiller akan menambah efisiensinya menjadi 40%.

CDM di Indonesia dari sector energi sebesar 125 juta ton CO₂, sector kehutanan 140 juta ton CO₂, totalnya adalah 265 juta CO₂. Belum lagi bilamana kita berani mengembangkan REDD sebagai alternative devisa Negara dari sektor kehutanan. Beberapa provinsi sudah melakukan beberapa aktifitas yang mengarah kepada *green economy* seperti di Yogyakarta melakukan efisiensi energi listrik sebesar 35-47%. Dana yang bias disimpan

ini digunakan untuk investasi energi terbarukan yang dipakai oleh masyarakat yang tidak dapat listrik dari PLN. Semua aktifitas ini juga membuka lapangan pekerjaan baru misalnya pemasangan dan pemeliharaan energi terbarukan.

Kegiatan industri yang dilakukan adalah mencari *alternative energy*, upaya yang dilakukan adalah melaksanakan CSR-nya dengan menanam pada lokasi bekas tambang tanaman produktif untuk petani penggarap dan jathropa untuk perusahaan semen sebagai energi alternatif. Selain itu melakukan bantuan pada pengelolaan sampah yang dijadikan kompos sebagai pupuk untuk petani yang bahan bakar alternative untuk industri semennya. Pendekatan CSR seperti ini juga dilakukan oleh Coca Cola dimana perusahaan ini sangat aktif dalam program lingkungan untuk konservasi air. Pendekatan ini dianjurkan juga agar dilaksanakan oleh semua industri, yaitu mengaitkan kepentingan bisnis dan upaya perlindungan lingkungan.

Uraian tersebut diatas, Indonesia bisa melaksanakan *green economy* dengan merubah cara pandang kita mengeksploitasi sumber daya alam sebelumnya yaitu eksploitasi sumber daya misalnya dari sektor kehutanan, migas, tambang, pertanian, perikanan dan pengembangan industri. Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan:

- 1) Kehutanan untuk pelayanan lingkungan: CDM, Carbon Trade, REDD, Eco Tourism, Keanekaragaman Hayati dan Pembagian Hasil.
- 2) Efisiensi Energi (biaya rendah).
- 3) Energi Terbarukan: waste for energy, biomass, biogas, solar cell, mass transportation, organic for agriculture.
- 4) Kepariwisataaan.

Adapun kegiatan untuk adaptasi yang utama yang bisa dilakukan serta sekaligus memberikan lapangan pekerjaan adalah program yang dilakukan secara komprehensif untuk rehabilitasi lingkungan seperti:

- 1) Reforestrasi dengan partisipasi masyarakat.
- 2) Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.
- 3) Pembuatan sumur resapan/biopori.
- 4) Situ, kolam dan rehabilitasi danau.
- 5) Rehabilitasi lahan kritis.

Kegiatan tersebut juga berdampak pada upaya pencegahan bencana lingkungan serta membantu upaya pelaksanaan program pertanian dan sektor ekonomi lainnya.

14.8 Strategi *Green Economy*

Adapun kebijakan dan strategi dalam yang dilakukan dalam pengembangan *green economy* adalah:

1) Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut

Strategi yang dilakukan sektor kehutanan dan lahan gambut melalui (a) menekan laju Deforestasi dan Degradasi hutan, (b) meningkatkan penanaman hutan dan tumbuhan, (c) meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar, (d) melakukan perbaikan tata air dan blok-blok pembagi serta menstabilkan elevasi muka air pada jaringan tata air rawa, (e) menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian.

2) Sektor Pertanian

Strategi dalam rangka pengembangan *green economy* dilakukan dengan: (a) mengoptimalkan sumber daya lahan dan air, (b) menerapkan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian, (c) menstabilkan elevasi muka air dan memperlancar sirkulasi air pada jaringan irigasi.

3) Sektor Energi dan Transportasi

Strategi dalam pengembangan *green economy* dilakukan dengan: (a) menghemat penggunaan energi final baik melalui penggunaan teknologi yang lebih bersih efisien maupun pengurangan konsumsi energi tak terbarukan, (b) mendorong pemanfaatan energi baru tak terbarukan skala kecil dan menengah.

4) Sektor Industri

Strategi dalam rangka pengembangan *green economy* ini dilakukan dengan melaksanakan audit energi khususnya pada industri-industri yang padat energi dan memberikan insentif pada program efisiensi energi.

5) Sektor Limbah

Strategi yang dilakukan sektor limbah ini mencakup: (a) Meningkatkan kelembagaan dan peraturan di daerah, (b) Meningkatkan pengelolaan air limbah di Perkotaan. (c) Mengurangi timbulan melalui 3R (Reduce, Reuce, Recycle). (d) Memperbaiki proses pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA). (e) Meningkatkan pembangunan atau rehabilitasi TPA. (f) Memanfaatkan limbah atau sampah menjadi produksi atau energi yang ramah lingkungan.

14.9 Green Economy dan Pengembangan Berkelanjutan

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Swadaya Masyarakat *World Wildlife Fund* (WWF) mengajak para pembisnis untuk ikut dalam kampanye *Green Economy*. Pemerintah menjanjikan insentif bagi pembisnis yang menaati *green economy*. Pemerintah mengajak para pelaku bisnis dan para stake holder agar mau menerapkan *green economy*. Maksud dari penerapan *green economy* adalah, para pembisnis melalui unit usahanya yang bergerak di bidang sumberdaya alam menerapkan standar internasional

berupa pengurangan penebangan hutan dan melestarikan keanekaragaman hayati untuk mencegah perubahan iklim.

Pembisnis melakukan pengurangan sampah, pemerintah dapat memberikan potongan pajak atau retribusi. Pengurangan itu bersifat progresif yang artinya jika semakin lama sampah yang mereka buang sedikit, semakin sedikit pula pajak dan retribusi yang pemerintah kenakan. Selain itu untuk membebaskan bea masuk, pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti bea cukai. Perusahaan yang menerapkan *green economy* diberikan rekomendasi untuk dibebaskan bea masuk barang impornya.

Bab 15

Lingkungan Hidup Dalam Kerangka CSR Dan *Sustainable Development*

Tujuan Pembelajaran

- 1) Untuk mengetahui Kerangka CSR
- 2) Untuk mengetahui konsep lingkungan hidup kerangka CSR
- 3) Untuk mengetahui proses pelaporan kerangka CSR
- 4) Untuk memahami pedoman kerangka CSR

15.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Kelestarian lingkungan terkait erat dengan kesejahteraan suatu bangsa, karena lingkungan hidup adalah salah satu asset ekonomi yang sangat berharga untuk diberdayakan. Semakin ramah suatu bangsa terhadap lingkungannya, semakin besar peluang untuk meningkatkan pembangunan di negaranya.

Banyak pakar atau ahli lingkungan hidup tidak membedakan secara tegas antara pengertian “lingkungan” dan “lingkungan hidup”, baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan adalah, bahwa istilah “lingkungan (*environment*)” dianggap lebih luas daripada istilah “lingkungan hidup (*life environment*)”. Hal-hal atau segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia pribadi atau di dalam proses pergaulan hidup, biasanya disebut lingkungan (soemartono,

1996:12). Pada dasarnya lingkungan dibagi menjadi tiga kelompok dasar, yaitu:

- 1) Lingkungan Fisik (Physical Environment) yaitu segala sesuatu disekitar manusia yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air dan lain-lain.
- 2) Lingkungan Biologis (Biological Environment) yaitu segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya sendiri, seperti binatang-binatang dari yang besar sampai yang paling kecil dan tumbuh-tumbuhan dari yang terbesar sampai terkecil.
- 3) Lingkungan Sosial (Socioal Environment) yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitarnya, seperti tetangga, teman, bahkan orang lain yang belum dikenal.

Namun demikian, baik lingkungan fisik, biologis, maupun lingkungan social selalu mengalami perubahan-perubahan; agar lingkungan tersebut dapat mempertahankan kehidupannya secara serasi, maka manusia melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan itu. Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh faktor, yaitu (soemartono, 1996), yaitu:

1. Jenis dan jumlah jenis unsur lingkungan hidup tersebut.
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup.
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup.
4. Faktor nonmaterial, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energy, dan kebisingan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup adalah jumlah

semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tidak terbatas jumlahnya, namun secara praktis ruang itu selalu diberi batas menurut kebutuhan yang dapat ditentukan. Jadi lingkungan hidup harus diartikan luas, yaitu tidak hanya lingkungan fisik dan biologi, tetapi juga lingkungan ekonomis, social, dan budaya. Soemartono (1996:17) mendefinisikan lingkungan hidup sebagai “ruang” di mana baik makhluk hidup maupun tak hidup berada dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut, khususnya manusia.

Kaitannya dengan konsep lingkungan ini, maka penjelasan tentang mutu lingkungan adalah relevan dan sangat penting, karena mutu lingkungan merupakan pedoman untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan. Pembahasan tentang lingkungan pada dasarnya adalah pembahasan tentang mutu lingkungan. Mutu lingkungan dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan dalam kaitannya dengan mutu hidup. Makin tinggi derajat mutu hidup dalam suatu lingkungan tertentu, makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut dan sebaliknya. Karena mutu hidup tergantung pada derajat pemenuhan kebutuhan dasar, mutu lingkungan dapat diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut. Makin tinggi kebutuhan dasar tersebut, makin tinggi pula mutu lingkungan dan sebaliknya.

Keberadaan lingkungan hidup sebagai salah satu asset bagi manusia merupakan suatu hal yang sangat mendasar. Sebab secara formalitas masyarakat dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan konferensi Tingkat Tinggi (KTT) sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pertama pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia; kedua pada tahun 1992 diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil; dan ketiga pada tahun 2002

diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan. Perhatian masyarakat dunia tersebut terhadap lingkungan hidup memberikan gambaran bahwa persoalan lingkungan hidup bukanlah persoalan yang mudah. Karena masyarakat dunia telah mulai cemas terhadap keberadaan lingkungan hidup sehingga mereka melaksanakan tiga kali konferensi di atas. Kenyataan menunjukkan bahwa sejak dicanangkannya industri di Negara-negara barat, sejak itu pulalah, lingkungan hidup mulai mengalami kerusakan dan pencemaran.

Menurut Sonny Keraf (mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup), tidak dapat disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik pada lingkup nasional, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia kasus-kasus pencemaran dan kerusakan, seperti di laut, hutan, atmosfer, air, tanah, dan seterusnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sejalan dengan pendapat Sonny Keraf, Arne Naess menyatakan bahwa krisis lingkungan dewasa ini hanya dapat diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam yang fundamental dan radikal. Yang dibutuhkan adalah sebuah pola hidup atau gaya hidup baru tidak hanya menyangkut orang per orang, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya, dibutuhkan etika lingkungan hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi dalam alam semesta (supriadi, 2005:23).

Krisis lingkungan global yang kita alami dewasa ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental-filosofi manusia dalam memahami, atau memandang dirinya, alam, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Pada gilirannya hal ini menyebabkan kesalahan pada perilaku manusia yang bersumber dari kesalahan cara pandang tersebut. Manusia

keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta sekluruhnya. Inilah awal dari semua bencana lingkungan hidup yang kita alami sekarang.

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup, pendekatan pengelolaan lingkungan dilakukan dengan menata system pengelolaannya. Sebab berbicara mengenai pengelolaan, sangat berkaitan dengan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen bertumpu pada kemampuan menata system yang berada dalam system tersebut. Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungannya, sehingga pandangan tersebut harus diubah dengan melakukan sebuah pendekatan yang lazim disebut dengan “ramah lingkungan”. Otto Soemarwoto mengatakan bahwa mengubah sikap dan kelakuan terhadap lingkungan hidup bukanlah pekerjaan yang mudah. Pada dasarnya usaha itu dapat dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut (Supriadi,2005):

1) Instrument Pengaturan dan Pengawasan

Tujuannya adalah untuk mengurangi pilihan pelaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup. Pemerintah membuat peraturan dan mengawasi kepatuhan pelaksanaannya. Ketidakpatuhan dikenakan sanksi denda dan/atau kerugian. System pengelolaan lingkungan hidup ini disebut *Command-And-Control (CAC)*. Pada dasarnya CAC berusaha menekan egoism dan mendorong orang untuk berkelakuan lebih ramah lingkungan dengan ancaman sanksi tindakan hukum.

2) Instrument Ekonomi

Untuk mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi pelaku, dengan memberikan insentif-disinsentif itu menghasilkan untung-rugi berupa uang, jadi bersifat *tangible*. Pertimbangan *tangible* merupakan dorongan yang kuat untuk melakukan pro lingkungan hidup dan hambatan untuk anti lingkungan hidup. Dengan instrument ekonomi, system nilai pelaku terhadap lingkungan sebenarnya tidak berubah. Dia bersikap dan berlaku lebih ramah lingkungan hidup karena dia mendapatkan keuntungan ekonomi, bukan karena dia lebih mencintai lingkungan hidup.

3) Instrument Persuasif

Instrument persuasif, yaitu mendorong masyarakat secara persuasif, bukan paksaan. Tujuannya ialah mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup kearah memperbesar untung relatif terhadap rugi. Dalam kondisi ini proses pengambilan keputusan pelaku didorong untuk mengubah prioritas pilihan yang lebih menguntungkan lingkungan hidup dan masyarakat. Persepsi untung rugi itu bersifat *tangible* maupun *intangible*. Instrument ini terdiri atas pendidikan, latihan, penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik serta ceramah umum dan dakwah agama. Yang terakhir ini bertujuan untuk membangkitkan rasa kewajiban moral dan etika dalam proses menentukan pilihan. Tujuan jangka panjang instrumen persuasif ialah agar nilai-nilai yang diajarkan dapat diinternalkan oleh para pelaku sehingga mengakibatkan perubahan permanen pada kelakuan terhadap lingkungan hidup, kemudian kelakuan itu membudaya.

Kesadaran lingkungan di Indonesia tidak terlepas dari adanya pengaruh kesadaran lingkungan yang bersifat global atau internasional. Kesadaran lingkungan yang bersifat global atau internasional tersebut merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap beberapa kejadian yang timbul di beberapa

Negara. Sejak tahun 1950 masalah lingkungan mendapatkan perhatian tidak saja dari para ilmuwan, melainkan juga masyarakat umum dan para politisi. Pemicu perhatian itu ialah terjadinya pencemaran oleh limbah industri dan pertambangan serta pestisida. Berikut ini beberapa konferensi yang diselenggarakan oleh masyarakat dunia menyangkut kepeduliannya terhadap kerusakan lingkungan.

Tabel 15.1
Konferensi Lingkungan Hidup

No	Nama Konferensi	Tempat dan Waktu	Hasil
1.	Konferensi Internasional	Amerika Serikat (1968)	Laporan yang berjudul <i>the Careless Technology</i> . Salah satu substansi kritikan yang diajukan adalah bantuan luar negeri Negara maju kepada Negara sedang berkembang yang menurut mereka telah menghasilkan bencana lingkungan.
2.	Deklarasi Stockholm	Stockholm Swedia (5-16 Juni 1972)	Deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia terdiri dari Preambul dan 26 asas yang lazim disebut <i>Stockholm Declaration</i> . <i>Action Plan</i> yang terdiri dari 109 rekomendasi termasuk didalamnya 18 rekomendasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Permukiman

			<p>Manusia.</p> <p>Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang Rencana Aksi di atas, terdiri dari <i>Governing Council</i> dari <i>UN Environment Programme</i>, Sekretariat Dana Lingkungan Hidup dan Badan Koordinasi Lingkungan Hidup.</p>
3.	Deklarasi Rio De Janeiro (Konferensi Tingkat Tinggi Bumi)	Brasil (3-14 Juni 1992)	<p>Menghasilkan lima dokumen sebagai berikut:</p> <p>Menetapkan hak dan tanggung jawab bangsa-bangsa dalam memperjuangkan perkembangan dan kesejahteraan manusia.</p> <p>Agenda 21, rancangan tentang cara mengupayakan pembangunan yang berkelanjutan dari segi social, ekonomi, dan lingkungan hidup.</p> <p>Pernyataan tentang prinsip yang menjadi pedoman bagi pengelolaan, pelestarian dan pembangunan semua jenis hutan secara berkelanjutan yang merupakan unsur mutlak bagi pembangunan ekonomi dan</p>

			<p>pelestarian segala bentuk kehidupan.</p> <p>Menstabilkan gas rumah kaca dalam atmosfer pada tingkatan yang tidak mengacaukan iklim global.</p> <p>Menghendaki agar Negara-negara mengerahkan segala daya dan dana untuk melestarikan keragaman spesies-spesies hidup dan mengupayakan agar manfaat penggunaan keanekaragaman hayati itu dirasakan secara merata.</p>
4.	Protokol Kyoto	Kyoto, Jepang (1997)	<p>Konsensus berupa keputusan (<i>Decision 1/CP3</i>) untuk mengadopsi suatu protocol yang merupakan dasar bagi Negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca gabungan paling sedikit 5 persen dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008-2012.</p>
5.	KTT Pembangunan Berkelanjutan	Johannesburg Afrika Selatan (2002)	<p>Penghapusan kemiskinan</p> <p>Mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan</p> <p>Melindungi dan mengelola basis sumber daya alam bagi</p>

			<p>pembangunan ekonomi dan social</p> <p>Program pembangunan sumber daya air dan sanitasi</p> <p>Program pembangunan kelautan dan pesisir</p> <p>Perubahan iklim dan penanganan bencana</p> <p>Program mengatasi pencemaran udara dan pengembangan pertanian</p> <p>Program penyelamatan penggurunan dan ekosistem pegunungan</p> <p>Program pariwisata, pelestarian keanekaragaman hayati dan hutan</p> <p>Pembangunan berkelanjutan dalam era globalisasi</p> <p>Pembangunan berkelanjutan Negara berkembang kepulauan kecil</p> <p>Pembangunan berkelanjutan untuk Afrika, Amerika Latin, Karibia, Asia Pasifik dan Asia Barat dan Komisi Ekonomi Kawasan Eropa</p> <p>Sarana pelaksanaan pembangunan berkelanjutan</p> <p>Pelaksanaan perdagangan bebas</p>
--	--	--	---

			<p>Pelaksanaan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan ilmu pengetahuan</p> <p>Pelaksanaan pendidikan berkelanjutan</p> <p>Kerangka kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan</p> <p>Penguatan kerangka kelembagaan bagi pembangunan berkelanjutan pada tingkat internasional</p> <p>Penguatan pengaturan kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan pada tingkat regional dan nasional</p>
--	--	--	--

Sumber : Supriadi,2005

15.2 Lingkungan Hidup dan Entitas Bisnis

Sepuluh tahun terakhir, seiring kita dengar adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang ditunjukkan pada perusahaan-perusahaan mengenai kasus perusakan/pencemaran lingkungan hidup akibat dari aktivitas bisnisnya. Sebagai contoh pada PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) yang sudah beroperasi sejak tahun 1987, pada tahun 1997an mendapat tuntutan dari nelayan Buyat akibat pembuangan limbah-limbah beracun ke laut yang mengakibatkan Teluk Buyat tercemar. Hingga pada akhirnya ditutup pada tanggal 31 agustus 2004, tetapi sampai sekarang masih meninggalkan pencemaran di kawasan Teluk Buyat. Hal ini menunjukkan tidak adanya kepedulian perusahaan terhadap ekosistem, dan pada kenyataannya umumnya beberapa entitas bisnis memang seperti itu.

PT. Lapindo Brantas Inc (LBI), sedari 29 mei 2006, semburan lumpur Lapindo tak kunjung mampet, terlebih sejak 2004-2006 kontribusi LBI untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo tidak signifikan. Dapat disebut, Rp. 1,1 miliar (2004), Rp. 45 juta (2005), dan angka nol (2006). Hal ini selain akibat dari ketidaktegasan Negara, juga merupakan contoh fatal akibat ketidakpekaan perusahaan terhadap konsep CSR. Sampai sekarang pun belum ada titik temu untuk mencari solusi menghentikan semburan Lumpur panas atau yang sering disebut di media masa sebagai semburan “LUSI” (Lumpur Sidoarjo). Jika ditinjau dari sisi analisis dampak Lingkungan (amdal) PT. Lapindo Brantas ternyata belum memenuhi syarat.

Hal tersebut hanya merupakan beberapa contoh dari dampak hubungan entitas bisnis dan lingkungan hidup yang kurang harmonis. Masih banyak lagi kasus-kasus tentang ketidak harmonisan entitas bisnis dengan lingkungannya. Hal ini menjadi sorotan utama dan problematika dalam konsep pelaksanaan tanggungjawab social perusahaan (*corporate social responsibility*).

15.3 Konsep CSR

Maraknya peristiwa kerugian yang dialami oleh suatu komunitas masyarakat karena kerusakan lingkungan hidup tempat mereka tinggal akibat beroperasinya suatu perusahaan makin menimbulkan sinisme masyarakat terhadap keberadaan suatu perusahaan. Apakah perusahaan memang didirikan semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan, yaitu keuntungan para pemegang sahamnya dan mengabaikan kepentingan masyarakat sekitar dan lingkungan hidup di mana perusahaan menjalankan aktifitas bisnisnya? Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh mengenai pengertian *corporate social responsibility*, perlu kita ketahui lebih dahulu mengenai apa sebenarnya yang menjadi tujuan di dirikannya suatu perusahaan. Dari asal

katanya, ‘*company*’ (perusahaan) berasal dari dua kata dalam bahasa latin (‘*cum*’ dan ‘*panis*’) yang berarti memecahkan roti bersama-sama. Karena itu, ide asli dari pembentuk suatu perusahaan sebenarnya memiliki konotasi komunal atau social. Dari asal kata tersebut, Dave Packard (*co-founder* dari Hewlett Packard Company) berpendapat mengenai tujuan berdirinya suatu perusahaan:

“I think many people assume, wrongly, that a company exist simply to make money. While this is an important result of a company’s existence, we have to go deeper and find the real reasons for our being. As we investigate this, we inevitably came to the conclusion that a group of people get together and exist as an institution that we colled a company so that they are able to accomplish something collectively that they could not achieve separately- they make contribution to the society, a phrase which sounds trite but is fundamental.”

Suatu perusahaan tidak terlepas dari peran perusahaan tersebut terhadap masyarakat sekitarnya. Seperti dikatakan oleh B. Taman Achda, memang diakui bahwa di satu sisi sector industri atau korporasi skala besar telah banyak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional tetap di sisi lain, eksploitas sumber-sumber daya alam oleh industri telah menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah. Hal inilah yang menjadikan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* relevan dan penting (perlu) dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan.

Social dan *responsibility*’ yang terkandung dalam istilah ini maka CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat di mana perusahaan tersebut berdiri atau menjalankan usahanya. Menurut Kamus *online* Wikipedia, CSR merupakan suatu konsep bahwa suatu organisasi (khususnya, tapi tidak terbatas pada,

perusahaan) memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham, komunitas dan pertimbangan-pertimbangan ekologis dalam segala aspek dari usahanya. *The Internasional Organization of Employers (IOE)* mendefinisikan CSR sebagai “*initiatives by companies voluntarily integrating social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders.*” Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) CSR merupakan tindakan perusahaan yang bersifat sukarela dan melampaui kewajiban hukum terhadap peraturan perundang-undangan Negara.
- 2) Pengertian tersebut diatas memandang CSR sebagai aspek inti dari aktifitas bisnis di suatu perusahaan dan melihatnya sebagai suatu alat untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan.

CSR adalah definisi menurut *The World Business Council for Sustainable Development* yaitu bahwa CSR merupakan suatu komitmen terus-menerus dari pelaku bisnis untuk berlaku etis dan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan keluarganya, juga bagi komunitas local dan masyarakat pada umumnya. Dari definisi ini kita melihat pentingnya ‘*sustainability*’ (berkesinambungan atau berkelanjutan), yaitu dilakukan secara terus-menerus untuk efek jangka panjang dan bukan hanya dilakukan sekali.

Praktik CSR umumnya berdasarkan pada nilai-nilai etis dan penghargaan perusahaan terhadap keberadaan serta peranan seluruh tenaga kerja, masyarakat, lingkungan social maupun lingkungan alam. Karena itu, seringkali CSR dapat dijelaskan sebagai, “pengambilan keputusan bisnis yang dikaitkan secara langsung dengan nilai etis, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta penghargaan atas keberadaan dan peranan tenaga kerja, masyarakat, dan lingkungan (Hertanto, 2008).”

Konsep CSR dengan demikian memiliki arti bahwa selain memiliki tanggung jawab untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang saham dan untuk menjalankan bisnisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, suatu perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral, etika, dan filantropik. Pandangan tradisional mengenai perusahaan melihat bahwa tanggung jawab utama perusahaan adalah semata-mata terhadap pemiliknya, atau para pemegang saham. Adanya konsep CSR mewajibkan perusahaan untuk memiliki pandangan yang lebih luas yaitu bahwa perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap pihak-pihak lain seperti karyawan, supplier, konsumen, komunitas setempat, masyarakat secara luas, pemerintah, dan kelompok lainnya. Dalam hal ini, jika sebelumnya pijakan tanggung jawab perusahaan hanya terbatas pada sisi finansial saja (*single bottom line*), kini dikenal konsep '*triple bottom line*', yaitu bahwa tanggung jawab perusahaan berpijak pada tiga dasar, yaitu: finansial, social dan lingkungan dikenal dengan *profit, people, planet (3P)*.

15.4 Dimensi CSR

1) Ekonomi, sosial, lingkungan

Perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhitungkan keseimbangan ketiganya, tak boleh ada *trade off* dalam jangka panjang diantara ketiganya, dan ketiganya harus mengalami kemajuan.

2) Pemangku kepentingan

Perusahaan dalam menjalankan CSR harus memperhatikan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternalnya, dan mencari keseimbangan terbaik bagi pemuasan seluruh kepentingan mereka.

3) Voluntari

Perusahaan dalam menjalankan CSR harus mematuhi seluruh regulasi yang berlaku kemudian berusaha melampauinya sejauh mungkin.

Pelaksanaan CSR sampai sekarang masih bersifat sukarela (*voluntary*). Beberapa perusahaan tidak menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut mungkin hanya sebagai pengeluaran biaya (*cost center*). Tetapi untuk sekarang sebenarnya pandangan tersebut sangat keliru, meskipun CSR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek, namaun CSR sebenarnya akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dari sisi dunia usaha sebenarnya berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan factor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek *profit*, aspek *people*, dan aspek *planet* biasa disebut *triple bottom line*.

Ukuran perusahaan yang diwakili oleh Total Aset berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Lingkungan dan bahwa perusahaan besar merasa bahwa mereka merupakan target perhatian sehingga perlu untuk membuat sesuatu usaha nyata dalam menciptakan kepercayaan dalam hal pertanggung jawab nasional. Selain itu perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar pula, sehingga mampu membiayai penyediaan informasih yang lebih lengkap dibandingkan perusahaan kecil. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program CSR diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Oleh karena itu, program-program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.

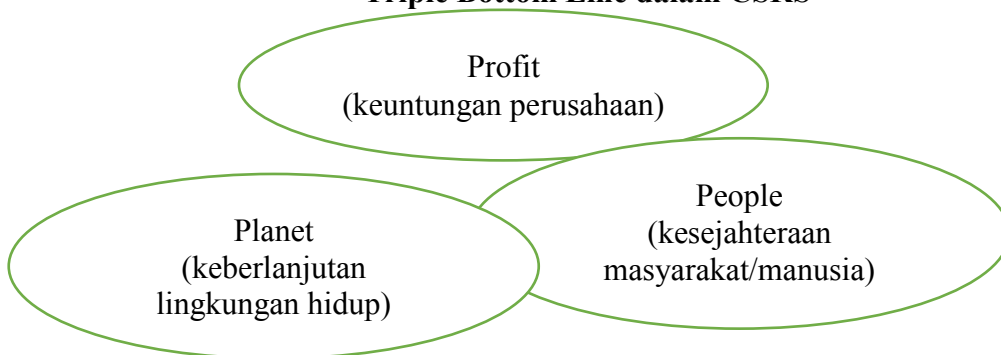
Porter dan Kramer (2002), menyatakan bahwa tujuan ekonomi dan social adalah terpisah dan bertentangan adalah pandangan yang kliru. Perusahaan tidak berfungsi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Faktanya, kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat tergantung pada keadaan lokasi dimana perusahaan itu beroperasi. Dalam piramida CSR yang

dikembangkan Archie B. Carrol, yaitu *profit*, *people* dan *planet* harus difahami sebagai satu kesatuan. Konsep tersebut digambarkan sebagai berikut:

- 1) **Profit.** Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.
- 2) **People.** Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidik dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi local, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan social bagi warga setempat.
- 3) **Plannet.** Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (*ekoturisme*).

Gambar 15.1

Triple Bottom Line dalam CSRS



Konsep Piramida CSR yang dikembangkan Archie B. Carrol memberi justifikasi dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat disekitarnya (saudi dan abiding, 2004: 59-60). Dalam pandangan carol, CSR adalah puncak piramida yang erat terkait, dan bahkan identic

dengan, tanggungjawab filantropis. Menurut Carrol (dalam saidi dan abiding, 2006) tataran tanggung jawab perusahaan sebagai berikut:

1) Tanggungjawab Ekonomis.

Kata kunci adalah: *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.

2) Tanggungjawab Legal.

Kata kuncinya: *obey the law*. perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.

3) Tanggungjawab eEis.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan *fair*. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kunci: *be ethical*.

4) Tanggungjawab Filantropis.

Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggungjawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada public yang kini dikenal dengan istilah *non-fiduciary responsibility*.

15.5 Pengaturan dan Pelaksanaan CSR di Indoensia

Sebelum diatur secara eksplisit dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (dan sebelumnya dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang

penanaman modal), konsep CSR sebenarnya telah diatur dalam beberapa Undang-undang di Indonesia sebagai berikut:

- a. UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- b. UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- c. UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

UU NO. 40 Tahun 2007 Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perseroan Terbatas yang diajukan Pemerintah pada awalnya tidak mengandung pasal mengenai kewajiban perusahaan dalam aspek sosial dan lingkungan. Desakan tersebut muncul dalam diskusi RUU di DPR karena parahnya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh industri pertambangan, baik di Papua maupun di daerah lain, juga karena peristiwa bencana lingkungan yang disebabkan oleh Lapindo Brantas. Menurut Ratnawati Prasodjo, salah satu pihak yang terlibat dalam pembuatan RUU PT, pembahasan mengenai pasal tersebut berlangsung sangat seru karena adanya pro dan kontra mengenai perlu tidaknya CSR menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-undang, sehingga akhirnya terjadi kompromi antara Pemerintah dengan DPR. Rencana diaturnya mengenai hal ini sempat menimbulkan reaksi yang keras di kalangan pengusaha mengingant sewaktu dilakukannya acara dengar pendapat mengenai RUU ini dengan kalangan pengusaha, pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan /TJSL (demikian istilah yang digunakan dalam UU ini merujuk pada 'CSR' untuk selanjutnya akan digunakan istilah TJSL mengikuti istilah dalam UU Perseroan Terbatas) ini tidak ada dalam rencana.

Kalangan pengusaha spontan menolak rencana dimasukkannya hal ini menjadi ketentuan yang diatur secara hukum karena menurut pendapat mereka CSR adalah kegiatan di luar kewajiban perusahaan yang umum dan sudah ditetapkan dalam perundang-undangan formal, sehingga jika diatur

akan bertentangan dengan prinsip kerelaan dan akan memberikan beban baru kepada dunia usaha. Sedangkan Ketua Panitia Khusus UU PT, Akil Mochtar menjelaskan bahwa kewajiban CSR terpaksa dilakukan karena banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia melepaskan diri dari tanggung jawabnya menjaga lingkungan di Indonesia.

Keberatan kalangan pengusaha juga karena mendengar rencana bahwa Pemerintah akan menetapkan besaran persentase yang harus dianggarkan oleh perusahaan yang harus disisihkan dari laba bersih untuk kegiatan tersebut. Dikhawatirkan perusahaan-perusahaan kecil yang belum sanggup untuk mengalokasikan dana untuk itu menjadi terbebani mengingat besaran pajak yang juga tidak kecil. Belakang keberatan tersebut melunak setelah akhirnya perusahaan yang wajib melakukan TJSJL tersebut dibatasi menjadi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja. Juga bahwa anggaran yang harus dikeluarkan tersebut diperhitungkan sebagai biaya sehingga mengurangi pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah tanpa menentukan besaran persentasenya, tapi diatur agar sesuai dengan kepatutan dan kewajaran yang interpretasinya kembali ke pemahaman masing-masing selama belum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Akhirnya Undang-undang tersebut diundangkan secara resmi pada tanggal 16 Agustus 2007.

Konsep tanggung jawab social perusahaan atau *corporate social responsibility (CSR)*, muncul sebagai akibat adanya kenyataan bahwa pada dasarnya karakter alami dari setiap perusahaan adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperdulikan kesejahteraan karyawan, masyarakat dan lingkungan alam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan kepekaan dari stakeholder perusahaan maka konsep CSR muncul dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Tetapi dewasa ini CSR masih

dianggap sebagai suatu “kosmetik” belaka untuk menaikkan pamor perusahaan atau menjaga reputasi perusahaan di masyarakat. Oleh karenanya ada asumsi jika perusahaan sudah memberikan sumbangan atau donasi kepada suatu institusi social berarti sudah melakukan tanggung jawab social sebagai sebuah perusahaan. Penerapan dan isu CSR yang saat ini baru dilakukan diantaranya adalah (Lusa, 2007):

- 1) Pengaruh dari globalisasi dan internasionalisasi yang memaksa perusahaan untuk dapat menerapkan fungsi tanggung jawab social perusahaan. Bentuk globalisasi dan internasionalisasi ini dapat berupa tekanan dari pihak ketiga yang menjadi bagian atau mitra kerja dari perusahaan lokal. Mereka dapat menetapkan suatu kondisi yang harus diikuti oleh perusahaan local dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya. Kondisinya ini biasanya dialami oleh perusahaan yang berada di negara miskin dan berkembang dimana memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada investor dari negara maju.
- 2) Ditinjau dari jenis perusahaan, umumnya yang menjalankan fungsi tanggung jawab social adalah perusahaan yang bergerak dalam usaha eksplorasi alam (tambang, minyak, hutan). Perusahaan tambang lebih mendapatkan perhatian dari masyarakat dibandingkan dengan perusahaan non tambang. Perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan penyeimbangan sebagai dampak dari eksplorasi yang dilakukan seperti melakukan reklamasi alam, reboisasi, mendukung pecinta alam, berpartisipasi dalam pengolahan limbah dan sebagainya. Kenyataannya apakah perusahaan tersebut benar-benar menaruh perhatian terhadap alam dan lingkungan sekitarnya, bukankah mungkin tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan hanya sebagai kedok untuk melegalkan dan mengamankan kegiatan perusahaan sehingga tidak dikritik oleh masyarakat.

- 3) Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang biasanya dilakukan adalah pemberian fasilitas kepada para pekerja atau buruh. Kenyataannya bahwa pemberian fasilitas baru akan terealisasi jika adanya ancaman mogok atau unjuk rasa dari para buruh. Ini berarti tanggung jawab social perusahaan terhadap para buruh didasarkan sebagai suatu negoisasi antara manajemen dengan para buruh. Manajemen tentunya akan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan dengan adanya ancaman tersebut jika dinilai akan merugikan perusahaan maka (biasanya) tuntutan akan direalisasikan.
- 4) Bentuk lainnya dari tanggung jawab sosial perusahaan sebatas pemberian sumbangan, hibah, bantuan untuk bencana alam yang sifatnya momentum. Musibah, bencana, atau malapetaka yang terjadi dapat dijadikan sebagai momentum bagi perusahaan yang membentuk citra dan reputasi baik di mata masyarakat.

15.6 Motivasi Perusahaan Menjalankan CSR

Seiring dengan bencana yang melanda Indonesia, berawal dari gempa tsunami di Aceh, banjir Pantai Jember, gempa DIY dan Jateng dan beberapa bencana yang beruntun, banyak iklan perusahaan yang melakukan aksi kepedulian sosial. Biasanya sumbangan itu berupa dana bantuan atau sembako kepada korban bencana alam, panti asuhan, dan lain-lain. Sayangnya, berbagai bantuan ini masih terkesan haus publikasi tanpa menyentuh akar masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Seringkali bantuan tersebut hanya berguna sesaat saja. Selanjutnya masyarakat kembali pada kondisi semula. Mereka seakan hanya tanggap terhadap bencana yang sifatnya nasional, tetapi sebenarnya bencana atau ancaman kerusakan lingkungan hidup dari aktivitas bisnis mereka juga mengancam masyarakat sekitar.

Perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) secara baik terhadap masyarakat. Alih-alih melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar dengan melakukan *community development*, korporasi cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar. Seperti yang ada pada PT Freeport Indonesia, meskipun setiap tahun menyisihkan 1% dari pendapatan tiap tahun, program yang dilakukan oleh korporasi tersebut biasanya bersifat *charity*, seperti memberi sumbangan, santunan, sembako, dan lain-lain. Program *charity* ini menjadi dalih bahwa mereka juga memiliki kepedulian sosial. Dengan konsep *charity*, kapasitas dan akses masyarakat tidak beranjak dari kondisi semula, yaitu akan tetap marginal. *Charity* menjadi program yang tidak tepat sasaran karena tidak bisa memutus rantai kemiskinan dan benang kusut pendidikan, problem lingkungan dan sebagainya. Yang pada akhirnya tetap menerima tuntutan masyarakat Papua.

Beberapa alasan/motif yang melatarbelakangi perusahaan melakukan program CSR dapat dilihat pada tabel 15.2 dibawah ini:

Tabel 15.2

Motif Perusahaan dalam Menjalankan Program CSR

Motif Keamanan	Motif Memenuhi Kewajiban Kontraktual	Komitmen Moral
<ul style="list-style-type: none"> • Program dilakukan setelah ada tuntutan masyarakat yang biasanya diwujudkan melalui demonstrasi. • Program tidak dilakukan setelah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggung jawaban program CSR bukan pada pemerintah daerah dan masyarakat lokal tetapi pada pemerintah pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Wacana CSR • Propaganda kegiatan CSR melalui media masa

<p>kontrak ditandatangani.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecenderungannya program dilakukan ketika kebebasan masyarakat sipil semakin besar pasca desentralisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Propaganda kegiatan CSR melalui media masa 	
---	--	--

Sumber: Mulyadi (2003)

Sebagian besar perusahaan ekstraksi berada di daerah pedalaman. Sementara fasilitas produksinya terbentang dalam area yang sangat luas. Secara fisik, control terhadap infrastruktur tersebut tidak mudah dan sangat rentan dengan kemungkinan-kemungkinan dirusak atau disabotase oleh pihak merasa dirugikan oleh keberadaan perusahaan tersebut. Jika perusahaan yang melakukan CSR, jadi bisa ditebak bahwa perusahaan melakukannya dengan motif keamana saja.

Sebagai contoh, pada tahun 2003 puluhan anggota masyarakat di Kampung Pasir Gintung, Bogor, yang berlokasi 16 kilometer dari tambang emas Pongkor berdemonstrasi secara damai untuk meminta Antam lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar serta kesempatan kerja yang lebih banyak kepada warga setempat. Menyusul kejadian ini, Antam langsung mengadakan pertemuan dengan anggota masyarakat tersebut dan menyepakati untuk lebih melibatkan masyarakat sekitar dalam program pengembangan masyarakat. Bersama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat, Antam juga membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Nanggung Antam (FKMNA) untuk dapat lebih menyerap aspirasi masyarakat sekitar tambang emas Pongkor. Beranjak dari konsepsi ini maka perhatian yang mendalam terhadap upaya pelestarian lingkungan

serta partisipasi secara proaktif dalam pengembangan masyarakat merupakan salah satu kunci kesuksesan kegiatan pertambangan.

Motif yang kedua adalah motif memenuhi kewajiban kontraktual, dimana motif ini timbul karena memenuhi perjanjian dengan pemerintah pusat untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa mereka merealisasi program tersebut secara lebih intensif pada tahun setelah dilakukannya otonomi daerah. Dalam era desentralisasi kekuatan masyarakat local menjadi lebih besar. Kebebasan mereka untuk menyalurkan aspirasinya menjadi lebih kuat. Ruang mereka untuk menyuarkan tuntutan mereka pada masalah pencemaran, masalah tenaga kerja, dan masalah tanah pada perusahaan menjadi lebih luas. Jadi jika entitas bisnis sebelum era desentralisasi, kemungkinan dalam pelaksanaan program CSR hanya berada pada motif ini. Komitmen moral menjadi motif perusahaan, jika perusahaan tersebut sudah menerapkan filosofi bahwa perusahaan menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan lingkungannya. Jadi dari sisi perusahaan sendiri merasa bahwa CSR merupakan bagian dari strategi keunggulan bisnis mereka.

Meskipun dari motif perusahaan sendiri terkadang hanya terletak pada motif keamanan, tetapi penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Penelitian PIRAC pada tahun 2001 menunjukkan bahwa dana CSR di Indonesia mencapai lebih dari 115 miliar rupiah atau sekitar 11.5 juta dollar AS dari 180 perusahaan yang dibelanjakan untuk 279 kegiatan sosial yang terekam oleh media massa (Suharto, 2006). Meskipun dana ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan dana CSR di negara barat seperti Amerika Serikat, dilihat dari angka kumulatif tersebut, perkembangan CSR di Indonesia cukup menggembirakan. Rata-rata angka

perusahaan yang menyumbangkan dana bagi kegiatan CSR adalah sekitar 640 juta rupiah atau sekitar 413 juta per kegiatan. Sebagai perbandingan, di AS porsi sumbangan dana CSR pada tahun 1998 mencapai 21.51 miliar dollar dan tahun 2000 mencapai 203 miliar dollar atau sekitar 2.030 triliun rupiah (Saidi dan Abidin, 2004: 64).

Saidi dan Abidin (2004:69) membuat matriks yang menggambarkan tiga tahap atau paradigm yang berbeda.

- 1) Tahap pertama adalah *corporate charity*, yakni dorongan amal berdasarkan motivasi keagamaan.
- 2) Tahap kedua adalah *corporate philanthropy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial.
- 3) Tahap ketiga adalah *corporate citizenship*, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial.

15.7 Bentuk Idea Tanggungjawaban Sosial Perusahaan

Untuk mendapatkan format ideal tanggung jawab sosial perusahaan, beberapa hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut (Lusa, 2007):

- 1) Perusahaan harus melakukan gap analisis antara apa yang ideal harus dilakukan dengan apa yang telah dilakukan (*existing*) saat ini. Hasil dari gap analisis ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan untuk mendapatkan solusi yang benar-benar dibutuhkan sehingga kehadiran perusahaan tersebut memberikan dampak positif bagi stakeholder.
- 2) Konsistensi dalam menjalankan komitmen harus menjadi bagian dan gaya hidup dari semua level manajemen perusahaan. Oleh karenanya tanggung jawab sosial perusahaan harus menjadi bagian dalam *strategic plan* perusahaan di mulai dari penentuan visi, misi, strategi, *core value*,

program, penyusunan anggaran sampai kepada evaluasi. Tujuan dengan adanya *strategic plan* ini adalah untuk menjaga kesinambungan perusahaan di masa yang akan datang. Di dalam *strategic plan* factor tanggung jawab sosial harus menjadi bagian dari *road map* perusahaan dalam rangka mencapai *good corporate governance (GCG)*. Untuk mengevaluasi penerapan *strategic plan* ini diperlukan *tool* yang dapat menjadi *dashboard* perusahaan di dalam menilai kinerja yang dihasilkan. *Tool* yang digunakan dapat berupa metode *balanced scorecard* atau hanya penerapan *key performance indicator* disetiap objektif yang ingin dicapai.

- 3) Sudah saatnya tanggung jawab sosial perusahaan dikelola oleh suatu divisi tersendiri secara professional sehingga pertanggungjawaban terhadap manajemen dan stakeholder dapat transparan dan terukur kinerjanya. Divisi ini diberikan otoritas untuk dapat memutuskan secara cepat dan tuntas semua perkara (isu) yang berhubungan dengan para stakeholder. Divisi ini harus dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah sebagai regulator, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi yang berhubungan, dan masyarakat sehingga keputusan yang diambil dapat mengakomodir semua kepentingan. Dalam prakteknya staff dari divisi ini dapat diisi oleh personal dari berbagai perwakilan yang ada di stakeholder.
- 4) Idealnya, pemerintah juga harus memiliki departemen yang berfokus untuk menangani regulasi tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat menjadi mediator dan fasilitator bagi semua pihak yang berkepentingan. Fungsi lainnya dari departemen ini adalah sebagai auditor yang memberikan rangking dalam periode tertentu bagi semua perusahaan sesuai dengan bidang dan kelasnya, dengan adanya rangking ini memicu perusahaan untuk serius menangani masalah tanggung jawab sosial

perusahaan. Departemen ini harus juga melibatkan institusi pendidikan dan akademisi untuk menjaga transparansi dalam proses audit.

- 5) Teknologi saat ini, peranan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah menjadi keharusan bukan lagi sebagai pendukung perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat memanfaatkan TIK semaksimal mungkin untuk menciptakan proses yang efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan dengan menggunakan software, internet, portal, dan teleconference sebagai alat komunikasi dengan stakeholder yang terintegrasi dengan proses bisnis yang ada dalam perusahaan.

15.8 CSR dan Sustainable Development

Corporate social responsibility merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka *sustainability*, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan budaya sosial. *Corporate social responsibility* merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan stakeholders baik secara internal (pekerja, shareholders dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain), dimana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis dan pasif, akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antar stakeholders. Adapun alasan penting mengapa harus melakukan *Corporate Social Responsibility*, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sosial, mencegah konflik dan persaingan yang terjadi, kesinambungan usaha/bisnis, pengelolaan sumber daya alam serta pemberdayaan masyarakat dan sebagai *License to Operate*. Jadi implementasi *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*, perusahaan tidak hanya

mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga secara sosial dan lingkungan alam bagi keberlanjutan perusahaan serta mencegah terjadinya konflik.

Sebagaimana hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam perspektif perusahaan, yang dimaksud berkelanjutan adalah merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis. Ada lima faktor sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting; (1) ketersediaan dana, (2) misi lingkungan, (3) tanggung jawab sosial, (4) terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah), (5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

Sustainable development memerlukan dua pra kondisi yaitu *social responbility* dan *environment responbility*. Terpenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan akan lebih memudahkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Sebab sumber-sumber produksi yang sangat penting bagi aktivitas perusahaan yaitu tenaga kerja, bahan baku, dan pasar telah dapat lebih terpelihara. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (*Corporate Social Responbility*).

Prinsip keberlanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola lingkungannya dan kemampuan institusinya dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintergrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga stakeholder inti diharapkan mendukung penuh, diantaranya adalah; perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Dengan konsep pembangunanan yang berkelanjutan ini, maka perusahaan tidak lagi

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*finansial*) saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

15.9 Implementasi Konsep *Sustainable Development* dalam Program CSR

Masih banyak perusahaan yang tidak mau menjalankan program-program CSR karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (*cost center*). CSR memang tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek. Namun CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan di masa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program-program CSR diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik. Oleh karena itu, program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi strategi bisnis dari suatu perusahaan.

Program CSR sebagai bagian dari strategi bisnis, maka akan dengan mudah bagi unit-unit usaha yang berada dalam suatu perusahaan untuk mengimplementasikan rencana kegiatan dari program CSR yang dirancangnya. Dilihat dari sisi pertanggung jawaban keuangan atas setiap investasi yang dikeluarkan dari program CSR menjadi lebih jelas dan tegas, sehingga pada akhirnya keberlanjutan yang diharapkan akan dapat terimplementasi berdasarkan harapan semua stakeholder.

Banyak perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan besar yang telah melakukan berbagai kegiatan CSR, apakah itu dalam bentuk *community development*, *charity*, atau kegiatan-kegiatan *philanthropy*. Tetapi apakah yang menjadi perbandingan/perbedaan antara program *community*

development, philanthropy, dan CSR dan mana yang dapat menunjang keberlanjutan (sustainable). Jawabannya adalah bahwa “CSR is the ultimate level towards sustainable of development”. Umumnya kegiatan-kegiatan community development, charity maupun philanthropy yang saat ini mulai berkembang di bumi. Indonesia masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya. Dan sering kali kegiatannya belum dikaitkan dengan tiga elemen yang menjadi kunci dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Namun hal ini adalah langkah awal positif yang perlu dikembangkan dan diperluas hingga benar-benar dapat dijadikan kegiatan Corporate Social Responsibility yang benar-benar sustainable.

Selain itu program CSR baru dapat menjadi berkelanjutan apabila, program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut bagaikan program penebusan dosa dari pemegang saham belaka. Dengan melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan.

Melakukan program CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik kepada perusahaan itu sendiri maupun para stakeholder yang terkait. Program CSR yang berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya

akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut.

Program CSR tidak selalu merupakan promosi perusahaan yang terselubung, bila ada iklan atau kegiatan PR mengenai program CSR yang dilakukan satu perusahaan, itu merupakan himbauan kepada dunia usaha secara umum bahwa kegiatan tersebut merupakan keharusan/tanggung jawab bagi setiap pengusaha. Sehingga dapat memberikan pancingan kepada pengusaha lain untuk dapat berbuat hal yang sama bagi kepentingan masyarakat luas, agar pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi dengan baik. Karena untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan mandiri semua dunia usaha harus secara bersama mendukung kegiatan yang terkait hal tersebut. Dimana pada akhirnya dunia usaha pun akan menikmati keberlanjutan dan kelangsungan usahanya dengan baik.

Bab 16

Lingkungan Bisnis Di Era Revolusi

Tujuan Pembelajaran

- 1) Untuk mengetahui proses lingkungan bisnis revolusi
- 2) Untuk menganalisis laporan lingkungan bisnis revolusi
- 3) Untuk mengetahui laporan lingkungan bisnis revolusi
- 4) Untuk mengetahui kinerja lingkungan bisnis revolusi

16.1 Perjanjian Perdagangan Bebas

Mulai tanggal 1 Januari 2010, kesepakatan perdagangan bebas ASEAN China *Free Trade Agreement* (AC-FTA) diberlakukan. China beserta enam negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) akhirnya bergabung ke dalam kawasan perdagangan bebas (FTA). Ini berarti, produk dari China akan membanjiri pasar domestik. Organisasi Perdagangan Dunia mengatakan, setidaknya sekitar 400 kawasan perdagangan dijadwalkan beroperasi pada tahun 2010. Hal ini menjadikan langkah awal menuju perdagangan global liberalisasi yang luas (Setyaningsih, 2010). Zona perdagangan bebas itu, maka Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand pun berencana menghapus tarif 90 persen dari produk-produk impor bahkan sampai ada yang 100 persen. Tujuannya, guna mengurangi biaya perdagangan dan cenderung mengarah pada perluasan perdagangan lintas batas antar negara yang terikat AC-FTA. Sebelum AC-FTA diberlakukan pun, barang asal Negeri Tirai Bambu itu yang dikenai tarif bea masuk sebesar 5% dikenal lebih murah dibandingkan produk lokal. Dengan berlakunya AC-FTA maka bermacam produk China, termasuk tekstil mulai tahun 2010 ini dipastikan membludak di pasaran dalam negeri, lantaran bea masuknya nol persen. Memang, hal ini sangat baik bagi

pedagang maupun konsumen karena mempunyai banyak variasi produk. Namun, tidak demikian halnya bagi kalangan pengusaha dalam negeri (Setyaningsih, 2010).

16.2 Keuntungan atau Kerugian

Implementasi *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) menghadirkan serangkaian kecemasan di kalangan pengusaha manufaktur di Indonesia, mengingat bea masuk 6.065 pos tarif dari 12 sektor manufaktur resmi dihapuskan mulai 1 Januari 2010. Para pendukung sistem ekonomi terbuka umumnya yakin liberalisasi perdagangan dapat menghasilkan keuntungan ekonomi nasional. Sebaliknya, mereka yang menentang sistem perdagangan bebas pesimistis mengenai kesanggupan dunia usaha di Indonesia memanfaatkan liberalisasi perdagangan ini. Mereka menilai komitmen Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Perdagangan yang terlalu kuat terhadap liberalisasi pasar akan membuat industri lokal tersingkirkan diri dari pasar domestiknya sendiri yang bisa berefek lanjut kepada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ratusan ribu pekerja. Struktur industri nasional dinilai masih sangat rapuh dalam menghadapi pasar bebas, terutama bersaing dengan produk China yang harganya murah. Hasil penelitian *Institute for Global Justice* memberikan simpulan bahwa perdagangan bebas hanya melahirkan kemenangan bagi yang kuat dan kekalahan bagi yang lemah. Pasar domestik yang menjadi tumpuan industri lokal akan tergerus dan pelaksanaannya diperkirakan akan memicu peningkatan impor yang semakin deras dibandingkan dengan ekspor produk manufaktur ke China (Waluyo, 2010).

Pertarungan besar antara Asean khususnya Indonesia versus China dibidang ekonomi juga menunjukkan ketidakseimbangan. Bagi Indonesia, implementasi ACFTA tahap I sejak 1 Januari 2004, terbukti meningkatkan

impor produk pertanian dari China. Keadaan ini tak jauh berbeda dengan implementasi ACFTA tahap II. Kondisi mutakhir memperlihatkan Pemerintah China masih agresif memberikan *exportvalue added tax* (VAT) *rebate* (subsidi pajak ekspor) kepada hasil produknya secara pasif. Peraturan terbaru soal ini bahkan kembali dikeluarkan pada 15 Desember 2009. Padahal, China telah resmi menjadi anggota World Trade Organization (WTO) pada pertengahan november 2001. Konsekuensi menjalin kerja sama melalui sistem liberalisasi pasar global ini seharusnya mendorong China menghapus habis seluruh kebijakan subsidi yang dilarang keras Wto (Waluyo, 2010). Dengan adanya kebijakan bebas tentu saja merugikan penerimaan negara yang berasal dari pajak impor (pasal 22) dan penerimaan pemerintah yang berasal dari PPN juga akan sakit.

Namun, China yang sering diidentikan dengan Naga, terus memberi subsidi karena AS pun memberi subsidi itu berlipat-lipat dibandingkan APBNB Indonesia. Itulah sebabnya, Nilai subsidi itu berlipat dibandingkan dengan APBN Indoensia. Itulah sebabnya China bersikeras tetap memberikan berbagai subsidi kepada industrinya. Saat ini, terdapat ribuan pos tarif produksi industri China masih mendapatkan fasilitas pajak ekspor 9% - 17% dari pemerintahnya. Bahkan porsi subsidi itu telah ditambah. Beberapa iindustri China yang menikmati fasilitas itu diantaranya pertanian, sektor produk agroindustri, kimia dasar anorganik, besi dan baja. China juga memberikan subsidi pajak ekspor kepada sektor elektronik, permesinan, peralatan komunikasi, otomotif, kapal, hingga furnitur dan kerajinan.

Sebelum implementasi ACFTA tahap II berlangsung, ekspor produk manufaktur Indonesia ke China tak terlalu besar jika dibandingkan dengan produk pertanian dan pertambangan. Pangsa pasar produk lokal disinyalir cenderung menyusut sekitar 5% - 8% per tahun secara konsisten sepanjang beberapa tahun terakhir akibat dihajar barang selundupan dan produk

manufaktur nonstandar dari China dengan harga lebih murah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor non-migas Indonesia ke China sepanjang Januari sampai dengan November 2009 hanya US\$ 7,71 miliar (sekitar Rp 74,02 triliun). Sebagai perbandingan, ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang pada periode itu mencapai US\$ 10,72 miliar dan AS sebesar US\$ 9,41 miliar. Sebaliknya, impor nonmigas Indonesia dari China pada periode itu menembus US\$ 12,01 miliar dibandingkan dengan impor Indonesia dari AS yang hanya US\$ 5,95 miliar dan Jepang US\$ 8,78 miliar. Dari angka ini, neraca perdagangan Indonesia melawan China tumbuh negatif, sedangkan dengan AS dan Jepang, Indonesia mencatatkan neraca perdagangan yang sangat positif. Itu sebabnya banyak kalangan pesimistis kondisi pasar bebas pasca implementasi ACFTA dapat memberi keuntungan bagi industri nasional (Waluyo, 2010).

16.3 Ancaman dan Peluang

Bagi kalangan pengusaha khususnya elektronik hingga tekstil yang sebagian besar diimpor dari China, harganya lebih murah dibanding produk lokal dan membuat industri dalam negeri kelimpungan. Saat ini saja industri tekstil sudah defisit lebih dari 520 juta dolar AS. Jika bea masuk nol persen, industri lokal tak bisa bersaing dan bukan tak mungkin terjadi pemutusan hubungan kerja massal, karena 75 persen pasar domestik dikuasai produk China. Permemberlakuan AC-FTA bagai kado pahit ditahun baru. Kelangsungan industri khususnya usaha kecil menengah alias UKM juga ikut terancam. Padahal, selama ini UKM menopang perekonomian nasional.

Namun demikian, AC-FTA sudah diberlakukan, bahkan pemerintah pun tidak bisa menghindari atau menolaknya karena kesepakatan tersebut telah ditanda tangani. Memang pelaksanaan AC-FTA apabila diikaji sebenarnya belum tentu menguntungkan bagi negara berkembang, karena

pertumbuhan ekonomi seperti di Indonesia masih didominasi oleh sektor konsumtif. Sehingga dengan adanya AC-FTA, jelas akan menambah peluang porsi konsumtif masyarakat. Kita sebagai pengusaha dan masyarakat Indonesia sudah terbiasa dan diuji oleh krisis moneter sejak tahun 1998. Kita mampu mengatasi dan melewati krisis tersebut sampai sekarang, apalagi krisis global yang dihadapi saat ini jauh lebih ringan dibanding dengan kondisi tahun 1998. Bagi pengusaha, AC-FTA dapat dijadikan sebuah peluang yang dapat mengubah suasana perekonomian atau bisnis menjadi lebih baik. Kita harus memandang hal ini dari sisi optimis, yang berarti harus memandang bahwa hal tersebut adalah peluang. Hanya tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk bisa kita gali dan kembangkan. Karakter produk China adalah harga murah tetapi kualitas rendah, sehingga kita dapat bersaing dengan membuat produk yang berkualitas dengan mengusahakan agar harga sedikit bisa bersaing. Sebagai contoh produk batik Indonesia, banyak pedagang, konsumen, atau masyarakat masih lebih memilih membeli produk lokal yang masih dipercaya lebih bagus kualitasnya.

16.4 Langkah Antisipasi

Negara Indonesia akan dibanjiri produk China yang melimpah dengan harga yang murah tapi kita harus mengingat bahwa kita masih memiliki potensi dan produk yang tidak dimiliki oleh negara China. **Pertama**, potensi dan produk harus dikembangkan dengan lebih inovatif untuk mencapai keunggulan komparatif dengan China. Inovasi produk ini dibarengi dengan meningkatnya ketrampilan anak negeri Indonesia untuk terus bereksplorasi menghasilkan produk bangsa yang unik, membanggakan dan bersaing. Tentunya hal ini didukung dengan peran pemerintah untuk mengadakan pelatihan ketrampilan agar SDM kita lebih terampil dan siap bersaing.

Kedua, yang perlu kita ingat bahwa kita tidak anti produk negara lain. Namun, semangat nasionalisme, seperti Aku Cinta Indonesia untuk menumbuhkan semangat cinta produksi dalam negeri harus kita perjuangkan lagi. Diikuti dengan peran pejabat pemerintah yang harus selalu bangga menjadi *public figure* dengan mengenakan produk dalam negeri sendiri. Apabila mereka sebagai pejabat publik mengenakan produk luar negeri yang lebih mahal maka wajib dikenai sanksi. Contohnya di Korea Selatan yang melanggar akan diberi sanksi berupa denda kecuali bagi mereka yang mengenakan produk yang belum diproduksi oleh negaranya. Begitu pula apabila hal ini diterapkan di Indonesia, masing-masing wilayah negara kita memiliki keunikan produk.

Ketiga, instrumen pajak sebagai instrumen yang tidak bisa lepas dari investasi harus mendukung pengusaha dalam negeri. Pengusaha dengan usaha mereka, erat kaitannya dengan penyediaan lapangan kerja. Kebijakan Menteri Keuangan terkait PPh tentu dapat menolong pengusaha dalam negeri. Peraturan Menteri Keuangan sehubungan dengan pemberlakuan AC-FTA belum dirilis sehingga memungkinkan untuk memperhatikan kepentingan pengusaha dalam negeri. Tunjangan pajak yang kemarin ditujukan untuk kategori usaha tertentu saja belum mampu teresap secara maksimal. Oleh karena itu sebaiknya tunjangan pajak bisa diperluas.

16.5 Politik dan Hubungan Internasional dalam Lingkungan Bisnis

Nasional

Pada masa yang silam, politik dan ekonomi merupakan sebuah bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi dan politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara dalam menghadapi saingan-saingannya. Ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial

yang memiliki teori, ruang lingkup serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci. Pemikiran yang berpangkal-tolak pada faktor kelangkaan menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijaksanaan yang rasional khususnya penentu hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam memajukan kebijaksanaan atau siasat ekonomi tertentu, seorang ahli ekonomi dapat bertanya kepada ahli ilmu politik tentang manakah yang paling baik disusun untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Kebijaksanaan untuk memperbesar produk nasional misalnya, ahli ilmu politik dapat ditanya tentang cara menghalau dan mengurangi hambatan politis yang mengganggu usaha

Ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerjasama antara ilmu politik tidak dapat lagi mengabaikan pengaruh dan peranan perdagangan luar negeri, serta hubungan ekonomi luar negeri pada umumnya terhadap usaha-usaha pembangunan dalam negeri, misalnya hasil kerajinan tangan UKM, apabila mereka ingin hasilnya dapat diekspor keluar negeri, tentunya mereka perlu campur tangan pemerintah dalam mempromosikannya.

Pembukaan UUD 1945, kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diwujudkan salah satunya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Pencapaian kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis baik dalam tataran global maupun regional yang memberikan tantangan sekaligus kesempatan bagi proses pencapaian kepentingan nasional tersebut.

Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama regional baik berlandaskan kedekatan geogarafis maupun fungsional yang semakin meluas. Demikian pula, saling keterkaitan antar masalah juga terlihat dari pembahasan topik-topik global pada agenda internasional yang cenderung membahas isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia (HAM), intervensi humainter, demokrasi dan demokratisasi, *good governance*, dan anti-korupsi, lingkungan hidup, masalah tenaga kerja, kejahatan transnasional seperti terorisme dll. Fenomena tersebut di atas diikuti pula oleh fenomena globalisasi yang semakin meluas, dimana globalisasi merupakan arus kekuatan yang dampaknya tidak dapat dielakkan oleh negara manapun didunia. Globalisasi telah membawa berbagai berbagai peluang besar bagi kemajuan perekonomian negara-negara yang dapat memanfaatkannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi pada kenyataannya juga memiliki dampak yang merugikan, khususnya bagi negara yang belum atau kurang mampu memanfaatkan kesempatan yang tersedia.

Perjalanan politik dan penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia telah banyak hal yang dilakukan dan dicapai dengan baik. Pertumbuhan penguatan citra Indonesia sebagai negara yang mampu memadukan dinamika penduduk yang mayoritas beraga Islam dan demokrasi, perhatian yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan nasional, penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diskriminatif, pendorongan pemulihan ekonomi yang lebih menjanjikan serta perlindungan warga negara yang konsisten, merupakan dasar kebijakan yang terus dikembangkan.

Kedudukan geo-politik yang strategis dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA), populasi, proses demokratisasi yang semakin baik merupakan

kekuatan dan keunggulan komparatif sebagai potensi untuk membangun kepemimpinan Indonesia ditataran global melalui inisiatif dan kontribusi pemikiran komitmen Indonesia pada terbentuknya tatanan hubungan internasional yang lebih adil dan berimbang. Hal ini tidak terlepas dari upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif di Indonesia, karena lingkungan bisnis sangat dipengaruhi oleh situasi politik suatu negara, ketika kondisi politik tidak menentu atau mengalami kekacauan akan berdampak kepada perekonomian terutama menyangkut industri.

Langkah kebijakan dalam menjaga kesinambungan dan pemantapan peran politik luar negeri dan kerja sama internasional antara lain adalah meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional, melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional, dan menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan, multilateralisme, saling pengertian dan perdamaian dalam politik dan hubungan internasional. Peranan politik luar negeri dan kerja sama internasional terus ditingkatkan untuk menuju Indonesia yang mampu mengembangkan pilihan-pilihan dan menopang keinginan hidup damai, sejahtera, dan bermartabat ditengah bangsa lain dan mampu menghadapi perubahan pergaulan internasional. Peran Indonesia semakin besar dalam hubungan internasional dan menciptakan perdamaian dunia, serta memulihkan citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional yang berdampak peningkatan perekonomian negara.

16.6 Peta Politik dan Kegiatan Bisnis Nasional

Berbagai studi ekonomi politik atau sejarah ekonomi selalu menunjukkan adanya hubungan yang erat dan positif antara kelembagaan politik dan hukum dengan kinerja ekonomi. Jika kelembagaan non ekonomi hukum dan politik baik, kinerja ekonomi pun membaik. Politik suatu negara

sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Semua kebijakan yang berhubungan dengan warga negara mereka yang memutuskan, mulai dari perang, izin investasi, penetapan upah, pajak ekspor-impor, dan pajak lainnya. Hubungan kausal teoritis antara variabel kelembagaan dengan kinerja ekonomi. Variabel kinerja ekonomi tersebut bisa diukur dari arus investasi yang masuk, pertumbuhan ekonomi, kinerja industri, dan ekspor.

Pelaku ekonomi, investor, dan pelaku pasar masih melihat bahwa institusi hukum dan politik mudah bergoyang, tidak stabil, dan masih menyisakan ketidakpastian, yang pada akhirnya dinilai berpengaruh secara signifikan ada dunia usaha dan kegiatan ekonomi umumnya. Kondisi politik suatu negara yang keadaan politiknya stabil maka perekonomiannya akan meningkat contohnya Jepang, Singapura, Cina, dan lain-lain, sedangkan keadaan politiknya yang tidak stabil (sedang dilanda konflik) maka perekonomian negara tersebut akan mengalami penurunan contohnya Amerika yang mengalami krisis (setelah perang dengan Irak), Afganistan, dan lain sebagainya.

16.7 Ilustrasi Iklim Investasi Indonesia

Kedatangan Presiden Obama ke Indonesia menurut ekonom dari *Standard Cartered Bank*, Fauzi Ikhsan, secara ekonomi berdampak kecil. Menurutnya hal itu tidak terlepas dari tiga lembaga pemeringkat dunia yang memberi indikasi positif bagi Indonesia. *Standar and Poor's* memberikan level “*double b*” untuk berinvestasi di Indonesia, sehingga para investor asing pun optimis dengan Indonesia.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2009 yang sebesar 4,5 persen, tertinggi setelah China dan India, membuat para investor penting untuk berinvestasi di Indonesia. Tahun lalu pertumbuhan ekonomi dunia negatif, dibanding tahun ini yang cenderung positif dan mencapai 3,9 persen.

Akibatnya menurut Fauzi, laba perusahaan dan perbankan dunia meningkat, Investor tahu motor pertumbuhan ekonomi dunia itu adanya di Asia. Di Asia motornya adalah China, India, dan Indonesia. Ditambah dengan suku bunga rendah yang diprediksi hingga akhir tahun, jadi tidak ada alasan investor asing tidak memilih Indonesia, lanjut Fauzi. Kedatangan Obama sendiri menurut Fauzi, hanya ingin mengurangi dominasi China. “Tujuan Obama datang ke Asia, kemudian ke Indonesia lebih bersifat geopolitis. Amerika ingin mencari penyeimbang pertumbuhan ekonomi China dengan mencari negara di belahan selatan, yaitu Indonesia,” terang Fauzi.

Menurutnya kedatangan Obama juga akan memberikan efek persepsi yang bagus. “Ancaman terorisme di Indonesia sudah berkurang. Sehingga warga AS di Indonesia juga menjadi aman. Investor Amerika akan berinvestasi di sektor riil terutama di bidang energi dan pertambangan, seperti perminyakan, gas, batu bara, dan emas,” lanjut Fauzi. Tidak menutup kemungkinan menurut Fauzi, kedatangan Obama juga akan melobi pemerintah Indonesia untuk merevisi perundang-undangan, terutama di sektor energi dan pertambangan.

16.8 Kunjungan Obama Mengangkat Peran Global Indonesia.

Kunjungan Presiden Obama ke Indonesia bukan saja bersifat pribadi tetapi juga politis. Ia berkesempatan mengenang kembali tempat ia menghabiskan masa kecilnya, mengenyam pendidikan dasarnya, dan mempelajari bahasa setempat (Indonesia). Tak seorang pun dari 43 presiden Amerika Serikat lainnya pernah mengalami kedekatan dengan negara-negara non Barat seperti Obama miliki.

Salah satu tujuan politik kunjungan sang presiden adalah mengangkat citra global Indonesia di mata dunia. Banyak orang AS melihat pentingnya posisi Indonesia, kerap kali digambarkan sebagai negara terpenting di dunia

yang paling sedikit dikenal warga AS. Dengan penduduk 230 juta jiwa, Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia setelah China, India, dan AS.

Sebelas tahun lalu Indonesia memulai satu transisi mengesankan, dari sebuah pemerintahan otoriter berusia 30 tahun dibawah Soeharto menjadi negara paling demokratis di seluruh Asia Timur dan Tenggara. Yang membuat proses transisi demokrasi itu luar biasa adalah bahwa penduduknya yang hampir 85 persen beragama Islam itu, membuktikan betapa nilai-nilai demokrasi dan Islam bisa menyatu untuk membangun ‘masyarakat adil dan makmur’ yang adalah tujuan utama berbangsa seperti tercantum dalam konstitusi Indonesia.

Indonesia juga penting karena lokasinya strategis di persilangan jalur laut antara Eropa, Afrika, Timur Tengah dibagian timur, dan China, Jepang, dan Korea Selatan di bagian utara. Selain itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas, batu bara, tembaga, nikel, kayu, ikan, kelapa sawit, dan banyak lagi. Mungkin alasan utama Indonesia tidak begitu dikenal oleh masyarakat AS adalah karena AS tidak pernah terlibat perang dengan Indonesia. Alasan lainnya karena hanya sedikit migran dan pelajar dari Indonesia yang datang ke AS. Indonesia dewasa ini dianggap lebih “*unward-looking*” dan curiga terhadap orang asing. Mengangkat citra Indonesia bisa menguntungkan AS karena dapat menjaga keseimbangan tiga negara besar Asia yaitu China, Jepang, dan India. Lebih jauh lagi, keberhasilan Indonesia mempertahankan sistem pemerintahan yang demokratis berpotensi mendukung perjuangan dunia mengatasi permasalahan di negara lemah dan penuh dengan konflik.

Kunjungan Obama ke Indonesia akan menempatkan negara kepulauan di peta penting dunia. Kemitraan Komprehensif yang secara resmi akan diluncurkan dan negara itu adalah bentuk komitmen jangka panjang yang

bisa membantu Indonesia berperan besar ditingkat global. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan Kemitraan Komprehensif pada November 2008 setelah memenangkan pemilihan presiden untuk kedua kalinya. Isi kesepakatan itu akan menjadi ujian yang bagus untuk kebijakan luar negeri pemerintahan Obama, yang lebih berusaha mendengar daripada menceramahi Indonesia.

Pendidikan sepertinya akan menjadi prioritas utama, memperkuat universitas di Indonesia, membantu lebih banyak orang Indonesia belajar di AS, dan mendorong warga AS untuk belajar tentang Indonesia. Indonesia akan memerlukan dampingan dari segi ekonomi dan pembangunan dari AS walaupun memang sulit. Wilayah diskusi paling pelik adalah militer, karena Indonesia belum mengamalkan dan mengartikulasikan strategi pertahanan dan keamanan yang pantas sehingga mendapat kunjungan AS. Kunjungan Presiden Obama yang sangat dinantikan masyarakat Indonesia sejak dia terpilih November 2008, mempunyai kepentingan simbolis yang besar bagi kedua negara. Meskipun begitu, keuntungan konkret bagi masyarakat awam di dua negara akan mewujud secara perlahan ditahun-tahun mendatang, tentu saja dengan kerja keras dari kedua negara.

16.9 Penegakan HAM dan CSR

Perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu penting, bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia namun peranan sektor usaha pun juga diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Terhadap ketiga hal tersebut, politik, hubungan Internasional, dan HAM pengaruhnya terhadap kegiatan bisnis juga membawa pengaruh tersendiri pada profesi hukum.

Profesi akuntan harus lebih mengembangkan dan menyesuaikan kemampuan yang dimilikinya agar dapat selalu memenuhi kebutuhan klien sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang ada. Tidak hanya sekedar memperdalam kemampuan menyajikan laporan keuangan kuantitatif tetapi juga mampu memahami pelaporan kinerja perusahaan yang lebih bersifat kualitatif, dalam hal ini menyangkut pengungkapan CSR suatu perusahaan. Oleh karena itu, para akuntan dan pelaku kegiatan bisnis juga diharapkan mampu memberikan analisis atau penilaian terhadap dampak bagi lingkungan yang disebabkan dari kegiatan bisnis tersebut.

Kegiatan bisnis dari suatu perusahaan akan lebih berkelanjutan jika perusahaan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan HAM. Dengan demikian perusahaan akan mampu untuk meminimumkan atau memmanajemen risiko dari bisnis yang dijalankan. Perusahaan sebagai entitas suatu usaha harus dapat menjadi bagian dari masyarakat dan hidup berdampingan secara damai dengan masyarakat sekitarnya. Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta merepresentasikan kepentingan rakyat belum cukup tanpa dukungan dari perusahaan yang sadar akan kewajibannya sebagai salah satu komponen dari masyarakat. Sehingga kerjasama antara pemerintah dengan bisnis perlu digalakkan, dengan catatan bukan untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi juga untuk keseimbangan kepentingan antara semua pihak.

16.10 Hubungan Politik, Perdagangan, HAM dan CSR

Pengaruh politik dan hubungan internasional terhadap perekonomian dan bisnis di suatu negara, selain itu juga telah sedikit disinggung tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu penting, bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia namun peranan

sektor usaha pun juga diharapkan dapat meewujudkan hal tersebut. Peranan sektor bisnis dan usaha dalam pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan HAM di Indonesia tidak terlepas dari *Global Compact* yang digulirkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (tahun 1999) dan dokumen PBB tentang tanggung jawab perusahaan (transnational) dan terhadap HAM (disahkan dalam tahun 2003). Bersama-sama dengan sepuluh asas *Global Compact* (GC), maka konsep *Corporate Social Responbilites* (CSR) sekarang merupakan bagian dari pedoman melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG).

Sekarang, masalah etika bisnis dan akuntabilitas bisnis makin mendapat perhatian masyarakat di beberapa negara maju, yang biasanya sangat liberal dalam menghadapi perusahaan-perusahaannya. Hal ini tidak terlepas dari adanya kondisi yang pada dewasa ini banyak muncul pandangan bahwa bisnis mempunyai ikatan erat dengan masyarakat (*stakeholder*) termasuk yang terkena pengaruh dari keberadaan bisnis, sehingga keberadaan bisnis tidak hanya untuk memberikan keuntungan bagi *shareholder* saja. Bisnis juga diharapkan memenuhi nilai-nilai yang ada di masyarakat dan memiliki tanggung-jawab kepada pihak tersebut jadi tidak salah jika *stakeholder* meminta tanggung jawab bisnis dari dampak-dampak yang telah ditimbulkannya. Apabila hal ini dijalankan dengan komitmen dan konsisten, maka akan mendorong perusahaan untuk bertindak lebih etis dalam setiap usahanya.

Selain itu, dengan adanya partisipasi *stakeholder* dalam setiap kegiatan bisnis, akan mendorong terciptanya akuntabilitas bisnis terhadap publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan. Pada akhirnya kegiatan bisnis dari persahaan dengan sendirinya akan lebih berkelanjutan. Konsep CSR sedikit tumpang tindih dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dan konsep etika bisnis. GCG kita mengacu pada standar

dasar yang bertujuan pada ketaatan (*compliance*) terhadap peraturan negara maupun aturan internal perusahaan. Etika bisnis lebih luas konsepnya, didasarkan pada nilai-nilai yang melampaui ketentuan atau norma aturan. Pada dasarnya GCG dan etika bisnis fokusnya adalah pada internal perusahaan dan diwujudkan sebagian besar dalam bentuk aturan. CSR itu lebih berdasar nilai-nilai (*value-based*) dan fokusnya keluar (*external*) perusahaan. CSR juga ditujukan pada jajaran *stakeholder* yang lebih luas. Misalnya, *stakeholder* internal, seperti : pegawai, pemegang saham; *stakeholder* eksternal : komuniti, *customer*, *supplier*, LSM, dan *stakeholder* lainnya. Dengan demikian dalam CSR, perhatian manajemen tidak saja harus ditujukan pada standar dasar ekonomi, tetapi juga pada dampak kegiatan perusahaan itu terhadap lingkungan hidup, komuniti, sekitarnya dan masyarakat pada umumnya.

Meskipun memang pada dasarnya negara yang bertanggung jawab tentang penegakan HAM ini, tetapi peranan perusahaan juga tidak kecil dalam turut serta menghormati HAM. Karena GC merupakan pedoman bagi CSR dan GC merujuk pada penghormatan HAM, maka pelaksanaan CSR oleh perusahaan berarti pula kewajiban perusahaan untuk menghormati perlindungan HAM di Indonesia. Ketidaktaatan perusahaan melindungi HAM di Indonesia, terutama yang tertuang dalam konstitusi, akan merupakan pelanggaran serius dari perusahaan bersangkutan. Terkait dengan hal itu, dewasa ini telah banyak perusahaan yang mengungkapkan bentuk CSR yang mereka lakukan pada laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan CSR dalam laporan perusahaan bukanlah suatu hal yang mudah, namun di lain pihak hal ini merupakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi para akuntan untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya agar dapat selalu memenuhi permintaan klien yang menggunakan jasa kita sebagai akuntan.

Bab 17

Rekonstruksi Paradigma Akuntansi: Menuju Akuntansi Keperilakuan

Tujuan Pembelajaran

- 1) Untuk mengetahui rekonstruksi paradigma akuntansi
- 2) Untuk menganalisis rekonstruksi akuntansi keperilakuan
- 3) Untuk mengetahui laporan rekonstruksi akuntansi keperilakuan
- 4) Untuk mengetahui kinerja akuntansi keperilakuan

17.1 Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Motivasi dan perilaku dari pelaksana sistem informasi akuntansi menjadi aspek penting dari suatu sistem informasi akuntansi. Pihak pemakai laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu pemakai internal (*internal user*) dan pemakai eksternal (*external user*). Pemakaian oleh pihak internal dimaksudkan untuk melakukan serangkaian evaluasi kinerja. Pihak eksternal juga memiliki suatu rangkaian perilaku yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi. Pihak eksternal sama dengan pihak internal, tetapi mereka lebih berfokus pada jumlah investasi yang mereka lakukan dalam organisasi tersebut. Binberg dan Shields (1989) mengklasifikasikan riset akuntansi keperilakuan dalam lima aliran (*school*), yaitu:

- 1) Pengendalian manajemen.
- 2) Pemrosesan informasi akuntansi.
- 3) Desain sistem informasi.

4) Riset audit.

5) Sosiologi organisasional.

Informasi akuntansi dirancang untuk suatu dasar bagi pengambilan banyak keputusan penting di dalam maupun diluar perusahaan. Sistem informasi dimanfaatkan untuk membantu dalam proses perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian yang kompleks. Awal perkembangan riset akuntansi keperilakuan menekankan pada aspek akuntansi manajemen khususnya penganggaran (*budgeting*), namun yang dominan dalam hal ini terus berkembang dan bergeser searah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit. Banyak volume riset atas akuntansi keperilakuan dan meningkatnya sifat spesialisasi riset, serta tinjauan studi secara periodik, akan memberikan manfaat untuk beberapa tujuan berikut ini:

- 1) Memberikan gambaran *state of the art* terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan.
- 2) Membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan riset.
- 3) Untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sebidang akuntansi, seperti audit, akuntansi manajemen dan perpajakan.

Perkembangan yang pesat dalam akuntansi keperilakuan lebih disebabkan karena akuntansi secara simultan dihadapkan dengan ilmu-ilmu social secara menyeluruh. Akuntansi keperilakuan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang mempengaruhi keputusan bisnis dan hasil mereka. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini:

- 1) Untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan.

- 2) Untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis.
- 3) Untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan.

Akuntansi keperilakuan merupakan cabang ilmu akuntansi yang mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan sistem informasi akuntansi. Istilah sistem informasi akuntansi yang dimaksud di sini dalam arti luas meliputi seluruh desain alat pengendalian manajemen yang meliputi sistem pengendalian, sistem penganggaran, desain akuntansi pertanggungjawaban, desain organisasi seperti desentralisasi atau sentralisasi, desain kolektibilitas biaya, penilaian kinerja, serta laporan keuangan.

17.2 Perspektif Akuntansi Keperilakuan Berdasarkan Perilaku

Manusia: Psikologi, Sosiologi dan Psikologi Sosial

Menurut Robbins (2003), ketiga hal tersebut, yaitu psikologi, sosiologi dan psikologi sosial menjadi kontribusi utama dari ilmu keperilakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia, walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia. Terutama merasa tertarik dengan bagaimana cara individu bertindak. Seseorang dapat disebut sebagai sosiolog adalah orang yang mempelajari manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Fokusnya didasarkan pada tindakan ketika mereka bereaksi terhadap stimuli dalam lingkungan mereka, dan perilaku manusia dijelaskan dalam kaitannya dengan ciri, arah dan motivasi individu. Keutamaan psikologi didasarkan pada seseorang sebagai suatu organisasi. Psikologi, merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan dan

kadang mengubah perilaku manusia. Para psikolog memperhatikan studi dan upaya memahami perilaku individual.

Psikologi sosial, adalah suatu bidang dalam psikologi, tetapi memadukan konsep baik dari psikologi maupun sosiologi yang memusatkan perhatian pada perilaku kelompok sosial. Penekanan keduanya adalah para interaksi antara manusia dan rangsangan fisik.

17.3 Kontribusi Berbagai Disiplin Ilmu

Ilmu akuntansi keperilakuan dibangun berdasarkan kontribusi dari sejumlah disiplin ilmu keperilakuan seperti psikologi, sosiologi, psikologi sosial.

1) Psikologi

Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengukur, menjelaskan dan terkadang mengubah perilaku manusia.

2) Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia.

3) Psikologi Sosial

Psikologi merupakan dunia yang berkaitan dengan persoalan perasaan, motivasi, kepribadian, dan sejenisnya yang berkaitan dengan individu. Sementara, sosiologi secara umum cenderung berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan.

4) Antropologi

Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik yang meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaan.

5) Ilmu Politik

Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik serta deskripsi dan analisis terhadap sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori dan riset dan organisasi internasional, serta perilaku politik dan kebijakan politik.

17.4 Landasan Teori dan Pendekatan Akuntansi Keperilakuan

Perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga pokok produk. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Meskipun demikian, berbagai riset tersebut masih bersifat normative.

Tahun 1952 C. Argyris menerbitkan risetnya pada tahun 1952, desain riset akuntansi manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Sejak saat itu, desain riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku organisasi.

17.5 Pendekatan Universal ke Pendekatan Kontinjensi

Riset keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal (*universalistic approach*), seperti riset Argyris (1952), Hopwood (1972), dan Otley (1978). Tetapi, karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontinjensi (*contingency approach*).

Berbagai riset yang menggunakan pendekatan kontinjensi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontinjensi yang mempengaruhi perancangan dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Secara ringkas, berbagai variabel kontinjensi yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidakpastian (*uncertainty*) seperti tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor eksternal lainnya.
- 2) Teknologi dan saling ketergantungan seperti proses produksi, produk masal, dan lainnya.
- 3) Industri, perusahaan, dan unit variabel seperti kendala masuk ke dalam industri, rasio konsentrasi, dan ukuran perusahaan.
- 4) Strategi kompetitif (*competitive strategy*) seperti penggunaan biaya rendah atau keunikan.
- 5) Faktor-faktor yang dapat diamati (*observability factor*) seperti desentralisasi, sentralisasi, budaya organisasi dan lainnya.

17.6 Aspek Penting dalam Akuntansi Keperilakuan

Menurut Schiff dan Lewin (1974), ada lima aspek penting dalam akuntansi keperilakuan diantaranya yaitu:

- 1) Teori Organisasi dan Keperilakuan Manajemen

Teori organisasi modern memiliki perhatian dalam membahas perilaku komponen entitas perusahaan sebagai dasar pemahaman tindakan dan motif mereka. Teori organisasi modern melihat interaksi antar elemen organisasi guna mendukung tujuan organisai. Teori organisasi modern lebih konsentrasi pada perilaku pengarah tujuan organisasi, motivasi dan karakteristik menyelesaikan masalah.

- 2) Penganggaran dan Perencanaan

Fokus penganggaran dan perencanaan yakni formulasi tujuan organisasi dan interaksi perilaku individu. Sebagian dimensi penting dalam area ini merupakan proses partisipasi penganggaran, level kesulitan mencapai tujuan, level aspirasi, dan adanya konflik antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Keselarasan antara tujuan individu dan tujuan organisasi menjadi kerangka manajerial dalam pengembangan organisasi,

3) Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan lebih berfokus pada teori dan model tentang pengambilan keputusan. Ada teori model normatif, paradoks, deskriptif dalam pengambilan keputusan. Teori normatif yakni bagaimana seharusnya orang mengambil keputusan. Teori paradoks yakni sesuatu yang bertentangan dengan teori normatif, dan model deskriptif membahas apa yang terjadi pada saat orang mengambil keputusan menurut fakta empiris yang ada. Apa informasi (*subject matter*) yang dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Informasi yang digunakan tetaplah informasi akuntansi.

4) Pengendalian

Aspek pengendalian sangat penting dalam suatu organisasi, semakin besar organisasi, maka membutuhkan tindakan pengendalian yang semakin intensif. Pengendalian sering dihubungkan dengan pengukuran kinerja dan adaptasi individu terhadap lingkungan. Dimensi penting dalam pengendalian diantaranya seperti struktur organisasi, pengendalian internal, desentralisasi-sentralisasi, dan hubungan antara hirarki administrasi. Perkembangan terbaru dalam pengendalian internal yakni diakuinya lingkungan pengendalian sebagai salah satu kunci dalam pengendalian operasional organisasi.

5) Pelaporan Keuangan

Aspek perilaku dan pelaporan keuangan meliputi perilaku perataan laba dan keandalan informasi akuntansi dan relevansi informasi akuntansi untuk investor. Perataan laba merupakan bagian dari manajemen laba yang disebabkan oleh pihak manajemen memiliki manajemen informasi khusus untuk kepentingannya.

17.7 Ruang Lingkup Akuntansi Keperilakuan

Akuntansi keperilakuan juga bagian dari akuntansi tradisional yang berperan untuk pengumpulan, pengukuran, pencatatan serta pelaporan tentang informasi keuangan. Ini merupakan dimensi akuntansi yang secara khusus pada perilaku manusia serta hubungannya dengan penerapan sistem informasi akuntansi. Dalam akuntansi keperilakuan, perilaku manusia menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan, karena didalamnya terdapat dimensi sosial dari organisasi tersebut. Sehingga hal ini menjadi salah satu elemen penting yang harus ada pada setiap laporan oleh akuntan. Ruang lingkup akuntansi keperilakuan meliputi:

- 1) Mempelajari pengaruh antara perilaku manusia terhadap konstruksi, bangunan, dan penggunaan sistem informasi yang diterapkan dalam perusahaan dan organisasi, yang berarti bagaimana sikap dan gaya kepemimpinan manajemen mempengaruhi sifat pengendalian akuntansi dan desain organisasi; apakah desain sistem pengendalian akuntansi bisa diterapkan secara universal atau tidak.
- 2) Mempelajari pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap perilaku manusia, yang berarti bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi kinerja, motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, kepuasan kerja dan kerja sama.
- 3) Metode untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia dan strategi untuk mengubahnya, yang berarti bagaimana sistem akuntansi

dapat dipergunakan untuk mempengaruhi perilaku, dan bagaimana mengatasi resistensi itu. Disini muncul istilah *freezing* (membekukan) dan *unfreezing* (mencairkan). Contohnya perubahan sistem. Perubahan sistem bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi perlu upaya untuk sampai pada aplikasi sistem itu sendiri karena bisa jadi ada resistensi di situ.

17.8 Mengapa Mempertimbangkan Aspek Keperilakuan pada

Akuntansi

Peningkatan ekonomi pada suatu organisasi dapat digunakan sebagai dasar memilih informasi yang relevan terhadap pengambilan keputusan. Kesempurnaan teknis tidak pernah mampu mencegah orang untuk menyadari bahwa tujuan akhir jasa akuntansi organisasi bukan sekedar teknik yang didasarkan pada efektivitas dari segala prosedur akuntansi tetapi juga bergantung pada bagaimana perilaku orang-orang di dalam perusahaan, naik sebagai pemakai maupun pelaksana, dipengaruhi oleh informasi yang dihasilkannya.

Akuntansi adalah Tentang Manusia

Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan *factor social* secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari seluruh sistem akuntansi. Dari pengalaman dan praktik banyak manajer dan akuntan telah memperoleh pemahaman yang lebih dari sekedar aspek manusia dalam tugas mereka. Bagaimanapun harus diakui bahwa banyak sistem akuntansi masih dihadapkan pada berbagai kesulitan manusia yang tidak terhitung, bahkan penggunaan dan penerimaan seluruh sistem akuntansi terkadang dapat menjadi meragukan. Pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan dilakukan atas dasar sudut pandang hasil laporan mereka dan bukan atas dasar kontribusi mereka yang lebih luas terhadap efektivitas organisasi.

Sebagian prosedur saat ini juga dapat menimbulkan pembatasan yang tidak diinginkan terhadap inisiatif manajerial. Prosedur dapat menjadi tujuan akhir itu sendiri jika semata-mata dibandingkan dengan teknik organisasi yang lebih jelas.

Akuntansi adalah Tindakan

Senua anggota mempunyai perang yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota. Rasa tanggung jawab tersebut pada sebagian organisasi dihargai dalam bentuk penghargaan tertentu.. Kesadaran dapat terwujud manakala mematuhi ketetapan dalam anggaran. Pencapaian tujuan dalam bentuk kuantitatif juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab anggota organisasi dalam memenuhi kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran informasi.

17.9 Pengaruh Akuntansi Keperilakukan Terhadap Pelaporan

Keuangan

Perkembangan organisasi bisnis saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada pihak lain tentang siapa atau apa, bagaimana menjalankan organisasi, dan untuk siapa harus bertanggungjawab. Hal ini pada umumnya disebut sebagai persyaratan pelaporan, meskipun beberapa diantaranya mungkin tidak dapat dipaksakan. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan atau pelaporan informasi mengkonsumsi sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara suka rela kecuali pembuat informasi yakni bahwa hal ini akan mempengaruhi penerima untuk berperilaku sebagaimana yang

diinginkan oleh pelapor/pembuat. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku dalam beberapa cara, diantaranya adalah:

1) Antisipasi penggunaan informasi.

Persyaratan pelaporan kemungkinan besar akan mempengaruhi perilaku pembuat ketika informasi yang dilaporkan merupakan deskripsi mengenai perilaku pembuat itu sendiri, atau untuk mana pembuat tersebut akan bertanggung jawab. Semakin informasi yang dilaporkan mencerminkan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh pembuat, maka akan semakin besar kemungkinan bahwa perilaku pembuat akan dimodifikasi. Pembuat dapat merasa cukup pasti bahwa perubahan dalam perilaku akan mengarah pada perubahan yang diinginkan dalam informasi yang dilaporkan.

2) Prediksi pengirim mengenai penggunaan informasi.

Kadang kala penerima menyatakan secara jelas bagaimana mereka menginginkan pembuat laporan berperilaku, meskipun sulit untuk dicapai secara simultan seperti: laba jangka pendek yang tinggi, pertumbuhan jangka panjang, atau citra publik yang baik. Apabila pembuat laporan bertanggung jawab kepada penerima maka ia akan berperilaku dalam cara-cara yang menyenangkan mengenai apa yang harus dilaporkan, mengenai tindakan dan hasil yang manakah yang penting bagi penerima. Namun ketika orang tidak merasa pasti mengenai bagaimana informasi tersebut akan digunakan, maka pembuat laporan memiliki pekerjaan sulit untuk memprediksi kapan dan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Kemungkinan besar akan mendasarkan pada prediksi sesuai dalam situasi yang serupa dalam pengalamannya atau bagaimana mereka akan menggunakannya jika berada pada penerima informasi tersebut.

3) Insentif atau saksi.

Kekuatan dan sifat dari penerima terhadap pembuat laporan adalah penentu yang penting dalam mengubah perilakunya. Semakin besar potensi yang ada untuk memberikan penghargaan atau sanksi semakin hati-hati pembuat laporan akan bertindak dan memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima. Misalnya saja, mahasiswa kemungkinan besar akan mengerjakan tugasnya ketika tugas tersebut dikumpulkan dan diberi nilai dibandingkan jika tidak, meskipun manfaat pembelajaran dalam kedua kasus tersebut adalah sama.

4) Penentuan waktu.

Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pembuat laporan atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan perubahan perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan tersebut sebelum ia bertindak. Sehingga jika persyaratan pelaporan yang sebelumnya dikenakan setelah perilaku yang dilaporkan, maka akan dapat diketahui pada pembuatan laporan berikutnya.

5) Pengarahan perhatian.

Suatu persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pembuat mengubah perilakunya. Hal itu kemungkinan informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengannya, yang dapat mengarah pada perubahan perilaku.

Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku disemua bidang akuntansi keuangan, perpajakan, akuntansi manajerial dan akuntansi sosial. Secara terperinci dampak tersebut dapat dijelaskan di bawah ini:

1) Akuntansi keuangan.

Terdapat beberapa prinsip akuntansi yang diterapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak yang ditimbulkannya. Beberapa hal yang kontraversial dari pernyataan standar akuntansi

tersebut merupakan contoh mengenai bagaimana prinsip akuntansi mempengaruhi perilaku. Contoh-contoh tersebut meliputi: “Bagaimana perlakuan atas kerugian akibat melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar?” dan “bagaimana perlakuan atas kelebihan nilai pembayaran kontrak utang dalam mata uang asing?”. Setelah mengalami proses perdebatan dari berbagai kelompok (pemerintah, praktisi bisnis, akademisi) melahirkan ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) No.4 yang menginterpretasikan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No.10 mengenai transaksi dalam mata uang asing. Dalam interpretasi tersebut dinyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh tingkat inflasi yang luar biasa (di atas 133%) dan melibatkan transaksi operasi dalam mata uang dolar dapat dikapitalisasi oleh organisasi/perusahaan. Prinsip akuntansi yang kontroversial lainnya termasuk perlakuan atas biaya penelitian dan pengembangan, serta persyaratan pelaporan akuntansi atas inflasi yang mengharuskan dibuatnya penyesuaian dalam laporan keuangan. Demikian pula halnya dengan akuntansi untuk minyak dan gas bumi.

2) Akuntansi perpajakan.

Umumnya persyaratan pelaporan akuntansi perpajakan dipandang rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak. Beberapa persyaratan telah dikenakan tidak hanya kepada pembayar pajak, tetapi juga pada pihak lain seperti karyawan dengan maksud untuk membuat hukum pajak lebih dipatuhi. Suatu keharusan catatan yang rinci atas pengurangan beban bisnis merupakan contoh yang paling baru dan kontroversial mengenai dampak perilaku dan persyaratan pelaporan pajak. Yang dalam faktanya, catatan rinci tersebut tidak perlu dilaporkan tetapi pembayar pajak dan penyusun pajak diharuskan untuk melaporkan bahwa catatan itu disimpan dan tersedia untuk diperiksa.

3) Akuntansi manajerial.

Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal maupun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan dapat bersifat keuangan, operasional, sosial atau suatu kombinasi. Tetapi hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan diluar organisasi. Disamping itu sangat sulit untuk digeneralisasi karena setiap organisasi memiliki sistem akuntansi manajemen yang berbeda-beda.

4) Akuntansi sosial.

Masih terdapat relatif sedikit mengenai dampak dari akuntansi sosial bagi publik karena akuntansi sosial adalah bidang perhatian yang masih relatif baru. Salah satu bidang pembahasan dari akuntansi sosial adalah dilema penyusunan laporan, polusi dan keamanan produk.

17.10 Rekonstruksi Konsepsi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

Sejak disahkannya UU No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT) pada Juli 2007, isu tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau yang lebih sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi polemik antara kalangan pelaku usaha dengan pemerintah dan DPR. Pro kontra mengenai TJSL sebagai kewajiban perseroan hingga kini belum juga usai. Alasan pelaku usaha menolak TJSL untuk dijadikan sebagai kewajiban perseroan yaitu:

- 1) Praktik TJSL di dunia umumnya bersifat sukarela sehingga sangatlah aneh bila Indonesia menjadikannya sebagai kewajiban perseroan.
- 2) Menjadikan TJSL sebagai kewajiban akan kian membebani perseroan dan mengurangi porsi laba untuk pemegang saham.

3) Mewajibkan pelaksanaan TJSL bisa mengganggu iklim investasi, sehingga dapat menyebabkan para investor Indonesia dan asing hengkang dan merelokasikan investasinya ke negara lain.

TJSL dipahami secara sempit oleh pelaku bisnis sebagai beban periodik yang merugikan perseroan dan pemegang saham. Dari perspektif biaya pemahaman tersebut bisa dimaklumi karena jika TJSL menjadi kewajiban periodik maka beban perseroan akan meningkat. Dampaknya, laba bersih dan deviden yang diterima pemegang saham akan menurun. Namun, pemahaman tersebut mencerminkan pelaku usaha di Indonesia masih terbelenggu oleh paradigma bisnis konservatif, *shareholder-based approach* dari aliran ekonomi neoliberal. Paradigma ini mengangungkan pencapaian laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisir biaya sebagai tolak ukur prestasi perusahaan. Dalam pandangan Friedman (peraih Hadiah Nobel Ekonomi Tahun 1976), tanggung jawab sosial bisnis adalah meningkatkan laba. Dengan laba yang maksimal, korporasi sebagai *good citizen* bisa menyetor pajak dalam jumlah yang meningkat kepada negara. Sementara urusan terkait isu-isu sosial dan lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintahlah yang harus mengalokasikan dana pajak dari korporasi untuk mengurus kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan karena hal tersebut merupakan tanggung jawab sosial pemerintah. Andaikan korporasi membantu, itu bersifat sukarela.

Berdasarkan paparan diatas, maka konsepsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) perlu ditata kembali. Secara konseptual, fokus dari TJSLP atau *corporate environment and social responsibility* (CESR) lebih luas dari TJSP (CSR). Dalam TJSLP, selain memfokuskan sumber dayanya untuk mendapatkan laba, korporasi juga harus memberikan perhatian dan komitmen yang sama besarnya pada isu-isu sosial dan lingkungan. Sedangkan pada TJSP (CSR), fokus sumber daya dan

energi perusahaan selain ditujukan untuk mendapatkan laba juga ditujukan untuk mengatasi isu-isu sosial, sementara isu-isu lingkungan hanya bersifat pelengkap. Pada konsepsi CSR, ada kecenderungan persepsi para pelaku bisnis lebih tertuju pada isu-isu sosial daripada lingkungan. Hal tersebut bisa tercermin dari hasil analisis Dahlsrud (2006) terhadap 37 definisi CSR. Hasil analisisnya menunjukkan ada lima komponen dalam definisi CSR, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan voluntarisme.

17.11 Urgensi Reformasi Paradigma Bisnis

Rekonstruksi konsepsi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) bakal sia-sia hasilnya apabila tidak dibarengi dengan reformasi paradigma bisnis. Masih banyaknya pelaku bisnis yang menolak konsepsi TJSLP sebagai kewajiban perseroan dengan alasan yang menunjukkan bahwa paradigma bisnis dan pelaku bisnis di Tanah Air masih konservatif. Reformasi paradigma bisnis oleh pelaku bisnis dalam mensikapi krisis dan isu sosial dan lingkungan menjadi agenda mendesak. Pebisnis harus menyadari. Selain itu, pebisnis juga harus segera menyadari bahwa eskalasi krisis sosial dan lingkungan berpotensi besar mengganggu keberlanjutan perusahaan dan bisnisnya. Pelaku bisnis perlu mengambil langkah konkrit secara berkelanjutan untuk mengatasi dan mencegahnya dengan menciptakan program-program TJSLP yang relevan, terarah dan efektif hasilnya.

Pelaku bisnis mesti menyadari bahwa TJSLP merupakan kewajiban asasi korporasi yang tidak boleh dihindari. Dasar argumentasinya adalah teori Akuntabilitas Korporasi (*Corporate Accountability*). Menurut teori ini, korporasi mesti bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkannya, baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap *stakeholder*

intinya maupun terhadap masyarakat dan lingkungan dimana korporasi beroperasi.

17.12 Reformasi Paradigma Akuntansi: Menuju Akuntansi

Berkelanjutan

Reformasi paradigma bisnis tidak akan efektif hasilnya apabila tidak dibarengi dengan reformasi paradigma akuntansi. Penyebabnya, kerangka konseptual akuntansi. Standar akuntansi keuangan dan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) yang selama ini menjadi pedoman bagi korporasi dalam praktik akuntansinya cenderung konservatif. Akuntansi konvensional kurang responsif terhadap perubahan. Paradigma bisnis yang hendak memperlakukan pengorbanan sumber daya ekonomi untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagai suatu investasi strategis.

Selama ini pelaporan keuangan yang dihasilkan para akuntan dan proses akuntansi mengabaikan pelaporan informasi sosial dan lingkungan sehingga menyesatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Karena itu, para akuntan harus ikut bertanggungjawab terhadap terjadinya krisis sosial dan lingkungan yang kian parah dan waktu ke waktu. Ada tiga alasan utama mengapa akuntan harus ikut bertanggungjawab (Gray dan Behbington., 2001;Schaltegger *et.al.*2006).

- 1) Moral dan etika (*moral/ethical reasons*). Para akuntan sebagai orang-orang yang terhormat harus menyadari bahwa keahlian profesional yang mereka miliki buka untuk menghasilkan sinyal-sinyal “sukses” yang menyesatkan. Para akuntan harus sungguh-sungguh mendorong pelaporan informasi keuangan sosial dan lingkungan secara jujur, benar dan utuh membantu para pihak dalam mengambil keputusan yang baik.
- 2) Profesional (*professional reason*). Akuntan sebagai profesi yang terhormat harus menyadari bahwa produk laporan keuangan yang

dihasilkan tidak lengkap, menyesatkan dan menyebabkan krisis sosial dan lingkungan. Karena itu, akuntan harus memiliki tanggung jawab profesional untuk mrngungkap informasi akuntansi yang komprehensif, jujur, reliabel dan relevan agar tidak menyesatkan menejemen dan para pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan.

- 3) Pragmatis atau ekonomi (*pragmatic, economic reasons*). Para akuntan harus menyadari bahwa manajer dan pemegang saham sedang mengambil keputusan-keputusan strategis dan taktis yang didasarkan pada informasi yang tidak lengkap. Karena isu-isu sosial dan lingkungan mempengaruhi pendapatan dan arus biaya koeporasi maka manajemen dan pemegang saham sebagai pengambil keputusan.

17.13 Reformasi Paradigma Akuntansi: Menuju Akuntansi

Keperilakuan

Akuntansi keperilakuan merupakan ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan usaha, sebaliknya bagaimana akuntansi bisa mempengaruhi perilaku manusia dalam pengambilan keputusan. Dalam akuntansi keperilakuan, perilaku manusia menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan, karena didalamnya terdapat dimensi sosial dari organisasi tersebut. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku akuntansi adalah masalah lingkungan. Permasalahan terkait isu mengenai lingkungan bukan merupakan hal yang baru saat ini. Penerapan akuntansi lingkungan masih dianggap sebagai hal yang membebani perusahaan karena dianggap dapat mengurangi laba perusahaan. Peran akuntan dianggap penting dalam upaya penerapan akuntansi lingkungan, karena akuntan dianggap sebagai pihak yang bisa menjembatani kepentingan publik dengan

perusahaan pengelolaan akuntansi lingkungan. Secara umum, terdapat 3 kategori utama ruang lingkup keperilakuan, yaitu:

- 1) Pengaruh/efek dari setiap perilaku/kegiatan manusia terhadap desain, konstruksi serta penggunaan sistem akuntansi. Hal ini terlihat pada bagaimana sikap serta filosofis dari bagian manajemen dalam mempengaruhi secara alami terhadap *budgeting control* atau pengendalian keuangan serta memaksimalkan fungsi setiap bagian dalam perusahaan.
- 2) Kebalikan dari yang pertama, bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi setiap perilaku manusia yang ada didalamnya. Hal ini ditandai dari perubahan emosi, motivasi, produktivitas, kepuasan kerja, pengambilan keputusan serta kerjasama tim
- 3) Metode atau cara untuk memprediksi untuk mengubah perilaku manusia, yang menekankan pada cara agar sistem akuntansi dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi perilaku manusia.

Era industrialisasi di satu pihak menitik beratkan pada perkembangan teknologi seefisien mungkin sehingga terkadang mengabaikan aspek lingkungan. Masalah lingkungan dengan adanya pencemaran limbah, misalnya banyak perusahaan telah diberhentikan operasionalnya karena masalah lingkungan yang dicemarkan oleh perusahaan.

Isu tentang pencemaran limbah oleh PT. Indorayon beberapa tahun lewat di Porsea Sumatera Utara yang berdampak pada operasional perusahaannya yang diberhentikan oleh pemerintah karena adanya permasalahan lingkungan dan masalah masyarakat sekitar industri. Selain itu juga PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo dengan lumpur yang tiada hentinya mengakibatkan kerusakan lingkungan dan menelantarkan ribuan masyarakat sekitar, yang sampai hari ini belum juga terselesaikan. Polusi dari pengelolaan limbah yang buruk membawa dampak negatif yang tinggi

terhadap perekonomian Indonesia. Sehingga perlu adanya suatu sarana untuk menyajikan informasi, apakah perusahaan menerapkan kebijakan lingkungan dalam operasionalnya. Peranan akuntan dalam hal ini cukup krusial. Saat ini perusahaan tidak hanya dituntut mencari keuntungan/laba semata tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial di masyarakat. Dari segi ekonomi, memang perusahaan diharapkan mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Tetapi di aspek sosial, maka perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Akuntansi lingkungan telah lama menjadi perhatian akuntan. Konsep ini menjadi penting karena perusahaan perlu menyampaikan informasi mengenai aktivitas sosial dari perlindungan terhadap lingkungan kepada *stakeholders* perusahaan. Perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai keuangan kepada investor dan kreditor yang telah ada serta calon investor atau kreditor perusahaan, tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan sosial di mana perusahaan beroperasi. Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada investor atau kepada kreditor saja, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lain, misalnya karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah, masyarakat, media, organisasi industri, dan kelompok kepentingan lainnya. Bentuk akuntansi pertanggungjawaban sosial selama ini dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Sustainability Reporting*. Laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat dilaporkan pada *annual report* atau sebagai laporan terpisah dari *annual report*.

Bab 18

Isu Utama Masalah Korporat

Tujuan Pembelajaran

- 1) Untuk mengetahui isu utama korporat
- 2) Untuk menganalisis isu utama korporat
- 3) Untuk mengetahui laporan isu utama korporat
- 4) Untuk mengetahui kinerja isu utama korporat

18.1 Korupsi: Masalah Klasik

Agustus tahun 2002 PT. Oenam Marble yang merupakan kelompok usaha PT. Sagared Team milik Maria Pauline Lumowa mengajukan permohonan kredit pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan, namun permohonan kredit tersebut ditolak. Dari perkenalan dalam presentasi tersebut, Edy Santoso selaku Manajer Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebesar USD 9.800.000,- akibat beberapa L/C pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan oleh beberapa perusahaan milik Maria Pauline Lumowa, seolah-olah perusahaan tersebut mengadakan kegiatan ekspor. Maria Pauline Lumowa menyanggupi kesepakatan tersebut dengan mempersiapkan dan menggunakan beberapa perusahaan untuk mengajukan dan menerima pembayaran fasilitas wesel ekspor diskonto yakni dengan sarana L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif.

Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Maria Pauline Lumowa kemudian membeli beberapa perusahaan yang kemudian dikenal dengan sebutan Gramarindo. Adapun yang duduk sebagai Direktur Utama masing-masing perusahaan dan sekaligus bertanggung jawab atau pengajuan pencairan L/C tersebut adalah beberapa orang kepercayaan Maria Pauline

Lumowa yang juga duduk dalam kepengurusan Pt. Sagared Team. Melalui perusahaan-perusahaan Gramarindo Group tersebut lah MARIA Pauline Lumowa memperoleh dana dari PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan menggunakan sarana wesel ekspor diskonto berupa L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif.

Januari 2003 Maria Pauline Lumowa mengajak Andrian Woworuntu sebagai konsultan investasi PT. Sagared Team dengan tugas dan tanggung jawab mengelola dana-dana yang diperoleh dari pencairan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif yang diajukan oleh Gramarindo Group pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sebagai konsultasi investasi PT. Sagared Team tersebut, Andrian Woworuntu memang tidak secara formal ditempatkan dalam susunan kepengurusan PT. Sagared Team, maka tidak memperoleh gaji tetap, namun sesuai kesepakatan antara Ardian Woworuntu dengan Maria Pauline Lumowa, Adrian mendapat imbalan telah mengakuisisi Hasfarm Group yakni berupa saham sebesar 15% dan Adrian mendapat posisi sebagai Komisaris atau diepercaya Maria Pauline Lumowa untuk mengelola dan menempatkan dana-dana yang diperoleh dari pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif pada PT. Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gramarindo Group untuk ditempatkan pada PT. Sagared Team. Selain itu, Adrian bertanggung jawab mengidentifikasi proyek-proyek yang diinginkan sesuai dengan kriteria yang diajukan Maria Pauline Lumowa atau PT. Sagared Team serta membuat rekomendasi apakah suatu proyek itu layak atau tidak untuk dilakukan investasi.

Untuk mempermudah koordinasi antara Ardian Woworuntu, PT. Sagared Team dan seluruh perusahaan Gramarindo Group ditempatkan terpusat pada satu gedung yang sama yakni pada Gedung Aditarina milik Ardian Woworuntu. Adapun dana-dana yang diperoleh dari pencairan L/C

dengan dokumen ekspor fiktif yang masuk ke rekening perusahaan PT. Sagared Team atas perintah Maria Pauline Lumowa yang terlebih dahulu dimintakan persetujuan Ardian Woworuntu. Sebagai konsultan investasi PT. Sagared Team, Ardian Woworuntu mengetahui asal muasal dana yang diperoleh PT. Sagared Team itu adalah dana yang diperoleh dari pencairan L/C dengan dokumen ekspor fiktif, namun oleh Ardian Woworuntu dan Maria Pauline Lumowa justru dipergunakan untuk berbagai kepentingan pribadi mereka dan kepentingan lain.

Untuk mengetahui tindak korupsinya mereka tersebut, Ardian Woworuntu bersama tujuh direksi perusahaan Grup Gramarindo merecovery diskonto L/C di BNI Kebayoran Baru. Bentuknya penandatanganan akte pengakuan utang (APU) pada 26 Agustus 2003 dibuat di depan notaris Mohammad Rida dan surat garansi pribadi Maria Pauline Lumowa dan terdakwa sendiri. Saksinya dari BNI seetempat, Koesadiyuwono dan Edy Santoso (disidang terpisah dan divonis pidana seumur hidup) dan rieksi perusahaan Grup Gramarindo. Tetapi APU hanya diatas kertas, terdakwa dan Maria Pauline Lumowa tidak pernah membayar 41 L/C yang didiskonto oleh Grup Gramarindo sehingga bank itu secara riil tetap dirugikan.

Perbuatan Maria Pauline Lumowa dan Ardian Woworuntu tersebut kemudian perkarakan ke pengadilan. Namun masalah itu tidak selesai sampai disitu saja, ketika perkaranya masih dalam persdiangan Ardian Woworuntu melakukan suap terhadap tiga (mantan) petinggi Mabes POLRI.

Pada bulan Februari 2005, Adrian Woworuntu dijatuhi kurungan seumur hidup, sedangkan Maria Pauline Lumowa saat ini masih buron. Begitu juga dengan tiga petinggi polisi yang terkena kasus suap akhirnya dipenjarakan. Kasus Adrian Woworuntu diatas adalah masalah klasik etika di Indonesia saat ini. Tindakan korupsi yang bertujuan untuk memperkaya diri

sendiri, didului oleh upaya penipuan dan manipulasi, yang kemudian juga dibumbui oleh masalah suap untuk menghindari diri dari masalah.

Indonesia berada di urutan ke-134 berdasarkan kemampuan mengatasi korupsi. Peringkat ini merupakan hasil survei Transparency International (TI) pada 2006 terhadap 163 negara di dunia. Posisi ini memang lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu yang menempati 140 dengan IPK Indonesia yang juga naik ketimbang 2005, yaitu dari 2,2 menjadi 2,4. Namun tentu saja saat ini masih merupakan angka yang sangat jelek bagi rapor sebuah negara. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia sudah mendapatkan komplain oleh banyak pihak, Bank Dunia, komunitas bisnis internasional dan juga para ekonom-ekonom liberal pasar bebas. Korupsi bagaikan darah dan daging yang menggerogoti bangsa ini, bahkan disebut sudah sebagai budaya bagi masyarakat Indonesia.

Definisi korupsi (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* = busuk, rusak, menggoyahkan, emutarbalik, menyogok) menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup unsur-unsur: melanggar hukum yang berlaku, penyalahgunaan wewenang, merugikan negara, memperkaya pribadi/diri sendiri.

Korupsi pada dasarnya disebut sbegai perbuatan aberant atau perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan atau kelompoknya dengan cara-cara berusaha untuk tidak melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, sulit untuk mendeteksi tindakan korupsi, karena palku akan berusaha untuk tidak menyimpang dari aturan. Misalnya saja

penggelembungan biaya, penawaran tender dan banyak lagi aktivitas yang diusahakan untuk tidak melanggar aturan.

Biasanya tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul “Strategi Pemberantasan Korupsi”, korupsi dapat dipicu oleh :

1. Aspek Individu Pelaku

- a. Sifat tamak manusia; Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam ini datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.
- b. Moral yang kurang kuat; Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.
- c. Penghasilan yang kurang mencukupi; Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tidak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam artisemua curahan peluang itu untuk keperluan diluar pekerjaanya yang seharusnya.

- d. Kebutuhan hidup yang mendesak; Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
- e. Gaya hidup yang konsumtif; Kehidupan di kota-kota besar acapkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.
- f. Malas atau tidak mau kerja; Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.
- g. Ajaran agama yang kurang diterapkan; Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

2. Aspek Organisasi

- a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

- b. Tidak adanya budaya organisasi yang benar. Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.
- c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai. Pada institusi pemerintah umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.
- d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi semakin terbuka perbuatan tindak korupsi dalam pegawai.
- e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi. Jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

- a. Nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghatgai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini

seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya darimana kekayaan itu didapatkan.

- b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi. Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara terbuka namun tidak disadari.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif. Pada umumnya masyarakat berpandangan masyarakat korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
- e. Aspek peraturan perundang-undangan. Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Tindakan korupsi secara langsung akan mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam

sektor privat, korupsi meningkatkan biaya niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi biaya (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi biaya niaga, korupsi juga mengacaukan “lapangan perniagaan”. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi juga menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Pakar ekonomi menyebutkan bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (*capital investment*) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti zaman Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan

kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain.

Di sisi lain, korupsi secara perlahan akan menjauhkan negara pada pencapaian kemakmuran, yang menjadi ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi oleh pejabat-pejabat negara akan mendorong kebijaksanaan pemerintah yang sering lebih menguntungkan kepada pemberi sogok, bukan pada rakyat luas. Satu contoh lagi adalah seperti pada kasus pemberian hak HPH kepada perusahaan-perusahaan hutan, juga peraturan lain pada zaman Soeharto yang mencoba melindungi perusahaan besar. Kebijakan seperti ini jelas akan merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Pemerintah atau penguasa yang “pro-bisnis” ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar, karena perusahaan ini pulalah yang akan membantu mereka melanggengkan kekuasaan mereka melalui dengan pemberian dana-dana besar saat kampanye pemilu.

Berdasarkan catatan Masyarakat Transparansi Indonesia, ada beberapa modus korupsi yang timbul di Indonesia, yaitu :

- 1) Pemerasan Pajak: Pemeriksa pajak yang memeriksa wajib pajak menemukan kesalahan perhitungan pajak yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak. Kesalahan-kesalahan tersebut bisa karena kesengajaan wajib pajak dan bisa juga bukan karena kesengajaan. Kekurangan tersebut dianggap tidak ada dan imbalannya wajib pajak harus membayarkan sebagian kekurangan tersebut masuk ke kantong pemeriksa pajak.
- 2) Manipulasi Tanah: Berbagai cara dilakukan untuk memanipulasi status kepemilikan tanah, termasuk memanipulasi tanah negara menjadi milik perorangan/badan, merendahkan pembebasan tanah dan meninggikan pertanggungjawaban, membebaskan terlebih dahulu tanah yang akan kena proyek dengan harga murah.

- 3) Jalur Cepat Pembuatan KTP: Dalam pembuatan KTP dikenal ‘jalur biasa’ dan ‘jalur cepat’. Jalur biasa adalah jalur prosedural biasa, yang mungkin waktunya lebih lama tapi biayanya lebih murah. Sedangkan ‘jalur cepat’ adalah proses pembuatannya lebih cepat dan harganya lebih mahal.
- 4) SIM Jalur Cepat; Dalam proses pembuatan SIM secara resmi, diberlakukan ujian/tes tertulis dan praktik yang dianggap oleh sebagian warga, terutama sopir akan mempersulit pembuatan SIM. Untuk mempercepat proses itu mereka membayar lebih besar, asalkan tidak harus mengikuti ujian. Biaya tidak resmi pengurusan SIM biasanya langsung ditetapkan oleh petugas. Biasanya yang terlibat dalam praktik ini adalah warga yang mengurus SIM dan oknum petugas yang menangani pengurusan SIM.
- 5) Markup Budget/Anggaran; Biasanya terjadi dalam proyek dengan cara menggelembungkan besarnya dana proyek dengan cara memasukkan pos-pos pembelian yang sifatnya fiktif. Misalnya dalam anggaran dimasukkan pembelian komputer tetapi pada praktiknya tidak ada komputer yang dibeli atau kalau komputer dibeli harganya lebih murah.
- 6) Proses Tender; Dalam proses tender pengerjaan tender seperti perbaikan jalan atau pembangunan jembatan seringkali terjadi penyelewengan. Pihak yang sebenarnya memenuhi persyaratan tender, terkadang tidak memenangkan tender karena telah dimenangkan oleh pihak yang mampu ‘main belakang’ dengan membayar lebih mahal, walaupun tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini telah terjadi penyogokan kepada pemberi tender oleh peserta tender yang sebenarnya tidak *qualified*.
- 7) Penyelewengan dalam Penyelesaian Perkara; Korupsi terjadi tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi mengubah (menafsirkan secara sepihak) pasal-pasal yang ada untuk meringankan hukuman kepada pihak yang memberi

uang kepada penegak hukum. Praktik ini melibatkan terdakwa/tersangka, penegak hukum(hakim/jasa) dan pengacara.

- 8) Pakar administrasi pemerintahan dari Universitas Airlangga Surabaya, Soetandyo Wignyosoebroto, mengatakan, korupsi di Indonesia sudah menjadi kebiasaan dan menjadi budaya masyarakat Indonesia, dan budaya itu sudah ada sejak penjajahan Belanda dahulu. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi selain dengan cara menegakkan hukum, juga harus dimulai mengubah konsep kultural masyarakat.

Korupsi: PERTAMINA

Dugaan korupsi dalam *Technical Assistance Contract* (TAC) antara Pertamina dengan PT. Ustaindo Petro Gas (UPG) tahun 1993 yang meliputi 4 kontrak pengeboran sumur minyak di Pendoko, Prabumulih, Jatibarang, dan Bunyu. Jumlah kerugian negara, adalah US \$24.8 juta. Para tersangkanya 2 mantan Menteri Pertambangan dan Energi Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita dan Ida Bagus Sudjana, Mantan Direktur Pertamina Faisal Abda'oe. Serta Direktur PT UPG Partono H Upoyo.

Kasus Proyek Kilang Minyak Export Oriented (Exxor) I di Balongan, Jawa Barat dengan tersangka seorang pengusaha Erry Putra Oudang. Pembangunan kilang minyak ini menghabiskan biaya sebesar US \$ 1.4 M. Kerugian negara disebabkan proyek ini tahun 1995-1996 sebesar 82.6 M, 1996-1997 sebesar 476 M, 1997-1998 sebesar 1.3 Triliun. Kasus kilang Balongan merupakan *benchmark*-nya praktik KKN di Pertamina. Negara dirugikan hingga US\$ 700 dalam kasus mark-up atau penggelembungan nilai dalam pembangunan kilang minyak bernama Exor I tersebut.

Kasus Proyek Pipianisasi Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa (Pipianisasi Jawa), melibatkan Mantan Direktur Pertamina Faisal

Abda'oe, Bos Bimantara Rosano Barack, dan Siti Hardiyanti Rukmana. Kerugian negara hingga US\$ 31.4 juta.

Korupsi: Group Salim dan Bulog

Selain Pertamina, Badan Urusan Logistik (BULOG) adalah salah satu sumber pendanaan proyek negara yang sangat penting bagi para sektor swasta. Para pengusaha-pengusaha keturunan yang dekat dengan Presiden Soeharto, seperti Liem Soei Liong, pendiri Salim Group diberikan konsensi sebagai suplier bagi berbagai kebutuhan dasar masyarakat.

Melalui persetujuan yang diberikan oleh Soeharto ini, Liem dengan Salim Groupnya telah menjadi perusahaan yang melakukan monopoli importir untuk kebutuhan barang pokok, seperti beras, gula dan lain-lain di Indonesia. Proyek inilah yang menjadikan perusahaan keturunan ini sebagai konglomerat terbesar pertama di Indonesia.

Korupsi: Bapindo

Tahun 1993, prmbobolan yang terjadi di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dilakukan oleh Eddy Tanzil yang hingga saat ini tidak ketahuan dimana rimbanya. Negara dirugikan sebesar 1.3 Triliun

HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young

Kasus HPH dan Dana Reboisasi audit Ernst & Young pada 31 Juli 2000 tentang penggunaan dana reboisasi mengungkapkan ada 51 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp. 15,025 triliun (versi Masyarakat Transparan Indonesia). Yang terlibat dalam kasus tersebut, antara lain Bob Hasan, Prajogo Pangestu, sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy Soeharto.

Bob Hasan telah divonis enam tahun penjara. Bob dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi proyek pemetaan hutan senilai Rp,]. 2.4 triliun. Direktur

utama PT Mapindo Pratama itu juga diharuskan mengganti ganti rugi US\$ 243 juta kepada negara dan denda Rp. 15 juta. Kini Bob dikerangkeng di LP Nusakambangan, Jawa Tengah.

Prajogo Pangestu diseret sebagai tersangka kasus korupsi dana reboisasi proyek hutan tanaman industri (HTI) Pt. Musi Hutan Persada, yang diduga merugikan negara Rp. 331 miliar. Dalam pemeriksaan, Prajogo, yang dikenal dekat dengan bekas presiden Soeharto, membantah keras tuduhan korupsi. Sampai sekarang nasib kasus taipan kakak ini tak ada kelanjutannya.

Korupsi: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pertama kali mencuat ketika Badan Pemeriksaan Keuangan mengungkapkan hasil audirnya pada Agustus 2000. Laporan itu menyebut adanya penyimpangan penyaluran dana BLBI Rp. 138,4 triliun dari total dana senilai Rp. 144,5 triliun. Di samping itu, disebutkan adanya penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar Rp. 80,4 triliun.

Bekas Gubernur Bank Indonesia Soedradjat Djiwandono dianggap bertanggung jawab dalam pengucuran BLBI. Sebelumnya, mantan pejabat BI lainnya yang terlibat pengucuran BLBI adalah Hendrobudiyanto, Paul Sutopo, dan Heru Soeprapto telah dijatuhi hukuman masing-masing tiga, dua setengah, dan tiga tahun penjara, yang dianggap terlalu ringan oleh para pengamat. Ketiganya kini sedang naik banding. Bersama tiga petinggi BI itu, pemilik komisaris dari 48 bank yang terlibat BLBI, hanya beberapa yang telah diproses secara hukum, antara lain: Hendrawan Haryono (Bank Aspac), David Nusa Widjaja (Bank Servitia), Hendra Rahardja (Bank Harapan Santosa), Sjamsul Nursalim (BDNI), dan Samaikun Hariono (Bank Modern).

Hingga akhir 2002, dari 52 kasus BLBI, baru 20 dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan hanya enam kasus.

18.2 Pemalsuan atau Pembajakan Hak Cipta

Indonesia menempati peringkat lima pembajakan piranti lunak pada 2004. Berdasarkan studi yang dilakukan Business Software Alliance (BSA), organisasi produsen peranti lunak, dan badan riset, IDS, peringkat teratas diduduki Vietnam, Ukraina, Cina, dan Zimbabwe.

Tingkat pembajakan Indonesia, menurut hasil studi itu, mencapai 87 persen, turun satu persen dari tahun sebelumnya. Namun, penurunan ini tidak diikuti dengan penurunan nilai kerugian yang justru meningkat menjadi US\$ 183 juta dari US\$ 158 juta pada 2003. Peningkatan kerugian terutama karena melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika dan meningkatnya jumlah penggunaan komputer di Indonesia.

Masalah terbesar yang dihadapi Indonesia dalam kasus pembajakan peranti lunak adalah kenyataan bahwa negara ini menjadi salah satu penghasil piringan ilegal terbesar. Bahkan menjadi salah satu eksportir dunia.

Penjualan peranti lunak bajakan di pusat-pusat pertokoan jumlahnya pun cukup tinggi, karena tingginya permintaan masyarakat. Selain itu banyak perusahaan Indonesia yang masih menggunakan peranti lunak bajakan untuk komputer mereka (Sumber: Tempo Interaktif, Rabu, 18 Mei 2005).

Daftar Pustaka

- Bell, S. & Morse, S. 1999. Sustainability Indicators , Measuring the immeasurable. London: Earthscan.
- Burrough, P. & Masser, I. 1991. A Challenge to GIS Users: Is The GIS You Have The GJS You Really Want? Computer, Environment and Urban System 15: 215 - 217.
- Chamhuri, Siwar. 2001. Pembangunan Mapan Strategi 'Menang-menang' untuk Pembasmian Kemiskinan dan Pemuliharaan Alam Sekitar. Syarahan Perdana. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Ehui, S.K. & Spencer, D.S.C. 1993. 'Measuring the Sustainability and Economic Viability of Tropical Fanning System: A Model From Sub-Saharan Africa' . Agricultural Economics 9: 279-296.
- Fresco, L.O. & Kroonenberg, S.B. 1992. 'Time and Spatial Scales in Ecological Sustainability'. Land Use Policy 9: 155-168.
- Hammond, A., Adrieanse, A., Rodenburg E., Bryant, D. & Woodward, R. 1995. Environmental Indicators: A Systematic Approach To Measuring and Reporting on Environmental Policy Performance In The Context of Sustainable development. World Resources Institute.
- Harrington. L. W. 1992. 'Measuring Sustainability: Issues and Alternatives'. Journal for Farming System Research-extension 3 (I): 1-20.
- HMSO. 1996. Indicators of Sustainable Development for the United Kingdom. HMSO, London. Dalam Peter J. Peterson (1997). Indicators of Sustainable Development in Industrializing Countries, Volume I Management Response Strategies. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Jansen, D.M., Stoorvogel, J .J. & Schipper, R .A. 1995. 'Using Sustainability Indicator in Agriculture Land Use Analysis : An Example From Costa Rica'. Netherlands Journal of Agricultural Science 43: 61-82.
- Majlis Perbandaran Seberang Perai . 1993. Rancangan Struktur Maj/Is Perbandaran Seberang Perai 1985 - 2000. Instansi Perancang Bandar dan Desa.
- Majlis Perbandaran Seberang Perai . 2000. IJraf Rancangan Struktur (Pengubahan). Instansi Perancang Bandar dan Desa.

- Mitlin, D. & Satterthwaite, D. 1996. Sustainable Development in Cities. In, Sustainability. The Environment and Urbanization. (C. Pugh, Ed.). London: Earthscan: 23-61.
- Muhammad, Zainuddin. 2001. Development of Urban indicators: A Malaysian Initiative, dalam Joy Javqueline Pereira & Ibrahim Komoo. Round Table Dialogues No: 7 Geoinicators for Sustainable Development . Bangi: Institute for Environment and Development (LESTARI).
- Niu, W.Y., Lu, J.J. & Khan, A.A. 1993. 'Spatial System Approach to Sustainable Development: A Conceptual Framework'. *Environment Management* 17 (2): 179-189.
- Peterson, P.J., Sham Sani & M. Nordin. 1999. Indicator of Sustainable Development in Industrializing Countries Vol III. Key Indicators for Tropical Cities. Bangi: LESTARI.
- Reid, D. 1999. Sustainable Development: An Introductory Guide. London: Earthscan Publication Ltd.
- Spencer, D.S.C. & Swift, M.J. 1992. 'sustainable agriculture: definition and measurement' in Mulongoy, K, Gueye, M and Spencer, D.S.C. (eds): Biological Nitrogen Fixation and Sustainability of Tropical Agriculture. United Kingdom: John Wiley & Sons. Chichester: 15-24.
- United Nations Centre for Human Settlement - UNCHS. 1995. Indicator Programme: Monitoring Human Settlement. New York: UN .
- WCED. 1987. Our Common Future (Brundtland Report). Oxford: Oxford University Press.
- Zhang, Zhiqiang & Daniel, A.G. 1997. Developing User-Friendly Spatial Statistical Analysis Modules for GIS: An Example Using ArcView. *Computer, Environment and Urban System* 21 (1): 5 - 21.

Glosarium

B3	: Bahan Berbahaya Dan Beracun
BAB	: Buang Air Besar
BAK	: Buang Ari Kecil
Bappenas	: Badan Perencanaan Dan Pembangunan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistic
CO	: Karbon Monoksida
CO ²	: Karbon Dioksida
COP	: <i>Conference Of Parties</i>
DKI	: Daerah Kawasan Ibukota
ESDM	: Energi Dan Sumber Daya Mineral
F	: Fareinheit
FAO	: <i>Food Association Organization</i>
GK	: Garis Kemiskinan
GRK	: Gas Rumah Kaca
HC	: <i>Hidrokarbon</i>
HFC _s	: <i>Hidrofluorokarbon</i>
HLPEP	: <i>High-Level Panel of Eminent Persons</i>
INDC	: Intended Nationally Determined Contribution
ISPA	: Infeksi Saluran Pernafasan Atas
IUPHHK-HA	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam
JTB	: Jumlah Tangkapan Biologis
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
KKL	: Kawasan Konvervasi Laut
KKP	: Kawasan Konvervasi Pertanian
KLHP	: Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
KSN	: Kawasan Stategi Nasional
KSNT	: Kawasan Startegis Nasional Tertentu
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi

LGP	: Liquefied Petroleum Gas
MSY	: Maximum Sustainable Yield
MPA _s	: <i>Marine Protected Areas</i>
MWH	: <i>Megawatt Hour</i>
N ₂ O	: <i>Nitrogen Dioksida</i>
OECD	: <i>Organization For Economic Co-Operation And Development</i>
OSHA	: <i>Occupational Safety & Health of The United State Gaverment</i>
OWG	: <i>Open Working Group</i>
PAH	: Penampungan Iar Hujan
PEM	: Pertambangan Energi Dan Migas
PFC _s	: Perfluorocarbon
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Polteks	: Politeknik Kesehatan
PROPER	: Program Penilaian Kinerja Perusahaan
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDG _s	: Sustainable Development Goals
SDSN	: Sustainable Development Solutions Network
SF ₆	: Sulfur Hexaforide
SPAL	: Sistem Pengelolaan Air Limbah
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
STBM	: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SUSENAS	: Survei Sosioal Ekonomi Nasional
UNCED	: <i>Conference On Environment and Development</i>
UU	: Undang-Undang
WECA	: <i>World Commission on Environment and Development</i>
WHO	: <i>Word Health Organization</i>
WPP	: Wilayah Pengelolaan Perikanan
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif

Indeks

A

Actuating 33

Apprasial 61

B

Biru 123

Bottleneck 111

C

Carbon dashboard 101

Carbon report 101

Controlling 34

D

Deep ecology 8

Developing Gren Abilties 60

E

EcoATM 89

Eco-borsd 47, 49

Ecoffin 90

Eco-Label 47, 48, 98

Ecological sustainability 4

Eco-Office 69, 71, 72, 75, 79, 80, 81

Efisiensi sumber daya 13, 36, 104, 106,
108, 109, 134

Energi 64, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78,
84

85, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 104,

Konservasi Air 74

Konservasi Energi 73

Konsumen 6, 14, 15, 17, 23, 24, 26, 28,
41,42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 59, 63, 93, 99, 100, 102,
107, 114, 122

Kriteria Penilaian 121

M

Manajemen Kinerja 65

Merah 123

N

Nanocomposites 87

Nanomaterials 87

O

Organizing 31

P

Pelaksanaan 79, 118

Pelibatan Karyawan 64

Pendekatan aktivis 28

Pendekatan hukum 28

Pendekatan pasar 28

Pendekatan pemangku kepentingan 28

Pengecekan 80

Pengembangan Karyawan 63

Penghargaan dan Sanksi 66

- 105, 108, 109, 120, 122
- Energy star 39
- Engagement 34, 61
- Environmental advertisement 47, 49
- Environmental management accounting
20, 21
- Etika lingkungan 2, 4, 7, 8, 17, 18, 20
- Ekosentrisme 4, 7, 8, 14
- Emas 119, 123
- Employee involvement 61
- G**
- Gedung dan tata ruang 73, 74
- Global warning 1, 20
- Go green 2, 98
- Green accounting 96
- Green banking 97
- Green bisnis 2, 3, 5, 6, 7, 12, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,
29, 35, 54, 55, 58, 63, 64, 65, 66,
68, 69, 95, 103, 104, 106, 108, 109,
111, 112, 115
- Green consulting* 102
- Green financial* 95
- Green HRM* 20, 32, 54, 55, 56, 57, 58,
63, 67, 76, 105, 106, 107
- Green management* 28
- Green Marketing* 33, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 51, 52
- Green Nanotechnology* 86, 87
- People* 9, 10, 11
- Perencanaan 29, 79
- Performance management* 61
- Photovoltaic* 91
- Planet* 9, 10, 11
- Planning* 29
- Political will* 111
- S**
- Selecting* 61
- Selection* 58
- Sertifikasi LEED 40
- Shareholder* 24
- Sistem kerja 73, 77
- Socio-cultural sustainability* 4
- Sustainability* 4, 11, 97
- T**
- Teknologi perkantoran 75
- Teori *stakeholder* 7, 14, 15, 22, 23
- Tindakan 23, 51, 65, 80, 81
- Track & trace* 101
- Triple Botton Line* 8
- U**
- USDA *Organic Product* 40
- W**
- Wind Power* 87
- Working environment 57

Green Office 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79

Green Procurement 98, 99

Green Production 35, 36, 37

Green Seal Certification 39

Green Supply Chain 99, 100, 101, 102

Green Technology 83

H

Hidroelektrik 87

Hijau 22, 28, 61, 62, 72, 113, 118, 120,
123

Hitam 123

Hydro power 85

I

Induction 58

ISO 1400/14001 40

ISO 14000 21, 55

J

Job analysis 58

K

Kebijakan Lingkungan 140

Kepuasan kerja 107

Kesadaran lingkungan 17

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 68,
70

Kompetensi karyawan 106

Procedure 9

Profit 9, 11

PROPER 119, 120, 121, 123

Punishment 66, 67, 70

R

Ramah lingkungan 4

Recovery 5, 88

Recruitment 58

Recycle 5, 26, 88, 122

Refine 5, 87

Rekrutmen 57, 58, 59, 63, 68, 107

Resource-based view 7, 11, 12, 13

Retrieve energy 5, 88

Reuse 5, 78, 79, 88, 103, 108, 120, 122

Reward systems 61

Reward management 58

S

Scipline management 59